



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA CILEGON TAHUN 2016-2021



**PEMERINTAH KOTA CILEGON
TAHUN 2016**



TAHUN : 2016

NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CILEGON
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kesinambungan tahapan pembangunan daerah di Kota Cilegon secara efektif dan efisien menuju masyarakat yang maju, mandiri, berbudaya, adil dan sejahtera, maka diperlukan adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai arah dan agenda pembangunan untuk periode lima tahun;
- b. bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 3858);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan ...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

Dengan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah Kota Cilegon untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Cilegon Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah Kota Cilegon untuk periode 5 (lima) tahun terhitung tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Cilegon untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2016-2021 disusun secara politis, teknokratis, partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.
- (2) RPJMD Tahun 2016-2021 disusun dengan tujuan sebagai dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan selama periode Tahun 2016-2021.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021 meliputi:

- BAB I Pendahuluan;
- BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah;
- BAB IV Analisis Isu-isu Strategis;
- BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan;
- BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
- BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan;
- BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
- BAB X Pentutup

BAB IV

ISI DAN URAIAN

Pasal 4

- (1) Isi dan uraian sistematika RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memuat konsep serta rencana program dan kegiatan pembangunan dalam kerangka perencanaan strategis yang akan dilaksanakan selama periode Tahun 2016-2021.
- (2) RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

FUNGSI

Pasal 5

RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 7

Apabila terjadi perubahan program pembangunan daerah sebagaimana tercantum pada RPJMD Tahun 2016-2021, maka perubahan dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Pagu tahunan program yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2016-2021, akan disesuaikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun rencana sesuai dengan proyeksi keuangan daerah tahun rencana.
- (2) Apabila pendapatan daerah dalam RKPD diproyeksikan melebihi proyeksi pendapatan daerah tahunan sebagaimana telah dicantumkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021, maka kelebihan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan baru yang ditujukan untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, atau yang bersifat mendesak.
- (3) Usulan kegiatan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah tahunan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Walikota yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya dengan berpedoman pada rencana tahun transisi pada RPJMD tahun 2016-2021.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

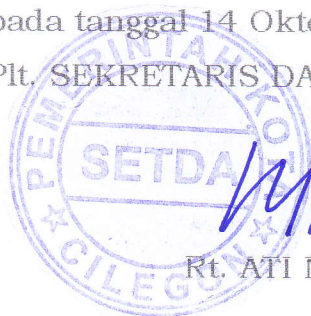
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 14 Oktober 2016
WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 14 Oktober 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



Rt. ATI MARLIATI

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2016 NOMOR 4

Penjelasan

atas

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH

TAHUN 2016 – 2021

I. UMUM

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah pada hakikatnya bertujuan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar tingkatan Pemerintahan, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Hal tersebut diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan yang berkesinambungan dan selaras antara rencana pembangunan jangka panjang, menengah maupun pendek.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, bahwa Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Pendek.

Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah, seiring dengan telah terpilihnya Walikota Cilegon Periode Tahun 2016-2021, maka Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 sebagai kelanjutan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah periode sebelumnya.

Secara substansi RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota Cilegon terpilih Periode Tahun 2016-2021. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi pedoman bagi :

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra SKPD.
- b. Pemerintah Kota Cilegon dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/ Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan terarah, terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan menyatakan bahwa terdapat keselarasan dan keterpaduan dengan dokumen perencanaan lainnya, baik antar tingkatan waktu, dalam hal ini dengan RPJP Daerah, maupun antar tingkatan Pemerintahan, dalam hal ini dengan RPJM Provinsi dan RPJM Nasional.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan dijadikan sebagai pedoman adalah bahwa segenap substansi yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016-2021, mutlak harus dijadikan dasar bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah, serta dijadikan juga sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD.

Pasal 6

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah Kota Cilegon sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Kota Cilegon.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Usulan tambahan alokasi anggaran kegiatan baru dapat diberikan kepada Perangkat Daerah berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi atas proposal kegiatan baru yang diajukan dengan tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Usulan tambahan alokasi anggaran kegiatan baru tersebut selanjutnya akan dibahas dalam forum musrenbang RKPD.

Pasal 9

Ayat (1)

Penyusunan RKPD oleh Walikota yang sedang menjabat untuk tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah.

Yang dimaksud tahun transisi pada ayat ini adalah rencana tahun 2016 yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2016 NOMOR 92

Lampiran Peraturan Daerah

Nomor : 04

Tahun : 2016

Tentang : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon
Tahun 2016-2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia serta ridho-Nya, maka **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2016-2021** telah tersusun.

Pada prinsipnya, **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2016-2021** ini menyajikan tentang: Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah; Analisis Isu-Isu Strategis; Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Strategi dan Arah Kebijakan; Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; serta Penetapan Indikator Kinerja Daerah.

Akhir kata, Kami berharap semoga **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2016-2021** ini dapat memenuhi harapan dan bermanfaat sebagai pedoman : penyusunan Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) Kota Cilegon Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2021 serta pelaksanaan pembangunan di Kota Cilegon dalam kurun waktu tahun 2017-2021. Atas partisipasi segenap pemangku kepentingan di Kota Cilegon dalam proses penyusunan ini, Kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1-1
1.2 DASAR HUKUM	1-5
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN.....	1-8
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	1-9
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN.....	1-11
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	2-1
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	2-1
2.1.1 Luas dan Pembagian Wilayah Administratif.....	2-1
2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis	2-4
2.1.3 Kondisi Morfologi dan Topografi.....	2-7
2.1.4 Kondisi Geologi dan Tanah	2-7
2.1.5 Kondisi Hidrogeologi dan Hidrologi	2-8
2.1.6 Kondisi Klimatologi.....	2-11
2.1.7 Kelautan.....	2-14
2.1.8 Penggunaan Lahan	2-14
2.1.9 Potensi pengembangan wilayah.....	2-21
2.1.10 Wilayah rawan bencana	2-41
2.1.11 Aspek Demografi.....	2-46
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	2-49
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	2-49

2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial.....	2-62
2.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga.....	2-75
2.3	ASPEK PELAYANAN UMUM	2-76
2.3.1	Fokus Layanan Urusan Wajib.....	2-76
2.3.2	Fokus Layanan Urusan Pilihan	2-85
2.4	ASPEK DAYA SAING DAERAH	2-86
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	2-87
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	2-88
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi.....	2-104
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia.....	2-106

BAB 3 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3-1

3.1	KINERJA KEUANGAN MASA LALU.....	3-1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	3-1
3.1.2	Target dan Realisasi Belanja Tahun 2011-2015.....	3-9
3.1.3	Pembiayaan.....	3-14
3.2	KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU	3-16
3.2.1	Kebijakan Pendapatan Daerah.....	3-16
3.2.2	Kebijakan Belanja Daerah	3-17
3.2.3	Kebijakan Pembiayaan Daerah	3-18
3.3	KERANGKA PENDANAAN	3-18
3.3.1	Metodologi penentuan Kerangka umum pendanaan.....	3-18
3.3.2	Analisis Penentuan Sumber-Daya Pendapatan	3-19
3.3.3	Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat	3-45

3.3.4 Ringkasan Kerangka Pendanaan Tahun 2017-2021	3-47

BAB 4 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....4-50

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN.....	4-50
4.1.1 PERMASALAHAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN	4-50
4.1.2 PERMASALAHAN DI BIDANG USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN KOPERASI.....	4-51
4.1.3 PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN	4-51
4.1.4 PERMASALAHAN DI BIDANG KETAHANAN PANGAN	4-52
4.1.5 PERMASALAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN	4-52
4.1.6 PERMASALAHAN DI BIDANG KESEHATAN	4-53
4.1.7 PERMASALAHAN DI BIDANG KETAHANAN AIR BERSIH	4-53
4.1.8 PERMASALAHAN DI BIDANG PEKERJAAN UMUM.....	4-54
4.1.9 PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.....	4-54
4.1.10 PERMASALAHAN DI BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.....	4-56
4.1.11 PERMASALAHAN DI BIDANG PEMERINTAHAN UMUM.....	4-56
4.1.12 PERMASALAHAN DI BIDANG PERTANIAN	4-56
4.1.13 PERMASALAHAN DI BIDANG PENATAAN RUANG.....	4-57

4.2	ISU STRATEGIS.....	4-58
BAB 5	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	5-1
5.1	VISI.....	5-1
5.2	MISI.....	5-1
5.3	TUJUAN DAN SASARAN	5-7
5.3.1	Tujuan Dan Sasaran pada Misi1 : Memantapkan Kemandirian Perekonomian Daerah	5-7
5.3.2	Tujuan Dan Sasaran pada Misi 2 : Memantapkan Lingkungan Kota Yang Asri dan Lestari.....	5-9
5.3.3	Tujuan dan Sasaran Pada Misi 3 : Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	5-11
5.3.4	Tujuan dan Sasaran pada Misi 4 : Memantapkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kota.....	5-13
5.3.5	Tujuan dan Sasaran pada Misi 5 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan	5-15
BAB 6	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	6-1
6.1	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	6-1
6.1.1	Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Misi 1 : Memantapkan Kemandirian Perekonomian Daerah	6-1
6.1.2	Strategi Dan Arah kebijakan Pada Misi 2 : Memantapkan Lingkungan Kota Yang Asri dan Lestari.....	6-6

6.1.3	Strategi Dan Arah kebijakan Pada Misi 3 : Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	6-9
6.1.4	Strategi Dan Arah kebijakan Pada Misi 4 : Memantapkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kota.....	6-13
6.1.5	Strategi Dan Arah kebijakan Pada Misi 5 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan	6-15
BAB 7	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	7-1
BAB 8	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN.....	8-1
BAB 9	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	9-1
BAB 10	PENUTUP	10-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Daerah dan Pembagian Wilayah Administrasi di Kota Cilegon.....	2-2
Tabel 2.2 DAS dan Sub River Basin di Kota Cilegon.....	2-10
Tabel 2.3 Keadaan Suhu Udara Perbulan di Kota Cilegon	2-12
Tabel 2.4 Keadaan Tingkat Kelembaban di Kota Cilegon	2-13
Tabel 2.5 Luas Penggunaan Lahan di Kota Cilegon	2-15
Tabel 2.6 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Perumahan Kota Cilegon 2015-2030.....	2-24
Tabel 2.7 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Lahan untuk Perumahan Kota Cilegon 2015-2030	2-25
Tabel 2.8 Proyeksi Daya Dukung Lahan untuk Perumahan Kota Cilegon 2015-2030.....	2-26
Tabel 2.9 Proyeksi Kepadatan Permukiman Kota Cilegon 2015-2030	2-26
Tabel 2.10 Proyeksi Kepadatan Permukiman Kota Cilegon Menurut Kelurahan Tahun 2015-2030.....	2-26
Tabel 2.11 Potensi Bahan Pertambangan Batuan Kota Cilegon ..	2-38
Tabel 2.12 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk menurut Catatan Administrasi Kependudukan, Kecamatan, Luas, dan Kepadatan Penduduk di Kota Cilegon Tahun 2015	2-47
Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cilegon menurut Catatan Administrasi Kependudukan Tahun 2014 dan 2015	2-48
Tabel 2.14 Peningkatan Nilai PDRB Kota Cilegon Tahun 2010-2015	2-50
Tabel 2.15 Perkembangan Nilai PDRB ADHB Menurut Sektor Lapangan Usaha Kota Cilegon Tahun 2010-2015 (Rp. Juta).....	2-51
Tabel 2.16 Perkembangan Nilai PDRB ADHK 2000 Menurut Sektor Lapangan Usaha Kota Cilegon Tahun 2010-2015 (Rp. Juta)	2-52
Tabel 2.17 PDRB dan PDRB Per Kapita.....	2-57
Tabel 2.18 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Cilegon..	2-63

Tabel 2.19 Perkembangan Harapan lama sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Cilegon Tahun 2010 – 2015	2-65
Tabel 2.20 Perkembangan Daya Beli Penduduk Kota Cilegon	2-66
Tabel 2.21 Perkembangan Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon Tahun 2010 – 2015	2-67
Tabel 2.22 Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja berdasarkan Jenis Lapangan Usaha di Kota Cilegon Tahun 2010 – 2015	2-68
Tabel 2.23 Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja berdasarkan Jenis Lapangan Usaha di Kota Cilegon Tahun 2010 – 2015	2-70
Tabel 2.24 Jumlah Kebudayaan serta Pemuda dan olahraga Kota Cilegon	2-75
Tabel 2.25 Aspek Pelayanan Umum Urusan Wajib Kota Cilegon Tahun 2011-2015	2-76
Tabel 2.26 Aspek Pelayanan Umum Urusan Pilihan Kota Cilegon Tahun 2011-2015	2-85
Tabel 2.27 BWK dan Sistem Pusat-Pusat Kota Cilegon	2-90
Tabel 2.28 Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Cilegon	2-104
Tabel 2.29 Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan & Jenis Kelamin	2-107
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Kota Cilegon Tahun 2011-2015	3-2
Tabel 3.2 Nilai Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Cilegon Tahun 2011-2015	3-9
Tabel 3.3 Nilai Target dan Realisasi Pembiayaan Kota Cilegon Tahun 2011-2015	3-14
Tabel 3.4 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021 Kota Cilegon	3-20
Tabel 3.5 Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Tahun 2017-2021 Kota Cilegon	3-46
Tabel 3.6 Ringkasan Kerangka Pendanaan Tahun 2017-2021	3-47
Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Cilegon Tahun 2016- 2021	8-7
Tabel 9.1 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	9-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	1-9
Gambar 2.1 Wilayah Administratif Kota Cilegon	2-3
Gambar 2.2 Posisi Geostrategis Kota Cilegon Dalam Konstelasi Regional dan Internasional.....	2-6
Gambar 2.3 Produksi Padi dan Palawija Di Kota Cilegon.....	2-41
Gambar 2.4 Peta Struktur Patahan Dan Lipatan Regional di Wilayah Banten Dan Sekitarnya.....	2-42
Gambar 2.5 Peta Seismitas di Selat Sunda Tahun 2006.....	2-43
Gambar 2.6 Potensi Tsunami Kawasan Pesisir Kota Cilegon	2-44
Gambar 2.7 Piramida Penduduk (Berdasarkan Kategori Usia) Kota Cilegon.....	2-48
Gambar 2.8 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010– 2015.....	2-50
Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2015 Terhadap PDRB 2014 Per Sektor	2-53
Gambar 2.10 Kontribusi Per Sektor PDRB 2015	2-54
Gambar 2.11 Distribusi PDRB Pengeluaran (riil) Tahun 2010- 2014.....	2-55
Gambar 2.12 Perbandingan Inflasi Nasional, Provinsi Banten dan Kota Cilegon (2010-2015).....	2-56
Gambar 2.13 PDRB Per Kapita	2-57
Gambar 2.14 Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan.....	2-59
Gambar 2.15 Dinamika Proporsi Jumlah Penduduk Miskin (Tingkat Kemiskinan) Kota Cilegon.....	2-60
Gambar 2.16 Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kota Cilegon Tahun 2010-2015	2-61
Gambar 2.17 Angka Kriminalitas.....	2-62
Gambar 2.18 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Cilegon	2-64
Gambar 2.19 Grafik Perkembangan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah Kota Cilegon Tahun 2010- 2015.....	2-65
Gambar 2.20 Grafik Perkembangan Daya Beli Penduduk Kota Cilegon Tahun 2010-2015 (per kapita per tahun).....	2-66

Gambar 2.21 Perkembangan IPM Kota Cilegon beserta indeks Kompositnya (Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli.....	2-67
Gambar 2.22 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	2-69
Gambar 2.23 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Cilegon Tahun 2010-2015 (dalam persen)	2-71
Gambar 2.24 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kota Cilegon Tahun 2009-2015.....	2-73
Gambar 2.25 Grafik perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Cilegon Tahun 2009-2015.....	2-74
Gambar 2.26 Grafik perkembangan PDRB perkapita di Kota Cilegon Tahun 2009-2015	2-87
Gambar 2.27 Panjang infrastruktur jalan berdasarkan administrasi pemerintahan dan kelas jalan di Kota Cilegon Tahun 2015.....	2-88
Gambar 2.28 Panjang infrastruktur jalan berdasarkan kondisi di Kota Cilegon Tahun 2015.....	2-89
Gambar 2.29 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Cilegon	2-102
Gambar 2.30 Realisasi Investasi Kota Cilegon (Updated)	2-105
Gambar 2.31 Laju pertumbuhan realisasi investasi Kota Cilegon Tahun 2010-2015 (%).....	2-105
Gambar 2.32 Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan & Jenis Kelamin	2-107
Gambar 2.33 Jumlah penduduk usia tidak produktif, usia produktif, dan rasio ketergantungan penduduk (dependency ratio).....	2-108
Gambar 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Kota Cilegon.....	3-3
Gambar 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Cilegon.....	3-12
Gambar 3.3 Metodologi Kerangka Umum Pendanaan	3-19

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah adalah merupakan bagian rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan juga pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut tentunya berisikan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, karena masing-masing daerah memiliki sumber daya dan potensi andalan daerah dan tantangan yang berbeda beda.

Paradigma dan pendekatan dalam perencanaan pembangunan nasional yang dicanangkan melalui penetapan kebijakan peraturan perundang-undangan (UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah) pada prinsipnya merupakan upaya untuk menata kembali dan mengedepankan penyusunan perencanaan pembangunan nasional dan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Untuk menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah maka ditetapkanlah **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**. Berdasarkan undang-undang tersebut,

lingkup perencanaan pembangunan nasional diklasifikasikan atas rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Pada tingkat daerah, periode jangka panjang diwujudkan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), periode jangka menengah diwujudkan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan periode tahunan diwujudkan melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu untuk menjaga terlaksananya kesinambungan pembangunan maka keterkaitan, keselarasan, dan sinergitas antar setiap dokumen perencanaan sangat diperlukan.

Seiring dengan ditetapkannya **Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang **Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional** dan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang **Pemerintahan Daerah** menandai lahirnya paradigma baru perencanaan pembangunan yang lebih memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut dan **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008** tentang **Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah** serta **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010** tentang **Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah**, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap menjamin terciptanya keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu maupun antarfungsi pemerintahan.

Mengacu pada kerangka regulasi peraturan perundang-undangan tersebut, pembangunan itu harus bersifat berkelanjutan (*sustainable*) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan". Selanjutnya Untuk melakukan pembangunan tersebut harus berpedoman pada acuan kerangka perencanaan pembangunan baik itu perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP), perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJM) dan perencanaan pembangunan jangka

pendek/tahunan (RKPD). RPJMD berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga para pelaku bisnis atau sektor swasta serta seluruh komponen masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengedepankan interaksi para pelaku pembangunan (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat) yang bersendikan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Selain itu RPJMD berfungsi sebagai tolak ukur penilaian Kinerja Kepala Daerah di setiap akhir tahun anggaran dan juga pada akhir masa Jabatan.

Kota Cilegon dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok. Setelah terjadi pemekaran wilayah Provinsi Jawa Barat maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, Kota Cilegon termasuk dalam wilayah Provinsi Banten.

Perkembangan pembangunan Kota Cilegon sampai dengan saat ini telah dirasakan peningkatan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat. Seiring dengan dinamika pembangunan, kebutuhan masyarakat dan tantangan pada masa mendatang diperlukan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan sehingga tujuan dan harapan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon dapat tercapai. Keseluruhan hasil-hasil pembangunan tersebut, tentunya tidak lepas dari konsep perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana daerah, baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program pembangunan Organisasi Kerja Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD, dan program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman bagi OPD dalam menyusun Renstra OPD, Renja OPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD. RKPD dan RKA-OPD inilah yang selanjutnya disusun menjadi Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya.

Terkait dengan upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan maka Pemerintah Kota Cilegon telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2010-2030. Dokumen perencanaan daerah tersebut menjadi pedoman dan landasan bagi penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka waktu lima tahunan maupun tahunan serta berbagai kebijakan serta prioritas program pemerintah nasional yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs) atau saat ini sudah diubah menjadi *Sustainable Development Goals* (SDG's) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Semua dokumen tersebut adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda.

Dalam melaksanakan tahun 2016-2021, sistem inovasi merupakan salah satu pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh Kota Cilegon. Sebagai suatu pendekatan pembangunan, sistem inovasi yang dimaksud disini adalah suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan, kebijakan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktek baik/terbaik serta proses pembelajarannya.

Berkaitan dengan dokumen RPJMD Kota Cilegon, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2016-2021, memasuki fase periode pembangunan tahap ke-3 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cilegon Tahun 2005-2025 dan merupakan kelanjutan dari RPJMD periode sebelumnya (RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015).

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021 yang diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang sistematis dengan kerangka kerja logis yang koheren dan konsisten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Maka selanjutnya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan dimaksud, khususnya sebelum melakukan penyusunan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021 sebelum terpilihnya kepala daerah maka dipandang perlu untuk melakukan penyusunan Rancangan

Rancangan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021 yang memuat permasalahan yang menjadi isu dan tantangan, serta prioritas program pembangunan kedepan tentunya dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja RPJMD periode sebelumnya (RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015) dan kajian pendahuluan yang telah ada.

Rancangan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021 diharapkan dapat menjadi materi awal dan masukan bagi proses penyusunan Rancangan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021 dan dapat digunakan oleh kepala daerah terpilih untuk menuangkan janji politis visi misi yang disampaikan pada saat pemilihan umum kepala daerah periode Tahun 2016-2021.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Rancangan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021 dilandasi oleh peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42);
24. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 12);

25. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon;
26. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon Jo. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon;
27. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2010-2030;
29. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

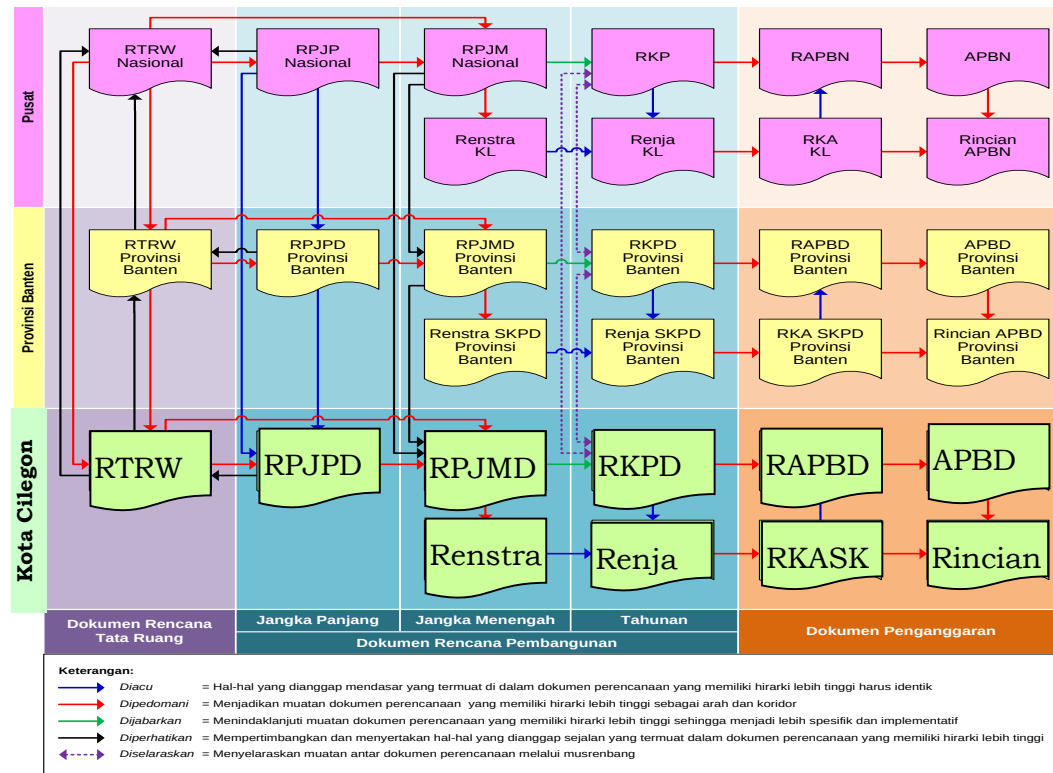
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen penganggaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sedangkan hubungan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan tata ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

RPJMD Kota Cilegon adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, RPJMD Kota Cilegon berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Cilegon dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cilegon. Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJMD Kota Cilegon juga memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Banten.

RPJMD Kota Cilegon menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kota Cilegon. RPJMD Kota Cilegon selanjutnya setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon yang

merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD Kota Cilegon dan Renja OPD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cilegon.



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rancangan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021 ini disusun dengan tata urutan penyajian sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Memuat uraian tentang latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; sistematika penulisan; serta maksud dan tujuan Rancangan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021.

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat uraian tentang analisis gambaran umum kondisi daerah Kota Cilegon dari aspek : geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB 3 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Memuat uraian tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan prediksi pengelolaan keuangan daerah.

BAB 4 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Memuat uraian tentang identifikasi permasalahan pembangunan daerah, baik terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun terkait pengelolaan keuangan daerah serta identifikasi isu strategis dan penentuan prioritas isu strategis pembangunan jangka menengah.

BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Memuat uraian tentang visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat uraian strategi dan arah kebijakan pembangunan.

BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat uraian tentang kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja disertai penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

BAB 8 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Memuat uraian pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB 9 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat uraian penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan pada akhir periode perencanaan yang ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Rancangan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021 adalah untuk merumuskan isu strategis, permasalahan dan tantangan serta prioritas program pembangunan yang disusun berdasarkan metode dan kerangka berpikir ilmiah melalui proses keilmuan untuk memperoleh gambaran pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat digunakan sebagai materi masukan dalam proses penyusunan RPJMD 2016-2021.

Sedangkan **tujuan** dari Penyusunan Rancangan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang konferhensif, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mengakomodir dan mengimplementasikan solusi pemabngunan (prioritas program pembangunan) sebagai upaya untuk menyelesaikan dan menjawab berbagai isu, permasalahan dan tantangan pembangunan pada periode tahun 2016-2021.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Kota Cilegon merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Banten dengan luas wilayah administrasi 175,51 Km². Kota Cilegon terbentuk pada tanggal 27 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon. Sebagai kota yang secara geografis berada pada ujung barat Pulau Jawa serta merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan sistem pulau jawa dan pulau sumatera, kedudukan kota cilegon memiliki nilai geostrategis yang sangat penting baik dalam konstelasi lokal, regional maupun nasional.

2.1.1 Luas dan Pembagian Wilayah Administratif

Secara administratif, Kota Cilegon berada pada koordinat 5°52'24" - 6°04'07" Lintang Selatan dan 105°54'05" - 106°05'11" Lintang Utara, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- (1) Sebelah barat : Selat Sunda (Provinsi Lampung);
- (2) Sebelah utara : Kabupaten Serang;
- (3) Sebelah timur : Kabupaten Serang;
- (4) Sebelah selatan : Kabupaten Serang.

Dengan luas 175,5 km², Kota Cilegon dibagi ke dalam 8 (delapan) kecamatan, yaitu (1) Kecamatan Cilegon; (2) Kecamatan Ciwandan; (3) Kecamatan Pulomerak; (4) Kecamatan Cibeber; (5) Kecamatan Grogol; (6) Kecamatan Purwakarta; (7) Kecamatan Citangkil; dan (8) Kecamatan Jombang, dan 43 kelurahan, yaitu (1) Kelurahan Ciwaduk (2) Kelurahan Bendungan (3) Kelurahan Bagendung (4) Kelurahan Ketileng (5) Kelurahan Ciwedus (6) Kelurahan Randakari (7) Kelurahan Kepuh (8) Kelurahan Gunung Sugih (9) Kelurahan Banjarnegara (10) Kelurahan Tegalratu (11) Kelurahan Kubangsari (12) Kelurahan Kedaleman (13) Kelurahan Kalitimbang (14) Kelurahan Karang Asem (15) Kelurahan Cikera (16) Kelurahan Bulakan (17) Kelurahan Cibeber (18) Kelurahan Kotasari (19) Kelurahan Rawaarum (20) Kelurahan Gerem (21) Kelurahan Grogol (22) Kelurahan Lebakgede (23) Kelurahan Tamansari (24) Kelurahan Mekarsari (25) Kelurahan Suralaya (26) Kelurahan Ramanuju (27) Kelurahan Kebondalem (28) Kelurahan

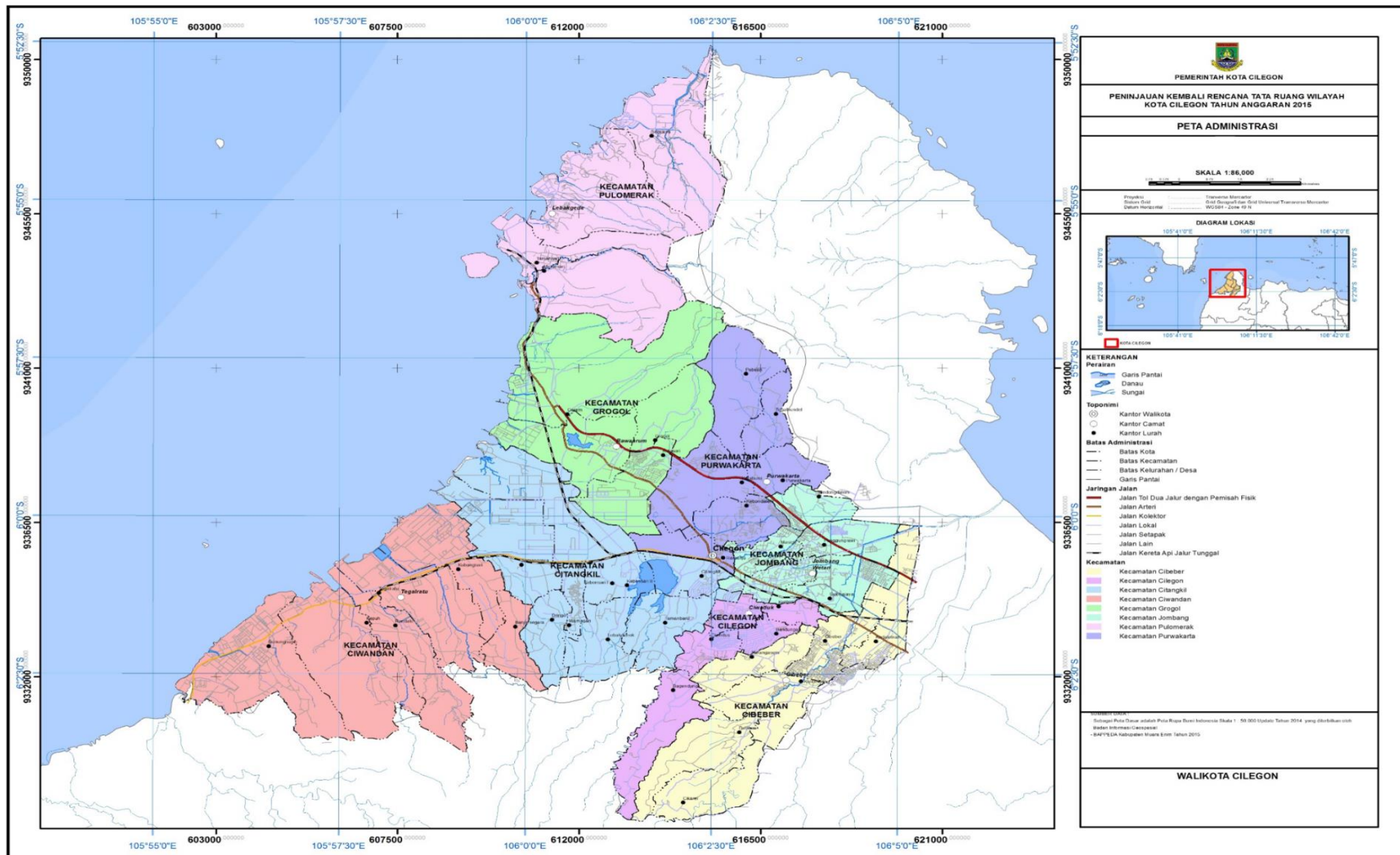
Kotabumi (29) Kelurahan Pabean (30) Kelurahan Tegalbunder (31) Kelurahan Purwakarta (32) Kelurahan Jombang Wetan ((33) Kelurahan Masigit (34) Kelurahan Sukmajaya (35) Kelurahan Panggungrawi (36) Kelurahan Gedong Dalem (37) Kelurahan Citangkil (38) Kelurahan Kebonsari (39) Kelurahan Warnasari (40) Kelurahan Samangraya (41) Kelurahan Lebak Denok (42) Kelurahan Taman Baru (43) Kelurahan Dringo. Kota Cilegon memiliki iklim tropis dengan temperatur berkisar antara 21,1°C – 33,1 °C, dan curah hujan rata-rata 95 mm per bulan.

Jarak Kota Cilegon terhadap Ibu Kota Provinsi Banten (Kota Serang) sekitar 15 km dan jarak ke Ibu Kota Negara Republik Indonesia sekitar 105 km. Kota Cilegon dilalui oleh beberapa sungai, yaitu Kali Kahal, Tompos, Sehang, Gayam, Medek, Sangkanila, Cikuasa, Sumur Wuluh, Grogol, Cipangurungan, dan Cijalumpang. Di antara sebelas sungai tersebut Kali Grogol merupakan yang terbesar dan hampir semua sungai bermuara di Selat Sunda. Selain sungai, di Kota Cilegon juga terdapat sebuah waduk yang cukup luas, yakni Waduk Krenceng yang membelah Kelurahan Kebonsari, Lebakdenok, dan Warnasari di Kecamatan Citangkil. Waduk ini merupakan sumber air PDAM yang dialirkan ke industri dan rumah tangga di sebagian wilayah Kota Cilegon.

Tabel 2.1 Luas Daerah dan Pembagian Wilayah Administrasi di Kota Cilegon

Kecamatan	Luas		JUMLAH		
	Km ²	%	Kelurahan	RT	RW
Ciwandan	51.81	29.52	6	119	28
Citangkil	22.98	13.09	7	192	51
Pulomerak	19.86	11.32	4	132	27
Purwakarta	15.29	8.71	6	128	39
Grogol	23.38	13.32	4	102	27
Cilegon	9.15	5.21	5	107	31
Jombang	11.55	6.58	5	172	43
Cibeber	21.49	12.24	6	159	37
Kota Cilegon	175.51	100	43	1111	283

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Cilegon, 2016



Gambar 2.1 Wilayah Administratif Kota Cilegon

2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Ditinjau dari aspek geostrategis, Kota Cilegon memiliki peran dan posisi yang sangat menentukan dalam mendukung arah dan pola pembangunan dan pengembangan perkotaan baik dalam konstelasi regional, nasional, dan bahkan internasional yaitu:

1. Kota Cilegon sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah Provinsi Banten.

Dalam arahan RTRW Provinsi Banten, Kota Cilegon terletak di Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II, yang mempunyai arti strategis bagi seluruh wilayah provinsi. **Kota Cilegon**, Kota Serang dan Kabupaten Serang berfungsi sebagai pemacu dan pusat pertumbuhan utama bagi wilayah belakangnya dengan kegiatan perekonomian terdiri dari industri, pelabuhan, pertanian, pariwisata, kelautan dan perikanan, pendidikan, kehutanan, pertambangan, dan jasa. Fungsi Kota Cilegon sebagai pusat pertumbuhan tidak dapat dilepaskan dari peran PT. Krakatau Steel yang alokasinya dalam RTRW Provinsi Banten sudah fix dan menjadi penggerak utama kegiatan industri di Provinsi Banten. Kawasan PT. Krakatau Steel dan sekitarnya ini pun kemudian direncanakan untuk ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus oleh Provinsi Banten dan PLTU Suralaya serta Waduk Krenceng sebagai Kawasan Strategis Provinsi.

Kota Cilegon sebagai salah satu PKN dan pusat pertumbuhan wilayah Provinsi Banten, sebagaimana dalam RTRW Provinsi Banten Tahun 2009–2029, Kota Cilegon lebih diarahkan pada pengembangan kelompok industri besar dan sedang, industri kecil, dan industri kerajinan. Dalam realisasinya, kawasan industri yang ada telah bertumbuhkembang dan sekaligus berperan sebagai pembentuk utama perekonomian Kota Cilegon. Peran sektor industri di Kota Cilegon juga memiliki peranan penting terhadap perekonomian Provinsi Banten. Sebagai pusat permukiman dengan segenap fasilitas dan jasa perkotaan yang tersedia, Kota Cilegon merupakan orientasi pergerakan bagi wilayah di sekitarnya, seperti Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Kota Cilegon merupakan salah satu daerah andalan bagi Provinsi Banten dalam sektor industri yang berskala nasional maupun yang sudah berorientasi ekspor. Kondisi ini merupakan suatu potensi yang perlu untuk dipertahankan bahkan dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang. Selain potensi industri yang berskala nasional, Kota Cilegon juga memiliki potensi yang berbasis pada masyarakat menengah yang dapat dikembangkan untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah.

2. Kota Cilegon sebagai simpul sistem jaringan utilitas dan pergerakan Jawa-Sumatera.

Melalui posisi seperti ini Kota Cilegon turut menentukan pertumbuhan dan perkembangan wilayah di kedua pulau besar tersebut. Dalam sektor transportasi, keberadaan Pelabuhan Merak menjadi penentu roda perekonomian dan pergerakan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dan sebaliknya, khususnya dalam menjamin kelancaran distribusi arus barang dan manusia. Di samping itu, keberadaan Jalan Tol Jakarta – Merak semakin meningkatkan aksesibilitas eksternal Kota Cilegon, baik dengan ibukota negara (Jakarta) maupun wilayah-wilayah di Pulau Jawa lainnya. Selain itu dalam hal sistem jaringan transportasi kereta api, Kota Cilegon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstelasi simpul sistem pengelolaan jaringan rel KA Jawa – Bali; serta dalam kaitannya dengan sistem jaringan prasarana energi dan tenaga listrik yang diprioritaskan penanganannya terutama sebagai pemasok kebutuhan listrik bagi Jawa-Bali.

3. Kota Cilegon sebagai potensi inlet-outlet terhadap lokasi pasar dunia.

secara geografis Kota Cilegon memiliki akses langsung terhadap Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang didukung oleh keberadaan 21 pelabuhan umum dan khusus. ALKI yang merupakan salah satu jalur pelayaran internasional menjadi salah satu acuan pengembangan inlet-outlet wilayah nasional, yaitu dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap lokasi pasar dunia. Dari gambaran aksesibilitas outlet terhadap pasar dunia dapat disimpulkan bahwa tendensi akses ALKI I adalah ke negara ASEAN, Uni Eropa, dan Asia Pasifik.



Gambar 2.2 Posisi Geostrategis Kota Cilegon Dalam Konstelasi Regional dan Internasional

Peran penting Kota Cilegon sebagai *inlet-outlet* di tingkat nasional disisi lain ditunjukkan dengan kinerja bongkar muat barang antar pulau dan luar negeri pada beberapa pelabuhan di Kota Cilegon yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Cilegon ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diidentifikasikan sebagai pusat kegiatan industri, pengolahan, dan simpul transportasi dengan cakupan pelayanan nasional meliputi beberapa kabupaten/kota yang berada dalam pengaruh Kota Cilegon. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa Kota Cilegon merupakan pusat utama untuk Kawasan Strategis Nasional Bojonegara – Merak-Cilegon dan sekitarnya, di mana sektor unggulan kawasan ini adalah industri, pelabuhan, pertanian tanaman pangan, pariwisata, perikanan, dan pertambangan. Selain aspek geostrategis, karakteristik geografis Kota Cilegon masuk ke dalam kategori kota pesisir. Hal ini diindikasikan dengan membentangnya kawasan pesisir laut dari bagian utara hingga selatan wilayah kota serta hasil perhitungan Peta Topografi Kota Cilegon di mana panjang garis pantai Kota Cilegon adalah 40,88 km atau sekitar 43,6% dari total perimeter wilayah Kota Cilegon.

2.1.3 Kondisi Morfologi dan Topografi

Morfologi

Tingkat morfologi dataran di Kota Cilegon bervariasi menjadi 4 kelompok, yaitu:

- Bentuk dataran, mempunyai kemiringan antara 0-2 % dan 2-7 % yang tersebar sepanjang pesisir pantai barat dan bagian tengah kota Cilegon.
- Bentuk perbukitan sedang, mempunyai kemiringan lahan berkisar antara 7 – 15 % terdapat di bagian tengah kota yang tersebar di bagian utara dan selatan Kecamatan Cilegon dan Cibeber serta bagian selatan dari Kecamatan Ciwandan.
- Bentuk perbukitan-terjal mempunyai kemiringan antara 15-40 % dan lebih dari 40 % tersebar di bagian utara Kota Cilegon (Kecamatan Pulo Merak dan sebagian kecil wilayah Kecamatan Ciwandan).

Topografi

Topografi di wilayah Kota Cilegon pada umumnya termasuk landai dengan ketinggian bervariasi dari 1 meter sampai 553 meter di atas permukaan laut (meter dpl) wilayah tertinggi berada di bagian Utara di Kecamatan Pulomerak (Gunung Gede), sedangkan terendah berada di bagian barat yang merupakan hamparan pantai sedangkan di bagian utara didominasi oleh lahan dengan kemiringan cukup besar (curam), karena merupakan pegunungan. Wilayah dataran merupakan wilayah yang mempunyai ketinggian kurang dari 50 meter di atas permukaan laut (mdpl) sampai wilayah pantai yang mempunyai ketinggian 0 – 10 mdpl. Wilayah perbukitan terletak pada wilayah yang mempunyai ketinggian minimum 50 mdpl dan puncaknya di Gunung Gede dengan ketinggian maksimum 553 mdpl.

2.1.4 Kondisi Geologi dan Tanah

Jenis batuan yang tersingkap di Kota Cilegon tersusun oleh batuan berumur kuartar, batuan yang relatif muda dalam skala geologi, terdiri dari batuan vulkanik, aluvium dan tufa banten.

1. Batuan vulkanik kuartar tua, batuan ini terdapat di bagian Utara (Kawasan Gunung Gede), terdiri atas lahar, lava dan breksi termanipulasi, berkomposisi andesit sampai basal dan berumur plistosen bawah

2. Endapan aluvium pantai, sebagian besar terdapat di pantai Kota Cilegon tersusun oleh perselingan antara lempung dan pasir bersifat lepas dan berumur holosen.
3. Tufa banten, sebagaian besar terdapat di Selatan, meliputi morfologi dataran dan perbukitan dibagian bawah terdapat tufa breksi aglomerat, tufa batu apung dan tufa lapili, sedangkan di bagian atasnya tersusun atas tufa pasiran yang berumur plistosen tengah.

Jenis tanah yang terdapat di Kota Cilegon merupakan pelapukan dari batu vulkanik yang berasal dari gunung gede serta tanah yang berasal dari aluvium (endapan sungai, pantai dan rawa), sesuai dengan tekstur tanah dan sebaran kedalaman efektif masing-masing tanah bervariasi, sebagai berikut:

- a. Latosol, dengan kedalaman efektif tanah < 30 cm tekstur tanah kasar, sebaran di bagian Utara;
- b. Regosol, dengan kedalaman efektif tanah > 90 cm, tekstur tanah halus, sebaran di bagian tengah, Barat, Timur dan Utara;
- c. Latosol, dengan kedalaman efektif tanah > 90 cm, tekstur tanah halus, sebaran di bagian Utara;
- d. Aluvial, dengan kedalaman efektif tanah 30-60 cm, tekstur tanah halus, sebaran di bagian Utara;
- e. Aluvial, dengan kedalaman efektif tanah 90 cm, tekstur tanah sedang, sebaran di bagian Barat hingga Barat Daya;
- f. Aluvial, dengan kedalaman efektif tanah > 90 cm, tekstur tanah kasar, sebaran di bagian Barat hingga Barat Daya;
- g. Regosol, dengan kedalaman efektif tanah > 90 cm, tekstur tanah kasar, sebaran di bagian Barat hingga Barat Daya (pantai);
- h. Asosiasi hidromorf kelabu dan planosol, dengan kedalaman efektif tanah > 90 cm, tekstur tanah halus, sebaran di bagian Utara;
- i. Regosol kelabu kekuningan, dengan kedalaman efektif tanah > 90 cm, tekstur tanah halus, sebaran di bagian Selatan; dan
- j. Asosiasi hidromorf coklat kemerahan dan litosol, dengan kedalaman efektif tanah > 90 cm, tekstur tanah sedang, sebaran di bagian Barat Daya.

2.1.5 Kondisi Hidrogeologi dan Hidrologi

Tingkat morfologi dataran di Kota Cilegon bervariasi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Bentuk dataran, mempunyai kemiringan antara 0-2 % dan 2-7 % yang tersebar sepanjang pesisir pantai barat dan bagian tengah kota Cilegon.
2. Bentuk perbukitan sedang, mempunyai kemiringan lahan berkisar antara 7 – 15 % terdapat di bagian tengah kota yang tersebar di bagian utara dan selatan Kecamatan Cilegon dan Cibeber serta bagian selatan dari Kecamatan Ciwandan.
3. Bentuk perbukitan-terjal mempunyai kemiringan antara 15-40 % dan lebih dari 40 % tersebar di bagian utara Kota Cilegon (Kecamatan Pulo Merak dan sebagian kecil wilayah Kecamatan Ciwandan).

Kondisi Hidrogeologi di wilayah Kota Cilegon memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Terdapatnya aliran langka, potensi mata air langka dengan daerah penyebaran di bagian utara dan tengah wilayah kota
- b. Akuifer produktif rendah, air melalui celah dan ruang antar butir, potensi mata air sedang
- c. Akuifer produktif dengan penyebaran luas, aliran melalui ruang antar butir pada akuifer ini tidak terdapat mata air
- d. Akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas, alirannya melalui ruang antar butir. Pada akuifer ini tidak ada mata air.

Wilayah Kota Cilegon dilalui beberapa sungai antara lain kali Kahal, Tompos, Sekong, Gayam (debit 36 l/dtk), Medaksa, Sangkanila, Cikuasa, Sumur Wuluh, Gerem, Grogol, Cipangurungan, dan kali Cijalumpang, Cibeber (debit 3.000 l/dtk), Kedungingas (debit 14.000 l/dtk), Cidanau (debit 2.000 l/dtk), Krenceng (debit 5 l/dtk) dan Kali Cipanyurungan. Diantara sebelas sungai tersebut kali Grogol merupakan yang terbesar dan hampir semuanya bermuara di selat Sunda. Selain beberapa sungai, di kota Cilegon juga terdapat sebuah waduk yang cukup luas yakni waduk Krenceng yang membelah Kelurahan Kebonsari, Lebakdenok, dan Tamansari di kecamatan Ciwandan dan merupakan sumber air PDAM yang dialirkan ke rumah tangga untuk sebagian wilayah di Kota Cilegon.

Kondisi Hidrologi Kota Cilegon dapat dilihat dengan daerah aliran Sungai di Kota Cilegon. Pada umumnya Sungai-sungai yang ada di Kota Cilegon tergolong sungai-sungai kecil dengan debit air yang tidak terlalu besar. Perlu strategi penanganan sungai-sungai di Kota Cilegon agar dapat dimanfaatkan lebih Optimal dengan keterbatasan debit air. Gambaran Keseluruhan DAS yang terdapat di Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 DAS dan Sub River Basin di Kota Cilegon

No.	Nama DAS	Wilayah DAS		Sub River Basin	
		Panjang (Km)	Debit Rata-rata (M3/detik)	Nama Sungai	Panjang (Km)
1.	Cibeber	20,87	65,55	Ciweleh	5,09
				Cigundil	2,89
				Cikukulu	2,72
				K. Husen	1,98
				K. Kubang Semar	3,03
				K. Kalapa	8,16
				K. Melati	3,48
2.	Kedungingas	24,23	35,85	Cibojongjengkol	5,85
				K. Lengkong	2,44
				Cisukanala	5,44
3.	Gunungsugih	4,79	8,46	-	
4.	Kali Malang	3,35	5,70	-	
5.	Kali Saksak	6,76	19,82	-	
6.	Kali Mancak	8,93	11,51	-	
7.	Cigeblag	11,82	18,13	Cibuntu	3,37
				Ciwatujuaran	4,20
8.	Ciluwit	8,05	12,99	-	
9.	Kebonsari	6,49	13,30	-	
10.	Kali Grogol	8,53	18,57	-	
11.	Kali Gerem	6,04	9,83	-	
12.	Cibatu	4,70	5,60	-	
13.	Cikuasa	3,93	4,80	-	
14.	Cilangon	6,03	11,19	-	
15.	Cipala	3,28	4,19	-	
16.	Cisalak	3,79	5,02	-	
17.	Cikohot	4,59	11,55	Cipeutey	2,05

Sumber: Cilegon Dalam Angka Tahun 2015

Untuk sebaran air di permukaan, terdapat beberapa sungai (kali) kecil. Di daerah Pulomerak sungai kecil ini berawal dari kawasan puncak Gunung Gede, sedangkan untuk yang melintasi daerah Kecamatan Cilegon, Ciwandan, dan Cibeber bersumber dari mata air yang berada di luar wilayah Kota Cilegon. Pada umumnya kali tersebut hanya berfungsi sebagai saluran pembuangan air (drainase kota) yang bersifat alami dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk keperluan lain, semisal untuk irigasi pertanian dan lain-lain. Hal ini tidak terlepas dari kondisi permukaan air kali-kali tersebut yang pada

umumnya terletak jauh lebih rendah dari lahan di sekitarnya serta debit air rata-rata yang rendah.

Neraca air di Kota Cilegon dihitung dengan Metode F.J. Mock, dengan jumlah limpasan air permukaan sebesar 614,79 mm dan volume simpanan air tanah (storage volume) sebesar 432 mm. Jika luas wilayah Kota Cilegon 175,5 km², maka besarnya volume simpanan air tanah adalah 75.816.000 m³/tahun. Dengan memperhatikan faktor-faktor morfologi, litologi dan arah aliran air tanah, daerah akifer dengan produktivitas tinggi ($Q_s = 1-19$ lt/dtk/m) terdapat di sekitar daerah industri PT. Krakatau Steel. Di dalam peta potensi air tanah, daerah tersebut dizonasikan sebagai daerah yang mempunyai produktivitas sumur >5lt/dtk. Menurut hasil pengamatan lapangan serta dengan memperhatikan tipikal konstruksi sumur bor yang ada, sebagian besar muka air tanah sumur bor yang ada umumnya lebih rendah dari muka air sumur gali di sekitarnya. Berdasarkan kondisi ini untuk tujuan konservasi (melindungi air sumur gali agar tidak tersedot ke sumur bor) pengambilan air tanah untuk sumur bor harus mulai dicermati. Penambahan debit pengambilan untuk industri (usaha komersial) sebaiknya dilakukan dengan penelitian hidrogeologi yang lebih teliti dan detail pada skala lokal.

Kualitas air tanah Kota Cilegon umumnya masih memenuhi syarat untuk air minum (TDS < 1.000 mg/l), kecuali di sepanjang pantai Selat Sunda (nilai TDS 1.000-20.960 mg/l), dan sebagian lokasi di Kelurahan Kotabumi (Kecamatan Purwakarta), Mekarsari (Kecamatan Pulomerak), Sukmajaya (Kecamatan Jombang), Cibeber (Kecamatan Cibeber), kualitas air tanahnya tidak memenuhi syarat sebagai air minum (nilai TDS 1.000-8.000 mg/l).

Berdasarkan pada analisis dengan Diagram Wilcox, daerah kajian pada umumnya mempunyai resiko kegaraman (salinity hazard) sedang dan sodium (sodium/alkali hazard) rendah. Resiko kegaraman tinggi-sangat tinggi dan resiko sodium rendah (C4-S1) akan cenderung dijumpai di sekitar daerah pantai setempat, dijumpai di sekitar Kelurahan Kotabumi (Kecamatan Purwakarta) dan Mekarsari (Kecamatan Pulomerak).

2.1.6 Kondisi Klimatologi

Keadaan iklim di Kota Cilegon tidak terlepas dari keadaan iklim Indonesia pada umumnya, yaitu beriklim tropis yang ditandai dengan adanya dua musim, yakni musim hujan (bulan November – Mei) dan musim kemarau (bulan April – November). Faktor iklim yang sangat

berperan dalam aktivitas masyarakat antara lain adalah suhu udara dan curah hujan.

1. Suhu Udara

Keadaan suhu Kota Cilegon umumnya cukup panas, pada tahun 2013 suhu berkisar antara 23,4°C sampai 31,8°C. Kondisi suhu udara yang cukup panas ini mengindikasikan bahwa topografi Kota Cilegon merupakan dataran rendah. Keadaan temperatur suatu tempat dipengaruhi oleh ketinggian tempat dari permukaan laut, setiap kenaikan 100 meter temperatur akan turun 0,61°C.

2. Curah Hujan

Keadaan curah hujan di Kota Cilegon pada tahun 2013 tercatat rata-rata sebanyak 17,2 hari hujan dengan curah hujan rata-rata 191,9 mm. Curah hujan tertinggi pada tahun 2013 terjadi pada bulan Januari (424 mm) dengan jumlah hari hujan sebanyak 28 hari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan September (35 mm) dengan jumlah hari hujan sebanyak 13 hari. Bila ditinjau dari klasifikasi iklim *Schmidt* dan *Ferguson*, tipe iklim Kota Cilegon termasuk tipe C (agak kering).

Tabel 2.3 Keadaan Suhu Udara Perbulan di Kota Cilegon

No.	Bulanan	Suhu Maksimum	Suhu Minimum	Rata-rata Suhu
1	Januari	30,6	23,7	26,4
2	Februari	31,8	23,7	26,4
3	Maret	32,6	23,6	26,8
4	April	31,9	24,1	27,1
5	Mei	32,1	23,8	27,2
6	Juni	31,5	23,5	26,8
7	Juli	31,9	23,1	26,5
8	Agustus	32,4	22,8	27,1
9	September	33,4	22,2	27,3
10	Oktober	34,1	23,6	28,4
11	November	33,3	24,0	27,6
12	Desember	33,3	24,3	27,3
	2014	32,4	23,5	27,1
	2013	31,8	23,4	27,0
	2012	32,4	23,2	27,0

Sumber: Cilegon Dalam Angka Tahun 2015

Tabel 2.4 Keadaan Tingkat Kelembaban di Kota Cilegon

No.	Bulanan	Kelembaban Udara Nisbi (%)	Tekanan Udara (mb)	Tekanan Uap Air (mb)
1	Januari	85	1009,4	28,8
2	Februari	87	1008,4	29,8
3	Maret	85	1009,0	30,1
4	April	80	1008,6	29,6
5	Mei	82	1008,4	30,6
6	Juni	84	1008,5	30,4
7	Juli	82	1009,3	28,9
8	Agustus	78	1009,8	27,7
9	September	74	1010,0	26,3
10	Oktober	73	1009,3	27,5
11	November	80	1008,6	29,0
12	Desember	82	1008,3	29,5
	2014	80,9	1009,0	29,0
	2013	83,0	1009,0	29,2
	2012	80,5	1009,1	28,9

Sumber: Cilegon Dalam Angka Tahun 2015

Musim penghujan di Kota Cilegon terjadi antara bulan November–April. Sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan Mei–Oktober. Besarnya curah hujan bulan November-April berkisar antara 100–400 mm, sedangkan bulan Mei–Oktober berkisar antara 50–150 mm. Besarnya curah hujan tahunan berkisar antara 1000–1500 mm/tahun.

Sementara itu tekanan udara pada tahun 2014 di Kota Cilegon yang terendah terjadi pada bulan desember yang memiliki nilai sebesar 1008,3 milibar (mb), sedangkan tekanan udara tertinggi terjadi pada bulan agustus dengan nilai 1009,3 milibar (mb). Rata-rata tekanan udara di Kota Cilegon tahun 2014 adalah 1009,0 milibar (mb).

Jika dilihat dari tekanan uap air pada tahun 2014 di Kota Cilegon yang tertinggi terjadi pada bulan 30,6 milibar (mb), sedangkan yang terendah terjadi pada bulan september 26,3 milibar (mb). Namun dari sisi kelembaban udara di Kota Cilegon pada tahun 2014, kelembaban udara yang tertinggi pada bulan 87% ini membuktikan penyinaran matahari pada bulan ini paling rendah dibanding bulan lainnya, sedangkan kelembaban yang terendah terjadi pada bulan oktober dengan nilai 73% dimana pada bulan ini penerangan sinar matahari sangat tinggi. Kelembaban udara di Kota Cilegon pada tahun 2014 memiliki rata-rata sebesar 80,9%.

2.1.7 Kelautan

Kondisi yang dibahas meliputi bathimetri, pasang surut, dan arus. Untuk keadaan bathimetri, Selat Sunda dibagi menjadi dua bagian, yaitu : (1) bagian pantai dengan kedalaman rata-rata 20 meter dengan kemiringan dasar rata-rata 10%; dan (2) bagian tengah dengan kedalaman rata-rata 30 meter selebar 4 kilometer. Dari data sounding, diketahui sampai kurang lebih jarak 1 kilometer dari garis pantai, kedalaman laut rata-rata sekitar 10 meter dengan kemiringan dasar laut slope rata-rata 10%.

Analisis pasang surut dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari daerah di sekitarnya yaitu lokasi Pelabuhan Merak dan Ciwandan. Tipe pasang surutnya adalah 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam 24 jam, sedangkan tenggang pasang surut yang tertinggi adalah 1,2 meter. Arus perairan seperti Selat Sunda dapat dipengaruhi pasang surut. Kecepatan arus pada saat pasang kurang lebih 0,6 knot dengan arah timur laut, saat surut 0,7 knot dengan arah barat daya. Pada musim timur, arus laut di perairan Selat Sunda lebih banyak mengarah ke timur atau timur laut sedangkan pada musim barat mengarah ke barat atau barat daya, dengan kecepatan arus berkisar antara 1,5-2,2 knot.

Dari hasil pengkajian analisis dampak lingkungan Proyek Perluasan Pelabuhan Merak-Bakauheni, diperoleh keterangan bahwa berdasarkan informasi dari nelayan setempat dan pengamatan visual, terdapat terumbu karang di sekitar Pulau Merak Kecil dan di sebelah Tenggara, Selatan, dan Barat Laut Pulau Merak Besar.

Ikan hasil tangkapan dengan bagan, pancing, gillnet dan payang, biasanya didaratkan di TPI Anyer. Selain ikan teri, aembang, kembung, layang, umumnya ikan-ikan yang tertangkap merupakan ikan pilajik besar (tongkol, layaran, cakalang, tuna, dan tenggiri). Ladang ikan pilajik ini umumnya terdapat di perairan Dusun Sangiang.

2.1.8 Penggunaan Lahan

Hingga saat ini pemanfaatan lahan di Kota Cilegon didominasi oleh pekarangan/ lahan buat bangunan, halaman sekitarnya dan lainnya dengan luasan sekitar 5.607 km² atau 31,95% dari total luas lahan di Kota Cilegon, disusul oleh pemanfaatan tegal/kebun dengan luasan sebesar 1.998 km² atau dengan persentase sebesar 11,38% dari total luas lahan di Kota Cilegon. Pemanfaatan lahan dengan luasan paling sedikit adalah lahan yang ditanami kayu - kayuan, yaitu sebesar 4 km² atau sekitar 0,02% dan pemanfaatan 5 km² atau sekitar 0,03%.

Berdasarkan data Kota Cilegon 2014, pemanfaatan ruang terbangun di Kota Cilegon berupa pekarangan/ lahan buat bangunan, halaman sekitarnya dan lainnya dengan luasan sekitar 5.607 km² atau 31,95%. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan terbangun cenderung masih kecil dibandingkan dengan pemanfaatan lahan non terbangun. Lebih jelasnya, luas penggunaan lahan di Kota Cilegon tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.6

Tabel 2.5 Luas Penggunaan Lahan di Kota Cilegon

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (km ²)	%
1	Lahan Sawah	1.965	11,20
2	Pekarangan/Lahan buat Bangunan, Halaman Sekitarnya dan lainnya	5.607	31,95
3	Tegal/Kebun	4.434	25,26
4	Ladang/Huma	1.998	11,38
6	Rawa - Rawa yang Tidak Ditanami	5	0,03
8	Kolam/Empang	17	0,10
9	Lahan Kering yang Sementara Tidak Ditanami	1.339	7,63
10	Lahan yang Ditanami Kayu - Kayuan	4	0,02
11	Hutan Negara	751	4,28
12	Perkebunan	26	0,15
13	Lainnya (Jalan, Sungai, Tandus)	1.404	8,00
Jumlah		17.550	100,00

Sumber: RTRW Kota Cilegon Tahun 2010-2030

A. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Rencana pola ruang kawasan lindung di wilayah Kota Cilegon secara umum bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dan melestarikan fungsi lindung kawasan hutan, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan lindung lainnya, serta menghindari berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan rawan bencana. Sasarannya adalah untuk:

- Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai budaya dan sejarah bangsa;
- Mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

Selain kawasan lindung, kawasan tidak terbangun lainnya yang diarahkan pengembangannya di Kota Cilegon adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pengertian RTH disini adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik bentuk area/ kawasan maupun

dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

Jenis pemanfaatan ruang yang diarahkan pengembangannya dalam kawasan lindung di Kota Cilegon terdiri dari:

1. Kawasan Hutan yang meliputi hutan lindung yang berada di Kecamatan Pulomerak dan hutan produksi yang berada di Kecamatan Pulomerak dan Purwakarta. Kawasan hutan ini dikelola oleh Perum Perhutani. Rencana pengelolaan kawasan hutan yaitu dengan mengkonversi peruntukan kawasan hutan produksi menjadi hutan lindung.
2. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang meliputi Gunung Gede pada bagian Utara Kota Cilegon serta perbukitan di Kelurahan Gunung Sugih dan Kepuh. Rencana pengelolaan kawasan ini meliputi:
 - a. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - b. Memperbanyak keragaman tanaman pohon; dan
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Kawasan perlindungan setempat yang meliputi jalur sempadan pantai, jalur sempadan sungai, kawasan sekitar Waduk Krenceng dan Situ Rawa Arum, kawasan sekitar mata air Ciputri di Kelurahan Cikerei Kecamatan Cibeber, kawasan di bawah SUTT dan SUTET. Rencana pengelolaan kawasan ini adalah:
 - a. Penanaman vegetasi jenis tanaman keras;
 - b. Memperbanyak keragaman tanaman pohon; dan
 - c. Menata dan mengamankan kawasan perlindungan setempat tetap sesuai dengan fungsinya.
4. Kawasan RTH meliputi RTH hutan kota; RTH taman kota; RTH taman lingkungan; RTH Tempat Pemakaman Umum; RTH lapangan olahraga; RTH kawasan pertanian; RTH benteng alam/mitigasi bencana; RTH jalur hijau jalan, jalan bebas hambatan, dan jalur kereta api; serta *green belt* kawasan industri. Rencana penyediaan dan pemanfaatan kawasan RTH meliputi:
 - a. pengembangan RTH sebagai bagian dari pengembangan fasilitas umum dan taman kota/lingkungan;
 - b. pengembangan RTH sebagai pembatas antara kawasan industri dengan kawasan fungsional lain di sekitarnya, terutama kawasan permukiman;

- c. membangun benteng alam dalam kawasan perindustrian yang berada di pesisir pantai sebagai antisipasi terhadap gelombang, angin, dan tsunami;
 - d. melaksanakan penanaman jenis tanaman yang dapat menahan gelombang dan angin pada kawasan benteng alam;
 - e. intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di sepanjang sempadan jalan, jalan bebas hambatan, dan jalur kereta api, *green belt* kawasan industri, dan benteng alam;
 - f. intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di kawasan hutan kota, taman kota, taman lingkungan, taman pemakaman umum, serta di dalam kawasan perindustrian;
 - g. penyediaan taman-taman lingkungan yang berada di pusat-pusat pelayanan lingkungan perumahan;
 - h. penyediaan dan pengembangan RTH sebagai bagian dari pembangunan suatu kawasan fungsional; dan
 - i. pembatasan pendirian bangunan-bangunan, kecuali yang memiliki fungsi sangat vital atau bangunan-bangunan yang merupakan penunjang dan menjadi bagian dari RTH.
5. Kawasan pelestarian alam yang meliputi Pulau Ular, Pulau Merak Besar, dan taman wisata alam yang dikembangkan di Gunung Gede Kecamatan Pulomerak, dengan rencana pengelolaan adalah menjaga dan melestarikan keberlangsungan keanekaragaman hayati.
6. Kawasan cagar budaya yang mencakup obyek cagar budaya dan kawasan sekitarnya yang meliputi:
- a. Kampung Pakuncen yang merupakan kompleks bangunan periodisasi kolonial di Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon;
 - b. Stasiun Kereta Api Cilegon yang merupakan Stasiun KA kolonial di Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang;
 - c. Stasiun Kereta Api Krenceng yang merupakan Stasiun KA kolonial di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil;
 - d. Rumah kuno Temu Putih yang merupakan bangunan kolonial di Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon;
 - e. Kampung Ciwedus yang merupakan kompleks bangunan kolonial di Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon;
 - f. Kampung Temu Putih yang merupakan kompleks bangunan kolonial di Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon;

- g. Eks kantor dan rumah Asisten Residen Gubbels yang merupakan bangunan periodisasi kolonial di Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang; dan
- h. Makam Kyai Haji Wasid yang merupakan makam kuno pada masa periodisasi Islam di Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang.

Rencana pengelolaan kawasan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Mempertahankan karakteristik bangunan dan lingkungan sekitarnya; dan
 - 2. Merevitalisasi kawasan cagar budaya agar tidak terjadi penurunan identitas dan karakteristik bangunan.
7. Kawasan rawan bencana alam yang terdiri atas kawasan rawan tsunami dan kawasan rawan bahaya industri kimia yaitu di sekitar Kecamatan Pulomerak, Grogol, Citangkil dan Ciwandan, dengan rencana pengelolaan adalah:
- a. Melaksanakan penanaman di sekitar pesisir pantai dengan tanaman yang berfungsi sebagai penahan gelombang; dan
 - b. Membangun benteng alam sebagai penyangga antara kawasan industri dan kawasan permukiman.

Keberadaan kawasan lindung dan RTH perlu dipertahankan dan dikembangkan karena peranannya dalam mewujudkan keserasian perkembangan fisik terbangun kota dengan lingkungan alami. Pengelolaan kawasan lindung di wilayah Kota Cilegon secara umum diarahkan untuk:

- 1. Mempertahankan/memantapkan fungsi lindung dari kawasan hutan lindung yang dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan air tanah dan air permukaan.
- 2. Mempertahankan fungsi kawasan resapan air yang dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada kawasan yang mempunyai fungsi konservasi potensial tinggi.
- 3. Memberikan perlindungan terhadap sempadan sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kualitas sungai, kondisi pinggir sungai dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.
- 4. Memberikan perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/waduk untuk melindungi waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Kawasan hutan lindung di Kota Cilegon yang terdapat di bagian utara Kecamatan Pulomerak, Grogol dan bagian Selatan Kecamatan Ciwandan

umumnya mempunyai topografi/kelas lereng cukup besar serta terdapat lokasi mata air yang perlu dikonservasi. Pengaturan dalam kawasan lindung secara normatif adalah tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya termasuk mendirikan bangunan, kecuali diperlukan untuk menunjang fungsi kawasan lindung dan atau transmisi bagi kepentingan umum atau kegiatan wisata lain yang keberadaannya mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Jika dirinci lebih lanjut, pengelolaan kawasan lindung (hutan lindung dan kawasan perlindungan setempat) secara normatif meliputi :

- Dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun kecuali yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak merubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alami. yang ada.
- Mempertahankan kawasan hutan lindung yang belum terintervensi.
- Daerah hulu waduk ditetapkan sebagai kawasan lindung yang merupakan reservoir utama untuk memenuhi kebutuhan air bersih Kota Cilegon.
- Pengembalian fungsi lindung bagi kawasan lindung atau bagian dari kawasan lindung yang telah dibudidayakan dengan/oleh kegiatan yang akan mengganggu fungsi kawasan lindung tersebut
- Penetapan kawasan penyangga (*buffer zone*) sebagai perisai terhadap kelestarian kawasan lindung, pemindahan kegiatan yang mengganggu kelangsungan fungsi lindung, dan menyusun program penghutanan kembali kawasan lindung yang terkonversi.

Pengembangan kawasan yang mempunyai fungsi lindung dapat dipadukan dengan pengembangan secara terbatas kegiatan-kegiatan pertanian atau pengembangan kegiatan wisata yang tidak menuntut terlalu banyak fasilitas (bangunan pendukung). Salah satu kegiatan wisata yang memungkinkan untuk dikembangkan di dalam kawasan ini adalah kegiatan wisata hutan (wana wisata) dengan memanfaatkan potensi keindahan panorama (pemandangan) dari ketinggian Gunung Gede.

Dalam konteks pengembangan, keberadaan kawasan pertanian yang pada umumnya berada di bagian pinggiran (Selatan dan Timur) masih dapat tetap dipertahankan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikannya sebagai bagian dari ruang terbuka hijau, meskipun karakteristik kegiatannya tetap merupakan kegiatan budidaya.

Kawasan pertanian di wilayah Kota Cilegon meliputi pertanian lahan

basah (sawah) dan pertanian lahan kering (tegalan/perkebunan rakyat). Rencana pengelolaan kawasan pertanian tersebut diuraikan berikut ini:

1. Diperlukan pertimbangan lebih lanjut mengenai keberadaan kawasan pertanian lahan basah yang masih ada, apakah dipertahankan atau diperbolehkan mengalami perubahan untuk penggunaan lahan lain yang dianggap lebih produktif terutama kawasan pertanian yang beririgasi teknis.
2. Untuk lahan pertanian yang terdapat di sepanjang jalur jalan, dikarenakan lokasinya yang strategis dan mempunyai tingkat daya hubung (aksesibilitas) yang tinggi menjadikan kawasan tersebut cenderung berubah fungsi menjadi kawasan kegiatan non-pertanian. Kawasan ini terdapat di bagian Timur Kota Cilegon. Untuk lahan pertanian yang belum berubah fungsi/belum terbangun dapat terus dimanfaatkan dan dikembangkan melalui program intensifikasi.
3. Untuk sawah tadah hujan pengelolaannya diarahkan pada sistem pengelolaan yang memperhatikan aspek lingkungan dan secara bertahap dikembangkan sebagai kawasan budidaya non-pertanian. Mengingat Kota Cilegon memiliki potensi kegiatan industri yang cukup besar, maka perkembangan kawasan industri dan permukiman yang cenderung memanfaatkan lahan pertanian perlu diarahkan ke lokasi/lahan pertanian yang tidak/kurang produktif untuk kegiatan pertanian.
4. Untuk kawasan pertanian lahan kering yang berada dalam kawasan lindung adalah dengan mempertahankan luas yang ada dan meningkatkan perlakuan konservasi sehingga akan mampu mendukung fungsi kawasan lindung sebagai daerah resapan air, selain untuk meningkatkan produksi hasil pertanian. Jenis tanaman yang dikembangkan adalah yang bernilai ekonomi tinggi dan berfungsi konservatif.
5. Untuk lahan yang terletak di daerah strategis dan memiliki nilai lahan (*land value*) yang tinggi, diprioritaskan untuk pengembangan kawasan permukiman perkotaan serta untuk pengembangan kawasan dengan kegiatan yang lebih produktif dan ekonomis.

B. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

Peruntukan kawasan budi daya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan

sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Pengembangan kawasan budi daya di Kota Cilegon diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan berdasarkan kesesuaian lahan potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan (permukiman, industri dan kawasan fungsional lainnya). Pengelolaan kawasan budi daya perkotaan ini dilakukan dengan prinsip:

- a. Membatasi perkembangan kawasan perkotaan untuk tidak meluas secara ekspansif dan tidak beraturan;
- b. Mengintegrasikan fungsi pengembangan kawasan-kawasan yang telah berkembang;
- c. Mengantisipasi perkembangan kegiatan di masa mendatang yang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, termasuk wilayah yang berbatasan.

Kawasan budi daya perkotaan yang akan dikembangkan di wilayah Kota Cilegon didasarkan pada fungsi utama untuk dibudidayakan sebagai kegiatan perkotaan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Sedangkan rencana pola ruang kawasan budi daya adalah sebagai upaya untuk mengendalikan alih fungsi bangunan dan guna lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta mendorong perkembangan kawasan budi daya yang sesuai dengan rencana tata ruang.

2.1.9 Potensi pengembangan wilayah

A. Potensi Pengembangan Industri

Sesuai dengan salah satu fungsi kota, pengembangan kawasan perindustrian dalam suatu areal tersendiri di Kota Cilegon merupakan suatu kebutuhan. Hal ini dapat diakomodasikan baik dalam bentuk kawasan industri bermanajemen (*industrial estate dan kompleks industri*) atau pemusatan industri dalam suatu lahan peruntukan industri. Kawasan perindustrian dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan sebagainya.

Kawasan Industri sebagai tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri (KI). Di dalam KI tidak diharuskan adanya keterkaitan usaha antar pengusaha industri, melainkan dapat saling independen. Pengadaan suatu KI pada dasarnya untuk memberikan

kemudahan bagi investor dalam memperoleh lokasi tanah matang bagi industri yang akan didirikannya. Dalam hal ini di Kota Cilegon, kawasan industri dalam pengertian ini terutama diarahkan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri sehingga lebih mudah dalam mengawasi dan mengendalikan perkembangannya. Kawasan tersebut diperkirakan akan cukup menampung pengembangan industri baru, sehingga tidak ada pembangunan industri baru diluar kawasan industri yang telah direncanakan.

Mengingat kegiatan yang terjadi dalam kawasan industri merupakan kegiatan yang menimbulkan polutan serta memerlukan perlakuan pengamanan khusus, maka rencana pengelolaan kawasan industri ini meliputi :

- a. Mengembangkan kawasan perindustrian di Kecamatan Ciwandan dan Pulomerak yang ramah lingkungan;
- b. Industri kecil dan menengah yang ada di lingkungan permukiman dapat dipertahankan selama tidak menimbulkan dampak negatif dan kedepannya diusahakan untuk diaglomerasikan dalam 1 (satu) kawasan industri tertentu dengan alokasi ruang di Kecamatan Citangkil, Kecamatan Cilegon, Kecamatan Cibeber, dan Kecamatan Jombang. Kawasan industri untuk usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki ketentuan luasan adalah minimal 5 (lima) hektar;
- c. Industri yang berada bukan pada peruntukannya harus keluar secara bertahap; dan
- d. Kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan diarahkan untuk mengelola dan memantau limbahnya lebih intensif dan/atau dialihfungsikan menjadi kegiatan jasa.

Untuk pengembangan kawasan industri diperlukan rencana tata ruang yang lebih rinci/teknis mengenai pemanfaatan ruang didalam kawasannya dengan tetap memperhatikan keberadaan kawasan-kawasan fungsional lain disekitarnya serta pembangunan sentra industri terpadu, baik kegiatan industri maupun pemasaran hasil produksi. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keadaan bahaya atau kondisi di luar dugaan, terutama pada industri-industri kimia, diperlukan upaya-upaya penanggulangan serta fasilitas-fasilitas pendukung yang meliputi:

6. Pengembangan jalan alternatif yang siap digunakan.
7. Pengembangan fasilitas hidran, sumber-sumber air dan sarana penunjang lainnya (*fire truck, ambulance*) untuk penanggulangan

bahaya kebakaran.

8. Diperlukan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kota Cilegon beserta instansi-instansi terkait dengan industri yang bersangkutan.
9. Diperlukan kajian serta rencana yang lebih rinci/teknis mengenai upaya-upaya penanggulangan bahaya serta fasilitas pendukung yang diperlukan.

Untuk industri-industri yang berlokasi di kawasan non-KI, yakni di lahan peruntukan industri, terutama yang lokasinya berhampiran dengan jaringan jalan primer, diperlukan rencana serta upaya-upaya penanganan yang seksama untuk mengamankan kegiatan serta instalasi-instalasi industri di dalamnya dari kemungkinan terjadinya bahaya yang diakibatkan kegiatan lalu lintas yang terjadi disekitarnya. Kemudian mengingat masih sering terjadi konflik antara kegiatan industri dan kegiatan hunian, terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup, maka diperlukan perencanaan pembangunan kawasan industri yang aman, layak, kompetitif, dan jauh dari permukiman.

B. Potensi Pengembangan Perumahan

Jumlah penduduk Kota Cilegon tahun 2030 diperkirakan mencapai 412.494 jiwa dan sebagian besar akan tinggal di wilayah yang didelineasi sebagai kawasan perkotaan. Dalam kaitan inilah pengembangan kawasan perumahan lebih diarahkan untuk mengakomodasikan kebutuhan perumahan perkotaan. Di luar kawasan perkotaan, kebutuhan perumahan pada dasarnya berada di kawasan yang didelineasikan sebagai kawasan perdesaan, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan pertanian. Beberapa arahan dalam pengelolaan kawasan perumahan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan kawasan perumahan baru diarahkan untuk terlebih dahulu memanfaatkan kawasan pertanian lahan kering, dengan asumsi bahwa dalam jangka waktu perencanaan RTRW (20 tahun) belum seluruh wilayah Kota Cilegon akan berubah menjadi kawasan perkotaan.
- b. Pengembangan fasilitas dan utilitas pendukung yang memadai untuk melayani kebutuhan penduduk di kawasan perumahan yang telah ada.

Perhitungan kebutuhan unit perumahan dan luasannya dengan berdasarkan pada hasil proyeksi jumlah penduduk hingga tahun 2030 dengan rata-rata jumlah jiwa dalam satu keluarga yaitu 5

jiwa/keluarga, maka didapat jumlah unit rumah yang dibutuhkan untuk tahun perencanaan hingga 2030.

Setelah mengetahui jumlah kebutuhan unit perumahan, kemudian dianalisis luas lahan yang dibutuhkan untuk penyediaan perumahan tersebut. Penyediaan perumahan di Kota Cilegon tetap memakai konsep penyediaan rumah menurut pembagian tipe 1 : 3 : 6 untuk rumah tipe besar, tipe sedang, dan tipe kecil. Luas kavling yang dipakai untuk setiap tipe rumah secara rata-rata adalah 2.000 M² untuk tipe besar, 600 M² untuk tipe sedang, dan 200 M² untuk tipe kecil. Pemilihan luas kavling tersebut adalah maksimal untuk setiap tipe rumah dilakukan dengan anggapan masih terdapat banyak lahan untuk pengembangan perumahan di Kota Cilegon. Dari hasil perhitungan dengan dasar kebutuhan jumlah unit rumah didapat tabel kebutuhan lahan untuk perumahan pada Tabel.

Untuk tahun perencanaan 2015 kebutuhan luas lahan perumahan adalah 4.537,92 Ha, untuk tahun 2020 dibutuhkan sekitar 4.744,01 Ha, pada tahun 2025 dibutuhkan 4.950,09 Ha dan sekitar 5.156,18 Ha untuk tahun perencanaan 2030. Luas lahan 5.156,18 Ha untuk tahun perencanaan 2030 adalah sekitar 29,38 % dari total wilayah Kota Cilegon yang luasnya 17.550 Ha. Jadi dapat dinyatakan masih terdapat banyak lahan untuk pengembangan perumahan. Idealnya, luas lahan untuk perumahan/permukiman di suatu kota maksimal adalah 60% dari luas wilayah kota untuk tetap menjaga kenyamanan kehidupan perkotaan. Dalam kebijakan penataan ruang, dibatasi penggunaan lahan untuk perumahan yaitu 40% dari luas wilayah (untuk tiap kecamatan) dalam upaya menciptakan lingkungan kota yang nyaman tersebut. Asumsi 40% dipakai karena menurut proyeksi kebutuhan lahan perumahan hingga tahun 2030 yang dibutuhkan adalah sekitar 5.156,18 Ha (baru sekitar 29,38 % dari luas wilayah Kota Cilegon). Tetapi batasan luas lahan perumahan ini telah melebihi batas maksimal bila melihat unit analisis kecamatan, hal ini terjadi pada Kecamatan Jombang dan Cilegon.

Tabel 2.6 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Perumahan Kota Cilegon 2015-2030

No.	Kecamatan	2015 (unit)				2020 (unit)				2025 (unit)				2030 (unit)			
		1	3	6	total	1	3	6	total	1	3	6	total	1	3	6	total
1	Pulomerak	1.095	3.286	6.573	10.954	1.124	3.373	6.746	11.243	1.153	3.459	6.919	11.531	1.182	3.546	7.092	11.820
2	Grogol	884	2.652	5.304	8.840	924	2.772	5.544	9.240	964	2.892	5.784	9.641	1.004	3.012	6.025	10.041

No.	Kecamatan	2015 (unit)				2020 (unit)				2025 (unit)				2030 (unit)			
		1	3	6	total	1	3	6	total	1	3	6	total	1	3	6	total
3	Purwakarta	1.1 49	3.4 47	6.8 95	11. 491	1.3 20	3.9 59	7.9 17	13. 195	1.4 90	4.4 70	8.9 39	14. 899	1.6 60	4.9 81	9.9 62	16.6 03
4	Jombang	1.4 27	4.2 81	8.5 62	14. 270	1.4 69	4.4 08	8.8 16	14. 693	1.5 12	4.5 35	9.0 69	15. 115	1.5 54	4.6 61	9.3 23	15.5 38
5	Cibeber	1.0 59	3.1 77	6.3 54	10. 590	1.0 96	3.2 88	6.5 75	10. 958	1.1 33	3.3 98	6.7 96	11. 326	1.1 69	3.5 08	7.0 17	11.6 95
6	Cilegon	98 0	2.9 41	5.8 81	9.8 02	1.0 12	3.0 37	6.0 73	10. 122	1.0 44	3.1 32	6.2 65	10. 441	1.0 76	3.2 28	6.4 57	10.7 61
7	Citangkil	1.4 78	4.4 35	8.8 69	14. 782	1.5 23	4.5 69	9.1 39	15. 231	1.5 68	4.7 04	9.4 08	15. 680	1.6 13	4.8 39	9.6 77	16.1 29
8	Ciwandan	1.0 03	3.0 09	6.0 17	10. 029	1.0 20	3.0 60	6.1 19	10. 198	1.0 37	3.1 10	6.2 21	10. 368	1.0 54	3.1 61	6.3 23	10.5 38
Kota Cilegon		9.0 76	27. 228	54. 455	90. 758	9.4 88	28. 464	56. 928	94. 880	9.9 00	29. 701	59. 401	99. 002	10. 312	30. 937	61. 874	103. 124

Sumber: Hasil Analisis

Tabel 2.7 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Lahan untuk Perumahan Kota Cilegon 2015-2030

No.	Kecamatan	2015 (Ha)				2020 (Ha)				2025 (Ha)				2030 (Ha)			
		1	3	6	total	1	3	6	total	1	3	6	total	1	3	6	total
1	Pulomerak	21 9,0 0	19 7,1 6	13 1,4 6	547, 62	22 4,8 0	20 2,3 8	13 4,9 2	562, 10	23 0,6 0	20 7,5 4	13 8,3 8	576, 52	23 6,4 0	21 2,7 6	14 1,8 4	591, 00
2	Grogol	17 6,8 0	15 9,1 2	10 6,0 8	442, 00	18 4,8 0	16 6,3 2	11 0,8 8	462, 00	19 2,8 0	17 3,5 2	11 5,6 8	482, 00	20 0,8 0	18 0,7 2	12 0,5 0	502, 02
3	Purwakarta	22 9,8 0	20 6,8 2	13 7,9 0	574, 52	26 4,0 0	23 7,5 4	15 8,3 4	659, 88	29 8,0 0	26 8,2 0	17 8,7 8	744, 98	33 2,0 0	29 8,8 6	19 9,2 4	830, 10
4	Jombang	28 5,4 0	25 6,8 6	17 1,2 4	713, 50	29 3,8 0	26 4,4 8	17 6,3 2	734, 60	30 2,4 0	27 2,1 0	18 1,3 8	755, 88	31 0,8 0	27 9,6 6	18 6,4 6	776, 92
5	Cibeber	21 1,8 0	19 0,6 2	12 7,0 8	529, 50	21 9,2 0	19 7,2 8	13 1,5 0	547, 98	22 6,6 0	20 3,8 8	13 5,9 2	566, 40	23 3,8 0	21 0,4 8	14 0,3 4	584, 62
6	Cilegon	19 6,0 0	17 6,4 6	11 7,6 2	490, 08	20 2,4 0	18 2,2 2	12 1,4 6	506, 08	20 8,8 0	18 7,9 2	12 5,3 0	522, 02	21 5,2 0	19 3,6 8	12 9,1 4	538, 02
7	Citangkil	29 5,6 0	26 6,1 0	17 7,3 8	739, 08	30 4,6 0	27 4,1 4	18 2,7 8	761, 52	31 3,6 0	28 2,2 4	18 8,1 6	784, 00	32 2,6 0	29 0,3 4	19 3,5 4	806, 48
8	Ciwandan	20 0,6 0	18 0,5 4	12 0,3 4	501, 48	20 4,0 0	18 3,6 0	12 2,3 8	509, 98	20 7,4 0	18 6,6 0	12 4,4 2	518, 42	21 0,8 0	18 9,6 6	12 6,4 6	526, 92
Kota Cilegon		1.8 15, 00	1.6 33, 68	1.0 89, 10	4.53 7,78	1.8 97, 60	1.7 07, 96	1.1 38, 58	4.74 4,14	1.9 80, 20	1.7 82, 00	1.1 88, 02	4.95 0,22	2.0 62, 40	1.8 56, 16	1.2 37, 52	5.15 6,08

Sumber: Hasil Analisis

**Tabel 2.8 Proyeksi Daya Dukung Lahan untuk Perumahan Kota Cilegon
2015-2030**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Kebutuhan Lahan (Ha)				Asumsi Luas Lahan Perumahan Max. 40% Dari Luas Wilayah (Ha)
			2015	2020	2025	2030	
1	Pulomerak	1.986	547,62	562,10	576,52	591,00	794,4
2	Grogol	2.338	442,00	462,00	482,00	502,02	935,2
3	Purwakarta	1.524	574,52	659,88	744,98	830,10	609,6
4	Jombang	1.155	713,50	734,60	755,88	776,92	462
5	Cibeber	2.149	529,50	547,98	566,40	584,62	859,6
6	Cilegon	915	490,08	506,08	522,02	538,02	366
7	Citangkil	2.298	739,08	761,52	784,00	806,48	919,2
8	Ciwandan	5.185	501,48	509,98	518,42	526,92	2.074
Kota Cilegon		17.550	4.537,78	4.744,14	4.950,22	5.156,08	7.020

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 2.9 Proyeksi Kepadatan Permukiman Kota Cilegon 2015-2030

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Lahan Permukiman Max. 40%	Kepadatan Permukiman (Jiwa/Ha)			
				2015	2020	2025	2030
1	Pulomerak	1.986	794,4	55	57	58	60
2	Grogol	2.338	935,2	38	40	41	43
3	Purwakarta	1.524	609,6	75	87	98	109
4	Jombang	1.155	462	124	127	131	135
5	Cibeber	2.149	859,6	49	51	53	54
6	Cilegon	915	366	107	111	114	118
7	Citangkil	2.298	919,2	64	66	68	70
8	Ciwandan	5.185	2.074	19	20	20	20
Kota Cilegon		17.550	7.020	52	54	56	59

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 2.10 Proyeksi Kepadatan Permukiman Kota Cilegon Menurut Kelurahan Tahun 2015-2030

No.	Kecamatan/ Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Perumahan Max. 40% (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)				Kepadatan Permukiman (Jiwa/Ha)			
				2015	2020	2025	2030	2015	2020	2025	2030
1	Kec. Pulomerak	1986	794	43.818	44.971	46.125	47.279	55	57	58	60
	1 Lebakgede	537	11.313	11.610	11.908	12.206	53	54	55	57	82
	2 Suralaya	575	5.987	6.145	6.302	6.460	26	27	27	28	38
	3 Tamansari	336	15.637	16.049	16.461	16.873	116	119	122	126	161
	4 Mekarsari	538	10.881	11.167	11.454	11.740	51	52	53	55	75



No.	Kecamatan/ Kelurahan		Luas Wilayah (Ha)	Luas Perumahan Max. 40% (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)				Kepadatan Permukiman (Jiwa/Ha)			
					2015	2020	2025	2030	2015	2020	2025	2030
2	Kec. Grogol		2338	935	35.359	36.961	38.564	40.166	38	40	41	43
	5	Rawaarum	419	13.688	14.308	14.928	15.549	82	85	89	93	137
	6	Grogol	479	3.664	3.830	3.996	4.162	19	20	21	22	30
	7	Kotasari	237	4.558	4.765	4.972	5.178	48	50	52	55	78
	8	Gerem	1203	13.449	14.058	14.668	15.277	28	29	30	32	42
3	Kec. Purwakarta		1524	610	45.964	52.781	59.595	66.410	75	87	98	109
	9	Purwakarta	189	5.455	6.264	7.072	7.881	72	83	94	104	81
	10	Kotabumi	313	14.049	16.133	18.216	20.299	112	129	145	162	115
	11	Kebondalem	192	14.959	17.177	19.395	21.613	195	224	253	281	202
	12	Pabean	445	3.673	4.218	4.762	5.307	21	24	27	30	24
	13	Tegalbunder	219	4.251	4.882	5.512	6.142	49	56	63	70	57
	14	Ramanuju	166	3.577	4.107	4.638	5.168	54	62	70	78	65
4	Kec. Jombang		1155	462	57.080	58.771	60.461	62.150	124	127	131	135
	15	Jomb. Wetan	218	21.098	21.723	22.348	22.972	242	249	256	263	386
	16	Masigit	157	13.805	14.214	14.622	15.031	220	226	233	239	291
	17	Sukmajaya	317	11.239	11.572	11.905	12.237	89	91	94	97	102
	18	Panggungrawi	273	7.447	7.668	7.888	8.109	68	70	72	74	106
	19	Gedongdalem	190	3.491	3.594	3.698	3.801	46	47	49	50	81
5	Kec. Cibeber		2149	860	42.361	43.833	45.305	46.778	49	51	53	54
	20	Kalitimbang	348	5.481	5.671	5.862	6.052	39	41	42	43	55
	21	Cibeber	608	12.979	13.430	13.881	14.333	53	55	57	59	87
	22	Kedaleman	262	9.113	9.430	9.747	10.063	87	90	93	96	112
	23	Karangasem	167	7.432	7.690	7.948	8.207	111	115	119	123	156
	24	Cikerei	358	3.220	3.332	3.444	3.556	22	23	24	25	30
	25	Bulakan	406	4.136	4.280	4.423	4.567	25	26	27	28	37
6	Kec. Cilegon		915	366	39.209	40.488	41.766	43.046	107	111	114	118
	26	Ciwedus	137	10.016	10.343	10.669	10.996	183	189	195	201	272
	27	Bendungan	106	8.378	8.651	8.925	9.198	198	204	210	217	265
	28	Bagendung	389	3.752	3.874	3.996	4.119	24	25	26	26	34
	29	Ciwaduk	150	10.329	10.666	11.003	11.340	172	178	183	189	271
	30	Ketileng	133	6.734	6.954	7.173	7.393	127	131	135	139	172
7	Kec. Citangkil		2298	919	59.127	60.924	62.719	64.514	64	66	68	70
	31	Kebonsari	315	11.013	11.347	11.681	12.016	87	90	93	95	122
	32	Warnasari	551	6.469	6.666	6.862	7.058	29	30	31	32	46
	33	Citangkil	155	16.454	16.954	17.453	17.953	265	273	282	290	379
	34	Tamanbaru	316	5.596	5.766	5.936	6.106	44	46	47	48	67
	35	Lebakdenok	303	5.239	5.399	5.558	5.717	43	45	46	47	63
	36	Dringo	241	5.453	5.619	5.785	5.950	57	58	60	62	79
	37	Samangraya	417	8.903	9.173	9.444	9.714	53	55	57	58	75
8	Kec. Ciwandan		5185	2.074	40.114	40.793	41.471	42.152	19	20	20	20
	38	Tegalratu	507	203	9.124	9.278	9.432	9.587	45	46	47	47
	39	Banjarnegara	231	92	5.386	5.477	5.568	5.660	58	59	60	61
	40	Kubangsari	396	158	5.992	6.094	6.195	6.297	38	38	39	40
	41	Kepuh	1878	751	6.957	7.075	7.193	7.311	9	9	10	10
	42	Gunungsugih	1712	685	6.349	6.456	6.564	6.671	9	9	10	10
	43	Randakari	461	184	6.306	6.413	6.519	6.626	34	35	35	36
KOTA CILEGON			17550	7.020	363.032	379.522	396.006	412.495	52	54	56	59

Sumber: Hasil Analisis

	>300 jiwa/Ha		100-200 jiwa/Ha		<50 jiwa/Ha
	200-300 jiwa/Ha		50-100 jiwa/Ha		

Kebutuhan lahan perumahan untuk kedua kecamatan ini pada tahun 2020 telah melebihi daya dukung maksimal untuk perumahan (**Tabel 2.1**). Dengan asumsi terbatasnya luas lahan untuk perumahan, dapat dihitung proyeksi kepadatan permukiman berdasarkan proyeksi jumlah penduduk dengan batasan maksimal penyediaan perumahan Kota Cilegon dan perkeluhan (**Tabel 2.8 - Tabel 2.10**)

Berdasarkan proyeksi kepadatan permukiman di atas, kemudian dilakukan analisis untuk pengaturan kepadatan bangunan perumahan. Dalam hal ini kepadatan bangunan dibagi menjadi tiga interval, yaitu: (1) Kepadatan bangunan tinggi: kepadatan bangunan antara 24-36 bangunan/Ha, dengan kepadatan penduduk rata-rata maksimum 180 jiwa/Ha; (2) Kepadatan bangunan sedang: kepadatan bangunan antara 12-24 bangunan/Ha dengan kepadatan penduduk rata-rata maksimum 120 jiwa/Ha; dan (3) Kepadatan bangunan rendah : kepadatan bangunan <12 bangunan/Ha dengan kepadatan penduduk rata-rata maksimum 60 jiwa/Ha.

Dengan demikian rencana pengembangan kawasan perumahan meliputi:

- a. Kepadatan bangunan tinggi, sudah perlu dipertimbangkan terutama untuk Kecamatan Jombang dan Cilegon. Kepadatan bangunan sedang ditetapkan untuk Kecamatan Pulomerak, Purwakarta, Cibeber, dan Citangkil. Sedangkan kepadatan bangunan rendah masih dapat ditetapkan di Kecamatan Grogol dan Ciwandan.
- b. Pada kawasan yang ditetapkan berkepadatan sedang sampai tinggi dapat dikembangkan perumahan secara vertikal kecuali pada kawasan yang ditetapkan sebagai cagar budaya dan/atau kapasitas prasarannya terbatas dan/atau tingkat pelayanan jalannya rendah serta harus mempertimbangkan daya dukung tanah berdasarkan hasil studi kelayakan.
- c. Perumahan atau rumah yang sudah ditetapkan menjadi kawasan atau objek cagar budaya tetap dipertahankan dalam kerangka perlindungan cagar budaya.
- d. Peremajaan kota dan pembangunan kembali kota pada beberapa lingkungan yang menurun kualitasnya. Lokasinya merupakan lokasi yang teridentifikasi sebagai kawasan kumuh berdasarkan kajian yang telah disusun (Kajian Penyusunan Pola dan Strategi Penataan Permukiman Kumuh Kota Cilegon, 2008), meliputi:
 - RW. 02 Cibeber Barat Kel. Cibeber Kec. Cibeber
 - RW. 04 Kel. Ketileng Kec. Cilegon

- RW. 02 Kel. Banjar Negara Kec. Ciwandan
 - RW. 02 Medaksa Kel. Tamansari Kec. Pulomerak
 - RW. 03 Pecak Kel. Gedong Dalem Kec. Jombang
 - RW. 03 Kel. Panggungrawi Kec. Jombang
 - RW. 03 Kp. Priuk Kel. Sukmajaya Kec. Jombang
 - RW. 02 Teratai Udik Kel. Masigit Kec. Jombang
 - RW. 01 Kubang Lampit Kel. Tegal Bunder Kec. Purwakarta
 - Link Ciore Wetan Kel. Kotasari dan Grogol Kec. Grogol
 - Link Kagungan RW. 06 Kel. Gerem Kec. Grogol
 - Link Kagungan RW. 07 Cupas Wetan Kel. Gerem Kec. Grogol
 - Link Sukaseneng RW. 01 dan 02 Kel. Tamansari Kec. Pulomerak
- e. Permukiman yang berada pada kawasan perdesaan lokasinya menyebar di bagian pinggiran wilayah Kota Cilegon dan bercampur/menyatu dengan kawasan pertanian. Kawasan permukiman perdesaan ini terutama untuk mengakomodasi masyarakat/penduduk Kota Cilegon yang belum terlibat dalam kegiatan perkotaan (industri, dsb) serta masih memiliki kultur kegiatan pertanian. Untuk mendorong pengembangan perumahan terutama pada lokasi pertanian lahan kering terlebih dahulu dan dapat menggunakan pola kasiba dan lisiba yang berdiri sendiri yaitu berada pada wilayah Cilegon Timur (BWK V) dan Selatan (BWK I).
10. Untuk kawasan perumahan/permukiman yang berkembang pada kawasan yang bukan peruntukannya secara bertahap harus keluar/pindah dari kawasan tersebut.
11. Permukiman yang berada dalam peruntukan kawasan perindustrian akan direlokasi secara bertahap.

C. Potensi Pengembangan Perdagangan dan Jasa

Kecenderungan perkembangan kegiatan perdagangan di Kota Cilegon mengikuti perkembangan perilaku sosial ekonomi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan perkembangan tersebut, perlu direncanakan pengadaan jenis fasilitas perdagangan yang dibutuhkan masyarakat mencakup fasilitas pasar baik skala kota (regional) maupun lingkungan (lokal), pusat-pusat perbelanjaan/swalayan, dan pertokoan.

Dalam penempatannya, fasilitas pertokoan yang mendukung permukiman akan dilokasikan berdasarkan sebaran permukiman penduduk. Adapun fasilitas pasar yang memiliki jangkauan regional akan dilokasikan tidak berjauhan dengan keberadaan terminal.

Dengan adanya penempatan-penempatan fasilitas perdagangan tersebut, diharapkan pusat kegiatan baru dapat tumbuh di kawasan tersebut maupun di sekitarnya sehingga mengurangi beban kegiatan dan kepadatan pada kawasan pusat kota.

Kawasan perdagangan dan jasa, terutama yang terdapat di pusat Kota Cilegon dan Merak sepanjang jalan arteri primer, merupakan pusat kegiatan perdagangan dan jasa dengan jangkauan pelayanan regional di samping pelayanan lokalnya. Rencana pengembangan kawasan ini diarahkan pada penetapan spesialisasi/kekhasan jenis kegiatan perdagangan dan jasa pada suatu lokasi/sub kawasan. Dengan demikian akan memudahkan pengelolaan/penataan subsub kawasan tersebut yang pada akhirnya akan menentukan citra pusat kota secara keseluruhan. Rencana pengelolaan kawasan perdagangan dan jasa ini meliputi :

- a. Pengembangan pasar induk grosir/perkulakan di Koridor Jalan Lingkar luar selatan dan Pusat Sekunder Cilegon Timur.
- b. Pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai peruntukannya di seluruh kecamatan.
- c. Relokasi pasar lingkungan kelurahan/kecamatan dan sekitarnya yang sudah tidak sesuai lagi peruntukannya dalam rencana tata ruang.
- d. Perkembangan pusat belanja yang sudah ada harus dikendalikan dan pengembangan selanjutnya diarahkan ke wilayah Cilegon Timur, Selatan, serta Utara.
- e. Pembatasan perkembangan pusat belanja dan pertokoan yang berkembang secara linier sepanjang jalan arteri dan kolektor sesuai peruntukannya.
- f. Mengembangkan dan memprioritaskan kegiatan jasa profesional (pengacara, dokter, psikolog, dan sejenisnya); jasa perdagangan (kegiatan ekspor-impor, perdagangan berjangka, dan sejenisnya); dan jasa keuangan (perbankan, asuransi, lembaga keuangan non-bank, pasar modal, dan sejenisnya) ke wilayah Pusat Kota Cilegon dan Cilegon Timur.
- g. Memprioritaskan pengembangan kegiatan jasa profesional; jasa perdagangan; jasa pariwisata (agen dan biro perjalanan, penginapan, dan sejenisnya); dan jasa keuangan di wilayah Cilegon

Timur, Cilegon Selatan (Jalan Lingkar luar selatan), dan sisi jalan arteri primer dan arteri sekunder sesuai dengan peruntukannya.

- h. Membatasi konsentrasi perkantoran jasa di wilayah Pusat Kota Cilegon, khususnya kawasan inti pusat kota.

D. Potensi Pengembangan Pelabuhan dan Pergudangan

Kawasan pelabuhan di Kota Cilegon terdiri dari 3 (tiga) pelabuhan pengumpul dan 17 (tujuh belas) Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Pengembangan kawasan pelabuhan di Kota Cilegon meliputi:

1. Kawasan Pelabuhan Pengumpul

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batasan tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Dalam kaitan ini pelabuhan pengumpul diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.

Pelabuhan pengumpul yang selama ini terdapat di Kota Cilegon meliputi pelabuhan PT. Pelindo II, Pelabuhan PT. Krakatau Bandar Samudera, dan Pelabuhan PT. Indah Kiat. Selain ketiga pelabuhan tersebut, akan dikembangkan pelabuhan baru di Wilayah Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil, yang berlokasi di samping kanan PLTGU PT. Krakatau Daya Listrik.

Dalam konteks pengembangan pelabuhan-pelabuhan itulah dipandang perlu untuk menata lebih lanjut kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan pergudangan sebagai fasilitas penunjangnya. Dengan menjadikan-nya sebagai suatu kawasan, maka pelabuhan dapat berperan sebagai :

1. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya.
2. Pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, nasional dan internasional.
3. Tempat kegiatan alih moda transportasi.
4. Penunjang kegiatan industri dan perdagangan.
5. Tempat distribusi, konsolidasi dan produksi.

2. Kawasan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)

Di luar pelabuhan umum, di Kota Cilegon terdapat 17 (tujuh belas) TUKS. Mengingat jumlahnya yang cukup banyak, maka diperlukan rencana pengelolaan:

- Pengembangan kegiatan dan kawasan pergudangan yang terpadu dengan kegiatan TUKS tersebut, terutama untuk mendukung kegiatannya sendiri serta cenderung berfungsi untuk dan sebagai pelabuhan pengumpul.
- Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpul guna mendukung penggerak perekonomian kota.
- Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpul dan TUKS tersebut diharapkan tidak mengubah garis pantai (*shore line*) secara signifikan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan lain di sekitarnya.
- Untuk rencana pengembangan kawasan pergudangan yaitu dengan mengarahkan kegiatan pergudangan dan produksi non polutan dalam kawasan pelabuhan, selain itu kawasan pergudangan juga dikembangkan di sebelah Timur Kota Cilegon (BWK V) untuk mendukung rencana pengembangan Pelabuhan Bojonegara.

E. Potensi Pengembangan Pemerintahan dan Bangunan Umum

Kawasan perkantoran pemerintahan skala kota yang akan dikembangkan, diharapkan dapat menjadi "*node*" bagi Kota Cilegon. Rencana pengembangan kawasan pemerintahan ini secara umum meliputi:

- a. Kawasan ini merupakan kawasan pemerintahan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan umum skala kota yang terpadu. Perkantoran pemerintah dan bangunan umum berskala nasional, provinsi, dan kota pada lokasi saat ini dipertahankan keberadaannya.
- b. Pengembangan kawasan pemerintahan dan bangunan umum baru di koridor Jalan Lingkar Luar Selatan (JLS) di Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber dan berfungsi sebagai kawasan cadangan pengembangan pusat pemerintahan dan bangunan umum Kota Cilegon. Kawasan ini direncanakan menjadi suatu kawasan perkantoran pemerintahan yang sekaligus menjadi pertanda (*landmark*) Kota Cilegon. Koridor Lingkar luar selatan juga menandakan adanya ketersediaan akses jalan yang lebih

banyak. Pada bagian barat dikembangkan kawasan industri menengah non polutif dan pergudangan.

- c. Pengembangan kawasan pemerintahan dan bangunan umum diintegrasikan dengan pengembangan RTH dan taman kota sehingga tidak menimbulkan kesan ruang/kawasan pemerintahan yang kaku sekaligus berfungsi sebagai paru-paru kota dan menjadi salah satu pembentuk "wajah" Kota Cilegon.

Di luar kawasan pemerintahan yang terpusat dalam suatu lokasi, termasuk dalam kawasan pemerintahan adalah bangunan-bangunan umum yang lokasinya tersebar di berbagai bagian wilayah kota sesuai dengan fungsinya sebagai pelayanan umum.

F. Potensi Pengembangan Wisata

Kawasan wisata adalah kawasan yang mempunyai fungsi kegiatan utama pariwisata sehubungan dengan adanya objek yang menarik di kawasan tersebut. Objek wisata ini dapat berupa objek alam maupun seni budaya dan sejarah ataupun gabungannya. Kriteria kawasan wisata meliputi:

- a. Adanya objek wisata yang menarik.
- b. Tersedianya prasarana dan sarana untuk mencapainya.
- c. Tersedianya fasilitas akomodasi di sekitar objek wisata yang bersangkutan.
- d. Tidak terletak pada kawasan rawan bencana.

Secara umum rencana pengembangan sektor pariwisata dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik nusantara maupun manca negara. Hal ini dilakukan karena sektor pariwisata di Kota Cilegon mempunyai potensi dan prospek yang layak untuk dikembangkan sehingga pada gilirannya akan meningkatkan PAD dan peranannya terhadap perekonomian daerah.

Kawasan wisata yang terdapat di wilayah Kota Cilegon adalah kawasan wisata bahari, wisata bangunan bersejarah, wisata industri, dan wana wisata. Selain itu ada juga Kawasan pantai yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari yaitu Pulau Rida dan Pulau Merak Kecil serta kawasan pantai di Kelurahan Mekarsari dan Lebak Gede sampai dengan Suralaya di Kecamatan Pulomerak. Pengembangan kegiatan wisata di kawasan ini dapat sekaligus merupakan upaya penataan kembali lingkungan permukiman yang telah berbaur dengan kegiatan-kegiatan perkotaan lainnya sehingga terkesan kumuh.

Kawasan wisata bangunan bersejarah adalah berupa objek cagar budaya di Kota Cilegon antara lain:

- Kampung Pakuncen yang merupakan Kompleks Bangunan Periodisasi Kolonial (Dusun Pakuncen) di Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon.
- Stasiun KA Cilegon yang merupakan Stasiun KA kolonial di Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang.
- Rumah Kuno Temu Putih yang merupakan bangunan kolonial di Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon.
- Stasiun KA Krenceng yang merupakan Stasiun KA kolonial di Kelurahan Kebon Sari Kecamatan Citangkil.
- Kampung Ciwedus yang merupakan kompleks bangunan kolonial di Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon.
- Kampung Temu Putih yang merupakan kompleks bangunan kolonial di Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon.
- Bekas Kantor dan Rumah Asisten Residen Gubbels yang merupakan bangunan periodisasi kolonial di Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang.
- Makam Kyai Haji Wasid yang merupakan makam kuno pada masa periodisasi Islam di Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang.

Sedangkan untuk wisata industri banyak sekali potensi yang dapat dijadikan objek wisata diantaranya kawasan PLTU Suralaya di Kecamatan Pulomerak, Kawasan Industri PT. Krakatau Steel dan PT. KIEC di Kecamatan Citangkil.

Selain itu, ada juga kawasan lain yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata yaitu komplek perbukitan kawasan Gunung Gede (Desa Wisata Cipala). Mengingat kawasan ini secara normatif merupakan kawasan lindung, maka kegiatan wisata yang sesuai untuk dikembangkan adalah kegiatan wisata hutan (wana wisata).

Berdasarkan uraian di atas, maka arahan pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata meliputi:

- Mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah yang ada.
- Mempertahankan objek wisata budaya di lokasi yang ada.
- Memberdayakan industri yang ada sebagai objek wisata.

- Mempertahankan obyek rekreasi yang ada dan mengembangkan obyek rekreasi baru di wilayah Cilegon Utara pada Kecamatan Pulomerak dan Kecamatan Grogol.
- Melengkapi objek wisata dan rekreasi dengan fasilitas penunjang.
- Melibatkan masyarakat sekitar dalam pengembangan dan pengelolaan wisata dan rekreasi.
- Untuk tempat hiburan khusus keberadaannya akan dikendalikan, dibatasi, dan/atau dilarang yaitu dengan mengalokasikan pada lokasi tertentu serta pelarangan pada lokasi di sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan, dan permukiman penduduk.

G. Potensi Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya berada pada Pusat Sekunder Cilegon Timur di Kecamatan Jombang dan Cibeber. Berdasarkan karakteristiknya, pengelolaan kawasan ini meliputi:

- Mengembangkan kawasan pertanian lahan basah yang dapat ditetapkan sebagai Lahan pertanian pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Purwakarta
- Kawasan Pos Angkatan Laut di Kecamatan Puomerak

H. Potensi Kawasan Terminal Terpadu

Kawasan terminal terpadu dengan luas 32 Ha dan berlokasi di Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak, memiliki rencana pengembangan yang meliputi :

- Mengalokasikan ruang dan membangun kawasan perniagaan dalam kawasan terminal terpadu.
- Mengalokasikan ruang dan membangun dermaga baru dalam kawasan terminal.
- Mengalokasikan ruang bagi stasiun kereta di luar kawasan pelabuhan penyeberangan.
- Mengalokasikan ruang untuk Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

I. Potensi Pengembangan Pertambangan Non Mineral

Kegiatan pertambangan non mineral di wilayah Kota Cilegon pada umumnya berada di kawasan perbukitan yang memiliki tingkat kemiringan lereng yang tinggi. Untuk itu pengelolaan kawasan ini

meliputi:

- Kegiatan pertambangan yang dilakukan harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip teknik penambangan, kapasitas yang diperkenankan, aspek kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan kawasan di sekitarnya. Kegiatan penambangan yang dilakukan tidak diperkenankan untuk menggali dasar tanah, maksimal sampai rata dengan permukaan tanah disekitarnya sehingga kawasan pertambangan yang sudah habis dapat dimanfaatkan untuk perluasan kawasan kegiatan perkotaan.
- Pengawasan secara intensif dan ketat serta pengendalian oleh instansi yang berwenang terhadap kegiatan penambangan galian batu. Diperlukan kajian dan rencana yang lebih mendalam seksama dalam hal pemanfaatan lahan bekas pertambangan galian batu untuk kegiatan perkotaan.

Analisis zonasi telah dilakukan untuk mengetahui jenis dan penyebaran bahan galian batu, mengetahui potensi bahan galian batu, mengetahui kualitas bahan galian dan menetapkan zonasi bahan galian yang layak tambang. Berdasarkan kondisi geologi potensi galian batu di Kota Cilegon terdiri atas batu andesit, tanah urug, dan pasir. Potensi dijumpai di hampir seluruh kecamatan dengan potensi bervariasi.

Penentuan pembagian zona kawasan pertambangan didasarkan pada : kemiringan lereng, daerah permukiman, daerah industri, dan fasilitas umum (jalan raya, jalan kereta, dan jalur listrik). Berdasarkan hal tersebut terbagi tiga zona yaitu :

- **Zona kawasan pertambangan I** yaitu daerah berpotensi galian tinggi dan kemungkinan penambangan berdampak lingkungan kurang berarti.
- **Zona kawasan pertambangan II** yaitu daerah yang mengandung bahan galian berpotensi ekonomi namun memberikan dampak terhadap lingkungan sehingga penambangan perlu penanganan.
- **Zona kawasan pertambangan III** yaitu potensi galian dijumpai namun penambangan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berat dan tidak mudah ditanggulangi secara teknologi .

Kualitas bahan tambang berdasarkan uji material di lokasi penambangan disimpulkan:

- Material (agregat halus) dari wilayah Kelurahan Bagendung (Kecamatan Cilegon) dapat digunakan untuk lapis permukaan jalan (latasir, macadam, dan laston) dan campuran beton.

- Material (agregat kasar) dari Kelurahan Bagendung dapat digunakan untuk lapis permukaan jalan (burtu, latasir, buras, macadam, dan laston).
- Material dari Kelurahan Pabean (Kecamatan Purwakarta) dapat digunakan untuk lapis permukaan jalan (latasir, buras, macadam, dan laston), campuran beton dan filter media.
- Material dari Kelurahan Gerem (Kecamatan Grogol) dapat digunakan untuk lapis permukaan jalan (buras, latasto, dan macadam), campuran beton, dan filter media.
- Material dari Kelurahan Lebakgede (Kecamatan. Pulomerak) dapat digunakan untuk lapis permukaan jalan (buras, latasto, dan macadam), campuran beton, filter media, dan perkerasan jalan.
- Material dari Kelurahan Tegalratu (Kecamatan Ciwandan) dapat digunakan untuk lapis permukaan jalan (burtu, latasir, buras, macadam, dan laston), campuran beton, dan filter media.

Tabel 2.11 Potensi Bahan Pertambangan Batuan Kota Cilegon

No.	Kecamatan	Jenis Batuan	Lokasi	Luas sebaran/Cadangan Tereka
1	Pulomerak	Andesit	-	Luas sebaran 8.670.000 m ² , berdasarkan kontur topografi diperkirakan cadangan yang dapat diambil sebesar 30% yaitu 292.612.500, maka cadangan tereka 29..261..250 m ³ .
2	Grogol	Andesit-Basal	Kelurahan Grogol, Gerem	Luas 5.200.000 m ² dengan volume cadangan 187.200.000 m ³ dan cadangan tereka 18.720.000 m ³ .
3	Purwakarta	Andesit-Basal	Daerah Pabean, Tegalbunder, sebagian Kelurahan Purwakarta dan Kotabumi.	Luas penyebaran batuan 4.400.000 m ² dengan cadangan tereka 15.840.000 m ³
4	Jombang	-		
5	Cibeber	Tanah urug	Kelurahan Bulakan, Cikerei	Luas sebaran 1.700.000 m ² dengan cadangan tereka 3.400.000 m ³
			Daerah Bulakan	Luas sebaran 1.400.000 m ² dengan cadangan tereka 56.000.000 m ³
6	Cilegon	Pasir	Kelurahan Bagendung	Luas 2.100.000 m ² dengan ketebalan 44 m, dengan jumlah cadangan tereka 92.400.000 m ³ .
		Tanah urug	-	Luas sebaran 1.000.000 m ² dengan jumlah cadangan tereka 2.000.000 m ³
7	Citangkil	Tanah urug	Dringo	Luas 300.000 m ² dengan perkiraan cadangan tereka 600.000 m ²
8	Ciwandan	Andesit	Daerah Pasir Merengmang, Pasir Praha, dan Pasir Kirijal.	Perkiraan cadangan tereka sebesar 378.000.000 m ³ dan besaran layak ditambang sebesar 37.800.000 m ³
			Kp.Gobang	Cadangan 19.260.000m ³ dan dapat ditambang 1.926.000 m ³
		Tanah urug	Kp.Ciromo, Sambironyok, dan Cigobang	Luas sebaran 3.400.000m ² dengan cadangan tereka 6.800.000 m ³

Sumber: Analisa Potensi dan Zonasi Bahan Tambang Galian Batuan Kota Cilegon, 2006

J. Potensi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau

Keberadaan RTH di Kota Cilegon akan sangat bermanfaat sebagai penyeimbang tingginya intensitas kegiatan terutama industri dan kawasan terbangun. Apabila pengembangan fisik kawasan tidak disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas RTH, maka degradasi kualitas lingkungan baik mikro maupun makro akan semakin kentara seperti polusi udara, banjir, kenaikan suhu udara, dan sebagainya. Dalam konteks pengembangan RTH pada prinsipnya terdapat tiga fungsi yaitu sebagai konservasi, pelindung kelestarian objek/lingkungan tertentu, dan penunjang estetika kota. Sebagai konservasi, potensi pengembangan RTH direalisasikan dengan penetapan kawasan konservasi di sekitar Kecamatan Pulomerak dan Kecamatan Ciwandan.

RTH yang berfungsi sebagai pelindung kelestarian objek/lingkungan tertentu direalisasikan dalam alokasi RTH penyangga (buffer) antara kawasan industri dan perumahan, RTH di sekitar ruang sempadan sungai, jalur kereta api, jaringan listrik tegangan tinggi (SUTT/SUTET), jalan tol, sempadan pantai, areal sekitar waduk, dan sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sedangkan untuk pengembangan RTH yang berfungsi penunjang estetika kota dialokasikan pada lahan eks-Pasar Kota serta rencana pengembangan taman skala kecamatan dan kelurahan.

Ruang terbuka non hijau di Kota Cilegon meliputi:

- a. Waduk Krenceng dengan luasan + 95,75 hektar di Kelurahan Citangkil, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Lebak Denok, dan Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil; dan
- b. *retention pond* atau danau atau situ dengan luasan + 11,85 hektar di Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol.

Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non-hijau ini yaitu:

- a. menyusun rencana aksi pengembangan danau/situ Rawa Arum, rumusan fungsi utama pelayanan, sampai pada tahap penyusunan DED perluasan. Deliniasi perluasan *pond* disesuaikan dengan kajian debit air dan analisis daerah tangkapan air hujan (*catchment area*), kajian geologi/topografi, dan kajian lingkungan. Hasil deliniasi tersebut akan dijadikan dasar dalam pembebasan lahan;

- b. menyediakan dan membangun danau-danau (*retention pond*) di dalam kawasan permukiman dan kawasan perindustrian;
- c. membuat saluran-saluran air menuju badan *pond* disesuaikan dengan topografi dan kecenderungan arah aliran air. Saluran ini dilengkapi dengan *peripheral treatment/filter* yang masuk ke badan *pond*; dan
- d. Menyiapkan daerah/koridor penyangga dari bibir waduk/danau/situ sebagai RTH.

K. Potensi Pengembangan Agrikultur

Dalam konteks pengembangan perkotaan, keberadaan aktivitas agrikultur memiliki peran ganda yaitu sebagai penunjang ekonomi masyarakat peri-urban dan berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. Kegiatan agrikultur yang berkembang di Kota Cilegon antara lain meliputi pertanian lahan kering seperti padi sawah, sayuran (jagung), ketela (pohon dan rambat), kacang-kacangan (kacang tanah, kacang hijau), dan beberapa jenis buah-buahan (mangga, durian, pepaya, dsb) yang secara spasial tersebar di beberapa lokasi terutama pada bagian utara dan selatan Kota Cilegon di sekitar kawasan lindung (Kecamatan Pulomerak, bagian selatan Kecamatan Citangkil, Kecamatan Cilegon, dan Kecamatan Cibeber); dan pertanian lahan basah berupa sawah irigasi yang terdapat di Kecamatan Cibeber (Kelurahan Kedaleman) dan Kecamatan Jombang (Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Panggungrawi).

Mengacu pada data luasan pemanfaatan ruang Kota Cilegon dapat diketahui bahwa untuk pertanian lahan kering yang meliputi kebun/ladang dan sawah tadah hujan mencapai 2131,63 ha sedangkan untuk pertanian lahan basah (sawah irigasi) sekitar 4.794,04 ha. Berkaitan dengan beberapa luasan lahan pertanian yang terdapat di sepanjang jalan utama kota dikarenakan lokasinya yang strategis dan memiliki nilai ekonomi tinggi, maka dapat dipertimbangkan adanya alih fungsi pemanfaatan ruang secara bertahap ke arah kegiatan non-pertanian terutama pada lahan-lahan di bagian timur Kota Cilegon dan sebagian di sekitar Jalan Lingkar Selatan. Untuk lahan pertanian yang belum beralih fungsi, aktivitas agrikultur dapat terus dikembangkan melalui pendekatan intensifikasi pertanian. Sedangkan konversi lahan agraris perlu mempertimbangkan hasil analisis HBU (*Highest and Best Use*) yang dilakukan oleh instansi terkait.

Untuk sawah tadah hujan pengelolaannya diarahkan pada sistem pengelolaan yang memperhatikan aspek lingkungan dan secara bertahap dikembangkan sebagai kawasan budidaya non-pertanian. Mengingat Kota Cilegon memiliki potensi kegiatan industri dan permukiman yang cukup tinggi, maka perkembangan kawasan industri dan permukiman yang cenderung memanfaatkan lahan pertanian produktif perlu diarahkan ke lokasi/lahan pertanian yang tidak/kurang produktif. Sedangkan Untuk kawasan pertanian lahan kering yang berada dalam kawasan lindung adalah dengan mempertahankan luas yang ada dan meningkatkan perlakuan konservasi sehingga akan mampu mendukung fungsi kawasan lindung sebagai daerah resapan air, selain untuk meningkatkan produksi hasil pertanian. Jenis tanaman yang dikembangkan adalah yang bernilai ekonomi tinggi dan berfungsi konservasi.



Gambar 2.3 Produksi Padi dan Palawija Di Kota Cilegon

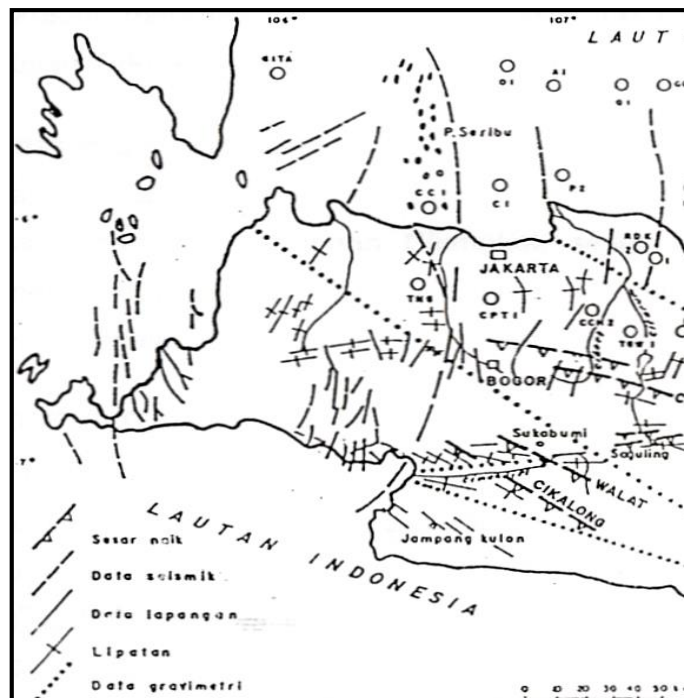
Sumber: Cilegon Dalam Angka Tahun 2015

2.1.10 Wilayah rawan bencana

A. Gempa dan Gelombang Tsunami

Gempa di laut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya gelombang tsunami. Intensitas tsunami ditentukan oleh magnitude dari gempa dan kedalamannya, perambatan gelombang tsunami, variasi arah rambatan gelombang gempa, konfigurasi pantai, topografi daratan/bentuk bentang alam, tipe serta ukuran deformasi laut yang diukur dengan bathimetri dasar laut. Gelombang Tsunami di Selat Sunda dapat disebabkan oleh gempa tektonik disebabkan oleh proses subduksi pada lempeng Eurasia dan lempeng Samudera Hindia. Adanya pergesekan antara dua lempengan tersebut baik ke arah

vertikal maupun horizontal dapat memicu pergerakan tektonik bawah laut yang akan diikuti oleh rambatan gelombang air laut yang sangat besar. Gelombang Tsunami di pesisir Kota Cilegon dapat pula dipicu oleh gempa vulkanik akibat letusan Gunung Anak Krakatau yang sampai saat ini masih aktif. Kerusakan akibat gelombang tsunami terutama terjadi pada daerah teluk akibat terjadinya penyempitan gerakan gelombang sehingga mempercepat gerakan gelombang tersebut. Kecepatan tsunami lebih besar pada laut dalam dibandingkan laut dangkal karena pada laut dangkal kecepatan gelombang banyak dinetralkan oleh dasar laut, sementara pada laut dalam gelombang bergerak tanpa hambatan.



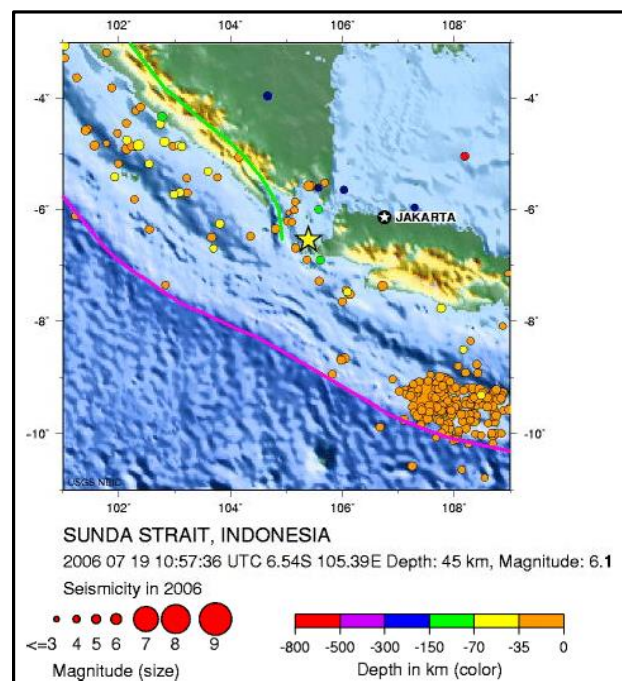
Gambar 2.4 Peta Struktur Patahan Dan Lipatan Regional di Wilayah Banten Dan Sekitarnya

Sumber: Martodjojo, 1984

Khusus untuk kawasan Selat Sunda, kegempaan di wilayah ini menunjukkan aktivitas yang besar. Kegempaan di Selat Sunda dengan skala di atas 2,5 skala Richer pada tahun 1988 13 kali, tahun 1989 12 kali dan tahun 1990 sebanyak 6 kali. Berdasarkan pencatatan telemetri didapatkan angka sebanyak 2.456 kali gempa pada tahun 1994, dan paling kecil sebanyak 1.692 kali tahun 1993. Titik pusat gempa dapat dilihat pada gambar selanjutnya. Rata-rata kejadian gempa adalah sekitar 2000 kali setiap tahunnya. Dari catatan kejadian gempa bumi yang terjadi dari tahun 1900 sampai tahun 1993, sebagian

besar mempunyai magnitude (M) sebesar 4,1 sampai 6,0. Gempa besar lain yang terjadi di kawasan Selat Sunda adalah pada tanggal 27 Februari 1903 dengan skala VII MMI di Banten, 12 Mei 1923 dengan skala VII MMI di Banten yang dirasakan di seluruh Jawa, 24 Juni 1949 skala 7 Richer di dekat Krakatau, 9 Juli 1957 skala 6,2 Richer di sebelah barat Selat Sunda serta 16 Desember 1963 skala V MMI di Labuhan. Pusat gempa antara tahun 1900-1999 dengan magnitude >4 umumnya terjadi di lautan Hindia dan Selat Sunda dengan frekuensi 6–29 kali per tahun. Konsentrasi pusat gempa berada di 3 lokasi, yaitu di bawah G. Krakatau, pada graben (sesar turun) di sebelah barat Selat Sunda, dan di selatan Sumatera. Beberapa pusat gempa yang telah terjadi di daratan umumnya terjadi di Banten Selatan (Kabupaten Lebak atau Kabupaten Pandeglang).

Dengan memperhatikan potensi bencana alam khususnya gempa bumi dan tsunami, maka kawasan pesisir Kota Cilegon merupakan daerah yang memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi. Terlebih aktivitas yang berkembang di sekitar kawasan pesisir adalah kawasan industri (khususnya industri kimia dan logam) dan pelabuhan sehingga bencana alam yang terjadi dapat disertai dengan bencana industri.

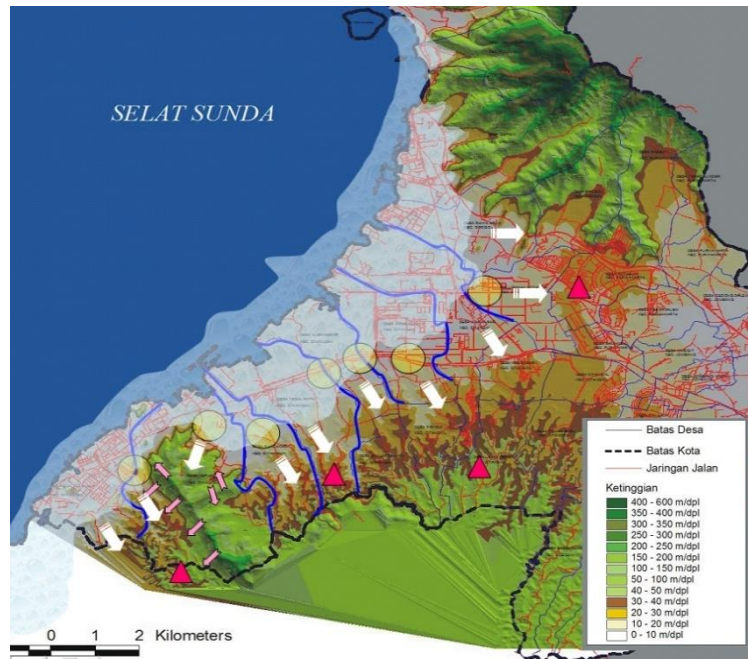


Gambar 2.5 Peta Seismitas di Selat Sunda Tahun 2006

Sumber: USGS, 2006

Keterangan : Pusat gempa umumnya mempunyai intensitas magnitude 6 dan berada pada kedalaman 0 hingga -35 km di bawah permukaan laut.

Lebih jauh lagi, gempa dengan magnitude 7, 8, dan lebih dari 8 sempat terekam sejak tahun 1900. Terdapat 1 titik gempa di Selat Sunda pada kedalaman 0 hingga 35 m di bawah muka laut.



Gambar 2.6 Potensi Tsunami Kawasan Pesisir Kota Cilegon

B. Gunung Berapi

Aktivitas gunungapi di sekitar Selat Sunda terdapat pada Gunung Anak Krakatau yang telah tumbuh sejak letusannya terakhir pada abad ke-19. Letusan gunungapi Gunung Krakatau pada tanggal 27 Agustus 1883 yang diikuti oleh tsunami telah menghancurkan kota dan desa di sekitar Selat Sunda dan mengakibatkan hilangnya nyawa 36.000 orang. Letusan gunungapi tersebut merupakan letusan terbesar dengan melontarkan material vulkanik sebanyak 18 km³ setinggi 80 km dan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 30 – 40 m di sepanjang pantai Merak – Banten, Lampung Selatan hingga Jakarta. Gelombang tsunami terdeteksi dengan periode lebih dari 30 menit pada lokasi yang dekat hingga 1 – 2 jam pada lokasi yang jauh. Tsunami tersebut berjalan ke arah barat di perairan Samudera India sekitar Tanjung Harapan (*Cape of Good Hope*) dan ke utara hingga Atlantik. Tsunami terekam di Cape Town, Afrika Selatan (13.032 km jaraknya), di Pelabuhan Cape Horn, Amerika Selatan (14.470 km) dan di Panama, Amerika Tengah (20.646 km).

Letusan besar pada gunungapi tersebut telah membentuk kaldera, serta menyisakan tiga pulau, yaitu Pulau Rakat, Sertung, dan Panjang yang terletak di pematang kaldera. Sejak tahun 1930 di tengah-tengah kaldera muncul titik letusan baru yang lama kelamaan menjadi kerucut gunungapi dan dinamakan G. Anak Krakatau. Sejak tahun 1963 kegiatan G. Anak Krakatau bergeser ke barat dan telah membentuk kerucut kedua yang telah mencapai ketinggian 201,446 m pada tahun 1983. Dari tahun 1930 hingga 1983, G. Anak Krakatau telah mengerupsi sebanyak 74 kali, baik erupsi eksplosif maupun efusif. Dari sejumlah tersebut, pada umumnya titik letusan selalu berpindah-pindah di sekitar tubuh kerucutnya. Erupsi ini merupakan kegiatan rutin Anak Krakatau yang terjadi setiap satu sampai delapan tahun sekali, dan umumnya terjadi empat tahun sekali yang berupa letusan abu dan lelehan lava.

Berkaitan dengan upaya mitigasi bencana di Kota Cilegon, Pemerintah Kota Cilegon dalam mengantisipasi tsunami telah membagi zona wilayah rawan bencana tsunami berdasarkan ketinggian (Diatas Permukaan Laut/DPL) berdasarkan versi A. Soebandono. Kota Cilegon dibagi menjadi 4 zona, yaitu:

1. zona yang berada kurang dari 7 M DPL, adalah daerah amat berbahaya.
2. zona dengan ketinggian 7-12 M DPL, adalah daerah berbahaya.
3. zona dengan ketinggian 12-25 M DPL, adalah daerah cukup aman.
4. zona dengan ketinggian di atas 25 M DPL, adalah daerah aman.

C. Banjir

Fenomena banjir yang terjadi di Kota Cilegon mayoritas dapat dijelaskan dari dua aspek yaitu aspek topografi dan aspek pengelolaan sistem drainase. Secara topografis, bagian utara dan selatan Kota Cilegon memiliki tingkat kemiringan (*slope*) yang cukup curam disertai dengan menurunnya kemampuan infiltrasi tanah terhadap air hujan sehingga aliran air bergerak tanpa disertai penyerapan ke tanah. Di sisi lain pada kondisi di mana terjadi pasang laut, aliran air menjadi terhambat sehingga menimbulkan genangan pada beberapa titik terutama untuk area yang memiliki tingkat kemiringan datar atau cekungan. Sedangkan ditinjau dari aspek pengelolaan sistem drainase terdapat beberapa kondisi yang menjadi pemicu timbulnya permasalahan banjir seperti penyempitan saluran, sedimentasi dan pendangkalan yang diakibatkan oleh material dan sampah, pelanggaran terhadap sempadan sungai, tidak terintegrasinya sistem

drainase, serta belum adanya saluran yang seharusnya tersedia terutama di kawasan permukiman. Total genangan yang ada di Kota Cilegon tahun 2014 adalah seluas 71,55 ha dan yang telah dikendalikan dari banjir adalah genangan seluas 24,8 ha.

D. Intrusi dan Abrasi Air Laut

Proses intrusi terjadi karena adanya penurunan kandungan air tanah sehingga mengakibatkan penetrasi air laut ke arah daratan pada suatu lapisan tanah yang sudah mengalami peronggaan. Adanya eksploitasi air tanah berlebih baik untuk menunjang kebutuhan industri maupun domestik akan meningkatkan penetrasi air laut yang berkorespondensi dengan semakin menurunnya kualitas air tanah. Hal ini pun disebabkan oleh menurunnya kemampuan tanah dalam menyerap air hujan/air buangan yang diakibatkan oleh kerusakan fisik tanah itu sendiri dan/atau berkurangnya luasan tanah untuk penyerapan air sebagai dampak meningkatnya kawasan budidaya (kawasan terbangun). Fenomena ini dapat dirasakan manakala air tawar berubah warnanya menjadi agak keputihan dan rasanya sedikit payau. Kondisi ini dapat dirasakan terutama pada area di sekitar kawasan pesisir seperti di sekitar Kecamatan Pulomerak, Kecamatan Ciwandan, dan Kecamatan Grogol.

Sedangkan abrasi air laut terjadi sebagai akibat dari tingginya frekuensi hempasan gelombang air laut yang lambat laun mengikis lapisan perkerasan dan dataran pada pesisir pantai terutama pada daerah yang sudah tidak memiliki pelindung alami (*natural-barrier*). Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya abrasi pantai, yaitu : (1) proses alami (karena gerakan gelombang pada pantai terbuka), (2) aktivitas manusia. Kegiatan manusia yang tidak mengindahkan konsep konservasi dapat menimbulkan erosi tanah, kemudian sedimennya terbawa oleh aliran sungai serta diendapkan di kawasan pesisir. Dalam jangka panjang, abrasi air laut dapat mengubah bentuk garis panta serta mengancam aktivitas dan bangunan (termasuk infrastuktur) di sekitar pinggir pantai. Meskipun demikian saat ini terdapat pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi abrasi air laut (seperti pemasangan kawat bronjong, wave-breaker, dsb).

2.1.11 Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kota Cilegon menurut data administrasi penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon adalah 438.348

jiwa (per 31 desember 2015). Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Citangkil dengan proporsi jumlah penduduk sebesar 17,18 % dan kecamatan dengan jumlah pendudukan paling sedikit adalah di Kecamatan Purwakarta (9,7 %). Secara umum, jika dilihat *hanya* berdasarkan jumlah penduduk (Tabel 1.7), tingkat persebaran penduduk di Kota Cilegon cukup merata. Namun jika dilihat berdasarkan tingkat kepadatan penduduk), ada 2 Kecamatan di Kota Cilegon yang kepadatannya jauh melebihi kecamatan yang lain, yaitu di Kecamatan Cilegon (5253 jiwa/km²) dan Kecamatan Jombang (5928 jiwa/km²). Angka itu jauh di atas kecamatan lainnya yang rata-rata memiliki tingkat kepadatan dibawah 2000 jiwa/km². Hal ini disebabkan oleh realitas bahwa pusat perkonomian dan aktivitas warga Kota Cilegon berada di wilayah Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Jombang, ditambah bahwa dua kecamatan tersebut merupakan kawasan permukiman dan perumahan yang cukup padat.

Tabel 2.12 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk menurut Catatan Administrasi Kependudukan, Kecamatan, Luas, dan Kepadatan Penduduk di Kota Cilegon Tahun 2015

Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
	km ²	%	Jumlah	%	
Ciwandan	51,81	29,52	50.339	11,48%	972
Citangkil	22,98	13,09	75.309	17,18%	3277
Pulomerak	19,86	11,32	54.990	12,54%	2769
Purwakarta	15,29	8,71	42.630	9,73%	2788
Grogol	23,38	13,32	43.188	9,85%	1847
Cilegon	9,15	5,21	48.064	10,96%	5253
Jombang	11,55	6,58	68.469	15,62%	5928
Cibeber	21,49	12,24	55.359	12,63%	2576
Kota Cilegon	175,51	100	438.348	100 %	2498

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, 2016

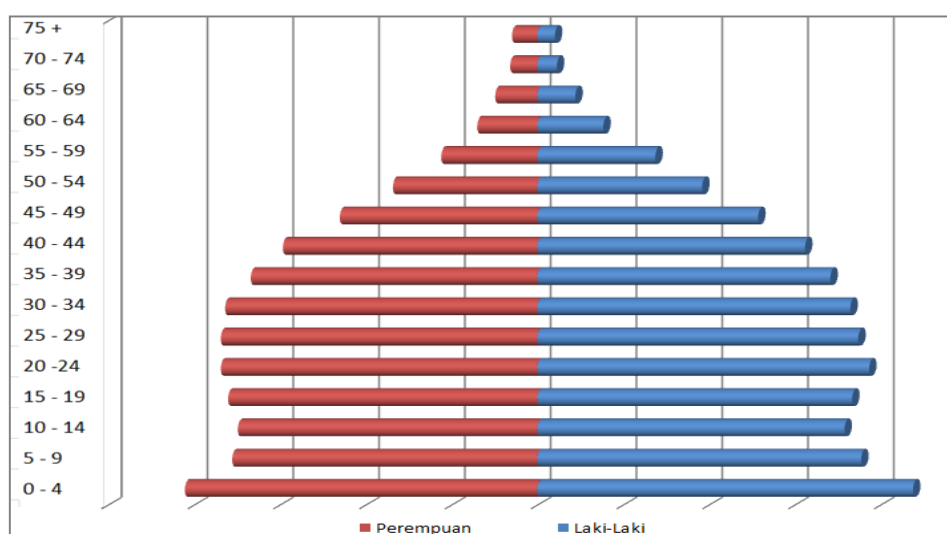
Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cilegon menurut Catatan Administrasi Kependudukan Tahun 2014 dan 2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Pertumbuhan Penduduk (2014-2015) (%)
		2014	2015	
1	Ciwandan	49.876	50.339	0,93%
2	Citangkil	73.972	75.309	1,81%
3	Pulomerak	54.464	54.990	0,97%
4	Purwakarta	43.188	42.630	-1,29%
5	Grogol	43.272	43.188	-0,19%
6	Cilegon	47.327	48.064	1,56%
7	Jombang	70.336	68.469	-2,65%
8	Cibeber	54.015	55.359	2,49%
Kota Cilegon		436.450	438.348	0,43%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, 2016

2.1.11.1 Piramida penduduk

Komposisi penduduk di Kota Cilegon berdasarkan kelompok umur membentuk Piramida Penduduk Muda (*Expansive*). Bentuk piramida ini menggambarkan komposisi penduduk dalam pertumbuhan dan sedang berkembang, dimana angka kelahiran di Kota Cilegon lebih besar daripada angka kematian. Penduduk tumbuh cepat karena terjadi penurunan tingkat kematian bayi tetapi tingkat kelahiran masih tinggi. Kelompok bentuk piramida seperti ini serupa dengan karakteristik penduduk negara Indonesia secara keseluruhan.



Gambar 2.7 Piramida Penduduk (Berdasarkan Kategori Usia) Kota Cilegon

(Sumber : Diolah dari Cilegon Dalam Angka 2015)

Bentuk piramida tersebut menggambarkan komposisi penduduk dalam pertumbuhan dan sedang berkembang, dimana angka kelahiran di Kota Cilegon lebih besar daripada angka kematian. Penduduk tumbuh cepat karena terjadi penurunan tingkat kematian bayi tetapi tingkat kelahiran masih tinggi. Karakteristik piramida penduduk di Kota Cilegon pada dasarnya mirip dengan karakteristik demografi di Indonesia yang memiliki bentuk piramida dengan sifat ekspansif, yaitu jumlah usia produktif yang cukup besar, dan juga tingkat fertilitas (kelahiran) yang juga cukup besar. Kondisi demografi ini dapat berpotensi menjadi keuntungan sekaligus kerugian bagi pertumbuhan ekonomi. Jumlah usia produktif yang berlimpah dapat menjadi 'bonus demografi' yaitu melimpahnya potensi jumlah tenaga kerja produktif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, melimpahnya penduduk usia produktif dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran jika tidak diantisipasi dengan baik melalui perluasan lapangan kerja dan peluang usaha.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

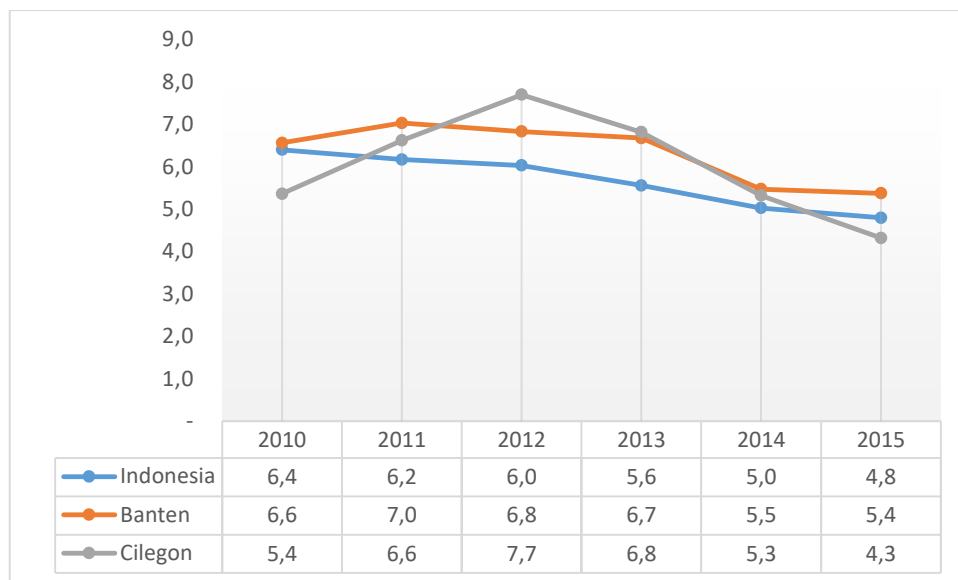
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkualitas akan berpengaruh terhadap pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, historis pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk dijadikan dasar perencanaan pembangunan daerah. Pada tahun 2014 struktur PDRB berubah dari 9 sektor menjadi 17 sektor, sehingga terjadi penyesuaian nilai PDRB yang berpengaruh juga pada angka proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon tahun 2016.

Berdasarkan PDRB 17 sektor Laju pertumbuhan ekonomi di Cilegon pada tahun 2015 sebesar 4,3 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan yang dicapai pada tingkat nasional dan Provinsi Banten pada periode yang sama yakni sebesar 4,8 persen dan 5,4 persen.

Tabel 2.14 Peningkatan Nilai PDRB Kota Cilegon Tahun 2010-2015

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PDRB ADHB (Juta Rupiah)	44.676.529	49.827.657	55.414.144	61.965.449	70.446.488	77.918.916
PDRB ADHK (Juta Rupiah)	44.676.529	47.633.318	51.300.206	54.796.098	57.711.045	60.204.038
Laju ADHK (%)	5,36	6,62	7,70	6,81	5,32	4,32

Secara lengkap perbandingan perkembangan pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Banten dan Kota Cilegon tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 terlihat pada gambar berikut.


Gambar 2.8 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010– 2015

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar diatas bahwa laju pertumbuhan ekonomi Cilegon dalam tiga tahun terakhir mengalami perlambatan yang relatif serupa dengan tingkat Provinsi Banten maupun nasional. Secara lengkap besaran PDRB berdasarkan harga berlaku dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15 Perkembangan Nilai PDRB ADHB Menurut Sektor Lapangan Usaha Kota Cilegon Tahun 2010-2015 (Rp. Juta)

KATEGORI		2010	2011	2012	2013*	2014**	2015***
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	140.579	150.744	161.148	180.193	205.702	236,602
2	Pertambangan dan Penggalian	23.748	26.030	27.937	30.144	33.405	38,372
3	Industri Pengolahan	27.784.657	30.317.296	33.265.237	38.114.791	40.600.030	43,350,303
4	Pengadaan Listrik, Gas	1.949.072	2.409.663	2.809.249	2.607.304	5.281.205	6,141,273
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	132.919	128.280	131.153	139.495	149.881	163,836
6	Konstruksi	2.360.063	2.681.049	3.128.990	3.560.974	4.470.683	5,651,202
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.744.730	5.611.903	6.410.421	6.828.821	7.558.836	8,525,512
8	Transportasi dan Pergudangan	1.200.803	1.397.809	1.515.439	1.667.766	2.044.634	2,301,498
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	898.898	1.009.710	1.116.899	1.232.150	1.502.508	1,751,892
10	Informasi dan Komunikasi	410.304	450.995	475.481	481.333	519.562	578,659
11	Jasa Keuangan	937.469	1.096.943	1.305.735	1.488.729	1.670.034	1,911,148
12	Real Estate	2.686.087	2.944.586	3.253.668	3.537.443	3.904.278	4,378,141
13	Jasa Perusahaan	132.798	148.416	167.751	188.683	221.729	247,367
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	316.829	363.116	409.641	455.278	538.766	634,322
15	Jasa Pendidikan	299.920	334.503	382.979	456.612	538.256	580,401
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	322.981	373.371	433.506	461.328	520.013	598,298
17	Jasa lainnya	334.672	383.240	418.910	534.405	686.966	830,089
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		44.676.529	49.827.657	55.414.144	61.965.449	70.446.488	77,918,916

Keterangan:

* Angka Sementara (BPS)

** Angka Sangat Sementara (BPS)

*** Angka proyeksi

Sumber: diolah dari PDRB Kota Cilegon Tahun 2015, Bappeda Cilegon

Sedangkan dari sisi PDRB ADHK Tahun dasar 2010 secara lengkap besarannya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16 Perkembangan Nilai PDRB ADHK 2000 Menurut Sektor Lapangan Usaha Kota Cilegon Tahun 2010-2015 (Rp. Juta)

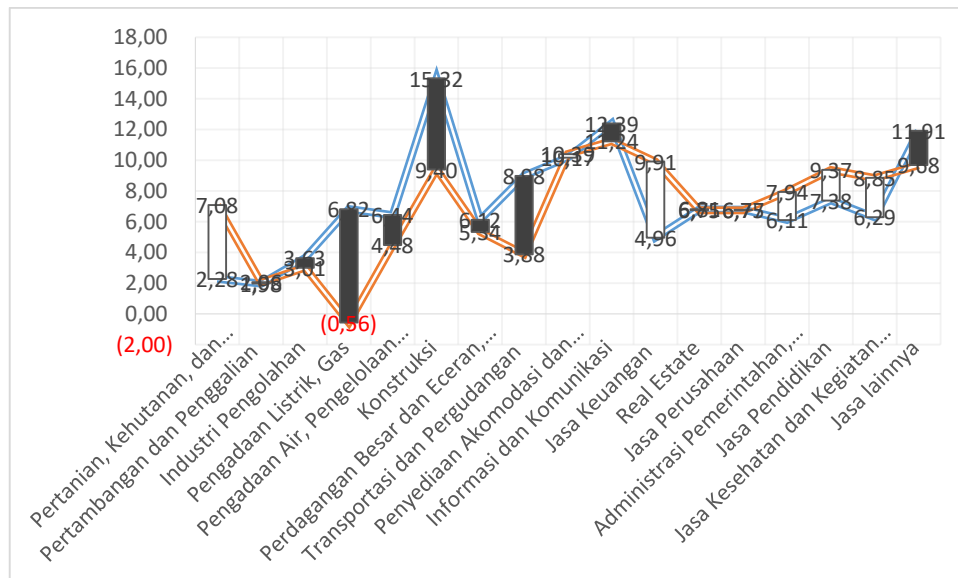
KATEGORI		2010	2011	2012	2013*	2014**	2015***
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	140.579	140.293	144.134	142.109	145.342	155,635
2	Pertambangan dan Penggalian	23.748	24.982	26.123	25.303	25.804	26,336
3	Industri Pengolahan	27.784.657	29.526.011	31.454.647	34.629.447	35.885.224	36,965,388
4	Pengadaan Listrik, Gas	1.949.072	1.936.855	2.014.320	1.914.323	2.044.853	2,033,371
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	132.919	133.334	134.984	135.555	144.280	150,742
6	Konstruksi	2.360.063	2.486.316	2.752.897	2.920.489	3.367.985	3,684,527
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.744.730	5.306.095	5.977.809	6.101.225	6.474.811	6,820,714
8	Transportasi dan Pergudangan	1.200.803	1.343.171	1.436.543	1.416.307	1.543.510	1,603,417
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	898.898	969.299	1.010.622	995.577	1.096.854	1,210,854
10	Informasi dan Komunikasi	410.304	441.760	507.719	492.069	553.053	615,192
11	Jasa Keuangan	937.469	1.023.510	1.143.388	1.211.784	1.271.923	1,397,959
12	Real Estate	2.686.087	2.832.859	3.124.310	3.228.095	3.447.909	3,680,526
13	Jasa Perusahaan	132.798	139.900	152.228	156.668	167.281	178,566
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	316.829	321.921	348.325	345.750	366.858	395,975
15	Jasa Pendidikan	299.920	306.489	314.503	307.382	330.052	360,973
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	322.981	344.745	376.556	371.665	395.041	429,992
17	Jasa lainnya	334.672	355.775	381.097	402.350	450.266	493,873
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		44.676.529	47.633.318	51.300.206	54.796.098	57.711.045	60,204,038

Keterangan:

* Angka Sementara (BPS) ** Angka Sangat Sementara (BPS) *** Angka proyeksi (Bappeda Cilegon)

Dari sisi produksi, tercatat bahwa pada tahun 2015, sektor pengadaan listrik dan gas mengalami pertumbuhan negatif 0,56 persen dibandingkan tahun 2014. Sebagaimana yang terlihat pada gambar 2.2. perlambatan tersebut juga disumbang dari 10 sektor lainnya yang mengalami perlambatan, termasuk di dalamnya sektor industri pengolahan dan perdagangan yang menguasai 72 persen

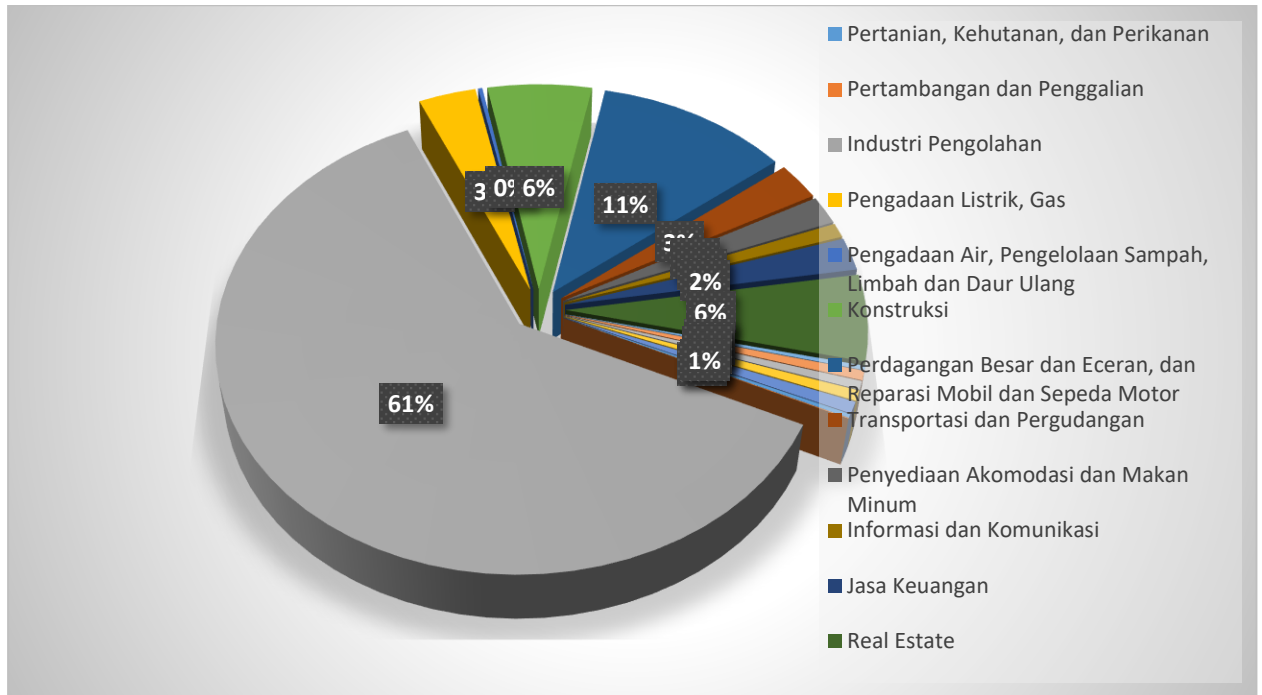
perekonomian di Kota Cilegon. Sebaliknya sektor pertanian, dibandingkan tahun sebelumnya (yoy) mengalami peningkatan sebesar 7 persen, yang mengindikasikan pola pengelolaan produksi pertanian semakin membaik namun sektor ini sangat bergantung pada faktor cuaca dan variabel lainnya seperti ketersediaan lahan dan penggunaan teknologi pertanian.



Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2015 Terhadap PDRB 2014 Per Sektor

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Dominasi pertumbuhan ekonomi di Kota Cilegon terletak pada sektor Industri Pengolahan dengan *share* 61 persen. Hal tersebut membuat Kota Cilegon sangat bergantung pada iklim investasi di Indonesia secara umum.

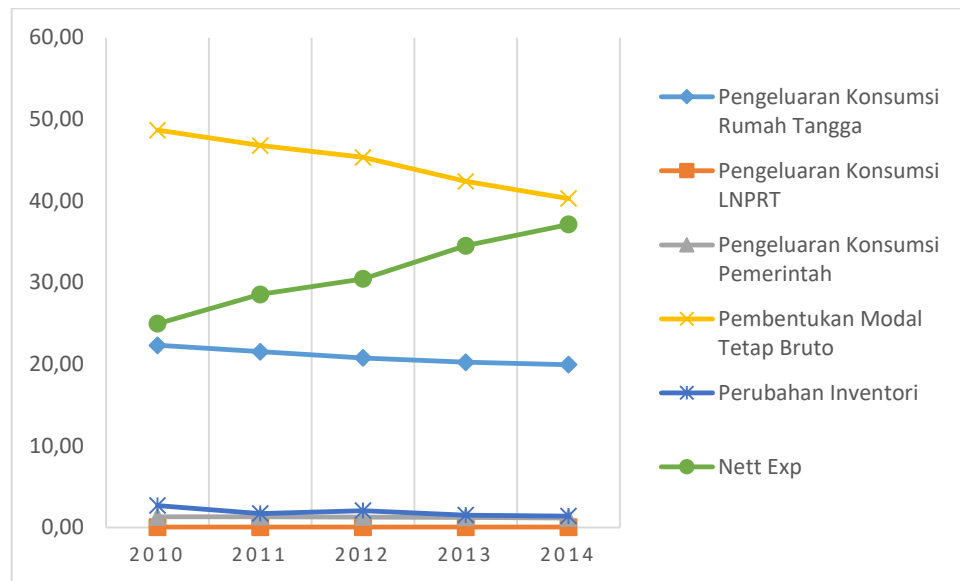


Gambar 2.10 Kontribusi Per Sektor PDRB 2015

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Sebagian besar industri di Kota Cilegon merupakan industri hulu yang sangat bergantung pada permintaan industri hilir di luar Kota Cilegon. Kondisi nilai tukar rupiah terhadap dollar yang fluktuatif sangat mempengaruhi pasar sehingga membuat industri di wilayah cilegon menurunkan produksi. Disamping dari sisi pasar, dari sisi produksi juga terbebani dengan biaya operasional yang meningkat akibat harga input yang dipengaruhi dollar, oleh karena itu situasi perekonomian di kota cilegon dalam kurun waktu tiga tahun terakhir semakin melambat yang disumbang secara dominan dari industri pengolahan dari 15,32 persen menjadi 9,40 persen.

Sementara itu, pendekatan PDRB dari sisi pengeluaran, secara konsisten sejak tahun 2010 sampai dengan 2014 didominasi komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan porsi rata-rata diatas 40 persen sebagaimana yang tergambar pada gambar 2.3.



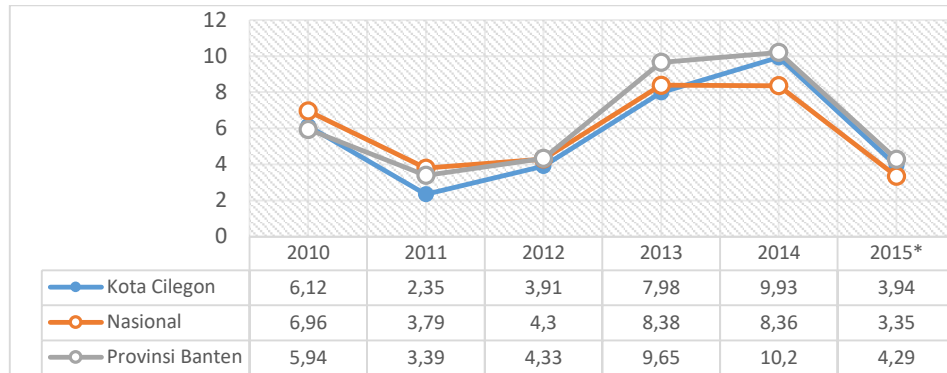
Gambar 2.11 Distribusi PDRB Pengeluaran (riil) Tahun 2010-2014

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Peranan Kota Cilegon sebagai Kota Industri terlihat dari kontribusi yang besar pada komponen PMTB, dimana komponen ini menggambarkan aktivitas investasi di Kota Cilegon. Sepanjang 2011-2014 porsi *Nett Export* meningkat dan positif yang menunjukkan bahwa Kota Cilegon lebih banyak memberikan supply barang kepada daerah lain baik skala nasional dan internasional ketimbang dengan perkembangan impor.

2.2.1.2 Laju Inflasi

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga merupakan indikator ekonomi makro yang penting. Inflasi Cilegon selama tahun 2015 adalah sebesar 3.94 persen, lebih rendah dari inflasi tahun 2014 yaitu 9,93 persen. Lebih lanjut perkembangan Inflasi pada tahun 2010 hingga 2015 ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 2.12 Perbandingan Inflasi Nasional, Provinsi Banten dan Kota Cilegon (2010-2015)

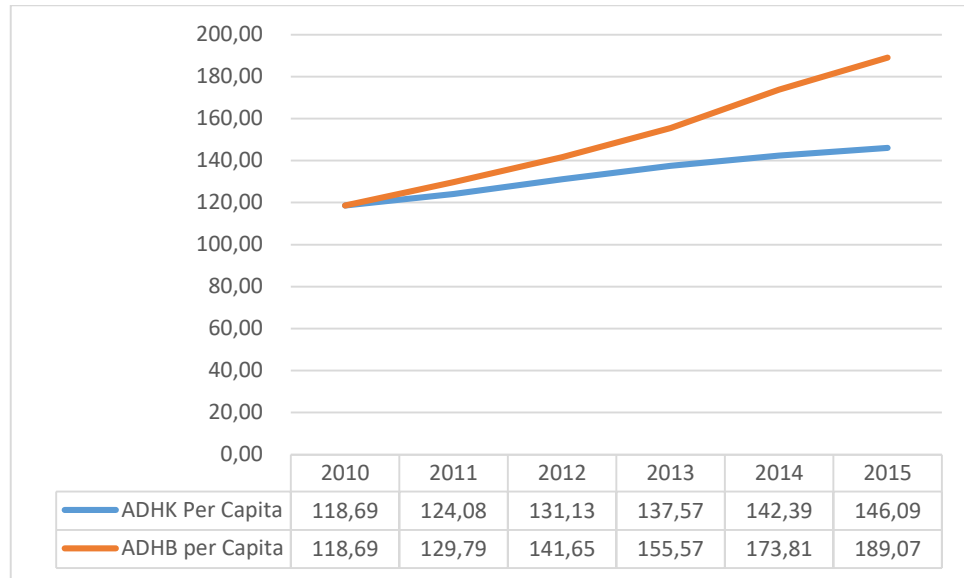
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada Gambar 2.5 di atas terlihat bahwa 2010-2013, inflasi Cilegon cenderung lebih rendah dari inflasi nasional dan Provinsi Banten. Namun 2014 inflasi cilegon lebih tinggi dari nasional, kondisi tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM bersubsidi pada November 2014 yang merupakan kebijakan reformasi subsidi energi yang dilakukan pemerintah dan memberikan dampak cukup signifikan bagi peningkatan inflasi di Kota Cilegon, sedangkan pada tahun 2015 inflasi mengalami penurunan diredam oleh penurunan bahan bakar minyak pada kelompok Administered Prices. Meskipun demikian, inflasi dari kelompok inflasi inti masih meningkat dengan kenaikan biaya tempat tinggal, tarif rumah sakit, dan makanan jadi.

Secara spasial, Inflasi Kota Cilegon terendah dari kota sampel inflasi lainnya yaitu Kota Tangerang dan Kota Serang. Inflasi Kota Serang pada triwulan ini sebesar 4,67% (yoy), sementara Kota Tangerang sebesar 4,28% (yoy).

2.2.1.3 PDRB ADHB per Kapita

Ukuran lainnya untuk mengukur kesejahteraan adalah dengan pendapatan per kapita yang merupakan *proxy* untuk menilai Kemampuan masyarakat dalam mengonsumsi produk barang/jasa. Namun demikian ukuran tersebut bukanlah ukuran mutlak yang dapat menggambarkan seutuhnya kondisi riil di masyarakat. Berdasarkan data yang didapatkan, PDRB per satu orang penduduk senantiasa meningkat tiap tahunnya sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2.13 PDRB Per Kapita

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

PDRB per-kapita Kota Cilegon menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seperti yang disajikan pada gambar 2.13 seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kota Cilegon rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Tabel 2.17 PDRB dan PDRB Per Kapita

Nilai PDRB (miliar rupiah)	2010	2011	2012	2013*	2014	2015
- ADHB	44.676,53	49.827,66	55.414,14	61.965,45	70.446,49	77.918,92
- ADHK 2010	44.676,53	47.633,32	51.300,21	54.796,10	57.711,05	60.204,04
PDRB perkapita (ribu rupiah)						
- ADHB	118,69	129,79	141,65	155,57	173,81	189,07
- ADHK 2010	118,69	124,08	131,13	137,57	142,39	146,09
Pertumbuhan						
PDRB ADHK perkapita	2,66	4,54	5,69	4,91	3,50	2,60

Selama kurun waktu 2010-2015 rata-rata pertumbuhan PDRB per-kapita ± 4 persen. Tahun 2011, PDRB perkapita mampu tumbuh sebesar 4,54 persen dibandingkan dengan tahun 2010 yang tumbuh sebesar 2,66 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012, yang mampu tumbuh sebesar 5,69 persen. Sedangkan pertumbuhan perkapita tahun 2015 kembali mengalami perlambatan dengan nilai

pertumbuhan sebesar 2,60 persen dibanding tahun sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 3,50 persen.

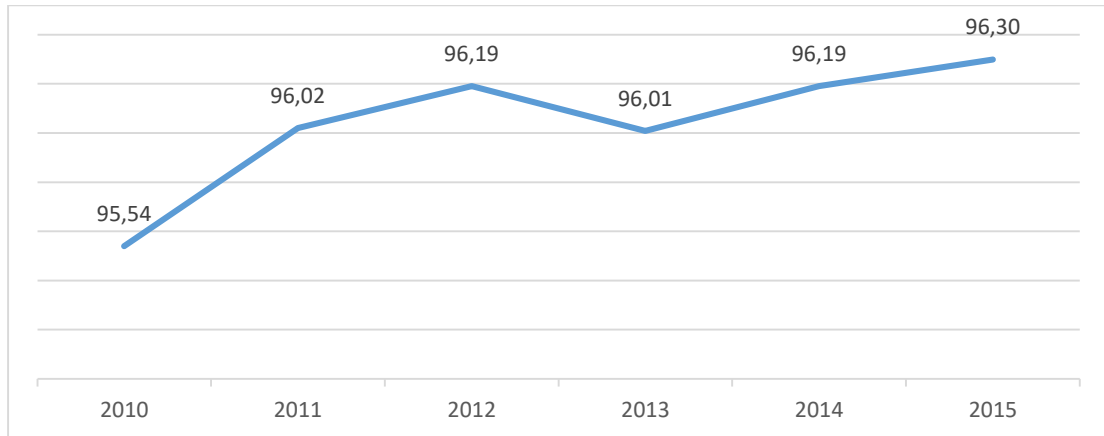
Gap antara PDRB per kapita ADHK dan ADHB dipengaruhi oleh faktor harga dimana pada ADHK menggunakan tahun dasar 2010. Namun secara substansi Untuk mengukur secara nyata kondisi distribusi pendapatan diperlukan data *gini ratio* yang sementara ini belum didapatkan, sehingga gambaran ketimpangan di Kota Cilegon saat ini belum terlihat secara pasti.

2.2.1.4 Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, Antara lain : tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, oleh karenanya masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

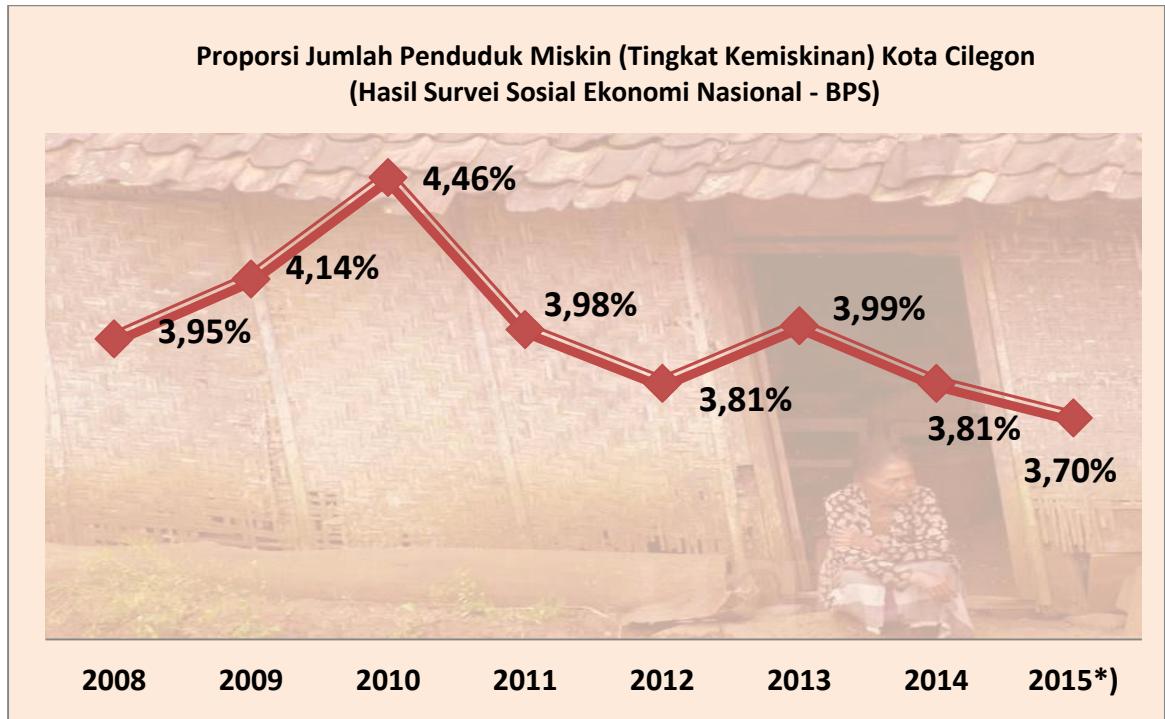
Penduduk kota cilegon diatas garis kemiskinan terlihat pada gambar berikut. Dimana angka tersebut diperoleh dari data kemiskinan Makro yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).



Gambar 2.14 Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah

Secara umum, angka kemiskinan Kota Cilegon sejak 2008-2015 terus menurun. Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah Kota Cilegon untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat. Kendati belum bisa dikatakan maksimal, akan tetapi tren penurunan menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah Kota Cilegon telah memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan pemenuhan hak-hak dasar mereka.



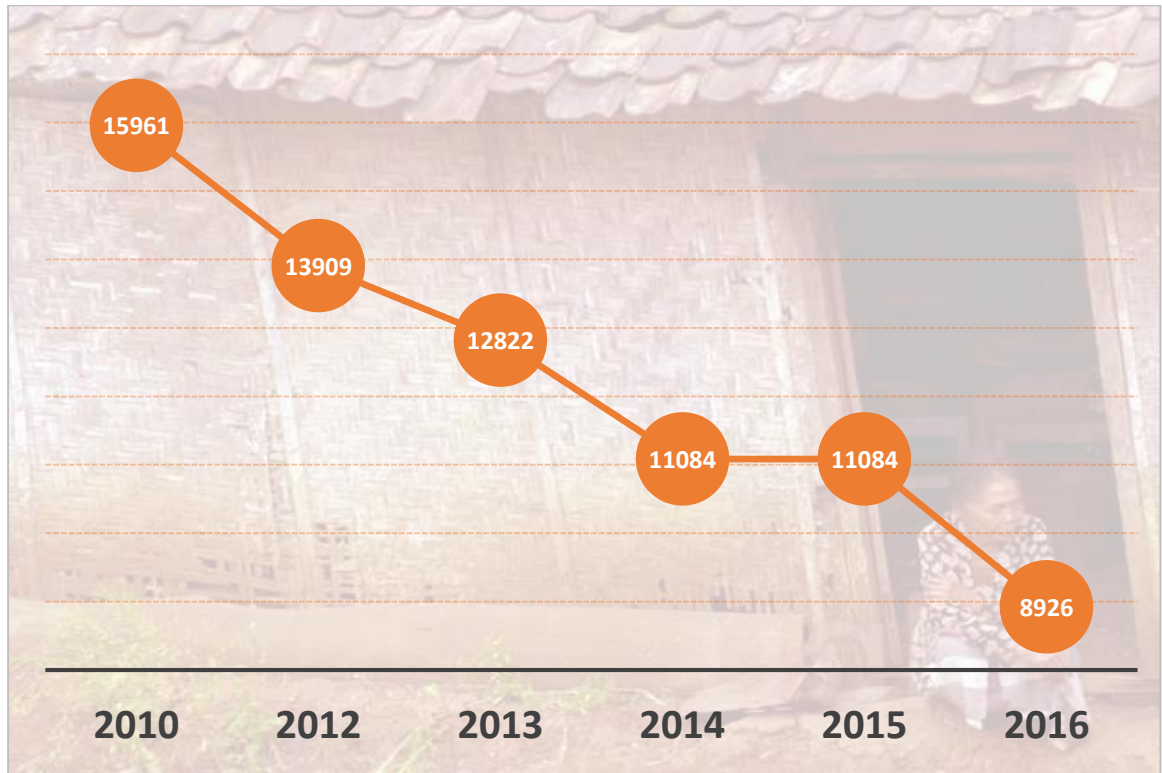
Gambar 2.15 Dinamika Proporsi Jumlah Penduduk Miskin (Tingkat Kemiskinan) Kota Cilegon

*) Angka proyeksi (Bappeda Cilegon)

Sumber : Diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas, BPS)

Namun demikian data tersebut merupakan kemiskinan makro yang diukur hanya sebatas kemampuan ekonomi seseorang (pendekatan moneter). Sementara itu dimensi kemiskinan sangat luas, dalam perjalanannya, program penanggulangan kemiskinan baik pusat dan daerah menggunakan data dari TNP2K yang terwujud pada jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011.

Pada hasil pendataan tersebut dapat diketahui karakteristik dari rumah tangga miskin, yaitu luas lantai rumah, jenis lantai rumah, jenis dinding rumah, fasilitas tempat buang air besar, sumber air minum, penerangan yang digunakan, bahan bakar yang digunakan, frekuensi makan dalam sehari, kebiasaan membeli daging/ayam/susu, kemampuan membeli pakaian, kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik, lapangan pekerjaan kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, dan kepemilikan aset. Adapun jumlah secara lengkap tersaji pada **gambar berikut**.



Gambar 2.16 Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kota Cilegon Tahun 2010-2015

Keterangan :

Tahun 2010 hingga Tahun 2012 merupakan hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) yang dilakukan oleh BPS dan TNP2K, tahun 2013 hingga 2014 pemutakhir data dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon (tahun 2015 tidak dilakukan pemutakhiran).

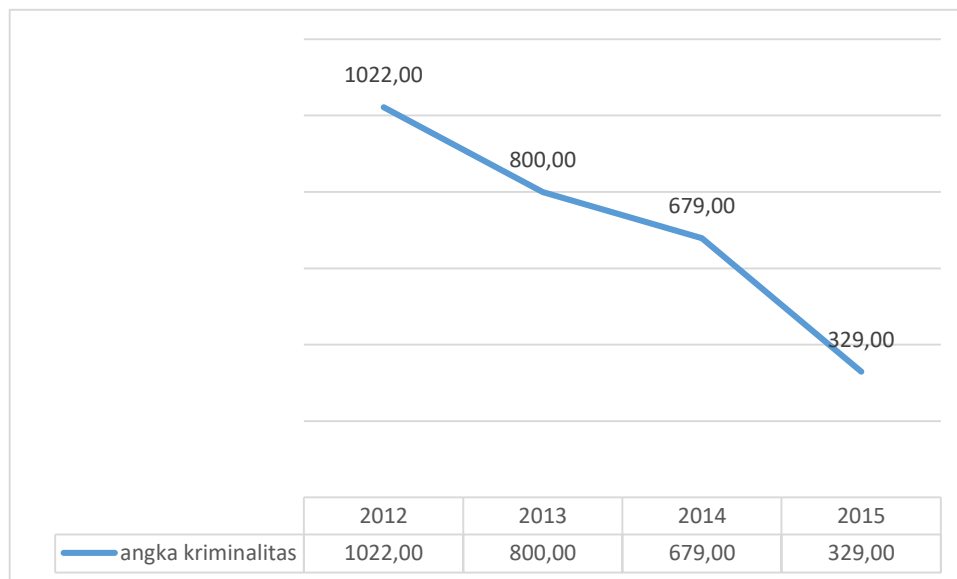
Tahun 2016 penentuan RTS mengalami perubahan metodologi dimana pengelolaan datanya dilakukan oleh PBDT Kementerian Sosial.

Pemerintah Kota Cilegon di awal masa RPJMD 2010-2015 mendapatkan tugas untuk menyisir 13.909 RTS. Dengan dinamika yang terjadi di lapangan, pemerintah Kota Cilegon melaksanakan proses verifikasi pada tahun 2013 guna menyisir RTS yang pindah, meninggal dan hal lainnya agar imlementasi program menjadi tepat sasaran, sehingga dalam hal ini pada tahun 2013 dan 2014 diperoleh jumlah RTS versi Kota Cilegon sebesar 12.822 dan 11.084. pada tahun 2015 pemerintah melakukan Pendataan Basis Data Terpadu (PBDT) yang kemudian dihasilkan data bahwa RTS sampai dengan desil 3 (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30% terendah) berjumlah 8.926.

Melihat data tersebut, dapat dikatakan jumlah kemiskinan yang direpresentasikan angkut RTS terlihat menurun.

2.2.1.5 Angka Kriminalitas yang tertangani

Kriminalitas merupakan permasalahan di Kota yang semakin berkembang. Hal tersebut dapat dipicu dengan kesenjangan yang semakin melebar diantara masyarakat. Kondisi yang terjadi di Kota Cilegon, sebagaimana yang tercatat melalui Badan Kesbang Linmas Kota Cilegon berkoordinasi dengan pihak terkait.



Gambar 2.17 Angka Kriminalitas

Melihat data tersebut, angka kriminalitas di Kota Cilegon terlihat menurun. Namun demikian, angka yang ditampilkan dapat saja belum menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan. Mengingat potensi kriminalitas di Kota Cilegon cukup besar, sebagai daerah perlintasan dan juga kawasan Kota yang sedang berkembang.

Harapan pemerintah daerah, seiring dengan tingkat kemiskinan yang rendah , serta meratanya pembangunan. Angka kriminalitas di Kota Cilegon diharapkan menurun dan menjadi kota yang aman dan tertib.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa indikator sosial, diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Ketenagakerjaan; Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Gambaran rincian terhadap fokus kesejahteraan sosial di Kota Cilegon, secara umum sebagai berikut :

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks gabungan dari tiga komponen 'penilai' kualitas sumber daya manusia. Jika ketiga komponen tersebut memiliki kualitas yang baik, maka secara otomatis sumber daya manusianya memiliki kualitas yang baik pula. Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan seberapa besar tingkat pencapaian dari pembangunan yang telah dilakukan selama ini dari bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nilai Indeks Pembangunan Manusia adalah rata-rata dari ketiga indeks (Indeks Angka Harapan Hidup, Indeks Tingkat Pendidikan dan Indeks Pendapatan/Daya Beli Penduduk):

(a.1) Indeks Angka Harapan Hidup (AHH)

Dari tahun ke tahun Angka Harapan Hidup Kota Cilegon mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, angka harapan hidup penduduk Kota Cilegon diasumsikan sebesar 66,15 artinya bayi yang dilahirkan pada tahun 2015 mempunyai peluang/harapan untuk hidup selama 66 tahun. Peningkatan angka Indeks Harapan Hidup tersebut menunjukkan tingkat kesehatan penduduk Kota Cilegon semakin baik dari tahun sebelumnya.

Pada tabel terlihat bahwa Indeks Angka Harapan Hidup selama dua tahun terakhir (2013-2015) terus menunjukkan peningkatan. Pembangunan bidang kesehatan di Kota Cilegon selama dua tahun mengalami kenaikan sebesar 0,51%.

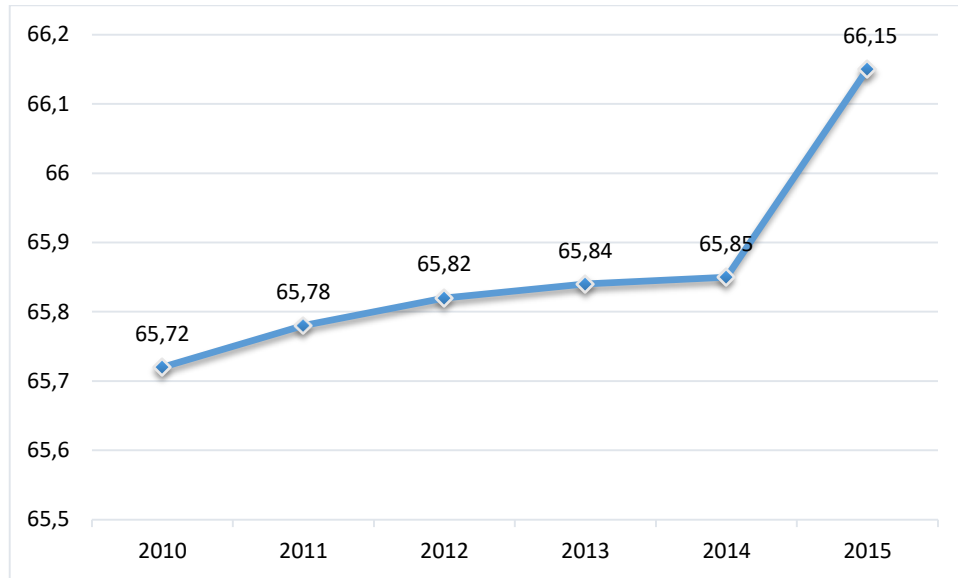
Tabel 2.18 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Cilegon

Tahun 2010 – 2015

Indikator	Satuan Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	65,72	65,78	65,82	65,84	65,85	66,15

Keterangan : *) Proyeksi sementara, Bappeda Cilegon

Sumber : Diolah dari Publikasi Inkesra Kota Cilegon Tahun 2014



Gambar 2.18 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Cilegon

Tahun 2010 – 2015

Keterangan :

*) 2015 : Proyeksi sementara, Bappeda Cilegon

Sumber : Diolah dari Publikasi Inkesra Kota Cilegon Tahun 2014

(b.1) Indeks Pendidikan

a) Harapan lama sekolah

Pada tahun 2015 harapan lama sekolah Kota Cilegon sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2014 angka harapan lama sekolah sebesar 13,07 tahun, maka tahun 2015 meningkat menjadi 13,10 tahun. Dengan kata lain di Kota Cilegon harapan lama sekolah mengalami peningkatan sebanyak 0,03 tahun.

b) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

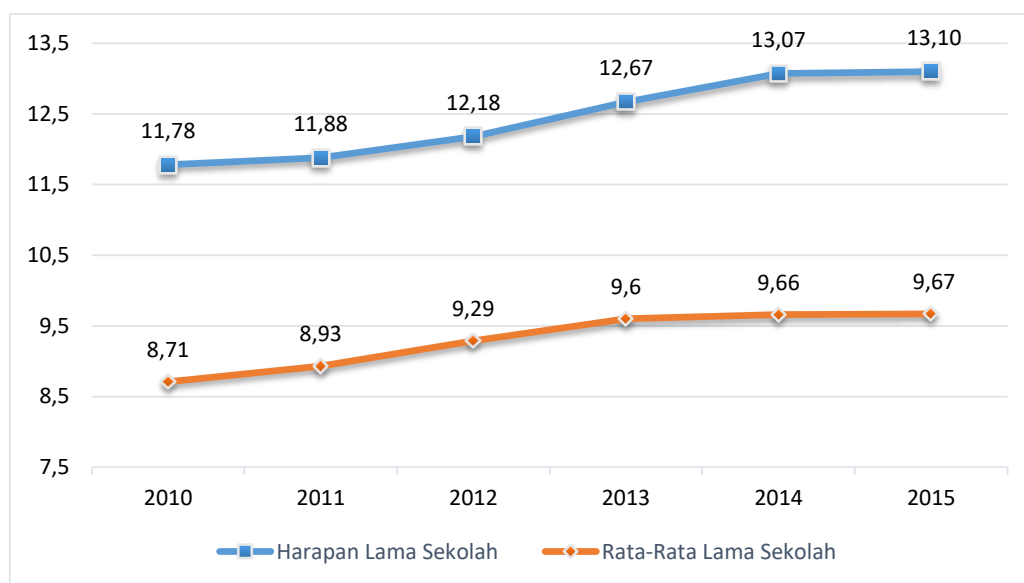
Perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk Kota Cilegon selama empat tahun terakhir tidak banyak mengalami perubahan. Pada tabel 2.19 terlihat rata-rata lama sekolah penduduk Kota Cilegon mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,2 poin per tahun sepanjang tahun 2010 sampai 2015. Pada tahun 2015 diasumsikan sebesar 9,67 tahun menunjukkan bahwa secara rata-rata lama sekolah penduduk Kota Cilegon telah mampu menyelesaikan pendidikan tingkat SMP.

Tabel 2.19 Perkembangan Harapan lama sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Cilegon Tahun 2010 – 2015

No.	Indikator	Satuan Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	11,78	11,88	12,18	12,67	13,07	13,10
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,71	8,93	9,29	9,6	9,66	9,67

Keterangan : *) Proyeksi sementara, Bappeda Cilegon

Sumber : Diolah dari Publikasi Inkesra Kota Cilegon Tahun 2014



Gambar 2.19 Grafik Perkembangan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah Kota Cilegon Tahun 2010-2015

Keterangan : *) Proyeksi sementara, Bappeda Cilegon

Sumber : Diolah dari Publikasi Inkesra Kota Cilegon Tahun 2014

(c.1) Indeks Tingkat Daya Beli

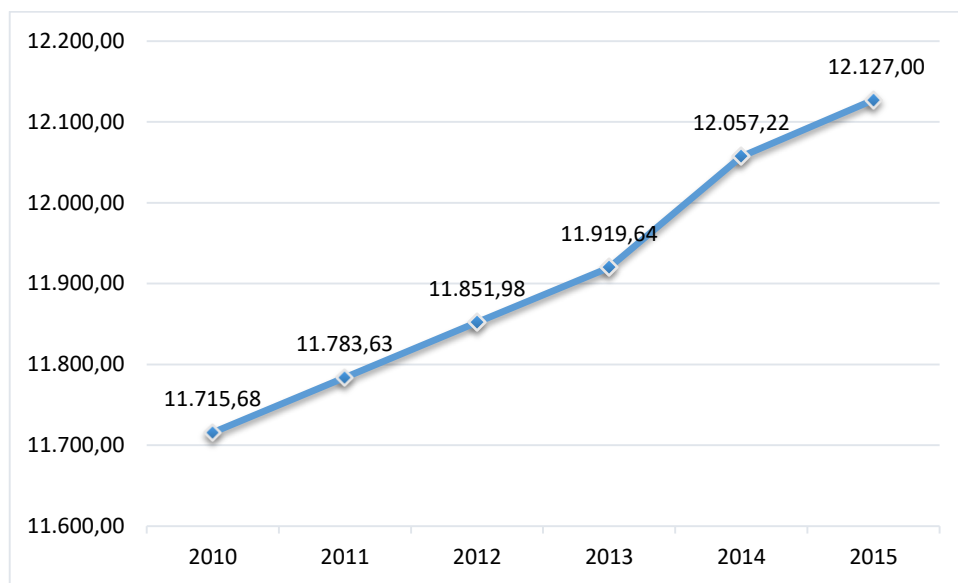
Besarnya Daya Beli menunjukkan tingkat kemampuan konsumsi penduduk. Semakin besar daya beli, mengindikasikan kesejahteraan penduduk semakin membaik. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari besarnya Indeks Daya Beli Penduduk. Tahun 2015, tingkat Daya Beli Penduduk Kota Cilegon diekspektasikan sebesar Rp 12.127,- per tahun per kapita.

Tabel 2.20 Perkembangan Daya Beli Penduduk Kota Cilegon
Tahun 2010 – 2015

Indikator	Satuan Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Daya Beli	Ribu rupiah/tahun	11.715,68	11.783,63	11.851,98	11.919,64	12.057,22	12.127,00

Keterangan : *) Proyeksi sementara, Bappeda Cilegon

Sumber : Diolah dari Publikasi Inkesra Kota Cilegon 2015



Gambar 2.20 Grafik Perkembangan Daya Beli Penduduk Kota Cilegon
Tahun 2010-2015 (per kapita per tahun)

Keterangan : *) Proyeksi sementara, Bappeda Cilegon

Sumber : Diolah dari Publikasi Inkesra Kota Cilegon 2015

Jika ketiga komponen tersebut memiliki kualitas yang baik, maka secara otomatis sumber daya manusianya memiliki kualitas yang baik pula. Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan seberapa besar tingkat pencapaian dari pembangunan yang telah dilakukan selama ini dari bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nilai Indeks Pembangunan Manusia adalah rata-rata dari ketiga indeks (Indeks Angka Harapan Hidup, Indeks Tingkat Pendidikan dan Indeks Pendapatan/Daya Beli Penduduk).

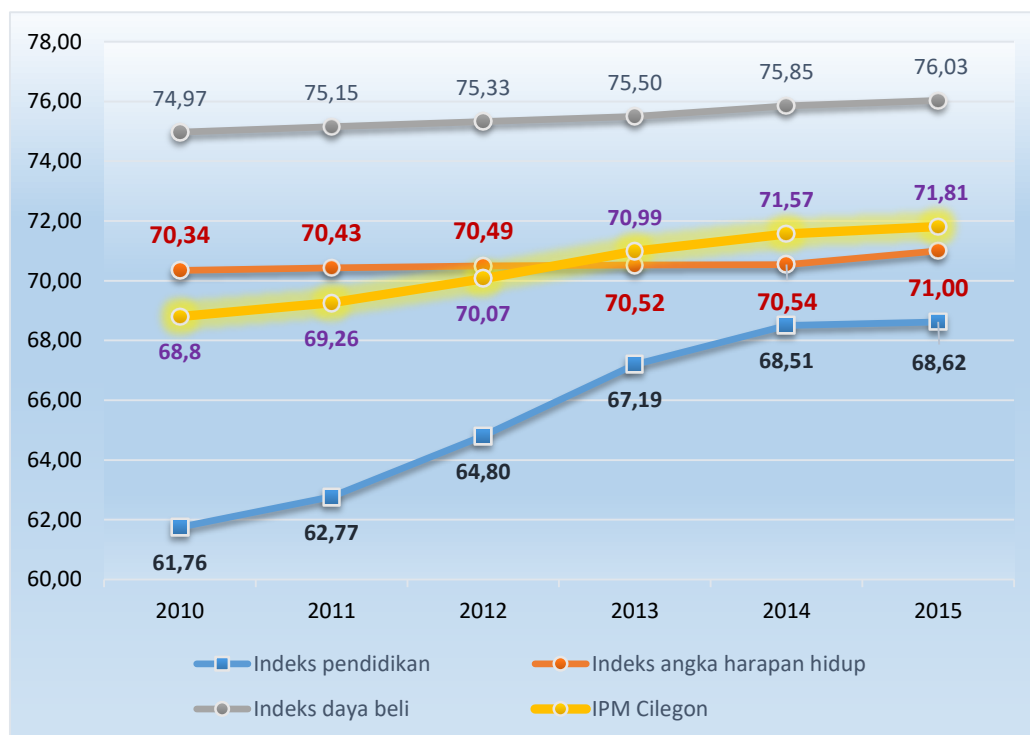
Tabel 2.21 Perkembangan Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon Tahun 2010 – 2015

Indikator / variabel	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Harapan Hidup	65,72	65,78	65,82	65,84	65,85	66,15
Indeks angka harapan hidup	70,34	70,43	70,49	70,52	70,54	71,00
Harapan Lama Sekolah	11,78	11,88	12,18	12,67	13,07	13,10
Rata-Rata Lama Sekolah	8,71	8,93	9,29	9,6	9,66	9,67
Indeks pendidikan	61,76	62,77	64,80	67,19	68,51	68,62
Daya Beli	11.715,68	11.783,63	11.851,98	11.919,64	12.057,22	12.127,00
Indeks daya beli	74,97	75,15	75,33	75,50	75,85	76,03
IPM Cilegon	68,8	69,26	70,07	70,99	71,57	71,81
IPM Banten	67,54	68,22	68,92	69,47	69,89	70,27

Keterangan :

*) Proyeksi sementara, Bappeda Cilegon

Sumber : Diolah dari Publikasi Inkesra Kota Cilegon Tahun 2015



Gambar 2.21 Perkembangan IPM Kota Cilegon beserta indeks Kompositnya (Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli)

Keterangan :

*) 2015 : Proyeksi sementara, Bappeda Cilegon

Sumber : Diolah dari Publikasi Inkesra Kota Cilegon Tahun 2014

Sejak 2014, struktur IPM mengalami perubahan dengan menghilangkan indikator Angka Melek Huruf yang digantikan dengan indikator Harapan Lama Sekolah pada indeks pendidikan, dan juga adanya penyesuaian standar hidup layak untuk menghitung daya beli. Oleh karenanya, nilai IPM mengalami perubahan skala dimana metode IPM terbaru menghasilkan nilai indeks yang lebih rendah dibandingkan metode sebelumnya.

Capaian IPM Kota Cilegon selalu membaik dalam 6 tahun terakhir, terutama yang paling signifikan adalah dari aspek pendidikan. Indeks pendidikan di Kota Cilegon mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dibandingkan dengan aspek lainnya, terutama dikarenakan berbagai intervensi pemerintah yang sangat signifikan untuk mendorong cakupan dan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat seperti sekolah gratis hingga tingkat SMA, beasiswa untuk RTS, dan lain sebagainya.

2.2.2.2 Ketenagakerjaan

Komposisi tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha memberikan gambaran sektor-sektor yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan dan mampu menyerap tenaga kerja optimal di suatu wilayah. Hal ini sangat berguna untuk perencanaan program ketenagakerjaan agar lebih terarah, sesuai dengan kondisi geografis maupun sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.

Tabel 2.22 Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja berdasarkan Jenis Lapangan Usaha di Kota Cilegon Tahun 2010 – 2015

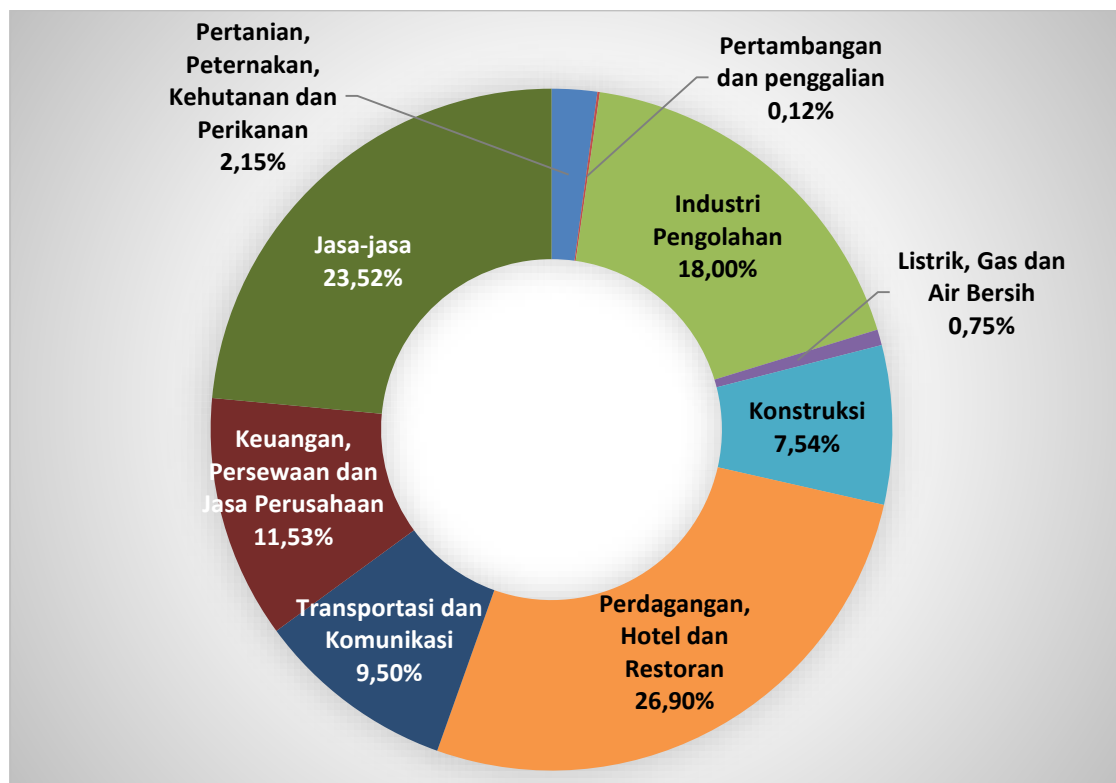
Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015 *)
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	4,25 %	5,12 %	4,62 %	3,25 %	2,27 %	2,15 %
Pertambangan dan penggalan	1,14 %	0,93 %	0,4 %	0,82 %	0,22 %	0,12 %
Industri Pengolahan	23,78 %	16,16 %	18,9 %	14,02 %	22,92 %	18,00 %
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,68 %	0,21 %	0,4 %	0,83 %	0,68 %	0,75 %
Konstruksi	9,32 %	7,94 %	8,86 %	9,47 %	6,94 %	7,54 %
Perdagangan, Hotel dan Restoran	26,9 %	30,22 %	30,24 %	25,21 %	27,54 %	26,90 %
Transportasi dan Komunikasi	11,99 %	10,03 %	8,83 %	12,96 %	8,82 %	9,50 %

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015 *)
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,27 %	6,85 %	5,69 %	12,79 %	7,99 %	11,53 %
Jasa-jasa	17,67 %	22,54 %	22,07 %	20,66 %	22,63 %	23,53 %

*) Angka proyeksi sementara, Bappeda Cilegon

Sumber : Diolah dari publikasi Cilegon Dalam Angka 2010-2015

Perkembangan struktur ketenagakerjaan dewasa ini lebih pada sektor perdagangan, industry dan jasa mengingat misi pembangunan Kota Cilegon adalah menjadi kota industry, perdagangan dan jasa. Dari hasil pendataan yang dilakukan di Kota Cilegon dapat dilihat bahwa ketiga sektor ini mampu menyerap tenaga kerja paling dominan. Banyaknya penduduk usia 15 tahun keatas yang terserap ke dalam sektor perdagangan 25,21%, jasa-jasa sebanyak 20,66%, dan industry sebanyak 14,02%. Kondisi geografis Kota Cilegon yang bukan merupakan daerah potensi pertanian, membuat sektor pertanian hanya mampu menyerap sekitar 3,25% tenaga kerja.



Gambar 2.22 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Keterangan : Hasil proyeksi dari data 2010-2014, Bappeda Cilegon
Sumber : Diolah dari Cilegon Dalam Angka, 2010-2015

Pada Tahun 2010 lalu, kondisi ketenagakerjaan di Kota Cilegon didominasi oleh tenaga kerja yang mengisi lapangan usaha di sektor perdagangan/hotel/restoran dan Industri pengolahan, namun pada tahun 2011, dominasi tenaga kerja di sektor industri pengolahan beralih ke sektor perdagangan dan sektor jasa. Sehingga di Kota Cilegon pada tahun 2011, banyak tenaga kerja di sektor industri pengolahan beralih ke sektor perdagangan dan juga sektor jasa. Namun tren tersebut berubah kembali pada tahun 2015 karena sektor industri kembali banyak menyerap tenaga kerja (meningkat), di sisi lain jumlah tenaga kerja di sektor perdagangan juga meningkat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran masih merupakan *core bussiness* dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Cilegon.

(a.2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Isu penting yang perlu menjadi perhatian adalah isu pengangguran. Konsep penganggur yang digunakan adalah individu berusia produktif yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dan pada waktu yang bersamaan mereka tidak bekerja (*jobless*).

Permasalahan ketenagakerjaan yang ada saat ini terjadi akibat dari ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan kesempatan kerja yang ada. Ketidakseimbangan tersebut berakibat terhadap penyerapan angkatan kerja relative terbatas dan tidak proporsional, sehingga tingkat pengangguran masih tinggi. Angka tingkat pengangguran ini dinyatakan dalam persentase jumlah penduduk yang menganggur terhadap total angkatan kerja, dengan istilah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tabel 2.23 Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja berdasarkan Jenis Lapangan Usaha di Kota Cilegon Tahun 2010 – 2015

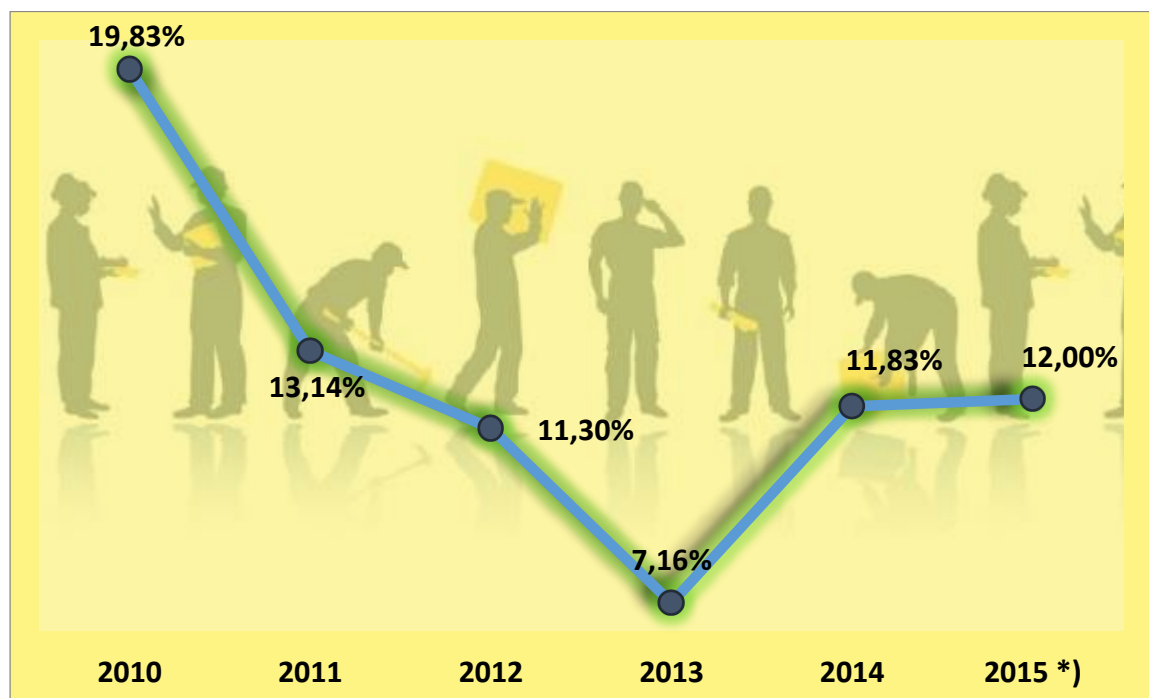
JENIS KEGIATAN UTAMA	2010	2011	2012	2013	2014	2015 *)
1. Angkatan kerja	65,60	70,00	65,74	60,23	63,76	62,96
a. Bekerja	52,59	60,80	58,31	55,92	56,22	55,40
b. Menganggur	13,01	9,20	7,43	4,31	7,54	7,56
2. Bukan angkatan kerja	34,40	30,00	34,26	39,77	36,24	37,04

JENIS KEGIATAN UTAMA	2010	2011	2012	2013	2014	2015 *)
a. Sekolah	10,52	8,52	10,17	10,32	9,01	9,53
b. Mengurus rumah tangga	20,28	18,20	20,88	26,12	22,91	23,86
c. Lainnya	3,60	3,28	3,21	3,34	4,32	3,65
Jumlah	100	100	100	100	100	100
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,60	70,00	65,74	60,23	63,76	62,96
Tingkat Pengangguran Terbuka	19,83	13,14	11,30	7,16	11,83	12,00

*) Angka sementara

Sumber: Bappeda Cilegon, diolah dari Cilegon Dalam Angka

Proporsi Jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia produktif di Kota Cilegon dari tahun 2009 sampai tahun 2011 cenderung meningkat 5 % pertahun, namun dari 2012 hingga pada tahun 2015 cenderung menurun menjadi 62,96 %. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk usia produktif di Kota Cilegon memang masih memiliki proporsi yang cukup besar, sesuai dengan karakteristik piramida penduduk di Kota Cilegon, yaitu banyaknya peralihan penduduk usia muda (di bawah usia 14 tahun) berganti status menjadi usia produktif (lebih dari 15 tahun).



Gambar 2.23 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Cilegon Tahun 2010-2015 (dalam persen)

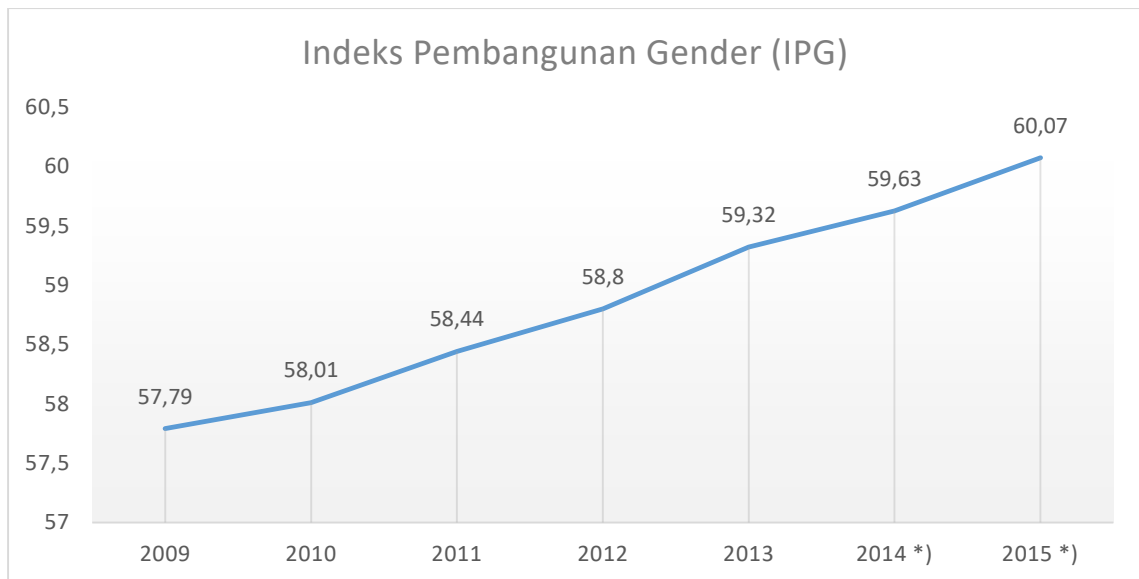
*) Angka sementara

Sumber : Bappeda Cilegon, diolah dari Cilegon Dalam Angka

Di tahun 2014 hingga 2015, terjadi peningkatan angka pengangguran terbuka, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti berhentinya proyek-proyek pembangunan industri yang tahun sebelumnya menyerap banyak tenaga kerja kontrak, serta adanya perampangan pegawai yang dilakukan oleh beberapa industri. Meningkatnya angka pengangguran di tahun 2015, meskipun tidak signifikan, menunjukkan bahwa masalah pengangguran masih merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Cilegon ke depan, yang memerlukan adanya sinergitas antara kebutuhan tenaga kerja industri dengan ketersediaan SDM masyarakat lokal yang memiliki kompetensi yang relevan dengan *core business* industri-industri di Kota Cilegon.

2.2.2.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Persamaan status dan kedudukan merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki yang tidak hanya dijamin oleh perundang-undangan, tetapi juga dalam praktek kehidupan sehari-hari. Jaminan persamaan status dan kedudukan ini meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program-program peningkatan kapabilitas dasar. Program peningkatan kapabilitas dasar yang dimaksud mencakup berbagai pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan kemudahan akses ekonomi yang diberikan pemerintah kepada semua penduduk. Namun kenyataannya, implementasi pada kehidupan sehari-hari khususnya upaya peningkatan kapabilitas dasar penduduk perempuan belum sepenuhnya dapat diwujudkan karena masih kuatnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya yang patriarki. Untuk itu, diperlukan upaya lebih serius dan berkesinambungan dalam mewujudkan persamaan status dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan melalui berbagai program pembangunan seperti peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai proses pembangunan, penguatan peran masyarakat, dan peningkatan kualitas kelembagaan berbagai instansi pemerintah, organisasi perempuan dan lembaga-lembaga lainnya. Melalui upaya ini diharapkan peningkatan kapabilitas dasar perempuan akan dapat segera diwujudkan.



Gambar 2.24 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kota Cilegon Tahun 2009-2015

*) Angka proyeksi sementara, Bappeda Cilegon
Sumber : diolah dari Banten Dalam Angka

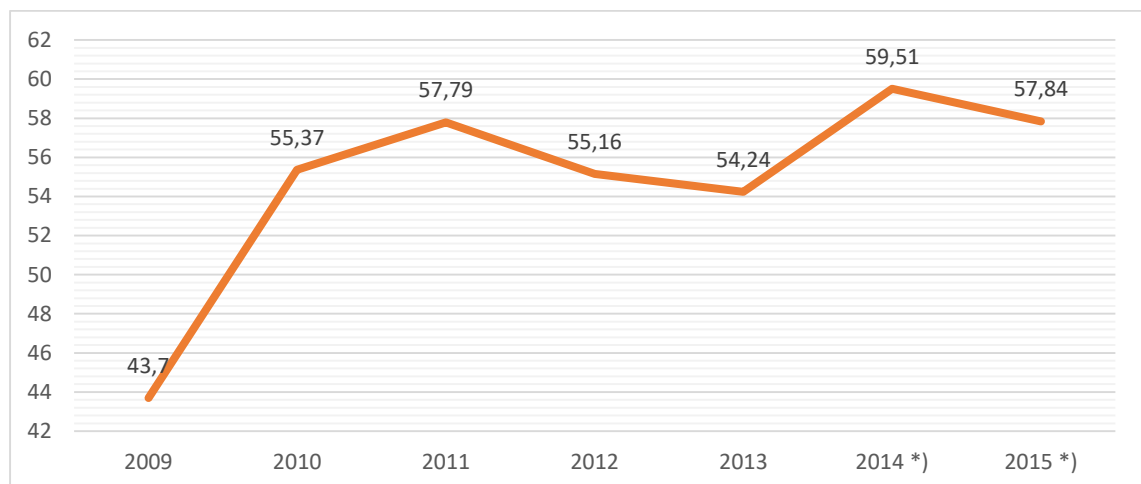
Linier terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), secara umum pencapaian pembangunan gender di Kota Cilegon dari tahun 2009 sampai 2015 memperlihatkan perkembangan yang semakin baik sebagaimana terlihat pada grafik perkembangan IPG selama kurun waktu 2009-2015 (Gambar 4.1). Peningkatan IPG selama kurun waktu 2009-2015 tersebut tentunya dipengaruhi oleh peningkatan beberapa komponen IPG yang juga merupakan komponen IPM yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks daya beli dengan mengkomparasikan penduduk perempuan dengan penduduk laki-laki. Hal ini berarti bahwa kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam dimensi kesehatan, pendidikan maupun hidup layak selama kurun waktu 2009-2015 terus mengalami peningkatan seiring dengan pelaksanaan program-program pembangunan di Kota Cilegon yang berbasis gender.

2.2.2.4 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Kesetaraan dan keadilan gender sering dimaknai sebagai suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis, tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan. Makna dari kesetaraan gender bukan

hanya persoalan pencapaian persamaan status dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga dapat bermakna sebagai persoalan pencapaian persamaan peranan.

Maksud dari persamaan peran disini adalah perempuan memiliki peranan yang proposional dalam hal: proses pengambilan keputusan di bidang politik, penyelenggaraan pemerintahan, dan kehidupan ekonomi, khususnya kontribusi perempuan dalam pendapatan rumah tangga. Unsur-unsur persamaan peranan tersebut merupakan komponen/indikator yang tercakup dalam pengukuran IDG. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, IDG merupakan ukuran komposit yang dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi.



Gambar 2.25 Grafik perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Cilegon Tahun 2009-2015

*) Angka proyeksi sementara, Bappeda Cilegon
Sumber : diolah dari Banten Dalam Angka

Dalam rentang waktu 2009 hingga 2015, perkembangan indeks pemberdayaan gender Kota Cilegon pada periode 2011-2013 sempat mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut. Penurunan angka indeks pemberdayaan gender selama periode 2011-2013 bisa diartikan bahwa peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi semakin berkurang. Dengan demikian pemberdayaan dalam konteks ini, perempuan belum bisa diposisikan memiliki peranan yang strategis. Meskipun demikian, pada tahun 2014 dan 2015.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Kondisi lain dalam fokus kesejahteraan sosial adalah usaha meningkatkan peranan masyarakat dalam melestarikan seni budaya dan olahraga. Perkembangan bidang keolahragaan meski tidak terlalu signifikan tetapi tetap menunjukkan pertumbuhan terlihat dari jumlah organisasi olahraga yang bertambah. Sampai dengan tahun 2015, jumlah klub olahraga di Kota Cilegon mencapai 152 klub dan 38 organisasi olahraga yang ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana olahraga sebanyak 13 gedung olahraga, baik milik swasta maupun pemerintah. Di sisi lain, animo masyarakat untuk berolahraga juga meningkat terlihat dari event-event olahraga bersama yang sering digelar pemerintah kota, seperti acara Car Free Day (CFD) yang rutin tiap akhir pekan, juga acara bersepeda (gowes) maupun jalan sehat bersama Walikota. Disamping itu juga dalam rangka memasyarakatkan olahraga Pemerintah Kota Cilegon mempunyai komitmen membangun sarana prasarana olah raga seperti Gedung Sport Center, yang dapat dijadikan icon daerah Kota Cilegon sebagai pusat pertumbuhan yang berdaya saing.

Dari segi pelestarian budaya, Kondisi makro bidang kesenian dan budaya sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang cukup baik terlihat dari pertumbuhan jumlah sanggar seni budaya yang meningkat, serta Kota Cilegon saat ini memiliki satu gedung kesenian, serta penyelenggaraan even kesenian yang diselenggarakan dua kali dalam setahun. Di sisi lain, jumlah komunitas atau grup kesenian di Kota Cilegon berdasarkan hasil inventarisir Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cilegon mencapai 71 komunitas atau grup kesenian di berbagai cabang budaya/kesenian.

Tabel 2.24 Jumlah Kebudayaan serta Pemuda dan olahraga Kota Cilegon

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fokus Seni Budaya dan Olahraga								
1.	Kebudayaan							
1.1	Jumlah Grup Kesenian	grup	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00
1.2	Jumlah Gedung	unit	N/A	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.	Pemuda dan Olahraga							

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.1	Jumlah klub olahraga	klub	75	75	76	76	152	152
2.2	Jumlah gedung olahraga	unit	1	1	1	1	1	1

Sumber : SIPD Kota Cilegon

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari SKPD di Kota Cilegon.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Tabel 2.25 Aspek Pelayanan Umum Urusan Wajib Kota Cilegon Tahun 2011-2015

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Fokus Layanan Urusan Wajib							
1.	Pendidikan						
1.1	Pendidikan Dasar:						
1.1.1	Angka partisipasi sekolah	%	98.83	101.20	99.79		90.50
1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	Sekolah per penduduk usia sekolah	260.00	261.04	262.69	265.24	268.97
1.1.3	Rasio guru/murid (SD)	siswa per guru	44.00	42.00	40.00	38.00	36.00
1.1.4	Rasio guru/murid per kelas rata-rata (Pendidikan Dasar)	siswa per guru	44.00	42.00	40.00	38.00	36.00
1.2	Pendidikan Menengah :						
1.2.1	Angka partisipasi sekolah	%	66.67	68.40	72.63	78.19	85.60
1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	sekolah per penduduk	551.14	551.12	550.88	549.82	547.67
1.2.3	Rasio Guru Terhadap Murid (SMA)	siswa per guru	44.00	42.00	40.00	38.00	36.00
1.2.4	Rasio guru/murid per kelas rata-rata (Menengah)	siswa per guru	44.00	42.00	40.00	38.00	36.00



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1.2.5	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	98.73	98.77	98.87	97.45	100.00
1.3	Fasilitas Pendidikan :						
1.3.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.3.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.4	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :						
1.4.1	Angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	29.10	50.56	61.84	54.35	57.67
1.5	Angka Putus Sekolah						
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0.04	0.02	0.04	0.00	0.02
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MT	%	0.03	0.09	0.19	0.06	0.11
1.5.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	0.50	0.46	0.11	0.06	0.06
1.6	Angka Kelulusan						
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	97.60	99.62	100.00	100.00	100.00
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	81.90	85.40	99.97	100.00	100.00
1.6.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	81.81	88.88	99.97	100.00	100.00
1.6.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	112.81	102.16	126.02	105.19	100.00
1.6.5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	125.34	99.75	105.54	103.94	100.00
1.6.6	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	72.37	73.21	72.43	86.05	89.71
2.	Kesehatan						
2.1	Rasio posyandu per satuan balita	Per 100 Balita	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1 : penduduk	4218.71	4298.93	4376.97	4453.88	4528.64
2.3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	2 : penduduk	76780.60 00	78240.60 00	79660.80 00	81060.60 00	82421.2 000

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
2.4	Rasio dokter per satuan penduduk	3 : penduduk	1000.00	1000.00	1000.00	1098.38	578.80
2.5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	4 : penduduk	143.73	146.46	149.12	151.74	154.29
2.6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	92.00	80.00	59.69	72.43	77.29
2.7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	95.00	98.00	90.21	95.81	94.59
2.8	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100.00	100.00	97.67	97.67	100.00
2.9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	91.00	89.16	83.05	72.21	112.68
2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.12	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	89.00	79.95	100.00	100.00	100.00
2.13	Cakupan kunjungan bayi	%	94.50	108.00	94.50	92.30	82.16
2.14	Cakupan puskesmas	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.15	Cakupan pembantu puskesmas	%	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
3.	Pekerjaan Umum						
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	85.13	87.34	88.52	92.58	83.84
3.2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	68.08	60.70	60.65	55.88	87.84
3.3	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	penduduk per m2	35	36	36	37	37
3.4	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	per 1000 penduduk	0.19	1.30	1.35	1.32	3.94

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
3.5	Rasio rumah layak huni	1 : Penduduk	4.64	4.73	4.21	4.23	4.22
3.6	Rasio permukiman layak huni	%	99.80	99.88	99.87	99.89	99.95
3.7	Panjang jalan dilalui Roda 4	%	348.31	348.31	348.31	348.31	348.31
3.8	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3.9	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	49.37	68.34	70.82	79.81	81.52
3.10	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	7.53	7.53	7.53	7.53	7.53
3.11	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	56.18	56.18	56.18	56.18	56.18
3.12	Luas irigasi kota dalam kondisi baik	%	56.18	56.18	56.18	56.18	56.18
3.13	Lingkungan Pemukiman	%	0.20	0.15	0.13	0.11	0.11
4.	Perumahan						
4.1	Rumah tangga pengguna air bersih	%	91.49	87.37	86.28	79.91	94.51
4.2	Rumah tangga pengguna listrik	%	99.73	100.00	100.00	100.00	100.00
4.3	Rumah tangga ber-Sanitasi	%	68.08	60.70	60.65	55.88	87.84
4.4	Lingkungan pemukiman kumuh	%	0.20	0.19	0.13	0.11	0.05
4.5	Rumah layak huni	%	87.45	87.45	98.45	99.12	100.00
5.	Penataan Ruang						
5.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	21.18	27.63	27.63	27.63	27.63
5.2	Jumlah bangunan ber – IMB	unit	3291.00	4452.00	4771.00	5508.00	6525.00



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
5.3	Ruang publik yang berubah peruntukannya	unit	n/a	n/a	n/a	2.00	0.00
6.	Rencana Pembangunan						
6.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada
6.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada
6.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada
6.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada
7.	Perhubungan						
7.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum				869955.0 0	998268.0 0	1145506 .38
7.2	Rasio ijin trayek	1 trayek : ... Penduduk	302	308	314	319	324
7.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		22.00	22.00	24.00	24.00	24.00
7.4	Angkutan darat		1270.00	1270.00	1270.00	1270.00	1270.00
7.5	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7.6	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	15'	15'	15'	15'	20'
7.7	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Ada	Perda	Perda	Perda	Perda	Perda
7.8	Pemasangan Rambu-rambu	Unit	900.00	940.00	940.00	940.00	940.00
8.	Lingkungan Hidup						
8.1	Persentase penanganan sampah	Persen	49.08	49.70	51.64	51.98	56.03
8.2	Persentase Penduduk berakses airminum	Persen	22.76	13.44	11.27	15.00	20.00
8.3	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.		66.67	66.67	100.00	100.00	100.00



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
8.4	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	per 1000 penduduk	0.19	1.30	1.35	1.32	3.94
8.5	Penegakan hukum lingkungan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
9.	Pertanahan						
9.1	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	98.69	98.69	98.69	98.69	99.03
9.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	Kasus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	Penyelesaian izin lokasi	%	100.00	100.00	100.00	81.82	100.00
10.	Penduduk dan catatan sipil						
10.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	Persen	88.17	96.99	76.14	43.86	83.35
10.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	<100	<100	<100	<100	<100
10.3	Rasio pasangan berakte nikah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
10.4	Kepemilikan KTP	Persen	88.17	96.99	76.14	43.86	83.35
10.5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	per 1000 penduduk	392.80	399.80	399.31	358.96	351.91
10.6	Ketersediaan database kependudukan skala kota	Ada	ada	ada	ada	ada	ada
10.7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ada	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
11.	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak						
11.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	58.17	58.17	52.64	55	49.40
11.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	52.37	46.65	37.18	42.57	42.57
11.3	Rasio KDRT	Persen	n/a	0.03	0.03	0.03	0.01
11.4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	52.37	46.65	37.18	42.57	42.57
11.5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Kasus	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera						
12.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	1.58	1.53	1.48	1.64	1.57
12.2	Rasio akseptor KB	Persen	73.00	76.20	77.18	76.95	76.67
12.3	Cakupan peserta KB aktif	Persen	73.00	76.20	77.18	76.95	76.67
12.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	18.57	15.69	15.15	16.37	<20
13.	Sosial						
13.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Unit	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
13.2	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Persen	2.63	3.61	10.12	29.04	37.96
13.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persen	2.63	3.61	10.12	29.04	37.96
14.	Ketenagakerjaan						
14.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persen	n/a	n/a	13.00	30.00	30.00
14.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	70.00	65.74	60.23	63.76	62.96
14.3	Pencari kerja yang ditempatkan	Persen	25.58	62.15	26.10	30.52	40.68
14.4	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	13.14	11.30	7.16	11.83	12.00
14.5	Keselamatan dan perlindungan	Persen	0.55	0.83	13.81	42.27	42.27
14.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
15.1	Persentase koperasi aktif	Persen	52.51	56.73	57.14	59.26	59.26
15.2	Usaha Mikro dan Kecil	Persen	99.26	99.44	99.26	99.26	99.26
16.	Penanaman Modal						
16.1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah (Juta)	157,613,610	159,081,688	161,739,355	165,043,607	179,085,607



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
16.2	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Rupiah (Juta)	150,282	0	0	3,016,13 8	4,508,0 00
17.	Kebudayaan						
17.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Keg	4.00	4.00	3.00	5.00	6.00
17.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
17.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	44.00	44.00	68.00	68.00	68.00
18.	Kepemudaan dan Olahraga						
18.1	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Gelanggang	1.30	1.28	0.13	0.13	0.13
18.2	Lapangan olahraga	per 100.000 penduduk	1.56	1.53	1.51	1.48	1.46
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
19.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Keg	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
19.2	Kegiatan pembinaan politik daerah	Keg	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
20.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	per 10.000 penduduk	3.64	3.45	2.65	4.29	3.87
20.2	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	per 10.000 penduduk	407.66	400.05	392.92	386.13	379.76
20.3	Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan	1 kel : ... Pos	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
20.4	Pertumbuhan ekonomi	Persen	6.62	7.70	6.81	5.32	4.32
20.5	Kemiskinan	Persen	3.98	3.81	3.99	3.78	3.69
20.6	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	Ada/Tidak	ada	ada	ada	ada	ada
20.7	Penegakan PERDA	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20.8	Cakupan patroli petugas Satpol PP	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
20.9	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20.10	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota	Persen	0.41	0.40	0.39	0.39	0.38
20.11	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20.12	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	n/a	n/a	50.00	92.73	93.10
20.13	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20.14	Sistim Informasi Manajemen Pemda	sistem	3.00	15.00	15.00	15.00	30.00
20.15	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
21.	Ketahanan Pangan						
21.1	Regulasi ketahanan pangan	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	ada
22.	Pemberdayaan Masyarakat Desa						
22.1	PKK aktif	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
22.2	Posyandu aktif	Persen	40.78	40.44	60.00	60.00	60.00
23.	Statistik						
23.1	Buku "kota dalam angka"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23.2	Buku "PDRB kota"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
24.	Kearsipan						
24.1	Pengelolaan arsip secara baku	Persen	60.63	65.35	75.00	79.69	82.17
24.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persen			2.00	2.00	1.00
25.	Komunikasi dan Informatika						
25.1	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Buah	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
25.2	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Siar	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
25.3	Web site milik pemerintah daerah	Buah	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
25.4	Pameran/expo	Kali	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
26.	Perpustakaan						
26.1	Jumlah perpustakaan	Unit	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00
26.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	15.52	17.74	19.02	20.91	23.01
26.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	64.76	55.00	44.99	45.38	46.88

Sumber : SIPD Kota Cilegon

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Tabel 2.26 Aspek Pelayanan Umum Urusan Pilihan Kota Cilegon Tahun 2011-2015

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Fokus Layanan Urusan Pilihan							
1.	Pertanian						
1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton/hektar	5.28	5.38	5.16	6.10	7.51
1.2	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	0.29	0.28	0.26	0.25	0.26
1.3	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persen	0.29	0.28	0.26	0.25	0.26
1.4	Cakupan bina kelompok petani	kelompok	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.	Energi dan Sumber Daya Mineral						
2.1	Penanganan Pertambangan tanpa ijin	Persen	0.00	86.67	0.00	79.00	100.00
2.2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Persen	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04
3.	Pariwisata						

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Fokus Layanan Urusan Pilihan							
3.1	Kunjungan wisata	kunjungan	75708.00	139931.0 0	182243.0 0	170793.0 0	200393. 00
3.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	2.78	2.71	2.55	2.68	2.60
4.	Kelautan dan Perikanan						
4.1	Kontribusi Produksi perikanan dan pertanian terhadap PDRB	Persen	0.30	0.29	0.29	0.29	0.31
4.2	Tingkat Konsumsi ikan	Kg/Kapita/ Tahun	21.40	22.20	22.30	24.20	25.00
4.3	Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
4.4	Produksi perikanan	ton	480.80	549.40	633.65	553.40	624.00
6.	Perdagangan						
6.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	11.26	11.57	11.02	10.73	10.96
6.2	Ekspor Bersih Perdagangan	US\$	- 6,177,85 8,509	- 9,064,24 0,299	- 9,064,24 0,299	- 10,705,5 14,298	- 10,705, 514,298
7.	Perindustrian						
7.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Persen	60.84	60.03	61.51	57.63	58.28
7.2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	Persen	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
7.3	Pertumbuhan Industri.	Persen	6.27	6.53	10.09	3.63	6.58

Sumber : SIPD Kota Cilegon

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

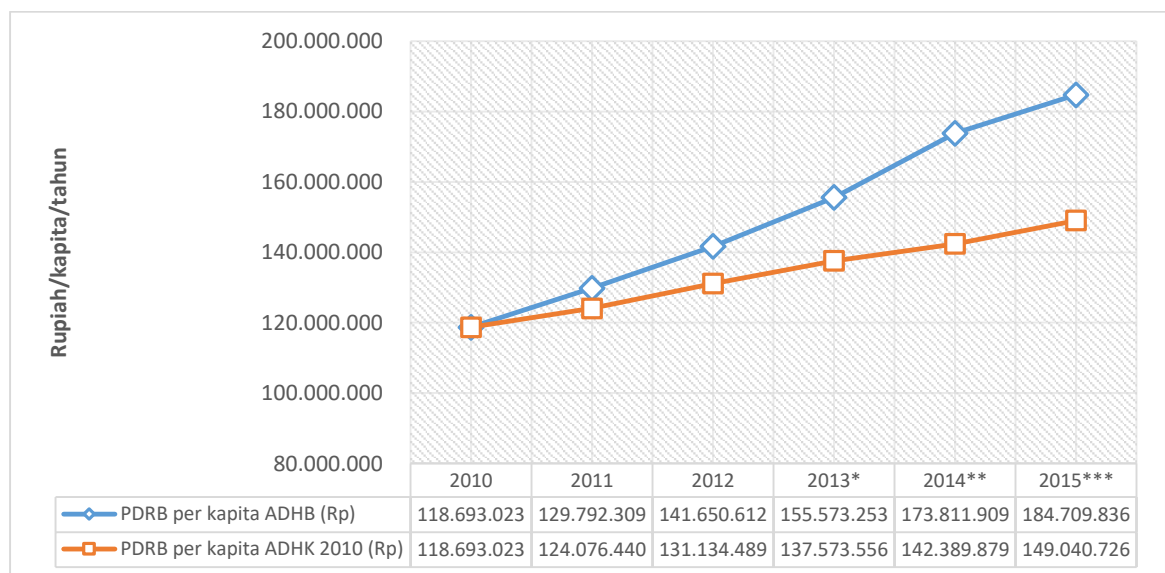
Salah satu kebijakan dan strategi yang dilakukan pemerintah kota cilegon dalam rangka untuk menggali sumber-sumber pendanaan daerah yang bertujuan untuk lebih meningkatnya kesejahteraan masyarakat adalah menumbuhkan investasi di daerah. Upaya ini juga harus diarahkan pada bagaimana cara menciptakan daya saing daerah sehingga diharapkan suatu daerah mempunyai keunggulan dalam menarik minat investor dibandingkan dengan daerah lain.

Selain kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah, pemerintah kota cilego harus memperhatikan hal-hal yang dapat menghambat peningkatan daya saing diantaranya korupsi, birokrasi pemerintahan yang tidak efisien, infrastruktur yang tidak memadai bagi pengembangan investasi di daerah, ketidakstabilan politik, keamanan dan ketertiban, tenaga kerja yang tidak terdidik, etika kerja yang buruk, inflasi, peraturan pajak, buruknya pelayanan birokrasi di daerah dan lain sebagainya.

Indikator utama yang dapat digunakan untuk menentukan peringkat daya saing daerah tersebut antara lain adalah (1) Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, (2) Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, (3) Fokus Iklim Berinvestasi, (4) Fokus Sumber Daya Manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

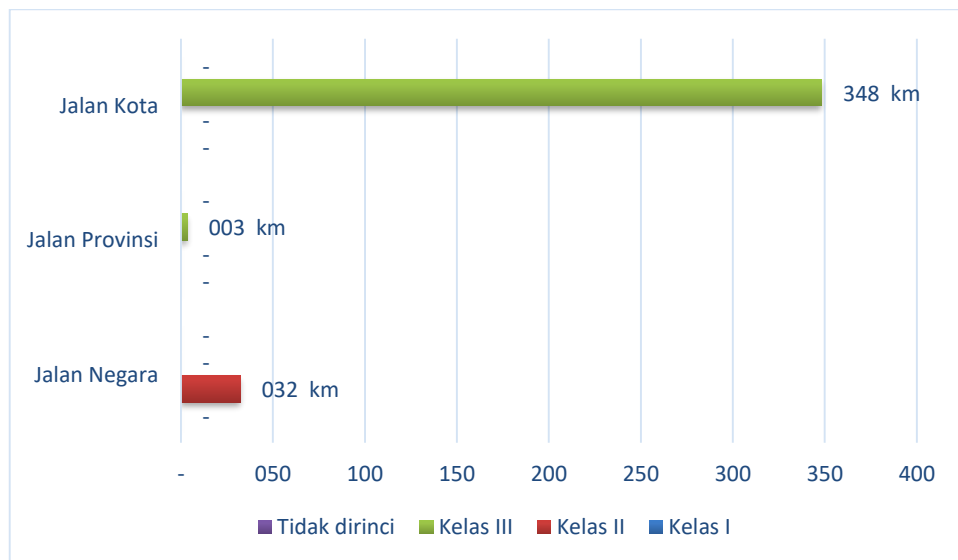
Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.



Gambar 2.26 Grafik perkembangan PDRB perkapita di Kota Cilegon Tahun 2009-2015

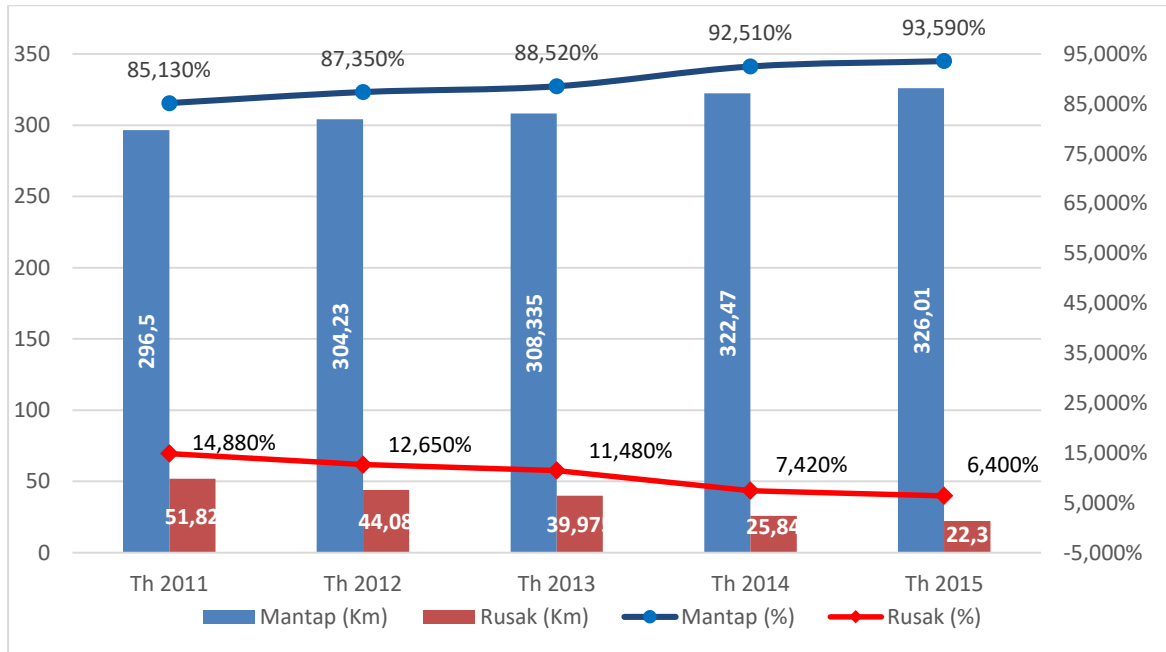
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus kedua dari aspek daya saing daerah adalah fokus fasilitas wilayah atau ketersediaan infrastruktur yang memadai di daerah. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah sebagai amanat dari undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah agar memberikan kemudahan bagi masyarakat atau investor dengan penyediaan sarana dan prasarana.



Gambar 2.27 Panjang infrastruktur jalan berdasarkan administrasi pemerintahan dan kelas jalan di Kota Cilegon Tahun 2015

Sumber : Bappeda Cilegon, diolah dari Cilegon Dalam Angka 2015



Gambar 2.28 Panjang infrastruktur jalan berdasarkan kondisi di Kota Cilegon Tahun 2015

2.4.2.1 Perhubungan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin menurun, artinya bahwa dengan panjang jalan tetap, jumlah kendaraan semakin bertambah, kepadatan kendaraan semakin bertambah.

Fasilitas perhubungan yang menjadi unggulan di Kota Cilegon adalah pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan dan dermaga khusus industri, serta terminal terpadu merak.

2.4.2.2 Penataan Ruang

Pembagian wilayah kota ini adalah sebagai berikut:

- **BWK I**, mencakup kelurahan-kelurahan di Kec. Citangkil (Kel. Dringo, Kel. Kebonsari, Kel. Warnasari, Kel. Citangkil, Kel. Tamanbaru, Kel. Lebakdenok, Kel. Samangraya), Kel. Kotasari (Kec. Grogol), Kel. Ciwaduk (Kec. Cilegon), Kel. Kotabumi, Kel. Kebondalem, Kel. Ramanuju (Kec. Purwakarta), Kel. Masigit dan Kel. Jombang Wetan (Kec. Jombang).
- **BWK II**, mencakup Kel. Gerem, Kel. Rawa Arum, dan Kel. Grogol (Kec. Grogol), serta Kel. Pabean, Kel. Tegal Bunder, dan Kel. Purwakarta (Kec. Purwakarta).

- **BWK III**, mencakup semua kelurahan di Kec. Pulomerak (Kel. Suralaya, Kel. Lebakgede, Kel. Tamansari, dan Kel. Mekarsari).
- **BWK IV**, mencakup semua kelurahan di Kec. Ciwandan (Kel. Tegalratu, Kel. Banjarnegara, Kel. Kubangsari, Kel. Kepuh, Kel. Gunungsugih, dan Kel. Randakari).
- **BWK V**, mencakup kelurahan-kelurahan di Kec. Cilegon (Kel. Bagendung, Kel. Ciwedus, Kel. Bendungan, dan Kel. Ketileng), Kec. Cibeber (Kel. Cikera, Kel. Bulakan, Kel. Kalitimbang, Kel. Karangasem, Kel. Cibeber, dan Kel. Kedaleman), dan Kec. Jombang (Kel. Sukmajaya, Kel. Panggung Rawi, dan Kel. Gedong Dalem).

Tabel 2.27 BWK dan Sistem Pusat-Pusat Kota Cilegon

No.	BWK	Kelurahan	Luas BWK (Ha)	Pusat Pelayanan Kota/ Sub Pusat Pelayanan Kota	Fungsi Pengembangan	Skala Pelayanan
1	I	Kebonsari	3.731	Pusat Pelayanan Kota di sekitar Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta	- Perumahan - Industri - Pelabuhan & Pergudangan - Pusat pemerintahan & Bangunan Umum - Perdagangan & jasa - RTH - Kawasan Lindung sekitar Waduk	Kota dan Regional
		Warnasari				
		Citangkil				
		Tamanbaru				
		Lebakdenok				
		Dringo				
		Samangraya				
		Kotasari				
		Ciwaduk				
		Kotabumi				
		Kebon Dalem				
		Ramanuju				
		Masigit				
		Jombang Wetan				
2	II	Gerem	2.954	Sub Pusat Pelayanan Kota 1 di sekitar Kelurahan Grogol	- Perumahan - Industri - Pelabuhan & Pergudangan - Perdagangan & Jasa - Kawasan lindung - RTH	Lokal
		Rawa Arum				
		Grogol				
		Pabean				
		Tegal Bunder				
		Purwakarta				
		Suralaya	1.986	Sub Pusat Pelayanan Kota 2 di	- Perumahan - Industri	Lokal
		Lebak Gede				

No.	BWK	Kelurahan	Luas BWK (Ha)	Pusat Pelayanan Kota/ Sub Pusat Pelayanan Kota	Fungsi Pengembangan	Skala Pelayanan
3	III	Taman Sari Mekarsari		sekitar Kawasan Terminal Terpadu Merak	- Pelabuhan & pergudangan - Perdagangan & Jasa - Kawasan terminal terpadu - Pariwisata - Kawasan Lindung - RTH	
4	IV	Tegalratu Banjarnegara Kubangsari Kepuh Gunungsugih Randakari	5.185	Sub Pusat Pelayanan Kota 3 di sekitar persimpangan jalan negara dengan jalan lingkar luar selatan di Kel. Kepuh Kec. Ciwandan	- Industri & pergudangan - Kawasan Lindung - RTH - Benteng Alam - Perdagangan & Jasa - Perumahan	Lokal
5	V	Ciwedus Bendungan Bagendung Ketileng Kalitimbang Cibeber Kedaleman Karangasem Cikerei Bulakan Sukmajaya Panggung Rawi Gedong Dalem	3.694	Sub Pusat Pelayanan Kota 4 di sekitar persimpangan jalan negara dengan jalan lingkar luar selatan di Kel. Kedaleman Kec. Cibeber	- Perdagangan & Jasa - Sub Terminal - Perumahan - Pusat pemerintahan & Bangunan Umum - industri non polutan - Kawasan TPL B3 - Kawasan Lindung - RTH - Kawasan Peruntukan Lainnya - Kawasan TPA	Lokal

Sumber: RTRW Kota Cilegon Tahun 2010-2030

1. Sistem Jaringan Prasarana Kota

Selain pembagian wilayah kota dan tata jenjang sistem pusat pelayanan kota, yang tidak kalah penting sebagai unsur pembentuk struktur ruang Kota Cilegon adalah sistem jaringan prasarana kota.

Sistem jaringan prasarana kota terdiri dari sistem prasarana utama dan sistem prasarana lainnya.

- **Jaringan Jalan Primer**

Jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan seperti menghubungkan secara menerus PKN, PKW, PKL sampai ke Pkling; dan menghubungkan antar PKN.

Jaringan jalan primer di Kota Cilegon meliputi:

- a. Arteri primer yang merupakan ruas Jalan Tol Tangerang – Merak, Jalan Tol Cilegon – Bojonegara, dan Jalan Negara Cilegon (PCI) – Simpang Tiga – Merak.
- b. Kolektor primer yang merupakan ruas jalan pengumpul Cilegon (PCI) – Bojonegara – Merak dan ruas Jalan Simpang Tiga - Anyer.
- c. Lokal primer yang merupakan jalan penghubung ke orde IV atau ibukota kecamatan.

- **Jaringan Jalan Sekunder**

Jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, sekunder kesatu, sekunder kedua, dan seterusnya sampai ke persil. Sistem jaringan jalan sekunder dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan penyebaran beban arus lalu lintas berdasarkan pertimbangan kejelasan wewenang penanganan dan status pembinaan jaringan jalan, minimasi terjadinya persilangan dengan jaringan rel kereta api, keterpaduan dengan jalan-jalan lingkungan (komplek perumahan dan perniagaan) serta peningkatan kemudahan pencapaian (aksesibilitas) dari daerah-daerah yang secara fisik geografis agak terisolir.

Jaringan jalan sekunder Kota Cilegon terdiri dari:

- a. Arteri Sekunder yang merupakan ruas Jalan Lingkar Luar Selatan dan Lingkar Luar Utara;
- b. Kolektor Sekunder yang merupakan ruas Jalan Provinsi Jl. KH. Yasin Beji, ruas Jalan Lingkar Dalam Selatan, dan Lingkar Dalam Utara;
- c. Lokal Sekunder yang merupakan jalan kota dan jalan lingkungan di Kota Cilegon; dan

- d. Lingkungan Sekunder yang merupakan jalan penghubung antar persil dalam kawasan perkotaan.

Untuk rencana penanganan dan pengelolaan sistem jaringan jalan di Kota Cilegon meliputi:

- a. Pemeliharaan rutin pada ruas jalan dengan tingkat kerusakan 6 - 10 %.
- b. Pemeliharaan berkala jalan pada ruas jalan dengan tingkat kerusakan 10 - 16 %.
- c. Rehabilitasi jalan pada ruas jalan yang mengalami kerusakan ringan.
- d. Peningkatan struktur dan kapasitas jalan pada ruas Jl. Kapt. Piere Tendean (ruas Ex. Matahari – Pecek), Jl. Ir. Sutami (ruas Krenceng – Langgerang), ruas Kandang Sapi – Bagendung, Jl. KH. Ahmad Dahlan (ruas Jl. Jombang Masjid – Curug Katimaha), ruas Curug Katimaha – Bagendung, Jl. Imam Bonjol (ruas Cibeber – Krotek), ruas Krotek – Kandang Sapi, Jl. Sunan Bonang (ruas Kebanjiran – Lingkar luar selatan), Jl. Industri (ruas ADB – Jl. KH. Yasin Beji), Jl. KH. TB. Ismail (ruas Pasar Kelapa – Pakuncen), Jl. D.I. Panjaitan (ruas Ex. Matahari – Ciberko), ruas Rama Baru – Daliran, Jl. Maulana Yusuf (ruas Simpang Tiga – Tegal Cabe), ruas Pecek – Purwakarta, ruas Purwakarta – Kubang Lampit, ruas Kubang Lampit – Pasar Bunder, ruas Pasar Bunder – Dukuh Malang, ruas Cikebel Bawah – Ciora Jaya, ruas Kuista – Gerem Kulon, Jl. Sultan Kranggnot, dan ruas Kadipaten – Seruni.
- e. Pembangunan jaringan jalan baru di ruas Pakuncen – jalan lingkar luar selatan, ruas Martapura - Sumampir Timur, dan ruas Bonakarta – Kependilan.
- f. Mengembangkan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Cilegon.
- g. Membuka akses jalan-jalan baru sesuai dengan perkembangan wilayah dan tingkat kepentingannya.
- h. Mengembangkan simpul persimpangan di jalan lingkar luar selatan dan pada beberapa ruas jalan sekunder yaitu di Jl. Antasari, Jl. Temu Putih, Jl. R.A. Kartini, Jl. Pasar Baru Cilegon, Jl. Kubang Bale, Jl. Kenanga, Jl. RPH dan Jl. Kranggnot, serta simpul persimpangan yang diperlukan.
- i. Meminimalisir persilangan dengan jaringan rel kereta api dalam merencanakan dan membangun jaringan jalan baru. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir konflik lalu lintas pada saat

kereta lewat, yaitu dengan cara pembuatan *fly over* di atas jaringan jalan kereta tersebut dan/atau pembuatan *under pass*.

- j. Menghilangkan secara bertahap kegiatan parkir di badan jalan khususnya pada kawasan-kawasan yang rawan kemacetan. Setiap kegiatan yang berada di sepanjang jaringan jalan diwajibkan untuk menyediakan lahan parkir sehingga tidak ada lagi kegiatan parkir di badan jalan.
- k. Penataan hirarki jalan untuk mendukung pengaturan perizinan guna lahan.
- l. Memelihara fungsi jaringan jalan primer dengan membatasi jalan akses lokal dan pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan jalan.
- m. Melengkapi fasilitas lalu lintas jalan pada ruas jalan sekunder dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban berlalu lintas.
- n. Penetapan kajian Analisa Dampak Lalu Lintas akibat kegiatan pembangunan/pengembangan yang menimbulkan bangkitan pergerakan.
- o. Penetapan kelas jalan.

Sistem Jaringan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Sistem jaringan prasarana LLAJ meliputi:

1. Terminal Tipe A yaitu Terminal Terpadu Merak di Kecamatan Pulomerak (BWK III)
2. Terminal Tipe B yaitu Sub Terminal di Kecamatan Cibeber (BWK V)
3. Terminal Tipe C yaitu terminal kecil di Kelurahan Suralaya dan Pasar Baru Merak (Kecamatan Pulomerak), Pasar Kranggot (Kecamatan Jombang), Pasar Kelapa Kavling (Kecamatan Cilegon), dan Kecamatan Ciwandan.

Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

- a. Alur pelayaran adalah Merak – Bakauheni.
- b. Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan yang berada di Kecamatan Pulomerak

Sistem Jaringan Kereta Api

- a. Jaringan jalur kereta api Merak – Rangkas Bitung – Jakarta
- b. Fasilitas pemberhentian (stasiun) kereta api sebanyak 4 (empat) buah, yang terdapat di Merak, Cigading, Krenceng dan Cilegon

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Sistem jaringan transportasi laut di Kota Cilegon meliputi:

- a. Alur pelayaran merupakan bagian dari ALKI I, yang melintasi Laut Cina Selatan – Selat Karimata – Laut Jawa – Selat Sunda.
- b. Pelabuhan pengumpul yang meliputi Pelabuhan PT. Pelindo II dan Pelabuhan PT. Krakatau Bandar Samudera di Kecamatan Ciwandan, serta Pelabuhan PT. Indah Kiat di Kecamatan Pulomerak.
- c. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Kota Cilegon

Sistem Prasarana Lainnya***Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan***

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT. Indonesia Power di Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) PT. Krakatau Daya Listrik (PT. KDL) di dalam Kawasan Industri PT. KIEC di Kecamatan Citangkil
- b. Jaringan pipa gas *ethylene* mulai dari PT. Chandra Asri di Kecamatan Ciwandan ke dalam Kawasan Industri PT. KIEC di Kecamatan
- c. Jaringan pipa gas dari Stasiun Meter Pertamina di Kawasan Industri PT. KIEC Kecamatan Citangkil ke PT. Unggul Indah Cahaya di Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- a. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi sistem jaringan terestrial, satelit dan sistem jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai sarana transmisi, sebagai penghubung antara pusat-pusat kegiatan.
- b. Menyebarkan fasilitas telepon umum di lokasi strategis.
- c. Menyediakan tiang pembagi yang menghubungkan konsumen melalui saluran udara terbuka dan telepon umum (saluran bawah tanah) yang merupakan jaringan tersier.

- d. Membangun *Base Tranceiver System* (BTS) secara terpadu berdasarkan *Master Plan Tower Bersama* serta mengendalikan tower-tower seluler yang tidak sesuai dengan *Master Plan*.

Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kota

- a. Mengembangkan wilayah tangkapan air (*catchment area*) yang berfungsi sebagai air baku di Kecamatan Ciwandan, Grogol, Purwakarta, dan Jombang.
- b. Melakukan konservasi daerah resapan air.
- c. Mengendalikan penggunaan sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam, terutama yang digunakan oleh industri.
- d. Mengendalikan debit air limpasan pada musim hujan dengan membuat sumur-sumur resapan.

Sistem Penyediaan Air Bersih

- a. Mengembangkan rencana sistem penyediaan air bersih perpipaan untuk wilayah Kecamatan Pulomerak dan Grogol.
- b. Membangun sumur-sumur dalam (*deep well*) pada wilayah-wilayah rawan air bersih yang tidak terjangkau jaringan perpipaan.
- c. Meningkatkan cakupan wilayah pelayanan distribusi air bersih untuk seluruh wilayah Kota Cilegon.
- d. Memperbaiki jaringan pipa air bersih secara bertahap, meningkatkan manajemen operasi dan pemeliharaan pelayanan air bersih.

Sistem Pengelolaan Air Limbah

- a. Mengembangkan sistem penyaluran air limbah baik domestik (rumah tangga) maupun non domestik (perkantoran, dll) dengan menggunakan sistem terpisah seluruhnya (*completely separate system*). Sistem ini dimaksudkan untuk memisahkan saluran antara penyaluran air hujan dengan air buangan (limbah). Air limbah akan disalurkan melalui saluran tertutup (perpipaan).
- b. melaksanakan studi kelayakan manajemen pengelolaan tinja terpadu Kota Cilegon. pengelolaan yang akan dikembangkan adalah dengan membuat instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) secara komunal pada setiap lingkungan permukiman.

- c. mengganti secara bertahap sistem pembuangan tinja dengan *septic tank* menjadi sistem komunal. Untuk pembangunan perumahan baru, para developer disyaratkan untuk membuat IPLT sedangkan perumahan yang sudah ada secara bertahap untuk merubah sistem septic tank menjadi sistem komunal.
- d. Mengembangkan kawasan tempat pengelolaan limbah (TPL) B3 di Kelurahan Bulakan Kecamatan Cibeber dan wilayah sekitarnya sebagai kawasan penyangga dengan total lahan seluas ± 50 (lima puluh) hektar di luar jalan khusus untuk kegiatan ini. Total lahan tersebut meliputi lokasi pengelolaan limbah B3 dan kawasan penyangga (*buffer zone*).
- e. Pemanfaatan lahan untuk TPL B3 harus memperhatikan semua hasil kajian yang merekomendasikan lahan yang dapat dimanfaatkan oleh instansi yang diberikan kewenangan berdasarkan kriteria teknis dan aturan-aturan yang telah ditetapkan.
- f. Pengembangan TPL B3 ini harus memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, keselamatan dan berkelanjutan.
- g. Pengawasan penggunaan lahan TPL B3 dan pengelolaan limbah B3 harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem Persampahan Kota

- a. Peningkatan pelayanan persampahan pada wilayah Kecamatan Cilegon, Jombang, Grogol, dan Pulomerak.
- b. Penambahan daerah pelayanan baru di Kecamatan Citangkil dan Cibeber.
- c. Mengganti sistem TPS tembok menjadi TPS kontainer serta merehabilitasi TPS kontainer yang rusak.
- d. Mengkaji dan menentukan lahan-lahan untuk TPS kontainer yang baru serta menempatkan minimal 2 (dua) TPS skala kelurahan di setiap kecamatan.
- e. Mengembangkan sistem di kawasan TPA dari yang berupa *open dumping* menjadi *sanitary land fill*.
- f. Memanfaatkan teknik-teknik yang lebih berwawasan lingkungan berdasarkan konsep daur ulang, pemanfaatan kembali, pengurangan dalam pengolahan sampah di dalam kawasan TPA. Konsep ini dimulai dari pemilahan sumber sampah yang dilakukan dengan mendesain bak sampah sehingga memudahkan sampah untuk digunakan kembali (*reuse*), pengurangan jumlah sampah,

dan dilanjutkan dengan mendaur ulang sampah ditempat lain. Penerapan konsep ini tidak hanya dilakukan di TPA melainkan juga pada saat di TPS.

- g. Menata penggunaan lahan di sekitar TPA sesuai kemampuan lahan.
- h. Mengembangkan kemitraan dengan swasta dan/atau kerjasama dengan kab/kota sekitarnya yang berkaitan untuk pengelolaan sampah.
- i. Melakukan pengawasan secara ketat dalam pengembangan kawasan TPA agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, keselamatan, dan berkelanjutan.
- j. Mengembangkan *buffer zone* berupa RTH di sekitar kawasan TPA.

Sistem Drainase

- a. Mengembangkan sistem drainase kota sesuai dengan Rencana Induk Drainase Kota Cilegon.
- b. Normalisasi saluran primer yaitu beberapa sungai yang selama ini menjadi saluran air hujan seperti Kali Kedungingas dan Kali Seruni/Cibeber.
- c. Ketentuan teknis bangunan pada daerah aliran sungai/kali diatur lebih lanjut dalam peraturan mengenai garis sempadan dan/atau RTBL JLS untuk wilayah bagian selatan kota.
- d. Rehabilitasi drainase yang melintasi jalan tol.
- e. Meningkatkan kualitas jaringan drainase sekunder yang berada di tengah kota dan sepanjang jalan utama.
- f. Membuat dan meningkatkan saluran drainase tersier di sisi kiri kanan ruas jalan lingkungan dipadukan dengan drainase sekunder dan utama.
- g. Mengembangkan sistem drainase pada 13 (tiga belas) ruas dengan dimensi yang sesuai dengan luas daerah layanannya dan mengikuti jaringan jalan utama (arteri primer) dengan saluran terbuka.
- h. Membuat saluran drainase pada tempat-tempat yang belum terlayani yaitu wilayah Selatan Kota Cilegon.
- i. Memperbaiki sistem drainase pada kawasan rawan genangan, yaitu di sekitar Kelurahan Mekarsari, Kota Bumi, Ramanuju, Masigit, Jombang Wetan, Sukmajaya, Cibeber, Kebonsari, dan Tegal Ratu, dengan sistem berjenjang terpadu.

- j. Melaksanakan penertiban jaringan utilitas lain yang menghambat fungsi drainase.
- k. Membangun kolam-kolam retensi air/kolam penampungan air hujan dan meningkatkan sistem drainase baik drainase primer maupun sekunder.

Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Jalan Pedestrian

Dalam hal penyediaan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pedestrian tidak dapat dipisahkan dari rencana penyediaan dan pemanfaatan jaringan jalan lingkar luar selatan. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pedestrian harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- b. Pedestrian sebagai bagian dari *linkage system* kawasan yang membentuk karakter lingkungan dari ruang publik.
- c. Jalur utama pedestrian harus telah mempertimbangkan sistem pedestrian secara keseluruhan, aksesibilitas terhadap sub sistem pedestrian di dalam lingkungan, dan aksesibilitas dengan lingkungan sekitarnya.
- d. Jalur pedestrian harus mampu merangsang terciptanya pergerakan manusia yang tidak terganggu oleh lalu lintas kendaraan.
- e. Penataan pedestrian harus mampu merangsang terciptanya ruang yang layak digunakan/manusiawi, dan memberikan pemandangan yang menarik.
- f. Elemen pedestrian (*street furniture*) harus berorientasi pada kepentingan pejalan kaki.

Jalur Evakuasi Bencana

Berdasarkan potensi terjadinya bencana di Kota Cilegon, yaitu bencana tsunami dan bahaya industri kimia, maka rencana jalur evakuasi ini adalah penetapan jalur evakuasi bencana yaitu dengan melalui jalan-jalan sekunder (jalan kota baik kolektor maupun lokal) yang terdekat dan mudah dicapai menuju lokasi evakuasi bencana yang sudah ditetapkan oleh SATLAK PB Kota Cilegon, meliputi:

- 1. Untuk menuju lokasi evakuasi I yang dipusatkan di SD Kampung Baru Kab. Serang, jalur evakuasi melalui akses jalur Jl. Cilodan/Sriwi Kec. Ciwandan yang melewati perbatasan antara

- Kota Cilegon – Kab. Serang berjarak ± 2 Km dari jalur Jalan Utama/Jalan Nasional;
2. Untuk menuju lokasi evakuasi II yang dipusatkan di Kampung Kopo Kidul, jalur evakuasi melalui akses jalur Jl. Kawasan Pancapuri dan Akses Jalur Jl. Ciromo-Kopolandeuh (Jl. Sunan Demak) berjarak ± 2 Km dari jalur Jalan Utama/Jalan Nasional;
 3. Untuk menuju lokasi evakuasi III yang dipusatkan di Kantor Desa/MTs Randakari, jalur evakuasi melalui akses jalur Jl. Randakari (Sukasari-Sasak Asem) dan Akses Jalur Jl. Kp. Warung Kara-Umbul Burak berjarak $\pm 1,2$ Km dari jalur Jalan Utama/Jalan Nasional;
 4. Untuk menuju lokasi evakuasi IV yang dipusatkan di Kp. Karang Jetak Lor (Kubang Sari), jalur evakuasi melalui akses jalur Jl. Mudakir (Meluar-Warung Juwet-Buah Kopek-Panauwan-Ciriu) dan Akses jalan lain menuju lokasi berjarak ± 2 Km dari jalur Jalan Utama/Jalan Nasional;
 5. Untuk menuju lokasi evakuasi V yang dipusatkan di SD Walikukun (Lebak Denok), jalur evakuasi melalui akses jalur Jl. Ir. Sutami (Krenceng-Batukuda), Jl. H. Agus Salim, Jl. Kp. Leuweung Sawo, Delingseng, Kepuh Denok menuju lokasi berjarak ± 3 Km dari jalur Jalan Utama/Jalan Nasional;
 6. Untuk menuju lokasi evakuasi VI yang dipusatkan di SD Lebak Gebang (Bagendung) Kec. Cilegon, jalur evakuasi melalui akses Jl. Temu Putih, Ciwedus, arah TPA Bagendung menuju lokasi berjarak ± 4 Km dari jalur Jalan Utama/Jalan Nasional;
 7. Untuk menuju lokasi evakuasi VII yang dipusatkan di TPU Cikera Kec. Cibeber, jalur evakuasi melalui akses jalur Jl. Tb. Ismail, Jl. Pagebangan, arah TPA Bagendung menuju lokasi berjarak ± 4 Km dari jalur Jalan Utama/Jalan Nasional;
 8. Untuk menuju lokasi evakuasi VIII yang dipusatkan di Kab. Serang (Waringin Kurung), jalur evakuasi melalui akses jalur Jalan Serdang Kab. Serang;
 9. Untuk menuju lokasi evakuasi IX yang dipusatkan di SD Pecinaan (Tegal Bunder), jalur evakuasi melalui akses jalur Jl. Sumampir, Kebondalem, Purwakarta, Pabean menuju lokasi berjarak ± 3 Km;
 10. Untuk menuju lokasi evakuasi X yang dipusatkan di SD Gerem 3 Kec. Grogol, jalur evakuasi melalui akses utama (Jl. H. Leman) berjarak $\pm 1,2$ Km;

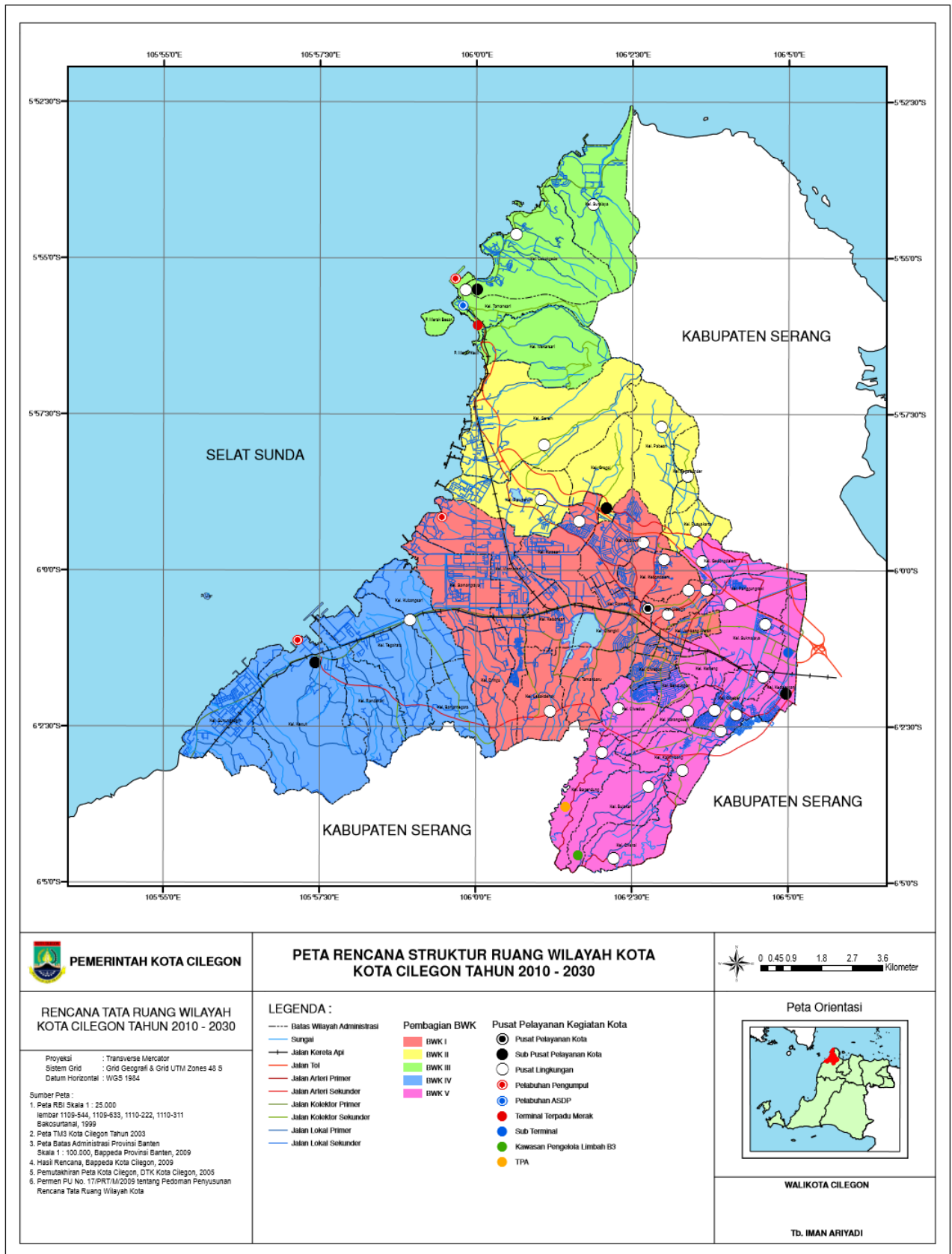
11. Untuk menuju lokasi evakuasi XI yang dipusatkan di Lapangan Terbuka, jalur evakuasi melalui akses Jl. Statomer-Cikuasa berjarak $\pm 1,2$ Km;
12. Untuk menuju lokasi evakuasi XII yang dipusatkan di Daerah Terbuka, jalur evakuasi melalui akses Jl. Puskesmas Merak, Jl. Pasar Baru Merak, Jl. Merdeka, dan Jl. Langon 2 menuju ke lokasi berjarak $\pm 1,6$ Km;
13. Untuk menuju lokasi evakuasi XIII yang dipusatkan di Lapangan Terbuka, jalur evakuasi melalui akses Jl. Kp. Cipala menuju ke lokasi berjarak $\pm 1,2$ Km;
14. Untuk menuju lokasi evakuasi XIV yang dipusatkan di SD Pulorida (Lebak Gede), jalur evakuasi melalui akses Jl. Kp. Temposo menuju ke lokasi berjarak $\pm 0,8$ Km; dan
15. Untuk menuju lokasi evakuasi XV yang dipusatkan di Lapangan Terbuka (Kel. Suralaya), jalur evakuasi melalui akses Jl. Ki Kahal menuju ke lokasi berjarak $\pm 2,1$ Km.

Sistem Pemadam Kebakaran

Dengan demikian maka rencana sistem pemadam kebakaran di Kota Cilegon meliputi:

1. Membangun pos pemadam kebakaran dengan lokasi tersebar di 4 BWK yaitu Kec. Citangkil (BWK I), Grogol (BWK II), Pulomerak (BWK III), dan Jombang (BWK V).
2. Membangun hidran-hidran air tersebar secara merata di sepanjang jalan arteri dan kawasan perumahan.
3. Membangun tandon-tandon air untuk keperluan pemadam kebakaran.
4. Meningkatkan sarana prasarana pendukung pemadam kebakaran lainnya termasuk hidran kebakaran bersumber dari PDAM.

Peta rencana struktur ruang Kota Cilegon dapat dilihat Gambar 2.29 di bawah ini.



Gambar 2.29 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Cilegon

2.4.2.3 Rencana Pola Ruang Kota Cilegon

Secara umum berdasarkan fungsi utamanya, pola ruang wilayah terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung didefinisikan sebagai kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya

buatan. Sedangkan kawasan budidaya merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumberdaya buatan.

Pengembangan kawasan budidaya di wilayah Kota Cilegon pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan ruang, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia untuk menyerasikan pemanfaatan ruang dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Jenis pemanfaatan ruang yang tercakup dalam kawasan budidaya perkotaan yang akan dikembangkan di Kota Cilegon hingga tahun 2030 meliputi:

- Kawasan Perumahan/Permukiman Perkotaan
- Kawasan Perdagangan dan Jasa
- Kawasan Pemerintahan dan Bangunan Umum
- Kawasan Perindustrian (Kawasan Industri, Zona Industri, Peruntukan Industri)
- Kawasan Pelabuhan dan Pergudangan
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Peruntukan Lainnya (Pusat Sekunder Cilegon Timur)
- Kawasan Terminal Terpadu
- Kawasan Pertambangan Batuan
- Kawasan Ruang Terbuka Non-Hijau
- Ruang Evakuasi Bencana
- Sektor Informal
- Peruntukan Pelayanan umum

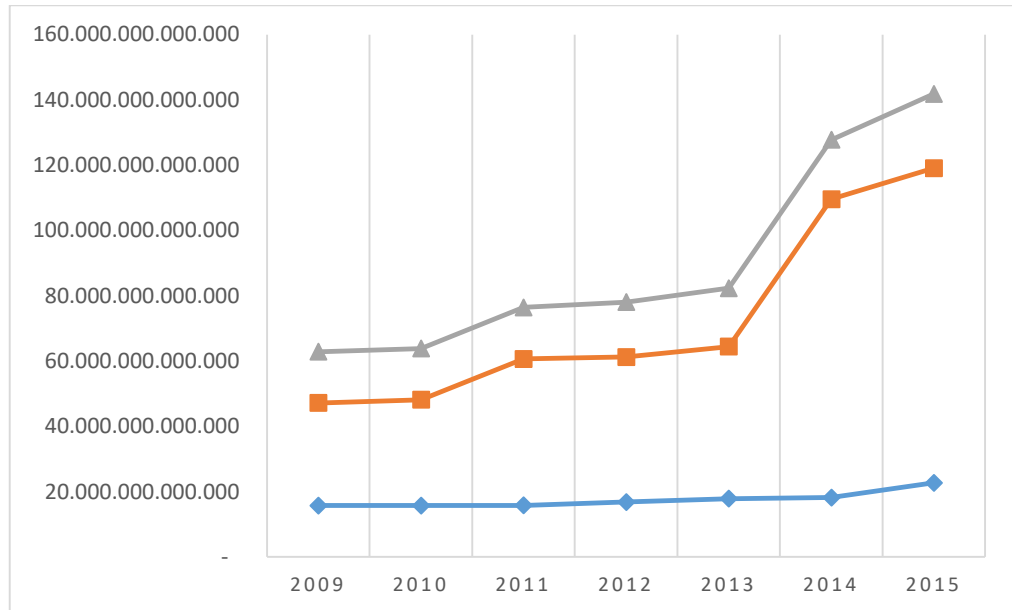
Tabel 2.28 Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Cilegon

	Jenis Guna Lahan	Luas (Ha)	%
I	Kawasan Lindung dan RTH		
	1. Kawasan Lindung	3.023,70	17,23
	2. Kawasan Perlindungan Setempat	328,19	1,87
	3. RTH (Taman, Jalur Hijau, Lapangan Olahraga/Stadion), Tempat Pemakaman Umum	960,59	5,47
	4. RTH Pertanian	1.415,22	8,06
	Sub Total I	5.727,70	32,64
II	Kawasan Budidaya Perkotaan		
	1. Kawasan Perumahan	6.144,21	35,01
	2. Kawasan Perdagangan Dan Jasa	450,62	2,57
	3. Kawasan Pemerintahan dan Bangunan Umum	22,00	0,13
	4. Kawasan Perindustrian	3.514,28	20,02
	5. Kawasan Pelabuhan Dan Pergudangan	416,16	2,37
	6. Kawasan Pariwisata (Termasuk Pulau Merak Kecil dan Pulau Rida)	30,61	0,17
	7. Kawasan Campuran	298,45	1,70
	8. Kawasan Terminal Terpadu	31,78	0,18
	9. Tempat Pembuangan Akhir	18,64	0,11
	10. Lokasi Penimbunan Limbah Industri (B3)	50,00	0,28
	11. Prasarana Jalan	845,55	4,82
	Sub Total II	11.822,30	67,36
	TOTAL	17.550,00	100,00

Sumber: Dokumen RTRW Kota Cilegon

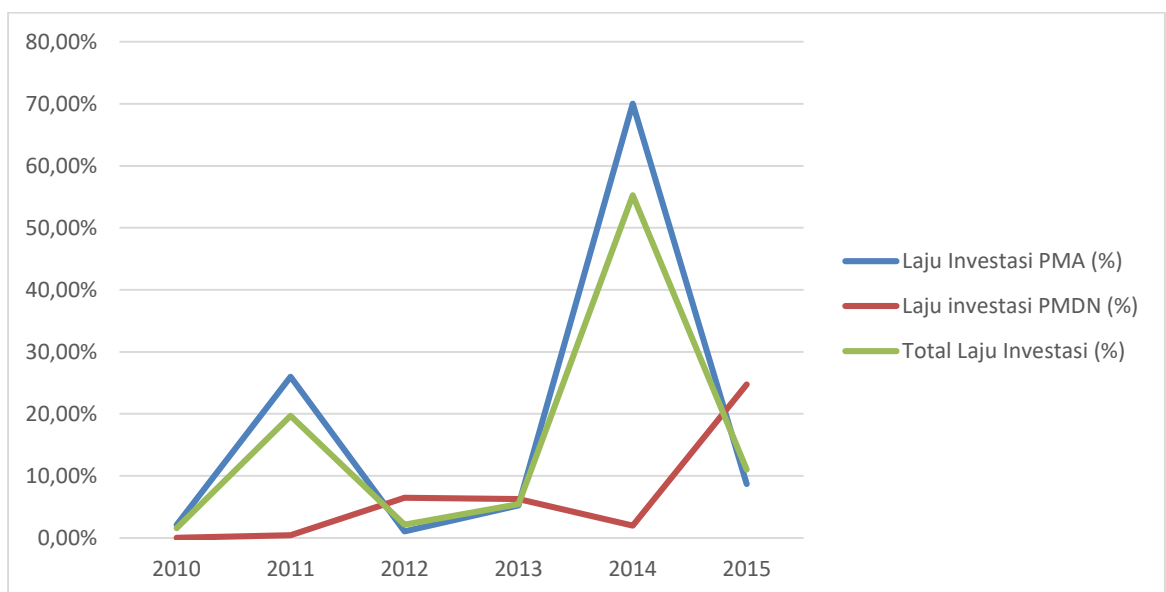
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi yang ada di Kota Cilegon dari sampai dengan tahun 2015 pada dasarnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah investasi di Kota Cilegon selalu didominasi oleh penanaman modal asing (PMA). Pada tahun 2011, dan 2014 terjadi lonjakan yang sangat besar dari sisi investasi modal asing (PMA). Total realisasi investasi penanaman modal baik asing maupun dalam negeri sampai dengan Tahun 2015 di Kota Cilegon adalah sebesar Rp 141 Trilyun. Perlu dicatat bahwa realisasi investasi adalah total penambahan realisasi investasi berdasarkan izin usaha Investasi dan izin usaha perluasan sampai dengan tahun anggaran 2015.



Gambar 2.30 Realisasi Investasi Kota Cilegon (Updated)

Pada tahun 2010-2011 terjadi lonjakan realisasi investasi sebesar 12,5 trilyun yang terkait dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang ditetapkan melalui peraturan presiden nomor 4 tahun 2011, dan pada tahun 2014 kembali terjadi lonjakan sebesar 45 Trilyun beriringan dengan kebijakan pusat yang membuka keran investasi di Kota Cilegon. Sebanyak 81 persen dari 45 Trilyun tersebut berasal dari penambahan investasi PT. Krakatau Posco.



Gambar 2.31 Laju pertumbuhan realisasi investasi Kota Cilegon Tahun 2010-2015 (%)

Dalam 2 tahun terakhir, pertumbuhan investasi di Kota Cilegon cukup baik dimana penambahan realisasi investasi pada tahun 2013-2014 sebesar 55.24% dan pada tahun 2015 meningkat kembali sebesar 10,99 %. Secara keseluruhan realisasi investasi di Kota Cilegon di dominasi oleh PMA.

Tentunya Dominasi sektor Industri pengolahan di pada PDRB Kota Cilegon, harus ditindaklanjuti dengan penciptaan iklim investasi yang baik. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mempermudah investasi di Indonesia sehingga dalam hal ini kinerja BPTPM akan mendukung kinerja investasi di Kota Cilegon dengan adanya streamlining dari perizinan.

Selanjutnya disamping dengan menciptakan iklim investasi yang baik, pemerintah daerah juga harus memfasilitasi bagaimana penyerapan tenaga kerja daerah agar seiring sejalan dengan performa investasi yang baik di Kota Cilegon.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

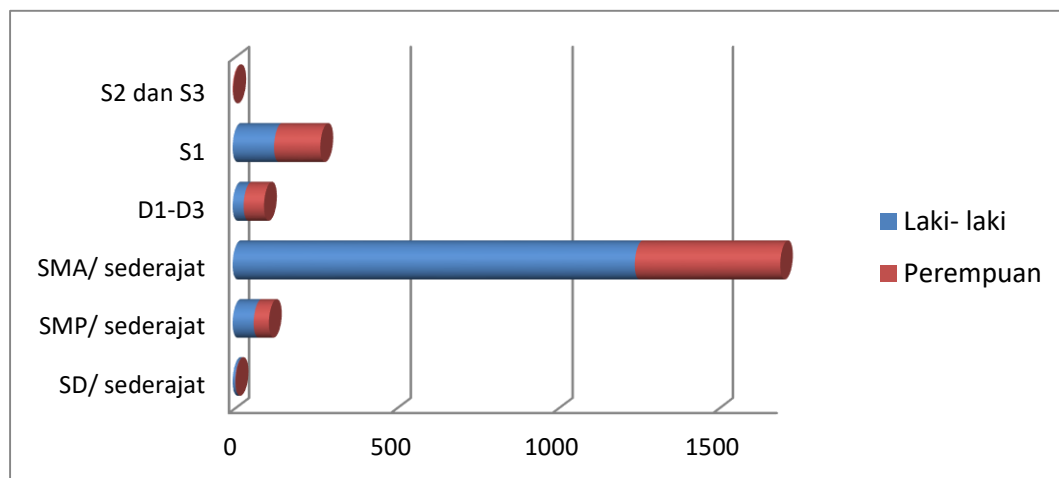
2.4.4.1 Kondisi tenaga kerja dan kualitas SDM

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Tabel 2.29 Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan & Jenis Kelamin

Tingkat Pendidikan	Laki- laki	Perempuan	Jumlah	%
SD/ sederajat	11	2	13	0,28%
SMP/ sederajat	133	90	223	4,88%
SMA/ sederajat	2416	1398	3814	83,51%
D1-D3	51	119	170	3,72%
S1	143	199	342	7,49%
S2 dan S3	2	3	5	0,11%
Jumlah	2756	1811	4567	0,28%
%	60%	40%	100%	100 %

Sumber : Cilegon Dalam Angka 2015



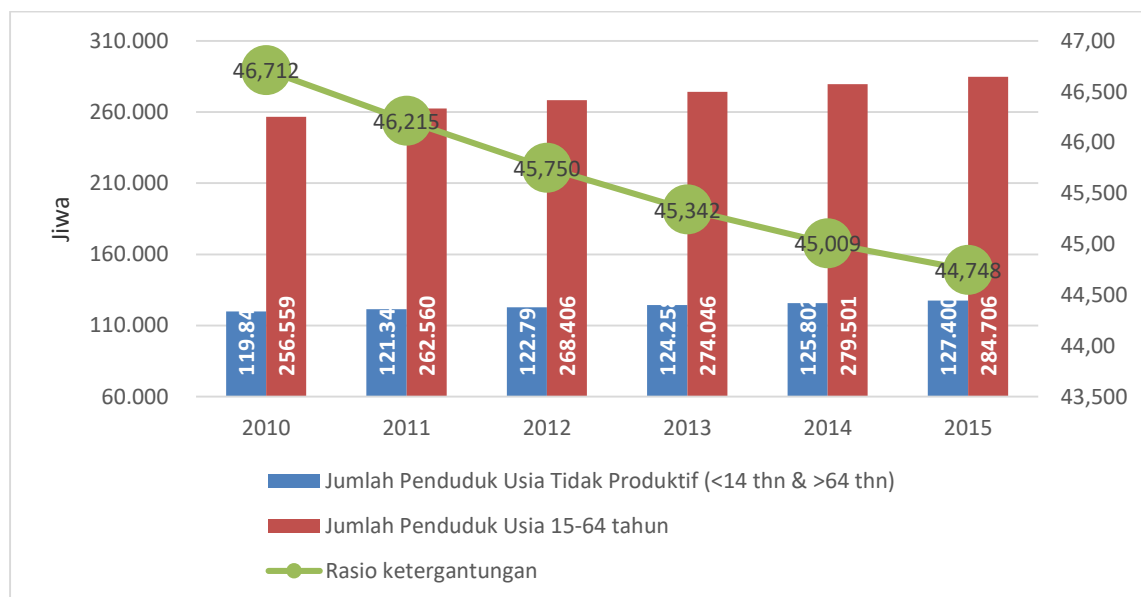
Gambar 2.32 Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan & Jenis Kelamin

Sumber : Diolah dari Cilegon Dalam Angka 2015

Jumlah pencari kerja yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon adalah sebanyak 4567 orang, dimana sebagian besar memiliki status pendidikan lulusan SMA (83,51 %) dan lulusan S1 (7,49 %). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa proporsi angkatan kerja pencari kerja di Kota Cilegon masih didominasi oleh masyarakat berpendidikan terakhir SMA atau SMK.

2.4.4.2 Tingkat ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.



Gambar 2.33 Jumlah penduduk usia tidak produktif, usia produktif, dan rasio ketergantungan penduduk (dependency ratio)

Sumber : Diolah dari Data Kependudukan 2015

Berdasarkan struktur penduduk menurut kelompok umur ini juga dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok usia produktif dan non produktif untuk melihat angka ketergantungan (*dependency ratio*), yaitu kelompok usia 0-14 tahun, 15-64 tahun dan 65 tahun ke atas. Dianggap sebagai penduduk non produktif adalah penduduk usia muda (0-14 tahun) dan penduduk usia tua (65 tahun ke atas), yang

pada tahun 2015 mencapai 31,04 persen. Sementara itu penduduk yang termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 68,96 persen dengan komposisi terbesar berada pada penduduk kelompok umur 20 - 24 tahun. Data ini memperlihatkan bahwa cukup banyak penduduk Kota Cilegon termasuk usia produktif, sehingga menjadi perhatian Pemerintah Kota Cilegon untuk terus berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada agar menjadi lebih produktif.

Penduduk berusia kurang dari 15 tahun cukup besar pula yaitu hampir seperempat penduduk Kota Cilegon (28,50 persen). Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi tenaga kerja baru yang memerlukan *skill* dan kualitas SDM yang memadai baik keterampilan maupun etos kerja dan kepribadian.

Untuk memperoleh hal tersebut diperlukan asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai serta lingkungan pergaulan yang cukup, baik di rumah maupun di masyarakat. Sehingga ketika mereka memasuki pasar kerja, mampu memperoleh peluang kerja yang tersedia. Jika dicermati lebih jauh, ternyata penduduk Kota Cilegon paling banyak diusia balita (0-4 tahun) sebesar 10,56 persen. Kondisi ini menuntut perhatian pemerintah dalam penanganan penduduk balita terutama dari segi kesehatan dan investasi di bidang pendidikan. Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan untuk melihat hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar. Rasio ini melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. *Dependency Ratio* Kota Cilegon pada Tahun 2015 sebesar 44,7 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 44 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Meskipun demikian secara total komposisi umur penduduk produktif dan non produktif di Kota Cilegon masih tergolong wajar dan cukup menguntungkan, karena kelompok usia produktif yang cukup besar sementara usia non produktif yang relatif kecil akan memperkecil angka beban tanggungan.

BAB 3

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Cilegon memiliki hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan penyediaan sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Gambaran pengelolaan keuangan daerah memperlihatkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD, maka analisis tentang gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan selama 5 (lima) tahun sebelumnya.

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

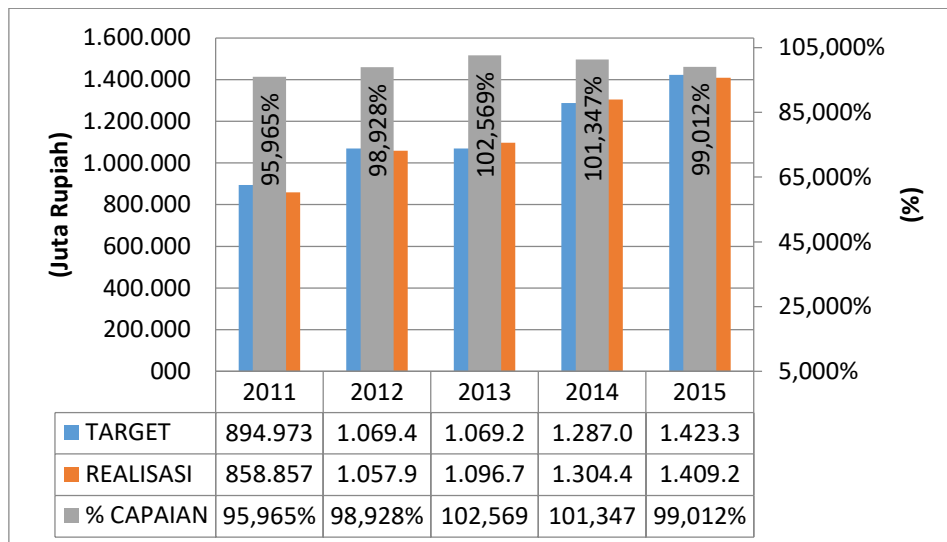
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber Pendapatan Daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Kota Cilegon Tahun 2011-2015

URAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4
2011	894.973,35	858.856,75	95,96%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	277.482,44	253.747,78	91,45%
DANA PERIMBANGAN	424.241,20	417.147,32	98,33%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	193.249,71	187.961,65	97,26%
2012	1.069.436,27	1.057.973,90	98,93%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	339.074,77	334.018,04	98,51%
DANA PERIMBANGAN	521.390,30	516.908,67	99,14%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	208.971,20	207.047,19	99,08%
2013	1.069.280,71	1.096.751,66	102,57%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	248.981,43	291.943,59	117,26%
DANA PERIMBANGAN	597.772,41	584.451,23	97,77%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	222.526,88	220.356,84	99,02%
2014	1.287.068,92	1.304.405,75	101,35%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	400.964,79	467.950,30	116,71%
DANA PERIMBANGAN	576.494,19	564.516,83	97,92%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	309.609,95	271.938,62	87,83%
2015	1.423.322,13	1.409.261,80	99,01%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	515.847,61	579.585,57	112,36%
DANA PERIMBANGAN	614.898,73	578.569,09	94,03%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	292.575,77	251.107,14	85,83%

Sumber : APBD Kota Cilegon Tahun 2011-2015



Gambar 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Kota Cilegon

Sumber : APBD Kota Cilegon

Dari 3 komponen (PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah). Rata-rata Capaian realisasi Pendapatan periode 2011-2015 pada komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar 107,25%, sedangkan komponen Dana Perimbangan capaian rata-rata periode 2011-2015 hanya sebesar 97,45%, hal tersebut dikarenakan pada komponen Dana Perimbangan, alokasi dana yang diterima oleh pemerintah Kota Cilegon dibatasi oleh Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia seperti yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang dikelola Pemerintah Pusat yakni oleh Kantor Pajak Pratama Kota Cilegon sehingga dari sisi realisasi capaiannya Pemerintah Kota Cilegon tidak dapat berupaya lebih agresif dan mengintervensi secara langsung sehingga Pemerintah Kota Cilegon hanya menerima dari bagi hasil capaian kinerja yang dilakukan Pemerintah Pusat.

Hal tersebut juga berlaku untuk Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus bahwa yang diterima Pemerintah Kota Cilegon berdasarkan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sehingga Pemerintah Daerah secara umum tidak dapat melakukan Intervensi artinya hanya menerima Dana tersebut sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan. Pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 93,81%.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi terhadap Pendapatan daerah adalah :

1. Banyaknya perubahan Peraturan Khususnya peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Pajak dan Rertibusi Daerah guna penyesuaian sesuia amanat Undang-undang 28 tahun 2009.
2. Kurangnya sosialisasi terkait perubahan peraturan kepada wajib pajak maupun wajib retribusi.
3. Tingkat ketersediaan Sumber Daya Manusia untuk memahami perubahan Aturan Perpajakan.
4. Tidak tercapainya target pajak hiburan disebabkan belum disahkannya Raperda pajak hiburan, adapun realisasi yang dicantumkan merupakan pembayaran piutang tahun 2011.
5. Tidak tercapainya target Realisasi Pelayanan Pasar merupakan dampak musibah terbakarnya Pasar Kranggot pada September 2011.
6. Pada komponen Bagi Hasil dari Penghasilan (PPh) Psl 25 dan Psl 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH Psl 21 tingkat capaiannya di tahun 2012 tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan PMK No.203/PMK.07/2011, Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Psl 25 dan Psl 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH Psl 21 merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak Partama Cilegon.
7. Pada Komponen Pendapatan Asli Daerah khususnya pada retribusi Pelayanan Kepelabuhanan resalisasinya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan hal tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi Perda nomor 5 tahun 2013 tentang Pelayanan Kepelabuhanan terhadap Pengusaha yang mendapatkan jasa kepelabuhanan (Wajib Retribusi).
8. Pemerintah Daerah Kota Cilegon belum memiliki sarana Kepelabuhanan sehingga Pemerintah Kota Cilegon belum dapat memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhan sesuai amanat yang tertuang dalam Perda nomor 5 tahun 2013 tentang Pelayanan Kepelabuhanan.
9. Pada Komponen Dana Perimbangan khususnya komponen Bagi Hasil dari Penghasilan (PPh) Psl 25 dan Psl 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH Psl 21 tingkat capaiannya di tahun 2012 tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Psl 25 dan Psl 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH Psl 21 merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak Partama Cilegon.

10. Pada Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah khususnya komponen Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi bahwa alokasi penerimaan berdasarkan peraturan Surat Keputusan Gubernur, pajak kendaraan bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
11. Tingkat kesadaran masyarakat dalam pemahaman perpajakan serta kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah masih belum optimal.
12. Pada Retribusi Pengedalian Menara Telekomunikasi berlaku sejak awal tahun anggaran 2014 berdasarkan perda nomor 9 tahun 2013 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 bulan September Tahun 2013 dalam hal teknis pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditentukan oleh Nilai Jual Objek Pajak Menara telekomunikasi. Pada tahun 2014 pemerintah Kota Cilegon Baru diberikan Kewenangan untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Perda nomor 23 tahun 2013, maka untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak Menara Telekomunikasi melalui kegiatan pendataan belum dapat dilakukan pada tahun 2014. Sehingga tidak ada dasar untuk perhitungan dalam menentukan besaran pengenaan Retribusi Menara Telekomunikasi.
13. Pada Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan mengalami permasalahan teknis pemungutan hal tersebut disebabkan karena Pemerintah Daerah belum memiliki sarana Kepelabuhanan sehingga pemerintah Kota Cilegon belum dapat memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhan sesuai amanat yang tertuang dalam Perda nomor 5 tahun 2013, serta belum ada kejelasan dengan Objek Retribusi Kepelabuhanan.
14. Pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Cilegon bahwa yang menjadi Objek Retribusi sesuai amanat Perda nomor 10 tahun 2013 adalah barang atau kekayaan daerah yang disewakan atau dimanfaatkan oleh Wajib Retribusi belum maksimal dalam penggunaannya.
15. Pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan permasalahan yang dihadapi diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuat IMB.
16. Pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Ijin Trayek permasalahan yang dihadapi diantaranya kurangnya

kesadaran pemilik kendaraan (wajib retribusi) serta belum optimalnya pengawasan dan penertiban.

17. Kurangnya pengawasan pada pedagang yang melakukan kegiatan perdagangan di jalan merdeka (eks Pasar Lama Merak) yang tidak sesuai dengan peruntukannya. serta terkendala dalam hal teknis pemungutan dikarenakan tingkat kesadaran pemilik kios untuk membayar kewajiban sewa cicilan kios sangat rendah.
18. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 25 dan 29 merupakan komponen pajak pusat yang dikelola Kementerian Keuangan melalui Kantor Pajak Pratama Kota Cilegon, sehingga Pemerintah Kota Cilegon hanya menerima bagi hasil atas capaian pendapatan yang dipungut atau dikelola oleh Kantor Pajak Pratama Kota Cilegon.
19. Terlambatnya SKPD penerima dana alokasi khusus dalam mengajukan pencairan anggaran tahap ke 2 dan tahap ke 3 pada Tahun Anggaran 2014.
20. Pada DBH Kendaraan Bermotor, disebabkan karena Pajak Kendaraan Bermotor merupakan komponen pajak Provinsi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Banten sesuai Keputusan Gubernur Banten Nomor 900.19/BHPD/IV/2014. Dan pada DBH Air Permukaan, dikarenakan potensi Air Permukaan di wilayah Kota Cilegon tidak ada.
21. Tenaga Pengajar (Guru) Pemerintah Kota Cilegon masih ada yang belum memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan Pemerintah RI.

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Cilegon dalam menyelesaikan permasalahan yakni :

1. Dengan diberlakukannya Undang-undang 28 tahun 2009 Pemerintah Kota Cilegon berupaya untuk dapat merevisi Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar dapat dilakukan pemungutannya sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar Pemerintah Kota Cilegon mendapatkan alokasi dana perimbangan yang lebih proporsional.
3. Melakukan sosialisasi terkait perubahan peraturan-peraturan perpajakan kepada wajib pajak maupun wajib retribusi.
4. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis,

Sosialisasi, Seminar-seminar, dan *Workshop* terkait teknis dan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

5. Melaksanakan koordinasi terkait BPHTB terhadap para perusahaan yang memiliki potensi berkewajiban membayar Pajak BPHTB.
6. Melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan agar Kota Cilegon mendapatkan realisasi dari sektor Dana Perimbangan lebih baik secara proporsional.
7. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak maupun wajib retribusi terkait Peraturan-peraturan perpajakan.
8. Melakukan koordinasi dan mendorong kepada DPRD Kota Cilegon untuk segera menetapkan terkait Peraturan Daerah tentang pajak Hiburan agar tidak terjadi loss pendapatan.
9. Membenahi sarana dan prasarana Pasar Kranggut yang mengalami musibah agar retribusi pengelolaan pasar dapat terealisasi secara optimal.
10. Melakukan koordinasi dan bersama-sama dengan KPP Pratama Cilegon melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap para pengusaha / Wajib Pajak (PPh) Psl 25 dan Psl 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH Psl 21.
11. Melakukan pendataan obyek dan subyek Pajak Daerah untuk menambah penerimaan dari sektor Pajak Daerah.
12. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada *stake holder* terkait teknis dan tata cara pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan.
13. Membangun serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang Pelayanan Kepelabuhanan.
14. Melakukan koordinasi dan bersama-sama dengan KPP Pratama Cilegon melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap para pengusaha / Wajib Pajak (PPh) Psl 25 dan Psl 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH Psl 21.
15. Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi Banten terkait Alokasi dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi.
16. Meningkatkan Sosialisasi terhadap pentingnya membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta melakukan pengawasan melalui kegiatan uji kepatuhan pajak daerah.
17. Keterkaitan permasalahan pada realisasi retribusi Menara Telekomunikasi Pemerintah Kota Cilegon berupaya segera

melakukan penetapan NJOP Menara Telekomunikasi sebagai dasar perhitungan pengenaan retribusi.

18. Guna mengatasi permasalahan teknis pemungutan pada Retribusi Keplabuhanan Remerintah Kota Cilegon mendorong untuk segera membangun pelabuhan milik Remerintah Kota Cilegon, serta mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Keplabuhanan khususnya pada objek retribusi sedapat mungkin bisa diterapkan pemungutannya. Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Perhubungan melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh *stake holder* dan para calon pengguna jasa pelayanan kepelabuhanan.
19. Dalam rangka upaya mengatasi permasalahan dan upaya peningkatan penerimaan dari sektor Retribusi Pemakaian Kekayaan Barang Daerah Pemerintah Kota Cilegon melalui SKPD terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa sesuai amanat Perda 10 tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Barang Daerah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, serta meningkatkan kondisi barang daerah/kekayaan daerah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
20. Guna meningkatkan penerimaan dan upaya penyelesaian masalah-masalah terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diantaranya mengadakan sosialisasi tentang pentingnya membuat IMB ditingkat Kecamatan maupun tingkat Kota, serta melakukan upaya untuk mengundang Investor agar berinvestasi di Kota Cilegon.
21. Guna meningkatkan penerimaan dan upaya penyelesaian masalah-masalah terkait Retribusi Ijin Trayek dengan melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi secara intensif kepada pemilik angkutan umum serta meningkatkan koordinasi dengan aparaturnya terkait untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional.
22. Guna meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah khususnya sektor Lain-lain PAD yang Sah Cicilan Kios serta untuk mengatasi masalah terkait masih rendahnya kesadaran pemilik kios dalam membayar kewajiban cicilan kios pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi melakukan pendekatan baik secara kekeluargaan maupun pendekatan secara hukum agar para pemilik kios dapat memenuhi kewajibannya. Serta lebih

meningkatkan pengawasan terhadap wajib retribusi, pendataan ulang dan penataan fasilitas dan infrastuktur pasar.

23. Melakukan koordinasi dan bersama-sama dengan KPP Pratama Cilegon melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap para pengusaha / Wajib Pajak (PPH) Psl 25 dan Psl 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH Psl 21.
24. Dalam upaya pencapaian target realisasi dana alokasi khusus SKPD penerima Dana Alokasi Khusus harus pro aktif dalam berkoordinasi dengan Instansi Terkait agar penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus dapat lebih maksimal. Memperhatikan dan melaksanakan sesuai Juklak dan Juknis yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan penyerapan dana alokasi khusus.
25. Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi Banten terkait Alokasi dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi.
26. Dalam upaya penyerapan Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pendidikan mendorong para Guru PNSD untuk dapat meningkatkan Standar profesi guru melalui sertifikasi Guru sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3.1.2 Target dan Realisasi Belanja Tahun 2011-2015

Baik anggaran maupun realisasi belanja Kota Cilegon memiliki nilai yang terus meningkat tiap tahunnya, untuk anggaran pada awal periode yaitu tahun 2011 senilai 913.958,58 Juta Rupiah menjadi 1.463.977,62 Juta Rupiah pada akhir periode yaitu tahun 2015. Sedangkan untuk realisasi pada awal periode yaitu tahun 2011 senilai 840.408,52 Juta Rupiah menjadi 1.463.977,62 Juta Rupiah pada akhir periode yaitu tahun 2015.

**Tabel 3.2 Nilai Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Cilegon
Tahun 2011-2015**

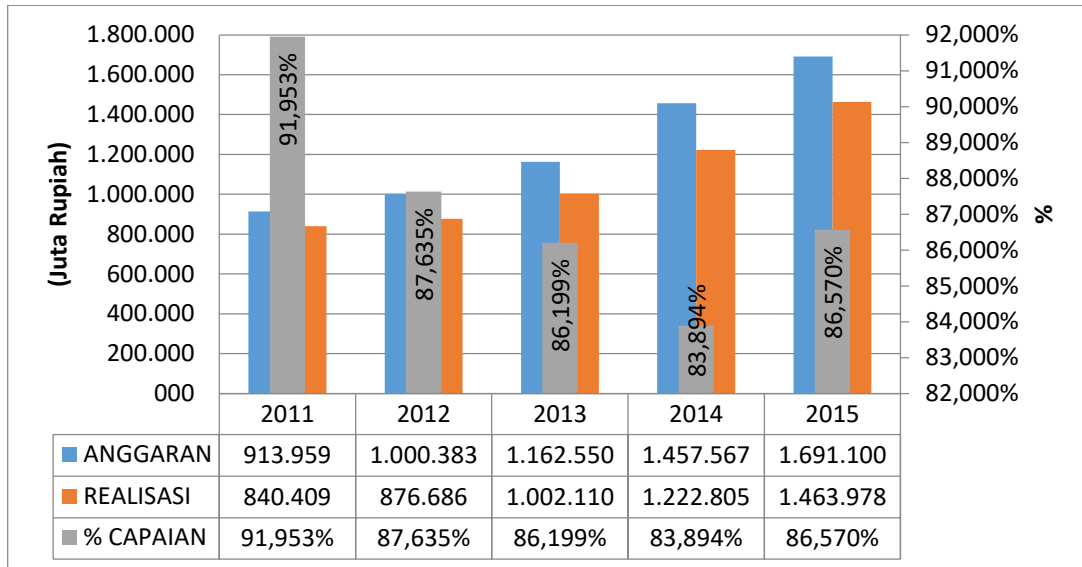
URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4
2011	913.958,58	840.408,52	91,95%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	474.907,00	434.744,12	91,54%
Belanja Pegawai	379.952,38	346.846,67	91,29%
Belanja Subsidi	7.666,00	7.654,90	99,86%
Belanja Hibah	58.824,65	54.729,25	93,04%
Belanja Bantuan Sosial	25.624,88	23.385,00	91,26%



URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.339,10	669,55	50,00%
Belanja Tidak Terduga	1.500,00	1.458,75	97,25%
BELANJA LANGSUNG	439.051,58	405.664,41	92,40%
Belanja Pegawai	66.692,00	59.958,43	89,90%
Belanja Barang dan Jasa	205.155,10	183.990,89	89,68%
Belanja Modal	167.204,47	161.715,08	96,72%
2012	1.000.383,45	876.685,87	87,63%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	489.722,23	425.342,92	86,85%
Belanja Pegawai	453.109,71	402.031,82	88,73%
Belanja Subsidi	0,00	0,00	-
Belanja Hibah	21.693,00	10.992,80	50,67%
Belanja Bantuan Sosial	12.327,75	11.610,89	94,18%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	669,55	606,22	90,54%
Belanja Tidak Terduga	1.922,21	101,19	5,26%
BELANJA LANGSUNG	510.661,22	451.342,95	88,38%
Belanja Pegawai	85.432,47	78.735,70	92,16%
Belanja Barang dan Jasa	232.212,87	195.660,99	84,26%
Belanja Modal	193.015,89	176.946,26	91,67%
2013	1.162.549,92	1.002.109,78	86,20%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	541.413,55	483.850,51	89,37%
Belanja Pegawai	496.750,35	441.831,44	88,94%
Belanja Subsidi	0,00	0,00	-
Belanja Hibah	31.632,80	31.237,36	98,75%
Belanja Bantuan Sosial	11.110,85	10.166,60	91,50%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	669,55	615,11	91,87%
Belanja Tidak Terduga	1.250,00	0,00	0,00%
BELANJA LANGSUNG	621.136,37	518.259,28	83,44%
Belanja Pegawai	102.295,75	89.169,14	87,17%
Belanja Barang dan Jasa	271.401,88	222.816,25	82,10%
Belanja Modal	247.438,74	206.273,89	83,36%
2014	1.457.567,48	1.222.804,81	83,89%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	649.073,88	537.267,32	82,77%

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4
Belanja Pegawai	576.956,19	481.045,46	83,38%
Belanja Subsidi	3.322,66	3.322,66	100,00%
Belanja Hibah	42.171,27	32.892,26	78,00%
Belanja Bantuan Sosial	24.440,58	19.482,62	79,71%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	669,55	512,32	76,52%
Belanja Tidak Terduga	1.513,65	12,00	0,79%
BELANJA LANGSUNG	808.493,60	685.537,50	84,79%
Belanja Pegawai	100.378,00	86.761,30	86,43%
Belanja Barang dan Jasa	324.185,18	281.231,36	86,75%
Belanja Modal	383.930,42	317.544,84	82,71%
2015	1,691,099.73	1,463,977.62	86.57%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	735,639.77	628,622.02	85,45%
Belanja Pegawai	641,169.18	538,985.35	84,06%
Belanja Hibah	72,303.65	71,102.49	98,34%
Belanja Bantuan Sosial	20,434.99	17,665.91	86,45%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1,031.96	842.13	81,61%
Belanja Tidak Terduga	700.00	26.13	3,73%
BELANJA LANGSUNG	955,459.95	835,355.60	87,43%
Belanja Pegawai	111,868.97	99,408.45	88,86%
Belanja Barang dan Jasa	421,340.40	362,947.77	86,14%
Belanja Modal	422,250.59	372,999.38	88,34%

Sumber : APBD Kota Cilegon Tahun 2011-2015



Gambar 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Cilegon

Sumber : APBD Kota Cilegon

Rata-rata persentase capaian realisasi belanja Kota Cilegon pada periode tahun 2011-2015 adalah sebesar 87,25%. Secara lebih rinci nilai capaian realisasi belanja pada tahun 2011 adalah sebesar 91,95%, 87,63% pada tahun 2012, 86,20% pada tahun 2013 dan 83,89% pada tahun 2014, serta pada tahun 2015 sebesar 86,57%. Yang perlu dicermati secara seksama adalah perkembangan dari nilai capaian realisasi belanja Kota Cilegon dari awal periode sampai akhir periode mengalami penurunan, hal ini perlu di analisis lebih lanjut diketahui penyebabnya dan mengambil langkah supaya tren tersebut berubah menjadi meningkat pada periode yang akan datang.

Pada tahun 2011 dan 2012 nilai dari persentase capaian realisasi belanja langsung lebih besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung, namun pada tahun 2013 persentase capaian realisasi belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung dengan perbedaan nilai yang cukup signifikan. Untuk belanja langsung capaian realisasinya terus menurun, hal ini menunjukkan kinerja dari dinas terkait dalam menyerap anggaran pada komponen belanja langsung menurun selama periode analisis, berbeda dengan belanja tidak langsung, pada periode 2011-2012 mengalami penurunan capaian, namun pada tahun 2013 mengalami peningkatan kembali walaupun masih di bawah nilai pada awal periode yaitu tahun 2011.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa realisasi belanja senyatanya tidak bisa mencapai 100%. Hal ini antara lain karena adanya efisiensi

belanja terutama dari kegiatan yang dilelangkan ataupun juga dari sisa dari akses anggaran belanja pegawai yang tidak dapat terserap secara eksak. Namun data capaian menunjukkan bahwa kinerja serapan anggaran di tahun 2011-2015 capaiannya di bawah 90%. Tentu terdapat beberapa kendala, yang menjadi evaluasi untuk ditindaklanjuti di tahun berikutnya

Belanja Tidak Langsung

Komponen lain dalam belanja tidak langsung adalah berupa belanja hibah bansos. Terbitnya regulasi baru yang mengatur tentang mekanisme pemberian hibah dan bansos, menyebabkan serapan hibah bansos di periode tersebut juga kurang optimal. Hal ini antara lain karena implementasi peraturan tersebut memerlukan waktu baik untuk penyiapan juklak dan juknisnya ataupun untuk sosialisasi peraturan tersebut kepada penerima hibah/bansos.

Upaya untuk meningkatkan serapan belanja pegawai adalah dengan melakukan pengalokasian anggaran yang lebih tepat, dengan memperhitungkan berbagai tolok ukur secara cermat.

Kemudian terbitnya regulasi-regulasi baru yang mengatur tentang alokasi belanja tidak langsung, segera ditindaklanjuti dengan penyusunan juklak dan juknis serta sosialisasi peraturan tersebut. Ketepatan waktu dalam penetapan APBD juga telah menjadi kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif.

Belanja Langsung

Upaya untuk meningkatkan serapan belanja langsung dilakukan dengan mengoptimalkan pengendalian pembangunan, untuk memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan dapat terealisasi. Berbagai regulasi baru juga ditindaklanjuti dengan penyusunan juklak, juknis dan sosialisasinya sehingga tidak menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan. Pemenuhan SDM dan sarana prasarana dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Kurang optimalnya serapan belanja langsung disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang tidak terlaksana. Beberapa penyebabnya antara lain adalah pertama, adanya keterlambatan dalam penetapan APBD Perubahan di tahun 2012, yang menyebabkan banyak kegiatan yang telah direncanakan tidak cukup waktu untuk dilaksanakan; kedua, terbitnya regulasi tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang menyebabkan adanya perubahan dalam mekanisme proses pengadaan tanah, sehingga beberapa

kegiatan pengadaan tanah yang telah direncanakan tidak dapat direalisasikan; ketiga, adanya regulasi baru terkait proses pengadaan barang dan jasa, yang membutuhkan kesiapan SDM pelaksana, sarana prasarana aparatur serta regulasi teknis, yang berdampak terhadap tidak dapat terealisasikannya beberapa kegiatan karena terkendala pada proses pelelangan.

3.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

Pembiayaan Daerah Kota Cilegon terdiri dari (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Tabel 3.3 Nilai Target dan Realisasi Pembiayaan Kota Cilegon Tahun 2011-2015

URAIAN	ANGGARAN/ TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4
2011			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	26.485.231.900	21.485.231.900	81,12%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	21.485.231.900	21.485.231.900	100,00%
Pencairan Dana Deposito	5.000.000.000	0	0,00%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.500.000.000	2.500.000.000	33,33%
Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	7.500.000.000	2.500.000.000	33,33%
PEMBIAYAAN NETTO	18.985.231.900	18.985.231.900	100,00%
2012			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	57.433.457.425	57.967.451.282	100,93%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	37.433.457.425	37.967.451.282	101,43%
Pencairan Dana Deposito	20.000.000.000	20.000.000.000	100,00%



URAIAN	ANGGARAN/ TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	27.975.401.485	25.475.401.485	91,06%
Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	26.000.000.000	23.500.000.000	90,38%
Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	1.975.401.485	1.975.401.485	100,00%
PEMBIAYAAN NETTO	29.458.055.940	32.492.049.797	110,30%
2013			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	213.780.084.595	213.780.084.595	100,00%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	213.780.084.595	213.780.084.595	100,00%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	120.510.879.600	20.792.400.000	17,25%
Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	10.000.000.000	100,00%
Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	12.000.000.000	10.792.400.000	89,94%
Investasi Jangka Pendek Dalam Deposito	98.510.879.600	0	0,00%
PEMBIAYAAN NETTO	93.269.204.995	192.987.684.595	206,91%
2014			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	287.509.439.105	287.509.439.105	100,00%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	287.509.439.105	287.509.439.105	100,00%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	117.010.879.600	17.321.900.000	14,80%
Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	10.000.000.000	100,00%
Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	8.500.000.000	7.321.900.000	86,14%
Investasi Jangka Pendek Dalam Deposito	98.510.879.600	0	0,00%
PEMBIAYAAN NETTO	170.498.559.505	270.187.539.105	158,47%
2015			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	371.788.478.752	371.788.478.752	100,00%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	351.788.478.752	351.788.478.752	100,00%
Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	100,00%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	104.010.879.600	5.500.000.000	5,29%
Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	102.010.879.600	3.500.000.000	3,43%

URAIAN	ANGGARAN/ TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4
Pengeluaran Investasi Non Permanen Dana Bergulir	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00%
PEMBIAYAAN NETTO	267.777.599.152	366.288.478.752	136,79%

Sumber : APBD Kota Cilegon Tahun 2011-2015

Di dalam pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Cilegon tren penyertaan modalnya fluktuatif, dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi lembaga BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cilegon. Penyertaan modal yang paling signifikan dilakukan pada tahun 2015 sebesar 102,01 Milyar dikarenakan penggantian investasi pelabuhan Kubangsari yang diterima Pemerintah Kota Cilegon yang selama ini dilakukan melalui investasi jangka pendek dalam deposito sesuai dengan kesepakatan bersama para penyelenggara negara antara eksekutif dan legislatif dialihkan ke dalam penyertaan modal melalui Badan Usaha PT. PCM dengan nilai 98,5 Milyar.

Disamping itu juga pengeluaran pembiayaan dilakukan melalui dana cadangan untuk pelaksanaan Pemilukada Kepala Daerah yang diasumsikan sebesar 20 Milyar yang menurut rencana akan dilakukan pada tahun 2015.

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah untuk pembangunan diupayakan untuk dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Disamping itu, hal yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah khususnya dari pos pajak dan retribusi daerah, yaitu efeknya terhadap kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Dimana upaya tersebut hendaknya sedapat mungkin tidak membebani masyarakat, sehingga potensi munculnya efek distorsi ekonomi yang kontra produktif dan akan sangat merugikan dapat hindari.

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Keuangan daerah pada dasarnya adalah bagian dari sistem keuangan negara. APBD dapat mempengaruhi perekonomian daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Belanja pemerintah daerah dapat mempengaruhi perekonomian daerah, namun pengaruh belanja tersebut bisa jadi sangat kecil. Pengaruh belanja pemerintah terhadap perekonomian daerah harus dilihat secara komprehensif dengan mendalami belanja ketiga tingkatan pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota). Alokasi belanja pemerintah yang lebih efisien dipastikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk mengalokasikan dananya, pada dasarnya dapat mendorong peningkatan efisiensi belanja karena Pemda lebih tahu kebutuhan masyarakatnya dari pada pemerintah pusat.

Arah kebijakan keuangan pada belanja daerah terdiri dari kebijakan belanja langsung dan kebijakan belanja tidak langsung. Arah kebijakan belanja langsung merupakan arah kebijakan belanja yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta dapat diukur berdasarkan indikator dan tolok ukur capaian kinerja yang telah ditetapkan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, sedangkan arah kebijakan belanja tidak langsung merupakan arah kebijakan belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan serta sulit diukur dengan capaian kinerja yang ditetapkan seperti belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut diantaranya adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa dan juga sektor bangunan.

Disamping itu, penggunaan belanja juga harus sedapat mungkin ditujukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat (seperti: pendidikan, kesehatan, perumahan), menanggulangi masalah-masalah sosial (seperti : kemiskinan dan pengangguran), serta meningkatkan ketersediaan dan daya dukung infrastruktur dan sarana prasarana dalam rangka mendukung pergerakan roda perekonomian daerah dan masyarakat.

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dari sisi penerimaan pembiayaan daerah, diupayakan untuk dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam mengantisipasi terjadinya defisit anggaran. Disamping itu, penting pula dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3.3 KERANGKA PENDANAAN

3.3.1 Metodologi penentuan Kerangka umum pendanaan

Penentuan kerangka pendanaan dilakukan melalui beberapa tahapan yakni:

1. Penentuan sumber daya daerah

Penentuan sumber daya daerah ini dilakukan melalui analisis realisasi pendapatan yang dikaitkan dengan realisasi dan asumsi indikator-indikator makroekonomi selama 5 tahun terakhir. Hasil dari analisis ini akan di tuangkan dalam hasil proyeksi pendapatan daerah selama 5 tahun ke depan.

2. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Hasil dari proyeksi pendapatan tersebut akan dialokasikan terhadap belanja wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan seperti : Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20%, alokasi anggaran kesehatan sebesar 10%, alokasi anggaran pembangunan kewilayahan sebesar 5%, dan alokasi gaji serta tunjangan pegawai.

3. Analisis belanja operasional pemerintah

Setelah dilakukan alokasi bagi anggaran periodik wajib mengikat maka akan alokasi selanjutnya adalah alokasi belanja operasional pemerintah wajib dikeluarkan guna mendukung operasional pemerintah.

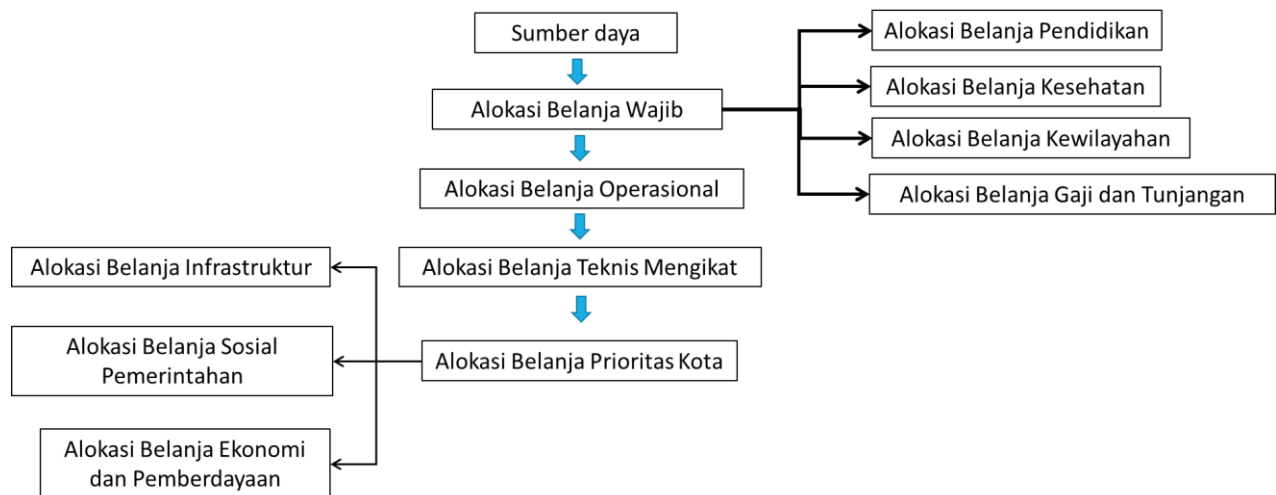
4. Analisis belanja teknis

Setelah dilakukan alokasi pada belanja operasional maka dibutuhkan alokasi anggaran guna mendukung tugas, pokok dan fungsi pemerintah selain itu alokasi belanja teknis diarahkan untuk meningkatkan fungsi pelayanan umum pemerintah.

5. Alokasi belanja kegiatan prioritas kota

Alokasi belanja kegiatan prioritas kota adalah alokasi belanja yang merupakan pemenuhan janji politik walikota yang memiliki nilai strategis.

Tahapan metodologi tersebut dapat dilihat pada gambar 3.3



Gambar 3.3 Metodologi Kerangka Umum Pendanaan

3.3.2 Analisis Penentuan Sumber-Daya Pendapatan

Proyeksi Pendapatan Kota Cilegon merupakan langkah awal yang harus ditempuh dalam manajemen penganggaran keuangan daerah terutama berkaitan dengan perencanaan Pembangunan. Berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2016-2021 maka dibutuhkan proyeksi Target Pendapatan Kota Cilegon Tahun 2016-2021.

**Tabel 3.4 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021 Kota Cilegon**

NO.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	PENDAPATAN DAERAH	1,629,129,902,537	1,747,696,765,549	1,810,010,882,036	1,892,645,462,567	1,978,712,624,251	2,064,454,101,656
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	539,063,774,817	620,513,103,698	634,052,864,975	665,103,829,732	696,606,843,806	724,771,571,424
1.1	PAJAK DAERAH	373,940,700,000	446,700,850,000	468,173,476,881	491,047,429,652	515,428,991,924	541,045,134,999
1.2	RETRIBUSI DAERAH	19,263,158,450	22,933,504,336	24,470,611,388	26,081,583,806	26,811,894,152	27,842,838,956
1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	15,954,032,510	16,828,311,309	18,354,443,651	19,955,906,595	21,139,126,093	22,408,161,745
1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	129,905,883,857	134,050,438,053	123,054,333,054	128,018,909,679	133,226,831,636	133,475,435,724
2	DANA PERIMBANGAN	914,681,924,620	945,117,536,906	985,907,631,458	1,029,008,233,646	1,074,553,926,104	1,122,629,630,738
2.1	BAGI HASIL PAJAK & BAGI HASIL BUKAN PAJAK	99,527,753,000	104,271,069,339	109,305,647,668	114,652,665,338	120,335,050,131	126,319,829,669
2.2	DANA ALOKASI UMUM	605,983,274,000	639,846,467,567	675,601,983,790	713,355,568,308	753,218,875,973	795,309,801,070
2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	209,170,897,620	201,000,000,000	201,000,000,000	201,000,000,000	201,000,000,000	201,000,000,000
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	175,384,203,100	182,066,124,945	190,050,385,604	198,533,399,189	207,551,854,341	217,052,899,494
3.3	DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	144,546,731,600	152,066,124,945	160,050,385,604	168,533,399,189	177,551,854,341	187,052,899,494
3.4	DANA PENYESUIAN DAN OTONOMI KHUSUS	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000



NO.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.5	BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	25,837,471,500	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000

Tahun 2016

|| Target Pendapatan Daerah Tahun 2016 sebesar Rp. 1.629.129.902.537,- merupakan dasar dalam memproyeksikan pendapatan RPJM tahunan (2016 – 2020) dengan rincian target pendapatan daerah sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 539.063.774.817,-
- Dana Perimbangan sebesar Rp. 914.681.924.620,-
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 175.384.203.100,-.

Tahun 2017

|| Prediksi Pendapatan Pendapatan Daerah 2017 ditargetkan meningkat sebesar 7,28% dari target 2016 sebesar Rp. 1.629.129.902.537,- menjadi Rp. 1.747.696.765.549,- prediksi tersebut diperoleh dari peningkatan PAD sebesar 14,56%, Dana Perimbangan sebesar 3,33%, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya sebesar 3,81%.

|| Peningkatan PAD sebesar 14,60% dari target 2016 sebesar Rp. 539.063.774.817,- menjadi Rp. 620.513.103.698,-, hal tersebut diperoleh dari asumsi asumsi sebagai berikut :

- Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cilegon tahun 2017 diperkirakan Tumbuh 5,15%
- Pada sektor penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp.72.760.150.000,- atau sebesar 19% menjadi Rp. 446.700.850.000,- dari target tahun 2016 sebesar Rp. 373.940.700.000,-, hal tersebut dikarenakan adanya upaya *Extensifikasi* dan *Intensifikasi* pada seluruh komponen Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Cilegon,
- Upaya mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak melalui sistem pembayaran online.
- Asumsi peningkatan pada sektor Pajak Daerah tersebut diperoleh dari :
 - Pajak Hotel diasumsikan meningkat hanya sebesar **2,96%** dari target 2016 sebesar Rp. 8,450,000,000,- menjadi Rp. 8,700,000,000,-, dikarenakan adanya

pertambahan wajib pajak hotel baru dengan kelas hotel Bintang 3 dan Bintang 2, dengan tarif relative lebih murah dan bersaing sehingga menyebabkan omset tingkat hunian hotel bintang 4 menurun dengan asumsi jumlah tingkat hunian beralih pada hotel bintang 3 dan bintang 2 yang harga tarif kamar relative lebih murah, selain hal tersebut berdiri pula hotel bintang 4 di daerah perbatasan yakni di jalur lingkaran selatan (JLS) yang menyebabkan menurunnya tingkat hunian pada hotel di wilayah Kota Cilegon dan melakukan audit / pemeriksaan yang intensif untuk mengawasi dan meminimalisir terjadinya kebocoran setoran pajak hotel yang dilaporkan/dibayarkan wajib pajak.

- Pajak Restoran diasumsikan meningkat sebesar **13,82%** dari target 2016 sebesar Rp. 12.300.000.000,- menjadi Rp. 14.000.000.000,- dikarenakan diasumsikan terdapat potensi wajib pajak baru jenis restoran khususnya restoran asing (Korea / Cina) meningkat bertambahnya Warga Negara Asing yang bekerja di wilayah Kota Cilegon sehingga meningkatkan penerimaan dari sektor pajak restoran, serta banyak tumbuh pula para pengusaha baru rumah makan, kantin, kafetaria, dan katering, DPPKD melakukan revisi regulasi guna mereview dengan menaikkan omset minimal sebagai dasar penentuan wajib pajak, lebih meningkatkan pembinaan kepada para pelaku pengusaha restoran baru/tradisional untuk memperbaiki administrasi perpajakan, dan melakukan audit / pemeriksaan yang intensif untuk mengawasi dan meminimalisir terjadinya kebocoran setoran pajak restoran yang dilaporkan/dibayarkan wajib pajak.
- Pajak Hiburan diasumsikan meningkat sebesar **8,89%** dari target 2016 sebesar Rp. 2.502.500.000,- menjadi Rp. 2.725.000.000,- dikarenakan adanya trend peningkatan usaha di sektor hiburan, namun demikian mengingat Perda penyelenggaraan Pajak Hiburan belum disahkan maka yang menjadi andalan dari sektor pajak hiburan jenis Tontonan Film/Bioskop yang tingkat kunjungannya semakin

meningkat dari luar wilayah cilegon, mengingat pelaku usaha bioskop hanya terdapat di wilayah Cilegon, sehingga diasumsikan peningkatan LPE sektoral mencapai angka 9,51%, dan melakukan audit / pemeriksaan yang intensif untuk mengawasi dan meminimalisir terjadinya kebocoran setoran pajak Hiburan yang dilaporkan/dibayarkan wajib pajak

- Pajak Reklame diasumsikan meningkat sebesar **8.21%** dari target 2016 sebesar Rp. 1,848,200,000,- menjadi Rp. 2.000.000.000,- hal tersebut diasumsikan meningkatnya jumlah Objek Pajak Reklame di sepanjang jalan protokol Kota Cilegon, dan Jalur lingkaran selatan (JLS) sehingga peningkatan LPE sektoral diasumsikan mencapai angka 5,15%, dan DPPKD melakukan revisi regulasi guna mereview dengan menaikkan harga dasar nilai sewa reklame.
- Pajak Penerangan Jalan diasumsikan meningkat hanya sebesar **3.73%** dari target 2016 sebesar Rp. 182,200.000,000,- menjadi Rp. 189.000.000.000,- dikarenakan diasumsikan akan beroprasinya wajib pajak PPJ Non PLN dikawasan industri, terjadi peningkatan jumlah pemasangan baru pengguna jasa PLN terutama di sektor rumah tangga terutama dipengaruhi oleh tumbuhnya perumahan baru di wilayah Kota Cilegon, dan tumbuhnya Ruko dan Perkantoran yang dapat meningkatnya potensi kebutuhan konsumsi listrik.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diasumsikan meningkat hanya sebesar **2,90%** dari target 2016 sebesar Rp. 690,000,000,- menjadi Rp. 710.000.000,- peningkatan tersebut tidak signifikan dikarenakan banyak tumbuh pengusaha galian C tanpa dokumen perijinan yang resmi (ilegal), lahan eksploitasi yang semakin dibatasi dan berkurang sehingga para pelaku usaha Galian C hanya mengolah bahan tambang yang dihasilkan dari luar wilayah kota cilegon. pendapatan dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan tidak dijadikan prioritas untuk peningkatan pendapatan

namun terlebih dalam rangka upaya pengendalian dan mengurangi kerusakan lingkungan.

- Pajak Parkir diasumsikan meningkat sebesar **5.38%** dari target 2016 sebesar Rp. 650.000,000,- menjadi Rp. 685.000.000,-. Peningkatan tersebut diasumsikan mengacu pada LPE Total Kota Cilegon yang diprediksi tumbuh mencapai angka 5,15%, hal tersebut potensi penambahan objek pajak parkir sangat kecil.
- Pajak Air Bawah Tanah diasumsikan meningkat hanya sebesar **5.56%** dari target 2016 sebesar Rp. 1.800,000,000,- menjadi Rp. 1.900,000,000,-, peningkatan tersebut diasumsikan peningkatan tersebut diasumsikan mengacu pada LPE Total Kota Cilegon yang diprediksi tumbuh mencapai angka 5,15% dan pendapatan sektor pajak air tanah tidak dijadikan prioritas untuk peningkatan pendapatan namun terlebih dalam rangka upaya pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya air, bentuk peningkatan pendapatan dan menjadi instrumen pengendalian DPPKD akan melakukan review terkait tarif dasar pemakaaian air bawah tanah terutama pada wilayah-wilayah zona rawan.
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diasumsikan meningkat sebesar **46,98%** dari target 2016 sebesar Rp. 100.000,000,000,- menjadi Rp. 146.980.850.000,- realisasi BPHTB tergantung pada transaksi atau peralihan hak atas bumi dan/atau bangunan, peningkatan tersebut diasumsikan bahwa banyak tumbuh perumahan-perumahan, tumbuhnya kawasan sentra perdagangan jasa dengan tumbuhnya ruko-ruko, dan akan dikembangkannya pembangunan apartemen di wilayah kota cilegon dengan nilai investasi yang cukup besar. DPPKD akan melakukan review terkait penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan yang dilakukan secara penilaian massal dan penilaian individual yang akan berdampak pada peningkatan potensi pendapatan atas transaksi/peralihan hak (BPHTB).

- Pajak Bumi dan Bangunan, diasumsikan meningkat sebesar **25.98%** dari target 2016 sebesar Rp. 63,500,000,000,- menjadi Rp. 80.000.000,000,- peningkatan tersebut diupayakan dengan cara melakukan review penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) melalui penilaian masal terutama pada wilayah kawasan strategis dengan pendekatan nilai harga pasaran. Dan dilakukan penilaian individual terhadap objek pajak industri yang potensial, melakukan upaya penagihan aktif dan memudahkan sistem pelayanan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan melakukan pinatausahaan piutang pajak bumi dan bangunan dengan cara melakukan validasi dan penagihan atas piutang PBB pelimpahan dari pemerintah pusat yang sangat berpotensi.
- Pada sektor **penerimaan Retribusi** mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.460.345.886,- atau sebesar 19,05 % menjadi Rp. 22.933.504.336,- dari target tahun 2016 sebesar Rp. 19.263.158.450,- peningkatan tersebut terjadi pada Retribusi Jasa Umum sebesar 5,46%, Retribusi Jasa Usaha sebesar 7,66%, dan Retribusi Perijinan Tertentu sebesar 30,87%. hal tersebut dikarenakan adanya upaya *Extensifikasi* dan *Intensifikasi* pada seluruh komponen Retribusi Daerah yang dikelola oleh SKPD pengelola Pendapatan di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon selain hal tersebut perlunya deregulasi penyesuaian tarif retribusi yang akan berdampak peningkatan pendapatan. Adanya potensi hilang dan bertambahnya kewenangan dalam pengelolaan jenis Retribusi Daerah sesuai kewenangan yang diamanatkan dalam Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang terpisahkan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 874.278.799,- atau sebesar (5,48%) menjadi Rp. 16.828.311.309,- dari target tahun 2016 sebesar Rp. 15.954.032.510,- peningkatan tersebut dipengaruhi dari peningkatan dari pengelolaan laba dari BPRS-CM sebesar

4,35%, Laba Bank Jabar Banten sebesar 5,20% dan PD-PCM sebesar 8,84%.

- Lain-lain PAD Yang Sah meningkat sebesar Rp. 1.413.116.696,- atau 1% menjadi Rp. 131.319.000.553,- dari target tahun 2016 sebesar Rp. 129.905.883.857,-. komponen yang memiliki potensi diperoleh dari pendapatan BLUD RSUD Kota Cilegon.

|| Prediksi Dana Perimbangan dari Target Tahun 2017 sebesar Rp. 945.117.536.906,- Terjadi peningkatan sebesar 3% atau sekitar Rp. 30,435,612,286,- dari target tahun 2016 sebesar Rp. 914.681.924.620,-, hal tersebut dipengaruhi oleh :

- Perkiraan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2017 sekitar 5,15 %.
- Dari Sektor Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak mengalami peningkatan sebesar Rp. 4,743,316,339,- atau sebesar 5% dari target tahun 2016 Sehingga target tahun 2017 sebesar Rp. 104,271,069,339,-.
- Peningkatan DAU Rp. 33,863,193,567,- atau sebesar 6% dari target tahun 2016 Sehingga target tahun 2017 sebesar Rp. 639,846,467,567 , -.
- Pengalokasian dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat yang setiap tahunnya diupayakan untuk terus mengalami peningkatan.
- Dengan diberlakukan Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait peralihan beberapa kewenangan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten akan menyebabkan bertambah dan berkurangnya jumlah pegawai sehingga berdampak pada perubahan pengalokasian gaji dan tunjangan pegawai dari Pemerintah Pusat.

|| Prediksi Lain-Lain Pendapatan yang Sah 2017 sebesar Rp. 182.066.124.945,- terjadi peningkatan sebesar 4% atau sebesar Rp. 6.681.921.845,- dari target tahun 2016 sebesar Rp. 175.384.203.100 , - hal tersebut dipengaruhi pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 2017 adalah dari Sektor Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten yang diasumsikan mengalami

peningkatan sebesar Rp. 7.519.393.345,- atau sebesar 5% dari target tahun 2016, sehingga target tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 152.066.124.945,-.

Tahun 2018

|| Prediksi Pendapatan Daerah 2018 ditargetkan meningkat hanya sebesar **3,57%** dari target 2017 sebesar Rp. 1.747.696.765.549,- menjadi Rp. 1.810.010.882.036,- prediksi tersebut diperoleh dari peningkatan PAD sebesar **2,63%**, pada Dana Perimbangan sebesar 4,32%, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya sebesar 4,39%.

|| Peningkatan PAD sebesar **2,63%** dari target 2017 sebesar Rp. 617.781.666.198,- menjadi Rp. 634.052.864.975,- hal tersebut diperoleh dari asumsi sebagai berikut:

- Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cilegon tahun 2018 diperkirakan Tumbuh 5,20%.
- Pada sektor penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar **4,81%** menjadi Rp. 468.173.476.881,- dari target tahun 2017 sebesar Rp. 446.700.850.000,-, adapun yang mempengaruhi hal tersebut sebagai berikut :
 - Pajak Hotel diasumsikan meningkat sebesar **9,20%** dari target 2017 sebesar Rp. 8,700,000,000,- menjadi Rp. 9.500.000.000,- dikarenakan adanya upaya intensifikasi dengan melakukan audit/ pemeriksaan yang intensif untuk mengawasi dan meminimalisir terjadinya kebocoran setoran pajak hotel yang dilaporkan/dibayarkan wajib pajak.
 - Pajak Restoran diasumsikan meningkat sebesar **8,93%** dari target 2017 sebesar Rp. 14.000.000.000,- menjadi Rp. 15.250.000.000,- peningkatan tersebut dikarenakan adanya upaya peningkatan pembinaan kepada para pelaku pengusaha restoran baru/tradisional untuk memperbaiki administrasi perpajakan, dan melakukan audit / pemeriksaan yang intensif untuk mengawasi dan meminimalisir terjadinya kebocoran

setoran pajak restoran yang dilaporkan/dibayarkan wajib pajak.

- Pajak Hiburan diasumsikan meningkat sebesar **9,17%** dari target 2017 sebesar Rp. 2.725.000.000,- menjadi Rp. 2.975.000.000,- dikarenakan adanya trend peningkatan usaha di sektor hiburan, upaya peningkatan tersebut dilakukan dengan kegiatan audit/ pemeriksaan yang intensif untuk mengawasi dan meminimalisir terjadinya kebocoran setoran pajak Hiburan yang dilaporkan/dibayarkan wajib pajak.
- Pajak Reklame diasumsikan meningkat sebesar **5,00%** dari target 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- menjadi Rp. 2.100.000.000,- hal tersebut diasumsikan meningkatnya jumlah Objek Pajak Reklame di sepanjang jalan protokol Kota Cilegon, dan Jalur lingkaran selatan (JLS) sehingga peningkatan LPE sektoral diasumsikan mencapai angka 5,20%.
- Pajak Penerangan Jalan diasumsikan meningkat hanya sebesar **5,25%** dari target 2017 sebesar Rp. 189.000.000.000,- menjadi Rp. 198.923.000.000,- dikarenakan diasumsikan akan beroprasinya wajib pajak PPJ Non PLN dikawasan industri, terjadi peningkatan jumlah pemasangan baru pengguna jasa PLN terutama di sektor rumah tangga terutama dipengaruhi oleh tumbuhnya perumahan baru di wilayah Kota Cilegon, dan tumbuhnya Ruko dan Perkantoran yang dapat meningkatnya potensi kebutuhan konsumsi listrik.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diasumsikan meningkat hanya sebesar **2,82%** dari target 2017 sebesar Rp. 710,000,000,- menjadi Rp. 730,000,000,- peningkatan tersebut tidak signifikan dikarenakan banyak tumbuh pengusaha galian C tanpa dokumen perijinan yang resmi (ilegal), lahan eksploitasi yang semakin dibatasi dan berkurang sehingga para pelaku usaha Galian C hanya mengolah bahan tambang yang dihasilkan dari luar wilayah Kota Cilegon. Pendapatan dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

tidak dijadikan prioritas untuk peningkatan pendapatan namun terlebih dalam rangka upaya pengendalian dan mengurangi kerusakan lingkungan.

- Pajak Parkir diasumsikan meningkat hanya sebesar **5.11%** dari target 2017 sebesar Rp. 685.000,000,- menjadi Rp. 720.000.000,-. Peningkatan tersebut diasumsikan mengacu pada LPE Total Kota Cilegon yang diprediksi tumbuh mencapai angka 5,15%, hal tersebut potensi penambahan objek pajak parkir sangat kecil.
- Pajak Air Bawah Tanah diasumsikan meningkat hanya sebesar **5.26%** dari target 2017 sebesar Rp. 1.900,000,000,- menjadi Rp. 2.000,000,000,- peningkatan tersebut diasumsikan peningkatan tersebut diasumsikan mengacu pada LPE Total Kota Cilegon yang diprediksi tumbuh mencapai angka 5,20% dan pendapatan sektor pajak air tanah tidak dijadikan prioritas untuk peningkatan pendapatan namun terlebih dalam rangka upaya pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya air.
- Pajak Bumi dan Bangunan, diasumsikan meningkat hanya sebesar **4,38%** dari target 2017 sebesar Rp. 80.000.000.000,- menjadi Rp. 83.500.000,000,- peningkatan tersebut diupayakan dengan cara melakukan review penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) melalui penilaian masal terutama pada wilayah kawasan strategis dengan pendekatan nilai harga pasaran. Dan dilakukan penilaian individual terhadap objek pajak industri yang potensial, melakukan upaya penagihan aktif dan memudahkan sistem pelayanan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan melakukan pinatausahaan piutang pajak bumi dan bangunan dengan cara melakukan validasi dan penagihan atas piutang PBB pelimpahan dari pemerintah pusat yang sangat berpotensi.
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami peningkatan sebesar **3,74%** dari target 2017 sebesar Rp. 146.980.850.000,- menjadi Rp. 152.475.476.881,- realisasi BPHTB

tergantung pada transaksi atau peralihan hak atas bumi dan/atau bangunan, asumsi target pada tahun 2018 hanya pada transaksi yang bersifat konvensional yakni pada objek pajak yang potensi teransaksinya tidak terlalu besar.

- Pada sektor **penerimaan Retribusi** mengalami kenaikan sebesar 6,70 % menjadi Rp. 24.470.611.388,- dari target tahun 2016 sebesar Rp. 22.933.504.336,- peningkatan tersebut terjadi pada Retribusi Jasa Umum sebesar 5,51%, Retribusi Jasa Usaha sebesar 7,72%, dan Retribusi Perijinan Tertentu sebesar 6,53%. hal tersebut dikarenakan adanya upaya *Extensifikasi* dan *Intensifikasi* pada seluruh komponen Retribusi Daerah yang dikelola oleh SKPD pengelola Pendapatan di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon selain hal tersebut perlunya deregulasi penyesuaian tarif retribusi yang akan berdampak peningkatan pendapatan.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang terpisahkan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 9,07% menjadi Rp. 18.354.443.651,- dari target tahun 2017 sebesar Rp. 16.828.311.309,-, peningkatan tersebut dipengaruhi dari peningkatan dari pengelolaan laba dari Perusahaan PDAM sebesar 25,00%, Laba BPRS-CM sebesar 4,17%, Laba Bank Jabar Banten sebesar 5,25% dan PD-PCM sebesar 8,84%.
- Lain-lain PAD Yang Sah mengalami penurunan (-6,29%) dari target tahun 2017 sebesar Rp. 131.319.000.553,- sehingga menjadi sebesar Rp. 123.054.33.054,-. penurunan tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya pendapatan Bunga Deposito akibat adanya kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer dilakukan dengan Surat Utang Negara. Sehingga Pemerintah Daerah tidak leluasa dalam memenajemn keuangan Kas Daerah.

|| Prediksi Dana Perimbangan dari Target Tahun 2018 sebesar Rp. 985.907.631.458,- Terjadi peningkatan sebesar 4,32% dari target tahun 2017 sebesar Rp. 945.117.536.906,- hal tersebut dipengaruhi oleh :

- Perkiraan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2018 sekitar 5,20 %.

- Dari Sektor Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak mengalami peningkatan sebesar 4,83% dari target tahun 2017 Sehingga target tahun 2018 sebesar Rp. 109.305.647.668,-.
- Peningkatan DAU sebesar 5,59% dari target tahun 2017 Sehingga target tahun 2018 sebesar Rp. 675.601.983.790,-.
- Pengalokasian dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat yang setiap tahunnya diupayakan untuk terus mengalami peningkatan.

|| Prediksi Lain-Lain Pendapatan yang Sah 2018 sebesar Rp. 190.050.385.604,- terjadi peningkatan sebesar 4,39% dari target tahun 2017 sebesar Rp. 182.066.124.945 ,- hal tersebut dipengaruhi pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 2018 adalah dari Sektor Bagi Hasil Pajak dari Provinsi mengalami peningkatan sebesar 5,25% dari target tahun 2017, sehingga target tahun 2018 diasumsikan menjadi sebesar Rp. 160.050.385.604,-.

Tahun 2019

|| Prediksi Pendapatan Pendapatan Daerah 2019 ditargetkan meningkat sebesar **4,57%** dari target 2018 sebesar Rp. 1.810.010.882.036,- menjadi Rp. 1.892.645.462.567,- hal tersebut disebabkan adanya asumsi peningkatan dari sektor PAD sebesar 4,90%, Dana Perimbangan sebesar 4,37%, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya sebesar 4,46%.

|| Peningkatan PAD sebesar **4,90%** dari target 2018 sebesar Rp. 634.052.864.975,- menjadi Rp. 665.103.829.732,-, hal tersebut diperoleh dari asumsi asumsi sebagai berikut :

- Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cilegon tahun 2019 diperkirakan Tumbuh 5,25%.
- Pada sektor penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar sebesar **4,89%** menjadi Rp. 491.047.429.652,- dari target tahun 2018 sebesar Rp. 468.173.476.881,- hal tersebut dikarenakan adanya upaya *Extensifikasi* dan *Intensifikasi* pada seluruh komponen Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Cilegon. asumsi peningkatan tersebut diperoleh dari sektor Pajak :

- Pajak Hotel diasumsikan meningkat hanya sebesar 8,69% dari target 2018 sebesar Rp. 9.500.000.000,- menjadi Rp. 10.326.000.000,- dikarenakan adanya upaya intensifikasi dengan melakukan audit/pemeriksaan yang intensif untuk mengawasi dan meminimalisir terjadinya kebocoran setoran pajak hotel yang dilaporkan/dibayarkan wajib pajak.
- Pajak Restoran diasumsikan meningkat hanya sebesar 8,96% dari target 2018 sebesar Rp. 15.250.000.000,- menjadi Rp. 16.617.000.000,- peningkatan tersebut dikarenakan adanya upaya peningkatan pembinaan kepada para pelaku pengusaha restoran baru/tradisional untuk memperbaiki administrasi perpajakan, dan melakukan audit / pemeriksaan yang intensif untuk mengawasi dan meminimalisir terjadinya kebocoran setoran pajak restoran yang dilaporkan/dibayarkan wajib pajak.
- Pajak Hiburan diasumsikan meningkat hanya sebesar 9,24% dari target 2018 sebesar Rp. 2.975.000.000,- menjadi Rp. 3.250.000.000,- dikarenakan adanya trend peningkatan usaha di sektor hiburan, upaya peningkatan tersebut dilakukan dengan kegiatan audit/ pemeriksaan yang intensif untuk mengawasi dan meminimalisir terjadinya kebocoran setoran pajak Hiburan yang dilaporkan/dibayarkan wajib pajak.
- Pajak Reklame diasumsikan meningkat sebesar **5,52%** dari target 2018 sebesar Rp. 2.100.000.000,- menjadi Rp. 2.216.000.000,- hal tersebut diasumsikan meningkatnya jumlah Objek Pajak Reklame di sepanjang jalan protokol Kota Cilegon, dan Jalur lingkaran selatan (JLS) sehingga peningkatan LPE sektoral diasumsikan mencapai angka 5,25%.
- Pajak Penerangan Jalan diasumsikan meningkat sebesar 5,30% dari target 2018 sebesar Rp. 198.923.000.000,- menjadi Rp. 209.466.000.000,- peningkatan tersebut dipengaruhi oleh trend peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sektoral

pengadaan listrik dan gas di tahun 2019 sebesar 6,82%.

- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diasumsikan meningkat hanya sebesar **2,74%** dari target 2018 sebesar Rp. 730.000.000,- menjadi Rp. 750.000.000,- peningkatan tersebut tidak signifikan dikarenakan banyak tumbuh pengusaha Galian C tanpa dokumen perijinan yang resmi (ilegal), lahan eksploitasi yang semakin dibatasi dan berkurang sehingga para pelaku usaha Galian C hanya mengolah bahan tambang yang dihasilkan dari luar wilayah Kota Cilegon, pendapatan dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan tidak dijadikan prioritas untuk peningkatan pendapatan namun terlebih dalam rangka upaya pengendalian dan mengurangi kerusakan lingkungan.
- Pajak Parkir diasumsikan meningkat hanya sebesar **5,42%** dari target 2018 sebesar Rp. 720.000.000,- menjadi Rp. 759.000.000,-. Peningkatan tersebut diasumsikan mengacu pada LPE Total Kota Cilegon yang diprediksi tumbuh mencapai angka 5,25%, hal tersebut potensi penambahan objek pajak parkir sangat kecil.
- Pajak Air Bawah Tanah diasumsikan meningkat hanya sebesar **5,00%** dari target 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,- menjadi Rp. 2.100.000.000,- peningkatan tersebut diasumsikan peningkatan tersebut diasumsikan mengacu pada LPE Total Kota Cilegon yang diprediksi tumbuh mencapai angka 5,25% dan pendapatan sektor pajak air tanah tidak dijadikan prioritas untuk peningkatan pendapatan namun terlebih dalam rangka upaya pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya air.
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diasumsikan meningkat hanya sebesar **3,29%** dari target 2018 sebesar Rp. 152.475.476.881,- menjadi Rp. 157.491.429.652,-. Realisasi BPHTB tergantung pada transaksi atau peralihan hak atas bumi dan/atau bangunan, asumsi target pada tahun 2019 hanya pada transaksi yang bersifat

konvensional yakni pada objek pajak yang potensi teransaksinya tidak terlalu besar.

- Pajak Bumi dan Bangunan, diasumsikan meningkat hanya sebesar **5,48%** dari target 2018 sebesar Rp. 83.500.000.000,- menjadi Rp. 88.072.000.000,- peningkatan tersebut diupayakan dengan cara melakukan review penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) melalui penilaian masal terutama pada wilayah kawasan strategis dengan pendekatan nilai harga pasaran. Dan dilakukan penilaian individual terhadap objek pajak industri yang potensial, melakukan upaya penagihan aktif dan memudahkan sistem pelayanan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan melakukan pinatausahaan piutang pajak bumi dan bangunan dengan cara melakukan validasi dan penagihan atas piutang PBB pelimpahan dari pemerintah pusat yang sangat berpotensi.
- Pada sektor **penerimaan Retribusi** mengalami kenaikan sebesar sebesar **6,58%** menjadi Rp. 26.081.583.806,- dari target tahun 2018 sebesar Rp. 24.470.611.388,- peningkatan tersebut terjadi pada Retribusi Jasa Umum sebesar 5,60%, Retribusi Jasa Usaha sebesar 7,83%, dan Retribusi Perijinan Tertentu sebesar 6,22%. Hal tersebut dikarenakan adanya upaya *Extensifikasi* dan *Intensifikasi* pada seluruh komponen Retribusi Daerah yang dikelola oleh SKPD pengelola Pendapatan di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon selain hal tersebut perlunya deregulasi penyesuaian tarif retribusi yang akan berdampak peningkatan pendapatan.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang terpisahkan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar sebesar 8,73% menjadi Rp. 19.955.906.595,- dari target tahun 2018. Peningkatan tersebut dipengaruhi dari peningkatan dari pengelolaan laba Perusahaan PDAM sebesar 20,00%, Laba BPRS-CM sebesar 4,00%, Laba Bank Jabar Banten sebesar 5,30% dan PD-PCM sebesar 8,84%.
- Lain-lain PAD Yang Sah meningkat sebesar **4,03%** diasumsikan menjadi Rp. 128.018.909.679,- dari target tahun 2018, komponen yang memiliki potensi diperoleh dari pendapatan BLUD RSUD Kota Cilegon.

|| Prediksi Dana Perimbangan dari Target Tahun 2019 sebesar Rp. 1.029.008.233.646,- Terjadi peningkatan sebesar 4,37% dari target tahun 2018 sebesar Rp. 985.907.631.458,-, hal tersebut dipengaruhi oleh :

- Perkiraan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2019 sekitar 5,25 %.
- Dari Sektor Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak mengalami peningkatan sebesar 4,89% dari target tahun 2018 Sehingga target tahun 2019 sebesar Rp. 114.652.665.338,-.
- Peningkatan DAU sebesar 5,59% dari target tahun 2018 Sehingga target tahun 2019 sebesar Rp. 713.355.568.308,-.
- Pengalokasian dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat yang setiap tahunnya diupayakan untuk terus mengalami peningkatan.

|| Prediksi Lain-Lain Pendapatan yang Sah 2019 sebesar Rp. 198.533.399.189,- terjadi peningkatan sebesar 4,46% dari target tahun 2018 sebesar Rp. 190.050.385.604,- hal tersebut dipengaruhi pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 2019 adalah dari Sektor Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten yang diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 5,30% dari target tahun 2018, sehingga target tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 168.533.399.189,-.

Tahun 2020

|| Prediksi Pendapatan Pendapatan Daerah 2020 ditargetkan meningkat sebesar 4,55% dari target 2019 sebesar Rp. 1.892.645.462.567,- menjadi Rp. 1.978.712.624.251,- hal tersebut disebabkan adanya asumsi peningkatan dari sektor PAD sebesar 4,74%, Dana Perimbangan sebesar 4,43%, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya sebesar 4,54%.

|| Peningkatan PAD sebesar 4,74% dari target 2019 sebesar Rp. 665.103.829.732,- sehingga menjadi Rp. 696.606.843.806,-, hal tersebut diperoleh dari asumsi asumsi sebagai berikut :

- Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cilegon tahun 2020 diperkirakan Tumbuh 5,30%

- Pada sektor penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar sebesar 4,97% menjadi Rp. 515.428.991.924,- dari target tahun 2019 sebesar Rp. 491.047.429.652,- hal tersebut dikarenakan adanya upaya *Extensifikasi* dan *Intensifikasi* pada seluruh komponen Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Cilegon. asumsi peningkatan tersebut diperoleh dari sektor Pajak :
 - Pajak Hotel diasumsikan meningkat hanya sebesar 8,95% dari target 2019 sebesar Rp. 10.326.000.000,- menjadi Rp. 11.250.000.000,- dikarenakan adanya upaya intensifikasi dengan melakukan audit/ pemeriksaan yang intensif untuk mengawasi dan meminimalisir terjadinya kebocoran setoran pajak hotel yang dilaporkan/dibayarkan wajib pajak.
 - Pajak Restoran diasumsikan meningkat hanya sebesar 8,95% dari target 2019 sebesar Rp. 16.617.000.000,- menjadi Rp. 18.104.000.000,-, peningkatan tersebut dikarenakan adanya upaya peningkatan pembinaan kepada para pelaku pengusaha restoran baru/tradisional untuk memperbaiki administrasi perpajakan, dan melakukan audit / pemeriksaan yang intensif untuk mengawasi dan meminimalisir terjadinya kebocoran setoran pajak restoran yang dilaporkan/dibayarkan wajib pajak dan dipengaruhi oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum yang diasumsikan sebesar 8,95%.
 - Pajak Hiburan diasumsikan meningkat hanya sebesar 9,69% dari target 2019 sebesar Rp. 3.250.000.000,- menjadi Rp. 3.565.000.000,- dikarenakan adanya trend peningkatan usaha di sektor hiburan, upaya peningkatan tersebut dilakukan dengan kegiatan audit/pemeriksaan yang intensif untuk mengawasi dan meminimalisir terjadinya kebocoran setoran pajak Hiburan yang dilaporkan/dibayarkan wajib pajak, dan dipengaruhi oleh peningkatan LPE sektoral mencapai angka 9,51%.

- Pajak Reklame diasumsikan meningkat sebesar **5,37%** dari target 2019 sebesar Rp. 2.216.000.000,- menjadi Rp. 2.335.000.000,- hal tersebut diasumsikan meningkatnya jumlah Objek Pajak Reklame di sepanjang jalan protokol Kota Cilegon, dan Jalur lingkaran selatan (JLS) dan dipengaruhi oleh LPE total yang diasumsikan mencapai angka 5,30% pada tahun 2020.
- Pajak Penerangan Jalan diasumsikan meningkat hanya sebesar 5,37% dari target 2019 sebesar Rp. 209.466.000.000,- menjadi Rp. 220.675.000.000,- peningkatan tersebut dipengaruhi oleh trend peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sektoral pengadaan listrik dan gas di tahun 2019 sebesar 6,82%.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diasumsikan meningkat hanya sebesar **2,67%** dari target 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- menjadi Rp. 770.000.000,- peningkatan tersebut tidak signifikan dikarenakan banyak tumbuh pengusaha galian C tanpa dokumen perijinan yang resmi (ilegal), lahan eksploitasi yang semakin dibatasi dan berkurang sehingga para pelaku usaha Galian C hanya mengolah bahan tambang yang dihasilkan dari luar wilayah Kota Cilegon, pendapatan dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan tidak dijadikan prioritas untuk peningkatan pendapatan namun terlebih dalam rangka upaya pengendalian dan mengurangi kerusakan lingkungan.
- Pajak Parkir diasumsikan meningkat hanya sebesar **5,27%** dari target 2019 sebesar Rp. 759.000.000,- menjadi Rp. 799.000.000,-. Peningkatan tersebut diasumsikan mengacu pada LPE Total Kota Cilegon yang diprediksi tumbuh mencapai angka 5,30%, hal tersebut potensi penambahan objek pajak parkir sangat kecil.
- Pajak Air Bawah Tanah diasumsikan meningkat hanya sebesar **4,76%** dari target 2019 sebesar Rp. 2.100.000.000,- menjadi Rp. 2.200.000.000,- peningkatan tersebut diasumsikan peningkatan tersebut diasumsikan mengacu pada LPE Total Kota

Cilegon yang diprediksi tumbuh mencapai angka 5,30% dan pendapatan sektor pajak air tanah tidak dijadikan prioritas untuk peningkatan pendapatan namun terlebih dalam rangka upaya pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya air.

- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diasumsikan meningkat hanya sebesar **3,47%** dari target 2019 sebesar Rp. 157.491.429.652,- menjadi Rp. 162.957.991.924,-. Realisasi BPHTB tergantung pada transaksi atau peralihan hak atas bumi dan/atau bangunan, asumsi target pada tahun 2019 hanya pada transaksi yang bersifat konvensional yakni pada objek pajak yang potensi teransaksinya tidak terlalu besar.
- Pajak Bumi dan Bangunan, diasumsikan meningkat hanya sebesar **5,34%** dari target 2019 sebesar Rp. 88.072.000.000,- menjadi Rp. 92.773.000.000,- peningkatan tersebut diupayakan dengan cara melakukan review penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) melalui penilaian masal terutama pada wilayah kawasan strategis dengan pendekatan nilai harga pasaran. Dan dilakukan penilaian individual terhadap objek pajak industri yang potensial, melakukan upaya penagihan aktif dan memudahkan sistem pelayanan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan melakukan pinatausahaan piutang pajak bumi dan bangunan dengan cara melakukan validasi dan penagihan atas piutang PBB pelimpahan dari pemerintah pusat yang sangat berpotensi.
- Pada sektor **penerimaan Retribusi** mengalami kenaikan sebesar sebesar 2,80% menjadi Rp. 26.811.894.152,- dari target tahun 2019 sebesar Rp. 26.081.583.806,- peningkatan tersebut terjadi pada Retribusi Jasa Umum sebesar 5,66%, Retribusi Jasa Usaha sebesar 7,88%, dan Retribusi Perijinan Tertentu mengalami penurunan sebesar -0,64%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh asumsi penurunan pada sektor Retribusi Perijinan Tertentu.

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang terpisahkan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar sebesar 5,93% menjadi Rp. 21.139.126.093,- dari target tahun 2019. Peningkatan tersebut dipengaruhi dari peningkatan dari pengelolaan Laba BPRS-CM sebesar 3,85%, Laba Bank Jabar Banten sebesar 5,35% dan PD-PCM sebesar 8,84%.
- Lain-lain PAD Yang Sah meningkat sebesar **4,07%** menjadi Rp. 133.226.831.636,- dari target tahun 2019, komponen yang memiliki potensi diperoleh dari pendapatan BLUD RSUD Kota Cilegon.

|| Prediksi Dana Perimbangan dari Target Tahun 2020 sebesar Rp. 1.074.553.926.104,- Terjadi peningkatan sebesar 4,37% dari target tahun 2019 sebesar Rp. 1.029.008.233.646,-, hal tersebut dipengaruhi oleh :

- Perkiraan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2020 sekitar 5,35 %.
- Dari Sektor Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak mengalami peningkatan sebesar 4,96% dari target tahun 2019 Sehingga target tahun 2020 sebesar Rp. 120.335.050.131,-.
- Peningkatan DAU sebesar 5,59% dari target tahun 2018 Sehingga target tahun 2019 sebesar Rp. 753.218.875.973,-.

Pengalokasian dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat yang setiap tahunnya diupayakan untuk terus mengalami peningkatan

|| Prediksi Lain-Lain Pendapatan yang Sah 2020 sebesar Rp. 207.551.854.341,- terjadi peningkatan sebesar 4,54% dari target tahun 2019 sebesar Rp. 198.533.399.189,- hal tersebut dipengaruhi dari Sektor Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten yang diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 5,35% dari target tahun 2019 sebesar Rp. 168.533.399.189,-, sehingga target tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 177.551.854.341,-.

Tahun 2021

|| Prediksi Pendapatan Pendapatan Daerah 2021 ditargetkan meningkat sebesar **4,33%** dari target 2020 sebesar Rp. 1.978.712.624.251,- menjadi Rp. 2.064.464.101.656,- hal

tersebut disebabkan adanya asumsi peningkatan dari sektor PAD sebesar 4,04%, Dana Perimbangan sebesar 4,47%, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya sebesar 4,58%.

|| Peningkatan PAD sebesar **4,04%** dari target 2020 sebesar Rp. 696.606.843.806,- sehingga menjadi Rp. 724.771.571.424,-, hal tersebut diperoleh dari asumsi asumsi sebagai berikut :

- Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cilegon tahun 2021 diperkirakan Tumbuh 5,35%
- Pada sektor penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar sebesar **4,97%** menjadi Rp. 541.045.134.999,- dari target tahun 2020 sebesar Rp. 515.428.991.924,- hal tersebut dikarenakan adanya upaya *Extensifikasi* dan *Intensifikasi* pada seluruh komponen Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Cilegon. asumsi peningkatan tersebut diperoleh dari sektor Pajak :
 - Pajak Hotel diasumsikan meningkat hanya sebesar 8,95% dari target 2020 sebesar Rp. 11.250.000.000,- menjadi Rp. 12.257.000.000,- dikarenakan adanya upaya intensifikasi dengan melakukan audit/ pemeriksaan yang intensif untuk mengawasi dan meminimalisir terjadinya kebocoran setoran pajak hotel yang dilaporkan/dibayarkan wajib pajak.
 - Pajak Restoran diasumsikan meningkat hanya sebesar 8,95% dari target 2020 sebesar Rp. 18.104.000.000,- menjadi Rp. 19.724.000.000,-, peningkatan tersebut dikarenakan adanya upaya peningkatan pembinaan kepada para pelaku pengusaha restoran baru/tradisional untuk memperbaiki administrasi perpajakan, dan melakukan audit / pemeriksaan yang intensif untuk mengawasi dan meminimalisir terjadinya kebocoran setoran pajak restoran yang dilaporkan/dibayarkan wajib pajak dan dipengaruhi oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum yang diasumsikan sebesar 8,95%.
 - Pajak Hiburan diasumsikan meningkat hanya sebesar 10,10 % dari target 2020 sebesar Rp. 3.565.000.000,- menjadi Rp. 3.925.000.000,-

dikarenakan adanya trend peningkatan usaha di sektor hiburan, upaya peningkatan tersebut dilakukan dengan kegiatan audit/ pemeriksaan yang intensif untuk mengawasi dan meminimalisir terjadinya kebocoran setoran pajak Hiburan yang dilaporkan/dibayarkan wajib pajak, dan dipengaruhi oleh peningkatan LPE sektoral mencapai angka 9,51%.

- Pajak Reklame diasumsikan meningkat sebesar **5,35%** dari target 2020 sebesar Rp. 2.335.000.000,- menjadi Rp. 2.460.000.000,- hal tersebut diasumsikan meningkatnya jumlah Objek Pajak Reklame di sepanjang jalan protokol Kota Cilegon, dan Jalur lingkaran selatan (JLS) dan dipengaruhi oleh LPE total yang diasumsikan mencapai angka 5,35% pada tahun 2021.
- Pajak Penerangan Jalan diasumsikan meningkat hanya sebesar 5,35% dari target 2020 sebesar Rp. 220.675.000.000,- menjadi Rp. 232.484.000.000,- peningkatan tersebut dipengaruhi oleh trend peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sektoral pengadaan listrik dan gas di tahun 2020 sebesar 6,82%.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diasumsikan meningkat hanya sebesar **2,60%** dari target 2020 sebesar Rp. 770.000.000,- menjadi Rp. 790.000.000,- peningkatan tersebut tidak signifikan dikarenakan banyak tumbuh pengusaha Galian C tanpa dokumen perijinan yang resmi (ilegal), lahan eksploitasi yang semakin dibatasi dan berkurang sehingga para pelaku usaha Galian C hanya mengolah bahan tambang yang dihasilkan dari luar wilayah Kota Cilegon, pendapatan dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan tidak dijadikan prioritas untuk peningkatan pendapatan namun terlebih dalam rangka upaya pengendalian dan mengurangi kerusakan lingkungan.
- Pajak Parkir diasumsikan meningkat hanya sebesar **5,38%** dari target 2020 sebesar Rp. 799.000.000,- menjadi Rp. 842.000.000,-. Peningkatan tersebut diasumsikan mengacu pada LPE Total Kota Cilegon

yang diprediksi tumbuh mencapai angka 5,35%, hal tersebut potensi penambahan objek pajak parkir sangat kecil.

- Pajak Air Bawah Tanah diasumsikan meningkat hanya sebesar **4,55%** dari target 2020 sebesar Rp. 2.200.000.000,- menjadi Rp. 2.300.000.000,- peningkatan tersebut diasumsikan peningkatan tersebut diasumsikan mengacu pada LPE Total Kota Cilegon yang diprediksi tumbuh mencapai angka 5,35% dan pendapatan sektor pajak air tanah tidak dijadikan prioritas untuk peningkatan pendapatan namun terlebih dalam rangka upaya pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya air.
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diasumsikan meningkat hanya sebesar **3,53%** dari target 2020 sebesar Rp. 162.957.991.924,- menjadi Rp. 168.706.134.999,-. Realisasi BPHTB tergantung pada transaksi atau peralihan hak atas bumi dan/atau bangunan, asumsi target pada tahun 2021 hanya pada transaksi yang bersifat konvensional yakni pada objek pajak yang potensi teransaksinya tidak terlalu besar.
- Pajak Bumi dan Bangunan, diasumsikan meningkat hanya sebesar **5,16%** dari target 2020 sebesar Rp. 92.773.000.000,- menjadi Rp. 97.557.000.000,- peningkatan tersebut diupayakan dengan cara melakukan review penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) melalui penilaian masal terutama pada wilayah kawasan strategis dengan pendekatan nilai harga pasaran. Dan dilakukan penilaian individual terhadap objek pajak industri yang potensial, melakukan upaya penagihan aktif dan memudahkan sistem pelayanan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan melakukan pinatausahaan piutang pajak bumi dan bangunan dengan cara melakukan validasi dan penagihan atas piutang PBB pelimpahan dari pemerintah pusat yang sangat berpotensi.
- Pada sektor **penerimaan Retribusi** mengalami kenaikan sebesar sebesar 3,85% menjadi Rp. 27.842.383.955,- dari

target tahun 2020 sebesar Rp. 26.811.894.152,- peningkatan tersebut terjadi pada Retribusi Jasa Umum sebesar 5,73%, dan terjadi peningkatan pada Retribusi Jasa Usaha sebesar 1,22%, dan Retribusi Perijinan Tertentu sebesar 4,76%.

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang terpisahkan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 6,00% menjadi Rp. 22.408.161.745,- dari target tahun 2020. Peningkatan tersebut dipengaruhi dari peningkatan dari pengelolaan Laba BPRS-CM sebesar 3,70%, Laba Bank Jabar Banten sebesar 5,35% dan PD-PCM sebesar 8,84%.
- Lain-lain PAD Yang Sah meningkat sebesar **0,19%** menjadi Rp. 133.475.435.724,- dari target tahun 2020, komponen yang memiliki potensi diperoleh dari pendapatan BLUD RSUD Kota Cilegon.

|| Prediksi Dana Perimbangan dari Target Tahun 2021 sebesar Rp. 1.122.629.630.738,- Terjadi peningkatan sebesar 4,47% dari target tahun 2020 sebesar Rp. 1.074.553.926.104,-, hal tersebut dipengaruhi oleh :

- Perkiraan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2021 sekitar 5,35 %.
- Dari Sektor Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak mengalami peningkatan sebesar 4,97% dari target tahun 2020 Sehingga target tahun 2021 sebesar Rp. 126.319.829.669,-.
- Peningkatan DAU sebesar 5,59% dari target tahun 2020 Sehingga target tahun 2021 sebesar Rp. 795.309.801.070,-.

Pengalokasian dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat yang setiap tahunnya diupayakan untuk terus mengalami peningkatan

|| Prediksi Lain-Lain Pendapatan yang Sah 2021 sebesar Rp. 217.052.899.494,- terjadi peningkatan sebesar 4,58% dari target tahun 2020 sebesar Rp. 207.551.854.341,- hal tersebut dipengaruhi dari Sektor Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten yang diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 5,35% dari target tahun 2020 sebesar Rp. 177.551.854.341,-, sehingga target tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 187.052.899.494,-.

3.3.3 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat

Berdasarkan peraturan perundangan maka pengeluaran periodik wajib dan mengikat terdiri dari :

1. Alokasi pendidikan termasuk gaji dan sertifikasi guru
2. Alokasi kesehatan
3. Alokasi pembangunan kewilayahan
4. Alokasi gaji dan tunjangan

Untuk alokasi gaji dan tunjangan dalam proyeksinya dilakukan *akress* sebesar 2.5%. Untuk lebih lengkapnya pengeluaran periodik wajib dan mengikat selama 5 tahun dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.5 Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Tahun 2017-2021 Kota Cilegon**

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
BELANJA WAJIB (A+B+C+D)	942,933,613,927	1,009,872,044,782	1,042,193,579,176	1,081,461,277,446	1,120,843,591,012
ALOKASI BELANJA PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (A)	75,235,517,000	90,500,544,102	94,632,273,128	98,935,631,213	103,222,705,083
ALOKASI BELANJA PENDIDIKAN (B)	349,539,353,110	362,002,176,407	378,529,092,513	395,742,524,850	412,890,820,331
-ALOKASI BELANJA GAJI GURU + SERTIFIKASI	259,734,860,207	266,228,231,713	272,883,937,505	279,706,035,943	286,698,686,842
- ALOKASI BELANJA LANGSUNG URUSAN PENDIDIKAN	89,804,492,902	95,773,944,694	105,645,155,007	116,036,488,907	126,192,133,490
ALOKASI BELANJA LANGSUNG URUSAN KESEHATAN (C)	146,868,994,801	152,052,889,406	159,242,642,489	166,748,811,063	174,194,897,520
ALOKASI GAJI DAN TUNJANGAN (D)	303,787,660,525	336,126,794,164	338,870,189,324	347,341,944,056	356,025,492,657



3.3.4 Ringkasan Kerangka Pendanaan Tahun 2017-2021

Setelah dilakukan analisis pada kerangka umum pendanaan berdasarkan metodologi pada bagian 3.3.1, maka didapat ringkasan kerangka pendanaan Tahun 2017-2021, sebagai berikut :

Tabel 3.6 Ringkasan Kerangka Pendanaan Tahun 2017-2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN	1,747,696,765,549	1,810,010,882,036	1,892,645,462,567	1,978,712,624,251	2,064,454,101,656
PENDAPATAN ASLI DAERAH	620,513,103,698	634,052,864,975	665,103,829,732	696,606,843,806	724,771,571,424
Pendapatan Pajak Daerah	446,700,850,000	468,173,476,881	491,047,429,652	515,428,991,924	541,045,134,999
Hasil Retribusi Daerah	22,933,504,336	24,470,611,388	26,081,583,806	26,811,894,152	27,842,838,956
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16,828,311,309	18,354,443,651	19,955,906,595	21,139,126,093	22,408,161,745
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	134,050,438,053	123,054,333,054	128,018,909,679	133,226,831,636	133,475,435,724
<i>Lain-Lain PAD yang Sah BLUD-RSUD</i>	<i>92,793,087,500</i>	<i>94,564,732,501</i>	<i>99,292,969,126</i>	<i>104,257,617,583</i>	<i>104,257,617,583</i>
<i>Lain-Lain PAD yang Sah BLUD-PEM</i>	<i>2,401,945,000</i>	<i>2,401,945,000</i>	<i>2,401,945,000</i>	<i>2,401,945,000</i>	<i>2,401,945,000</i>
<i>Sub Sektor Lainnya</i>	<i>12,973,355,553</i>	<i>12,202,955,553</i>	<i>12,438,295,553</i>	<i>12,679,519,053</i>	<i>12,926,773,141</i>
DANA PERIMBANGAN	945,117,536,906	985,907,631,458	1,029,008,233,646	1,074,553,926,104	1,122,629,630,738
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	104,271,069,339	109,305,647,668	114,652,665,338	120,335,050,131	126,319,829,669
Dana Alokasi Umum	639,846,467,567	675,601,983,790	713,355,568,308	753,218,875,973	795,309,801,070
Dana Alokasi Khusus	201,000,000,000	201,000,000,000	201,000,000,000	201,000,000,000	201,000,000,000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	182,066,124,945	190,050,385,604	198,533,399,189	207,551,854,341	217,052,899,494
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	152,066,124,945	160,050,385,604	168,533,399,189	177,551,854,341	187,052,899,494
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000
BELANJA	1,887,696,765,549	1,950,010,882,036	2,032,645,462,568	2,118,712,624,251	2,204,454,101,656



URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
BELANJA TIDAK LANGSUNG	691,024,609,223	716,544,666,580	727,673,508,550	744,740,346,263	762,233,854,920
Belanja Pegawai	631,024,609,223	671,544,666,580	682,673,508,550	699,740,346,263	717,233,854,920
Belanja Hibah	37,415,542,784	22,984,983,575	23,672,983,575	24,360,983,575	31,240,983,575
Belanja Bantuan Sosial	16,671,060,000	15,983,060,000	15,295,060,000	14,607,060,000	7,727,060,000
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	913,397,216	1,031,956,425	1,031,956,425	1,031,956,425	1,031,956,425
Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
BELANJA LANGSUNG	1,196,672,156,326	1,233,466,215,456	1,304,971,954,017	1,373,972,277,987	1,442,220,246,737
Alokasi Belanja Pembangunan Kewilayahan	75,235,517,000	90,500,544,102	94,632,273,128	98,935,631,213	103,222,705,083
Alokasi Belanja Langsung Urusan Pendidikan	89,804,492,902	95,773,944,695	105,645,155,008	116,036,488,907	126,192,133,490
Alokasi Belanja Langsung Urusan Kesehatan	146,868,994,801	152,052,889,406	159,242,642,489	166,748,811,063	174,194,897,520
<i>Alokasi BLUD RSUD</i>	<i>92,793,087,500</i>	<i>94,564,732,501</i>	<i>99,292,969,126</i>	<i>104,257,617,583</i>	<i>104,257,617,583</i>
<i>Alokasi Belanja Langsung Dinas Kesehatan</i>	<i>54,075,907,301</i>	<i>57,488,156,905</i>	<i>59,949,673,363</i>	<i>62,491,193,480</i>	<i>69,937,279,937</i>
Alokasi Belanja Generik	136,040,886,243	142,842,930,555	146,414,003,819	150,074,353,915	153,826,212,762
Alokasi Belanja Teknis	221,289,514,380	232,353,990,099	243,971,689,604	256,170,274,084	830,824,297,882
<i>Alokasi Belanja Teknis BLUD PEM</i>	<i>2,401,945,000</i>	<i>2,401,945,000</i>	<i>2,401,945,000</i>	<i>2,401,945,000</i>	<i>2,401,945,000</i>
<i>Alokasi Belanja Teknis SKPD</i>	<i>218,887,569,380</i>	<i>229,952,045,099</i>	<i>241,569,744,604</i>	<i>253,768,329,084</i>	<i>828,422,352,882</i>
Kegiatan Prioritas Daerah Non Urusan Pendidikan Dan Urusan Kesehatan	527,432,751,000	519,941,916,600	555,066,189,969	586,006,718,806	53,960,000,000
SURPLUS / (DEFISIT)	(140,000,000,000)	(140,000,000,000)	(140,000,000,000)	(140,000,000,000)	(140,000,000,000)
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	140,000,000,000	140,000,000,000	140,000,000,000	140,000,000,000	140,000,000,000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	140,000,000,000	140,000,000,000	140,000,000,000	140,000,000,000	140,000,000,000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-



URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
PEMBIAYAAN NETTO	140,000,000,000	140,000,000,000	140,000,000,000	140,000,000,000	140,000,000,000
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-	-

BAB 4

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

4.1.1 PERMASALAHAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Kota Cilegon saat ini masih menghadapi permasalahan ketenagakerjaan yang sangat kompleks. Jumlah pengangguran secara kumulatif terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah lulusan pendidikan formal ataupun juga arus pencari kerja dari daerah lain yang datang ke kota Cilegon. Hal ini terlihat dari tingkat pengangguran yang angkanya fluktuatif dari tahun 2010-2015.

Tabel 4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tingkat pengangguran terbuka	Persen	19.83	13.14	11.30	7.16	11.83	12.00

Tingkat pengangguran mencapai titik terendah dalam kurun waktu 5 tahun pada tahun 2013 namun pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 12 % dari jumlah angkatan kerja. Kenaikan sebesar 4.88 % dari tahun 2013 merupakan kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan awal RPJMD 2010-2015. Mengacu kepada target SPM di bidang ketenaga kerjaan terdapat satu indikator yang capaiannya masih dibawah target yakni : besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan. Dimana target pencapaian dalam SPM adalah sebesar 70% sedangkan capaian kota Cilegon pada tahun 2015 adalah sebesar 40.68%. Untuk mendorong pencapaian SPM tersebut diperlukan suatu intervensi pemerintah dalam penempatan tenaga kerja yang sudah melakukan pendaftaran status ketenagakerjaannya.

Di sisi lain fungsi dan peran Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Cilegon belum maksimal dalam memberikan keterampilan yang dibutuhkan para pencari kerja. BLK sebagai salah satu instrumen pengembangan Sumber Daya Manusia yang diharapkan dapat menjadi “Agent of Change” untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan dan etos kerja produktif belum dapat melaksanakan fungsi secara maksimal dan memberikan kontribusi secara optimal guna menghasilkan tenaga kerja kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dalam rangka mengatasi pengangguran.

Maka revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) harus dilakukan agar menjadi lembaga pelatihan kerja yang mampu mengelola dan mendayagunakan Sumber Daya pelatihan secara optimal dengan menerapkan program pelatihan berbasis kompetensi, sarana prasarana yang berstandar, serta instruktur/tenaga kepelatihan yang kompeten dalam rangka peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

4.1.2 PERMASALAHAN DI BIDANG USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN KOPERASI

Mencetak wirausaha yang mandiri merupakan strategi lain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menurunkan tingkat pengangguran. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah UMKM yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah.

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi merupakan salah satu fokus agenda dalam Masyarakat Ekonomi Asean. Hal ini menempatkan UMKM dan Koperasi dalam posisi strategis dalam konstelasi perekonomian nasional maupun internasional. Namun posisi yang strategis ini belum dapat dioptimalkan, hal ini terlihat dari prosentase koperasi yang aktif terhadap seluruh koperasi masih berada pada tingkat 59.26% pada tahun 2015 dan prosentase usaha kecil mikro terhadap seluruh UKM masih pada kisaran 99.26%, hal ini menunjukkan bahwa dari semua UKM di kota cilegon 99.26% masih pada level mikro dan kecil, hanya 0.74% berada pada level menengah. Untuk mendorong pencapaian dua indikator tersebut maka dibutuhkan intervensi pemerintah dalam pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi kemitraan antara UMKM dan Koperasi dengan pelaku ekonomi besar.

Untuk itu upaya pengembangan sentra-sentra industri UMKM harus lebih digalakkan, yang menjadi pusat pengembangan UMKM mulai dari proses standarisasi produk hingga ke pemasaran.

4.1.3 PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN

Permasalahan di bidang perdagangan antara lain keterbatasan sarana dan prasarana perdagangan.

Secara kuantitas, jumlah pasar publik yang ada masih belum memenuhi kebutuhan Kota Cilegon. Berdasarkan standar penataan ruang untuk tingkat kota dibutuhkan 1 pasar untuk 30.000 penduduk

sehingga jika dikaitkan dengan jumlah penduduk cilegon pada tahun 2015 sebesar 438.348 penduduk maka dibutuhkan 14 buah pasar untuk memenuhi kebutuhan kota Cilegon. Namun terdapat beberapa kendala dalam pemenuhan kebutuhan pasar, yang pertama adalah besarnya investasi untuk membangun pasar baru, kedua distribusi populasi penduduk yang secara spasial tidak merata. Berdasarkan penilaian adipura dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dari sisi kualitas, pasar tradisional yang ada saat ini masih belum memenuhi kualitas pasar yang bersih dan sehat.

4.1.4 PERMASALAHAN DI BIDANG KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan merupakan issue nasional, yang mana tingkat import pangan Indonesia cenderung meningkat, padahal Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Potret ketahanan pangan Kota Cilegon menunjukkan bahwa :

1. Ketersediaan pangan, sudah melebihi standar, dengan porsi terbesar supply dari daerah lain, dan dari sisi produksi masih merah;
2. Konsumsi masih rendah, factor penyebab antara lain tingkat daya beli ataupun juga kekurangfahaman masyarakat akan tingkat/variasi gizi, terutama konsumsi sayur dan buah.
3. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan belum optimal

Potret diatas menunjukkan bahwa ketersediaan bahan pangan sudah teratasi di kota Cilegon, hal ini diperkuat dengan persentase konsumsi non pangan di kota Cilegon yang berada di atas 50% dari total pendapatan perkapita. Namun hal ini harus juga di barengi dengan diversifikasi pola pangan dengan memperhatikan optimalisasi asupan gizi. Meskipun ketersediaan pangan sudah teratasi jalur distribusi harus tetap dioptimalkan karena Cilegon bukan merupakan basis produksi pangan.

4.1.5 PERMASALAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN

Indikator rata-rata lama sekolah Kota Cilegon sebesar 9,7 tahun menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Kota Cilegon sudah cukup baik, sudah lebih dari wajar dikdas 9 tahun. Fokus pendidikan ke depan adalah peningkatan mutu pendidikan, baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Pada jenjang pendidikan dasar, peningkatan mutu ditandai dengan peningkatan lulusan pendidikan dasar yang memiliki kemampuan kognitif,afektif, motorik dan karakter yang baik. Sedangkan pada pendidikan menengah, peningkatan mutu

pendidikan ditandai dengan peningkatan lulusan pendidikan menengah yang memiliki kompetensi untuk diserap di dunia kerja atau melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi.

Maka berbagai komponen yang berperan terhadap peningkatan mutu, baik sarana prasarana, kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum, serta sistem dan manajemen pendidikan harus menjadi fokus pemerintah ke depan.

4.1.6 PERMASALAHAN DI BIDANG KESEHATAN

Dalam lima tahun terakhir sebagian besar indikator pembangunan kesehatan di Kota Cilegon perkembangannya menunjukkan perbaikan. Namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian serius dari Pemerintah Daerah yakni Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Walaupun perkembangannya cenderung menurun namun angkanya relatif masih tinggi.

Terkait hal tersebut, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah pemerataan sarana prasarana kesehatan, khususnya akses terhadap sarana kesehatan rujukan serta sarana kesehatan dasar di wilayah yang masih terbatasnya transportasi dan infrastruktur. Tentu hal ini harus diiringi dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh layanan kesehatan, baik jumlah maupun jenisnya, untuk menghasilkan layanan kesehatan yang berkualitas.

4.1.7 PERMASALAHAN DI BIDANG KETAHANAN AIR BERSIH

Data menunjukkan bahwa sd tahun 2013 baru sekitar 21,63% penduduk yang terlayani PDAM, 64,63 % menggunakan air sumur dalam; Masih sekitar 13,74% yang belum terlayani air perpipaan maupun non perpipaan. Dengan keterbatasan kuota air PDAM dan PT KTI tentu perluasan cakupan pelayanan melalui perpipaan sangat terbatas, demikian juga tidak semua wilayah memiliki potensi air dalam. Ke depan krisis air bersih tidak mustahil terjadi di Kota Cilegon, apalagi Kota Cilegon tidak memiliki sumber air baku.

Berpedoman kepada Renstrada di bidang air bersih, selain mengoptimalkan kapasitas air baku yang dikelola PDAM, perlu dilakukan inovasi lain untuk menyediakan sumber air baru, antara lain melalui **Reverse Osmosis (desalinasi)** air laut.

4.1.8 PERMASALAHAN DI BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Permasalahan banjir

Hingga tahun 2015 masih terdapat 33 titik banjir yang genangannya lebih dari 2 jam (13 titik diantaranya di Ciwandan). Selain sistem drainase yang buruk, perilaku masyarakat yang belum disiplin dalam menjaga drainase lingkungan, merupakan faktor lain yang menyebabkan banjir.

Mengacu kepada masterplan drainase, prioritas penanganan banjir dilakukan melalui pembangunan tandon-tandon khususnya di titik-titik banjir, di samping juga normalisasi saluran/drainase secara berkelanjutan.

Perubahan perilaku masyarakat, harus dilakukan melalui upaya promotif dan edukatif secara berkelanjutan, di samping juga penerapan regulasi yang tegas.

2. Permasalahan Infrastruktur Jalan

Adanya pertumbuhan pusat kegiatan akibat investasi yang masuk dan pertumbuhan jumlah kendaraan yang cukup pesat akibat pertumbuhan kelas menengah yang tinggi membuat beban infrastruktur semakin tinggi.

Tingginya biaya investasi dalam peningkatan kualitas serta kuantitas infrastruktur jalan menjadi sebuah masalah tersendiri. Untuk menghindari penumpukan pelayanan pada satu wilayah maka diperlukan peningkatan aksesibilitas di wilayah lain sehingga selain untuk merangsang tumbuhnya pusat kegiatan baru hal tersebut juga akan menurunkan beban pelayanan infrastruktur di wilayah lainnya.

4.1.9 PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Sebagai kota industri, Kota Cilegon memiliki potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sangat tinggi. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus melakukan pengendalian dan pemantauan lingkungan secara berkesinambungan.

Sementara itu, tekanan pembangunan ekonomi yang terus tumbuh, akan mempengaruhi sistem ekologi di Kota Cilegon yang sedikit demi sedikit mengalami degradasi kualitas lingkungan. Sebagai daerah industri, Kota Cilegon menjadi daya tarik bagi para pendatang untuk mencari penghidupan. Kondisi ini akan mereduksi sumber daya alam Kota Cilegon secara perlahan. Sebagai contoh, ketersediaan sumber air

sebagai air baku dan air bersih yang sangat terbatas terus mengalami penurunan kuantitas, mengingat Kota Cilegon tidak mempunyai sumber air permukaan.

Sebagai daerah industri dengan pertumbuhan populasi akibat migrasi yang cukup tinggi, degradasi lingkungan merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang dihadapi Kota Cilegon. Masalah lingkungan ini bersifat kompleks dan multi dimensi karena melibatkan banyak pihak seperti masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah daerah sendiri. Degradasi lingkungan terjadi di berbagai bentang alam, mulai dari perbukitan hingga wilayah pesisir, yang terjadi secara terus menerus. Kondisi ini bukan hanya mempunyai dampak terhadap lingkungan fisik seperti hilangnya sumber daya hutan, pencemaran udara dan air, tetapi juga mempengaruhi keadaan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Salah satu penyumbang degradasi lingkungan adalah kegiatan pertambangan yang tidak terkendali yang tersebar di sepanjang Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Grogol dan Kecamatan Pulomerak. Tak urung kegiatan ini mendorong kerusakan struktur permukaan tanah, bentang tanah menjadi berlekuk, berlubang ataupun bertebing terjal serta merusak estetika lingkungan dan berpotensi menimbulkan bencana alam.

Untuk itu diperlukan upaya rehabilitasi, konservasi dan pelestarian lingkungan hidup, di samping peningkatan pengendalian lingkungan hidup melalui pengawasan pencemaran tanah, air dan udara secara berkelanjutan.

Sebagai daerah dengan pertumbuhan populasi akibat migrasi yang cukup tinggi ini, maka timbul berbagai masalah lingkungan yang bersifat kompleks dan multi dimensi karena melibatkan banyak pihak seperti masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah daerah sendiri. Degradasi lingkungan dari berbagai bentang alam, mulai dari perbukitan hingga wilayah pesisir terjadi secara terus menerus. Kondisi ini bukan hanya mempunyai dampak terhadap lingkungan fisik seperti hilangnya sumber daya hutan, pencemaran udara dan udara, tetapi juga akan mempengaruhi keadaan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Kemerosotan fungsi-fungsi ekologi di Kota Cilegon terutama di Kawasan lindung dan Ruang Terbuka Hijau bisa menimbulkan rangkaian masalah yang serius terhadap berbagai kegiatan ekonomi dari masyarakat maupun industri. Dampak kerugian yang disebabkan oleh banjir, erosi, hilangnya pasokan air, serta berkurangnya unsur

hara tanah akan jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang didapat dari ekstraksi sumber daya alam tersebut. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijak akan membawa permasalahan besar bagi Kota Cilegon baik skala kota maupun skala regional.

4.1.10 PERMASALAHAN DI BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Di tahun 2015, 14 titik kawasan kumuh seluas 35,92 hektar (14 titik), ditargetkan tertangani seluruhnya (secara fisik).

Melihat kondisi lapangan, dimungkinkan tumbuhnya potensi tumbuhnya kawasan kumuh baru, yang yang dikarenakan oleh penambahan penduduk, sementara ruang terbatas. Di sisi lain, perilaku masyarakat, dan kondisi ekonomi masyarakat, juga mendi faktor yang berpengaruh terhadap tumbuhnya kawasan kumuh. Tidak menutup kemungkinan, kawasan kumuh yang sudah tertangani, ke depan, kembali menjadi kumuh.

Maka prioritas penanganan kumuh ke depan harus ditangani secara lintas sektoral, tidak hanya terkait penanganan fisik, namun juga selaras dengan penanganan dari sisi kesehatan (perilaku hidup bersih), pendidikan serta pemberdayaan ekonominya.

4.1.11 PERMASALAHAN DI BIDANG PEMERINTAHAN UMUM

Aparatur yang berkualitas merupakan komponen penting bagi terwujudnya reformasi birokrasi. Banyak factor yang berpengaruh terhadap hal ini, mulai dari system perekrutan pegawai untuk mendapatkan inputan yang tepat, proses penempatan (the right man on the right place), hingga ke punishment and reward untuk mendorong kinerja pegawai.

Langkah paling awal dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah dilaksanakannya restrukturisasi SOTK Kota Cilegon. Kondisi saat ini banyak terjadi tumpang tindih kewenangan yang menyulitkan dalam pengukuran akuntabilitas kinerja. Anforjab sebagai dasar penyusunan draft SOTK, sudah tersedia, selanjutnya perlu disusun evaluasi jabatan hingga ke peta jabatan sebagai dasar penempatan pegawai.

4.1.12 PERMASALAHAN DI BIDANG PERTANIAN

Peningkatan hasil pertanian tentu membutuhkan ketersediaan lahan. Data menunjukkan bahwa lahan pertanian khususnya sawah semakin

berkurang. Tercatat luas sawah di tahun 2011 adalah seluas 1.805 hektar dan di tahun 2015 menjadi seluas 1.627 hektar. Terkait hal tersebut, diperlukan regulasi untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Di samping itu, dengan terbatasnya lahan pertanian yang dimiliki Cilegon, maka strategi peningkatan hasil pertanian harus dilakukan dengan meningkatkan produktivitas pertanian. Metode yang perlu dilakukan adalah dengan penerapan pertanian berbasis teknologi.

4.1.13 PERMASALAHAN DI BIDANG PENATAAN RUANG

Pertumbuhan aktifitas perkotaan ini diwadahi dalam pembangunan fisik yang merupakan bentuk konkrit pelaksanaan pembangunan yang membutuhkan ruang. Ruang yang dimaksud adalah wilayah Kota Cilegon yang sifatnya statis, sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mengharmoniskan antara kegiatan yang berlangsung di Kota Cilegon. Di dalam implementasinya tidak sedikit tantangan, kendala serta permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi dan harus dicari pemecahannya.

Untuk mewujudkan kota yang tertata rapi, nyaman dan layak huni sangat dipengaruhi oleh penataan ruang yang berkualitas. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon 2010-2030 sebagai perangkat perencanaan penataan ruang dihadapkan pada kemungkinan terjadinya simpangan-simpangan dalam pemanfaatan ruang serta dapat mengakomodir dinamika perkembangan yang bersifat eksternal dan internal. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang yang masih rendah turut mendorong terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai fungsinya. Maka peran pemerintah selaku regulator dituntut untuk lebih aktif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat melalui instrumen pengendali seperti pengawasan, monitoring maupun perizinan dalam pemanfaatan ruang.

Dari aspek estetika kota, wajah Kota Cilegon pun belum menunjukkan jatidirinya sebagai kota industri yang berwawasan lingkungan. Sepanjang jalan-jalan di pusat Kota Cilegon, bangunan-bangunan monumental seperti landmark, gerbang kota atau unsur fisik pembentuk estetika kota masih kurang. Sehingga dibutuhkan program-program pembangunan fisik untuk menjadikan wajah kota lebih, estetis, impresif dan berkarakter.

4.2 ISU STRATEGIS

Berpijak pada kondisi dan tantangan pembangunan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka isu strategis dan permasalahan pokok yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kota Cilegon tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan daya saing perekonomian

Struktur perekonomian daerah Kota Cilegon yang didominasi oleh sektor industri, pada satu sisi memberikan dampak positif terhadap tingginya laju pertumbuhan ekonomi daerah, namun di sisi lain dampak negatif yang ditimbulkan yaitu kerawanan sosial serta pencemaran lingkungan. Hal tersebut dikarenakan sektor industri yang berkembang di Kota Cilegon bukan merupakan industri yang berbasis sumberdaya lokal, namun merupakan industri yang padat modal serta membutuhkan tenaga kerja dengan skill atau keahlian khusus.

Disamping itu, perekonomian yang didominasi oleh industri, strukturnya relatif lemah dan sangat rawan terhadap adanya gejolak perekonomian. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumberdaya lokal berupa UMKM dan Koperasi harus lebih ditingkatkan kinerjanya agar dapat berperan lebih signifikan dalam pekerkomian daerah, serta mampu mendukung kinerja sektor industri daerah

Permasalahan pokok yang terkait dengan kualitas dan daya saing perekonomian adalah:

- Penataan dan pengembangan sentra usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta industri kecil dan menengah (IKM)
- Keterbatasan akses tenaga kerja lokal terhadap kesempatan kerja
- Peningkatan Kapasitas Balai Latihan Kerja
- Pengembangan dan Insentif perijinan usaha bagi pelaku usaha ekonomi padat karya
- Ketersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang berkualitas
- Pengembangan pertanian berbasis IPTEK
- Penumbuhan dan penguatan ekonomi kreatif
- Peningkatan sarana dan prasarana pasar tradisional yang bersih dan sehat

- Penumbuhan Destinasi pariwisata
- Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi didukung investasi;
- Produktivitas, kualitas dan daya saing perekonomian;
- Pengangguran dan produktivitas tenaga kerja;
- Ketahanan pangan;
- Penurunan jumlah penduduk miskin;
- Perluasan lapangan pekerjaan dan penurunan tingkat pengangguran.

2. Penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Sebagaimana umumnya kawasan perkotaan yang memiliki lahan yang sangat terbatas, Kota Cilegon dihadapkan dengan semakin menurunnya luas lahan terbuka akibat semakin intensifnya penggunaan lahan khususnya untuk permukiman. Dengan kecenderungan demikian, maka konsistensi terhadap implementasi perda penataan ruang harus diupayakan guna mencegah terjadinya konversi lahan yang masif sehingga akan berakibat pada menurunnya daya dukung lahan. Lebih jauh lagi, aktivitas di kawasan perkotaan yang sangat tinggi tanpa diimbangi oleh upaya pengendalian lingkungan, pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang akan sangat merugikan bagi kelangsungan pembangunan.

Permasalahan pokok yang terkait dengan penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah:

- Kualitas penataan ruang;
- Pemanfaatan dan pengendalian ruang
- Estetika Kota
- Kelestarian Lingkungan
- Pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dan buatan;
- Degradasi kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tanah)
- Ruang terbuka hijau
- Manajemen Mitigasi bencana

3. Kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan sosial

Isu kualitas sumber daya manusia, kemiskinan dan kesejahteraan sosial merupakan isu yang sangat substansial dalam kerangka

pembangunan daerah Kota Cilegon. Hal tersebut terkait dengan fungsi manusia itu sendiri sebagai subjek dan juga sekaligus objek dari kegiatan pembangunan, sehingga seluruh upaya pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk menunjang kelangsungan aktivitas manusia. Kesejahteraan sosial masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pembangunan Kota Cilegon. Taraf kesejahteraan sosial masyarakat merupakan salah satu indikator tercapai atau tidaknya program-program pembangunan yang telah dilaksanakan.

Permasalahan pokok yang terkait dengan kualitas sumberdaya manusia, kemiskinan dan kesejahteraan sosial adalah:

- Pelestarian dan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya;
 - Aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal dan non formal serta pendidikan keagamaan;
 - Aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat;
 - Perlindungan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
 - Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga;
 - Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender
 - Pengendalian pertumbuhan penduduk dan kependudukan;
 - Peningkatan relevansi pendidikan formal dan non formal yang dapat dimanifestasikan dengan pengembangan kecakapan dasar atau kecakapan hidup.
4. Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota

Peningkatan daya dukung dan pelayanan prasarana dan sarana serta fasilitas kota merupakan hal yang krusial dilakukan. Hal tersebut mengingat dampak yang sangat signifikan yang dapat ditimbulkan akibat kurang memadainya daya dukung infrastruktur tersebut, baik dampak secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Secara sosial, dampak yang ditimbulkan akibat keterbatasan infrastruktur wilayah adalah semakin meningkatnya kerawanan sosial yang mengancam ketentraman dan ketertiban umum. Dari sisi ekonomi, dampak yang ditimbulkan adalah menurunnya aksesibilitas pergerakan barang dan angkutan sehingga kegiatan koleksi dan distribusi menjadi terganggu.

Adapun dari sisi lingkungan, berbagai dampak yang dapat ditimbulkan diantaranya banjir, kawasan kumuh, kurangnya suplai air bersih, dll.

Permasalahan pokok yang terkait dengan peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota adalah:

- Kemacetan dan pelayanan transportasi yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan;
- Kualitas kondisi dan kinerja jaringan jalan;
- Bencana banjir;
- Perumahan dan Kawasan Kumuh;
- Kuantitas dan kualitas Infrastruktur;
- Pengelolaan Persampahan;
- Kualitas dan kuantitas sanitasi kota;
- Penyediaan Air Baku.

5. Kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum

Kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan di Kota Cilegon. Kinerja birokrasi yang efisien dan efektif dengan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang profesional dan akuntabel pada gilirannya dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat maka diharapkan masyarakat akan semakin produktif dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Permasalahan pokok yang terkait dengan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum adalah:

- Kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
- Kualitas dan daya saing pelayanan publik;
- Kapasitas dan kemandirian keuangan daerah;
- Kualitas kehidupan demokrasi;
- Ketaatan dan supremasi hukum;
- Kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum.
- Penataan Kewenangan antar Tingkat Pemerintahan
- Akuntabilitas dan Tata Pemerintahan



- Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah
- Kualitas Belanja dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
- Penguatan pengawasan
- Penataan manajemen SDM aparatur
- Perwujudan Cilegon Smart City

BAB 5

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 VISI

Berpijak pada kondisi saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi sampai dengan Tahun 2021 serta mempertimbangkan potensi dan harapan masyarakat Kota Cilegon maka **“visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2016-2021”** adalah sebagai berikut:

TERWUJUDNYA KOTA CILEGON YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA
BERBASIS INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA

5.2 MISI

Berdasarkan **VISI** tersebut, diperlukan sejumlah **MISI** yang **mengarahkan pencapaian visi secara sistematis**, yaitu :

1. MEMANTAPKAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN DAERAH

Melalui misi ini diharapkan, Kota Cilegon mampu mengembangkan dan memperkuat perekonomiannya agar memiliki daya saing secara nasional maupun global dengan menggunakan seluruh potensi yang ada yang berorientasi kepada keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif berbasis pada industri, perdagangan dan jasa.

2. MEMANTAPKAN LINGKUNGAN KOTA YANG ASRI DAN LESTARI

Melalui misi ini diharapkan, Kota Cilegon mampu mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga daya dukung dan fungsi lingkungan, serta menjaga rasio keseimbangan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan kawasan budidaya.

3. MEMANTAPKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Melalui misi ini diharapkan, Kota Cilegon mampu membangun sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dari segi jasmani dan rohani, berkualitas dan produktif serta memiliki kompetensi yang tinggi sehingga memiliki daya saing baik lokal ataupun global, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan kearifan budaya, serta memiliki akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, adil dan merata pada seluruh lapisan masyarakat.

4. MEMANTAPKAN PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA KOTA

Melalui misi ini diharapkan, Kota Cilegon mampu mewujudkan pelayanan sarana dan prasarana kota yang merata dan berkualitas yang berorientasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga dapat menunjang akselerasi pertumbuhan dan pembangunan kota.

5. MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Melalui misi ini diharapkan, Kota Cilegon mampu membangun pemerintahan yang akuntabel, bertanggung jawab, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta sadar akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan efisiensi dari birokrasi, membangun kemitraan yang serasi antara eksekutif dan legislatif, dan penciptaan kondisi politik yang stabil dan konsisten dalam penegakan hukum.

Guna mengarahkan rumusan **kebijakan tahunan** selama periode 2016-2021 dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut, **dituangkan lebih lanjut dalam 5 (lima) Agenda Pembangunan**, meliputi :

Pertama, Agenda Cilegon Mandiri

Dalam Agenda ini, diharapkan, Kota Cilegon mampu **mengembangkan dan memperkuat kemandirian perekonomian daerah** sehingga mampu bertahan di perekonomian nasional maupun global dengan menggunakan seluruh potensi yang ada yang **berorientasi kepada keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif** berbasis pada industri, perdagangan dan jasa

Kemandirian perekonomian daerah juga **mensyaratkan ketahanan ekonomi masyarakatnya** melalui kebijakan investasi padat karya, meningkatkan kompetensi tenaga kerja local, peningkatan peran industry mikro, kecil, menengah dan koperasi, peningkatan produktifitas pertanian, serta pembangunan pelabuhan daerah dan optimalisasi wilayah pesisir.

Agenda ini ditindaklanjuti dengan sejumlah kegiatan strategis, diantaranya :

1. Meningkatkan kemitraan IMKM dengan industry besar melalui penerapan link and match industry hulu ke hilir
2. Menumbuh kembangkan industry padat karya

3. Penerapan Konsep **ONE VILLAGE ONE PRODUCT** dalam pengembangan UMKM;
4. Pembangunan pasar tradisional yang sehat dan bersih
5. Pembangunan Pelabuhan Daerah
6. Pengembangan kawasan pertanian terpadu
7. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja
8. Pengembangan kawasan industri kecil
9. Penguatan pemberdayaan ekonomi lokal

Kedua, Agenda Cilegon Bersih dan Asri

Dalam Agenda ini diharapkan, Kota Cilegon **mampu mengelola** sumber daya daerah dan **kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan**, menjaga daya dukung dan fungsi lingkungan, serta **menjaga rasio keseimbangan ruang** yang serasi antara kawasan lindung dan kawasan budidaya

Agenda ini juga mensyaratkan kondisi penataan perkotaan yang berkualitas, terjaganya ketertiban dan keindahan kota, terciptanya kondisi kebersihan kota yang memadai, serta terpenuhinya ruang public bagi seluruh warga masyarakat.

Agenda ini ditindaklanjuti dengan sejumlah Program/Kegiatan Strategis, diantaranya :

1. Penataan Estetika Kota antara lain pembangunan ruang publik, taman-taman kota, taman tematik, penataan jalan-jalan protokol, gerbang selamat datang, penataan dan pengendalian bangunan dan reklame.
2. Penataan sektor informal
3. Penataan dan pengendalian bangunan dan reklame
4. Pemantauan Kualitas Lingkungan yang berkesinambungan
5. Penyiapan sarana dan prasarana pemantau lingkungan melalui pengadaan alat dan pembangunan laboratorium lingkungan.
6. Penataan Kawasan Budidaya dan Lindung
7. Peningkatan luas areal kawasan RTH
8. Pengembangan Wilayah pada Bagian Utara dan Selatan Kota Cilegon
9. Pengelolaan Mitigasi Bencana

Ketiga, Agenda Cilegon Sehat dan Cerdas,

Dalam agenda ini diharapkan, Kota Cilegon **mampu membangun sumberdaya manusia** yang cerdas, sehat dari segi jasmani dan rohani, berkualitas dan produktif serta memiliki kompetensi yang tinggi sehingga memiliki daya saing baik lokal ataupun global, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan kearifan budaya, **serta memiliki akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan masyarakat** yang berkualitas, terpadu, adil dan merata pada seluruh lapisan masyarakat.

Dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur kewenangan strata Pendidikan SMA/SMK menjadi kewenangan Provinsi, maka berbagai kebijakan terkait sekolah gratis yang selama ini diterapkan di Kota Cilegon menjadi fokus pembahasan tersendiri dengan pihak Provinsi, agar masyarakat yang selama ini bersekolah gratis di Kota Cilegon tetap mendapatkan sekolah gratis hingga jenjang SMA/SMK.

Oleh karenanya substitusi anggaran akan digunakan untuk pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama secara maksimal, termasuk meningkatkan kesejahteraan guru negeri dan swasta. Selain itu pengembangan fisik sekolah akan menjadi prioritas dengan konsep vertikal building mengingat kondisi lahan yang tidak memungkinkan adanya penambahan luasan.

Pada bidang kesehatan, **infrastruktur kesehatan** masih perlu terus dikembangkan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan terjangkau. Oleh karena itu, penyediaan sarana kesehatan yang mampu menjangkau seluruh masyarakat serta mudah diakses secara cepat adalah suatu keharusan. Selain itu, undang-undang kesehatan yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pembangunan bidang kesehatan dengan prosentase sebesar 10% dari total belanja langsung, menjadikan rujukan utama prioritas perencanaan dan penanggaran dalam penyusunan APBD setiap tahunnya.

Agenda ini diarahkan pada peningkatan kecerdasan, kesehatan masyarakat, serta kualitas dan ketrampilan SDM, dalam koridor pembangunan berkelanjutan.

Agenda ini ditindaklanjuti dengan sejumlah Program/Kegiatan strategis, diantaranya :

1. Penggalian dan pengembangan kesenian tradisional

2. Dukungan pelaku seni untuk mengaktualisasi apresiasi seni dan pembinaan seni
3. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar di setiap kelurahan sebagai pusat promosi dan edukasi kesehatan berkelanjutan
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
6. Peningkatan sarpras pendidikan dasar yang memenuhi standar pelayanan minimal
7. Jaminan kesejahteraan social bagi masyarakat miskin
8. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
9. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan pendidikan keagamaan
10. Mengupayakan Standarisasi Pengembangan Luas Lahan Pendidikan Dasar
11. Menerapkan Penguasaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pendidikan Dasar
12. Menjamin ketersediaan layanan pendidikan nonformal yang berkualitas

Keempat, Agenda Cilegon Nyaman

Dalam Agenda ini diharapkan, Kota Cilegon **mampu mewujudkan pelayanan sarana dan prasarana kota yang merata dan berkualitas** yang berorientasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga dapat menunjang akselerasi pertumbuhan dan pembangunan kota

Pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan pokok. Semakin maju ekonomi suatu daerah maka kebutuhan infrastruktur fisiknya akan semakin berkembang. Begitu juga sebaliknya, apabila pembangunan infrastruktur fisik tertahan, maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami hambatan yang serius. Atas dasar ini, pemerintah kota ke depan harus mempercepat program pembangunan infrastruktur kota.

Agenda Cilegon Maju dan Mandiri, dicerminkan dengan kondisi infrastruktur kota yang memadai serta mampu memenuhi kebutuhan aktifitas ekonomi segenap warga masyarakatnya.

Agenda ini ditindaklanjuti dengan sejumlah Program/Kegiatan strategis, diantaranya :

1. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Manajemen Parkir
2. Meningkatkan akses transportasi public yang nyaman, aman dan terjangkau
3. Pembangunan Jalan Lingkar Utara termasuk dengan utilitas yang terintegrasi
4. Melaksanakan peningkatan struktur dan kapasitas jalan jalan – jalan kota
5. Pembangunan Kolam Retensi dan normalisasi saluran drainase
6. Pembangunan Rumah Susun, Penataan Lingkungan dan Revitalisasi kawasan kumuh
7. Pengelolaan sampah terpadu (Integrated solid waste management) dengan membangun transfer depo di setiap kecamatan dan TPS 3R tersebar di seluruh wilayah.
8. Pembangunan IPLT
9. Pengembangan alternatif air baku
10. Kerjasama antar daerah dalam pemenuhan air baku
11. Percepatan Pembangunan Sanitasi Kota
12. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
13. Penyediaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan
14. Pembangunan Pelabuhan Warnasari

Kelima, Agenda Cilegon Berwibawa

Dalam Agenda ini diharapkan, Kota Cilegon **mampu membangun pemerintahan yang akuntabel, bertanggung jawab, serta sadar akan hak dan kewajiban**, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan efisiensi dari birokrasi, membangun kemitraan yang serasi antara eksekutif dan legislatif, dan penciptaan kondisi politik yang stabil dan konsisten dalam penegakan hukum

Reformasi birokrasi yang sekarang berjalan, perlu ditingkatkan akselerasinya, untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap birokrasi yang tangkas, tanggap, dan cepat. Oleh karena itu, sudah sangat mendesak untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Restrukturisasi organisasi pemerintahan harus dilakukan dengan memperkuat *front office* pelayanan publik.

Di samping itu, *reward* dan *punishment* di dalam birokrasi harus ditata ulang agar lebih adil dan proporsional. Gebrakan-gebrakan dalam reformasi birokrasi ini adalah suatu keharusan untuk menyesuaikan dengan dinamika demokratisasi dan pertumbuhan ekonomi.

Agenda ini diarahkan pada peningkatan tatakelola pemerintahan dalam koridor pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Agenda ini ditindaklanjuti dengan sejumlah Program/Kegiatan strategis, diantaranya :

1. Membangun pusat pemerintahan yang menggabungkan seluruh instansi pemerintah dalam satu area
2. Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel berbasis *e-government*, khususnya pada **Bidang Perencanaan, Penganggaran dan layanan publik**
3. Melaksanakan Renumerasi Pegawai
4. Optimalisasi Pelayanan Publik pada seluruh strata pemerintahan (Kota, Kecamatan dan Kelurahan)
5. Membangun *integrated city control* dengan memanfaatkan *Wireless Sensor Network* yang mampu memantau seluruh wilayah Kota Cilegon, termasuk di dalamnya mengakomodir implementasi *electronic government* dalam hubungannya dengan *Government to Government*, *Government to Business*, dan *Government to Citizen*.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

5.3.1 Tujuan Dan Sasaran pada Misi1 : Memantapkan Kemandirian Perekonomian Daerah

Tujuan dan Sasaran Misi 1 : Memantapkan Kemandirian Perekonomian Daerah adalah sebagai berikut:

Tujuan	Indikator	Capaian Kinerja			Sasaran	Indikator
		Sat	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)		
1 Meningkatkan keberdayaan perekonomian	1.1 Indeks Daya Beli Masyarakat (Purchasing Power Parity)	Poin	76.23	77.31		
	1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	< 11,44	< 7,01		
					1.1 Meningkatnya kesempatan kerja	1.1.1 Cakupan Kasus Ketenagakerjaan



Tujuan		Indikator		Capaian Kinerja			Sasaran		Indikator							
				Sat	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)										
							masyarakat dan Perlindungan Ketenagakerjaan		yang diselesaikan							
								1.1.2	Tingkat penempatan tenaga kerja							
							1.2	Meningkatnya keberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil								
									1.2.1	Proporsi Usaha Kecil terhadap Usaha Mikro & Kecil						
									1.2.2	Proporsi Koperasi Aktif terhadap Jumlah Seluruh Koperasi						
							1.3	Meningkatnya ketahanan pangan								
									1.3.1	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan						
									1.3.2	Ketersediaan pangan utama						
							2	Meningkatkan pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah								
									2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5 - 6	6 - 6,5			
						2.1			Meningkatnya peran sektor industri, perdagangan dan jasa sebagai penggerak utama perekonomian daerah							
										2.1.1	Laju PDRB ADHK sektor industri pengolahan					
										2.1.2	Laju PDRB ADHK sektor perdagangan					
										2.1.3	Laju PDRB ADHK sektor jasa					
						2.2			Terwujudnya peningkatan investasi							
										2.2.1	Pertumbuhan realisasi investasi					

5.3.2 Tujuan Dan Sasaran pada Misi 2 : Memantapkan Lingkungan Kota Yang Asri dan Lestari

Tujuan dan sasaran Misi 2 : Memantapkan Lingkungan Kota Yang Asri dan Lestari adalah sebagai berikut :

Tujuan	Indikator	Capaian Kinerja			SASARAN	INDIKATOR
		Sat	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)		
1 Mewujudkan penataan ruang dan perkotaan yang asri	1.1 Proporsi ruang terbuka hijau (RTH) terhadap luas wilayah Kota Cilegon	%	15	30		
					1.1 Terwujudnya penataan ruang yang serasi dan terpadu	1.1.1 Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukannya
						1.2.1 Tingkat kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan
					1.2 Terwujudnya lingkungan kota yang bersih dan asri	1.2.1 Cakupan pelayanan persampahan
						1.2.2 Proporsi RTH Publik terhadap luas wilayah Kota Cilegon
					1.3 Terwujudnya perumahan dan pemukiman yang tertata dan terpadu	1.3.1 Persentase kawasan kumuh
						1.3.2 Persentase permukiman yang memiliki prasarana, sarana dan utilitas umum



Tujuan		Indikator		Capaian Kinerja			SASARAN		INDIKATOR	
				Sat	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)				
									sesuai standar	
2	Menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan	1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	51	60				
							1.1	Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	1.1.1	Indeks Kualitas Udara
									1.2.1	Indeks Kualitas Air
							1.2	Meningkatnya perlindungan ekosistem dan sumberdaya alam	1.2.1	Proporsi luasan tutupan vegetasi di Kota Cilegon

5.3.3 Tujuan dan Sasaran Pada Misi 3 : Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Tujuan dan sasaran Misi 3 : Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut:

Tujuan	Indikator	Capaian Kinerja			Sasaran	Indikator
		Sat	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)		
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia					
		1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72.66	75.72
					1.1	Terwujudnya ekosistem pendidikan yang merata, terjangkau, bermutu dan kompetitif bagi masyarakat
					1.1.1	Rata-rata lama sekolah
					1.1.2	Harapan lama sekolah
						Pemenuhan SPM penyelenggaraan pendidikan
					1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
					1.2.1	Angka Harapan Hidup
					1.2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang pelayanan kesehatan
					1.3	Meningkatnya pemasyarakatan olahraga dan kualitas peran pemuda dalam pembangunan
					1.3.1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam olahraga
					1.3.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan
2	Meningkatkan kesejahteraan sosial					
		2.1	Tingkat kemiskinan	%	< 3,9	< 3,6



Tujuan		Indikator		Capaian Kinerja			Sasaran		Indikator	
				Sat	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)				
		2.2	Indeks Pembangunan Gender	%	60.48	62.94				
							2.1	Menurunnya penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan RTS		
									2.1.1	Proporsi penanganan PMKS
									2.1.2	Cakupan penanganan rumah tangga sasaran
							2.2	Meningkatnya kualitas keluarga dan pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga sasaran		
									2.2.1	Tingkat pertumbuhan alamiah penduduk
									2.2.2	Peningkatan kualitas keluarga
							2.3	Terwujudnya kesetaraan serta pemenuhan hak anak dan perempuan		
									2.3.1	Tingkat perwujudan Kota Layak Anak
									2.3.2	Tingkat partisipasi perempuan dalam program pemerintah

5.3.4 Tujuan dan Sasaran pada Misi 4 : Memantapkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kota

Tujuan dan sasaran Misi 4 : Memantapkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kota adalah sebagai berikut:

Tujuan		Indikator		Capaian Kinerja			Sasaran		Indikator	
				Sat	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)				
1	Meningkatkan pelayanan infrastruktur fisik dan transportasi untuk mendukung produktivitas kawasan dan perekonomian daerah									
		1.1	Pertumbuhan laju PDRB sektor konstruksi, transportasi dan pergudangan	%	6 - 6,5	6,5 - 7				
		1.2	Rata-rata jarak dan waktu tempuh moda transportasi di jalan perkotaan	Km / jam	30	40				
							1.1	Terwujudnya pelayanan prasarana jalan dan jembatan yang memadai dan berkualitas	1.1.1	Proporsi jalan dan jembatan dalam kondisi baik
							1.1.2		Tingkat pengembangan kapasitas jalan dan jembatan	
							1.2	Terwujudnya pelayanan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai dan handal	1.2.1	Proporsi penggunaan sarana transportasi umum
					1.2.2	Tingkat pemenuhan kelengkapan prasarana perhubungan				



Tujuan		Indikator		Capaian Kinerja			Sasaran		Indikator	
				Sat	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)				
							1.3	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan air bersih, saluran irigasi dan penanganan banjir		
									1.3.1	Cakupan pelayanan air bersih
									1.3.2	Persentase luasan yang masih tergenang (lebih dari 30 cm selama 2 jam)

5.3.5 Tujuan dan Sasaran pada Misi 5 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan

Tujuan dan sasaran Misi 5 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tujuan	Indikator	Capaian Kinerja			Sasaran	Indikator
		Sat	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)		
1 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1.1 Penilaian akuntabilitas kinerja (LAKIP) daerah	Poin (A/B/C)				
	1.2 Opini BPK	WDP / WTP	WTP	WTP		
					1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	
						1.1.1 Proporsi OPD dengan nilai LAKIP minimal B
						1.1.2 Proporsi OPD yang memiliki maturitas SPIP level 3 (Terdefinisi)
						1.1.3 Tingkat kinerja pegawai (rata-rata nilai SKP)
					1.2 Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	
						1.2.1 Tingkat realisasi Belanja
						1.2.2 Tingkat pertumbuhan PAD
						1.2.3 Persentase aset daerah dalam kondisi baik
					1.3 Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	
						1.3.1 Tingkat ketersediaan data sektoral daerah
						1.3.2 Ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan



Tujuan		Indikator		Capaian Kinerja			Sasaran		Indikator	
				Sat	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)				
										yang tepat waktu
							1.4	Terwujudnya pelaksanaan penataan dan pengembangan produk hukum dan produk legislatif daerah secara integratif dan bersinergi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah	1.4.1	Rata-rata persentase hasil reses yang ditindaklanjuti
							1.5	Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu menuju tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	1.5.1	Cakupan pemenuhan infrastruktur dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks implementasi <i>Smart City</i>
									1.5.2	Tingkat penetrasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
2	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kota	Poin						
							2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	2.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Perijinan
									2.1.2	Indeks Kepuasan



Tujuan		Indikator		Capaian Kinerja			Sasaran		Indikator	
				Sat	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)				
3	Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat									Masyarakat pada Pelayanan Non Perijinan
							2.2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan informasi dan kepastakaan yang berkualitas	2.2.1	Tingkat pemenuhan dan penetrasi media informasi publik
		3.1	Penurunan Kasus SARA, Konflik Sosial dan Pelanggaran PERDA	%						
							3.1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum daerah	3.1.1	Presentase penurunan kasus pelanggaran perda
							3.2	Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran	3.2.1	Indeks Resiko bencana

BAB 6

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka perlu disusun strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Visi dan misi pembangunan yang telah dirumuskan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi selama lima tahun ke depan.

Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dalam berbagai target baik jangka pendek maupun jangka menengah, yang tentunya mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah. Terkait dengan hal ini, salah satu strategi pembiayaan yang akan dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan meningkatkan kerjasama/dukungan pembiayaan melalui Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) khususnya dalam pembanguana fasilitas strategis Daerah.

6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

6.1.1 Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Misi 1 : Memantapkan Kemandirian Perekonomian Daerah

Berpijak pada upaya untuk mencapai sasaran Misi 1 : Memantapkan Kemandirian Perekonomian Daerah, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan keberdayaan perekonomian					
		1.1	Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat dan Perlindungan Ketenagakerjaan	1.1.1	Peningkatan Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan	Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
				1.1.2	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, Pelayanan dan Aksesibilitas Informasi Ketenagakerjaan	Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja melalui Optimalisasi Fungsi BLK dan meningkatkan Aksesibilitas Informasi Ketenagakerjaan dan Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan
				1.2	Meningkatnya keberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	
				1.2.1	Peningkatan pembinaan, fasilitasi peningkatan kualitas SDM, kapasitas kelembagaan dan manajemen, akses permodalan, pemasaran produk dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. bagi UMKM dan koperasi	Memberdayakan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan serta pemanfaatan teknologi yang dimanifestasikan dalam konsep science and technopark dengan memberdayakan interaksi pemerintah, masyarakat, civitas perguruan tinggi, dan pelaku industri untuk meningkatkan kapasitas produksi serta menjalin konektivitas hasil produksi UMKM dengan rantai produksi industri menengah di Kota Cilegon Memberdayakan usaha Koperasi melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
						para pemangku kepentingan
				1.2.2	Peningkatan keberdayaan masyarakat melalui aspek pemanfaatan teknologi dan kelembagaan/komunitas	Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG) yang dimanifestasikan dalam wadah interaksi antar kelompok usaha bersama/kelembagaan swadaya masyarakat, civitas perguruan tinggi, dan pelaku industri di Kota Cilegon
		1.3	Meningkatnya ketahanan pangan			
				1.3.1	Peningkatan daya saing SDM dan pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan SDM, pemanfaatan ilmu pengetahuan & teknologi, serta pemberdayaan berbasis komunitas Meningkatkan produktivitas peternakan dan perikanan melalui peningkatan SDM, pemanfaatan ilmu pengetahuan & teknologi, peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, serta pemberdayaan masyarakat atau komunitas pelaku usaha sektor peternakan Meningkatkan produktivitas perikanan dan perikanan melalui peningkatan SDM, pemanfaatan ilmu pengetahuan &



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
						teknologi, serta pemberdayaan masyarakat atau komunitas pelaku usaha sektor perikanan
				1.3.2	Peningkatan tata kelola ketahanan pangan	Meningkatkan upaya-upaya diversifikasi dan keamanan pangan
						Meningkatkan tata kelola distribusi pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga
2	Meningkatkan pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah	2.1	Meningkatnya peran sektor industri, perdagangan dan jasa sebagai penggerak utama perekonomian daerah	2.1.1	Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah	Mendorong industri kecil dan menengah dalam pemenuhan standar/regulasi dan meningkatkan konektivitas rantai produksi industri kecil dan menengah (IKM) terhadap rantai produksi industri besar
				2.1.2	Peningkatan tata kelola dan pengembangan sarana & prasarana perdagangan perkotaan	Mengembangkan fungsi dan pengelolaan pasar & Meningkatkan pengawasan aktivitas perdagangan dalam upaya melindungi konsumen dan menjaga stabilitas harga barang pokok dan barang penting
				2.1.3	Pengembangan sektor pariwisata	Pengembangan destinasi wisata daerah serta pembinaan, fasilitasi usaha kepariwisataan, dan Ekonomi Kreatif
		2.2	Terwujudnya peningkatan investasi	2.2.1	Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan kualitas	Meningkatkan upaya promotif Kota Cilegon sebagai tujuan investasi



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
					pelayanan penanaman modal	pada skala nasional dan internasional
						Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal

6.1.2 Strategi Dan Arah kebijakan Pada Misi 2 : Memantapkan Lingkungan Kota Yang Asri dan Lestari

Berpijak pada upaya untuk mencapai sasaran Misi 2 : Memantapkan Lingkungan Kota Yang Asri dan Lestari maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	Mewujudkan penataan ruang dan perkotaan yang asri	1.1	Terwujudnya penataan ruang yang serasi dan terpadu	1.1.1	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang dan bangunan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang
						Meningkatkan pengendalian tata bangunan, reklame, dan pengembangan gedung negara
						Mewujudkan kualitas Data Perencanaan Tata Ruang dan Pekerjaan Umum
		1.2	Terwujudnya lingkungan kota yang bersih dan asri	1.2.1	Peningkatan pelayanan persampahan	Meningkatkan pelayanan persampahan melalui pengembangan sarana dan prasarana persampahan serta pengelolaan sampah berbasis komunitas
				1.2.2	Peningkatan ketersediaan taman publik untuk menunjang keberadaan ruang terbuka hijau	Mewujudkan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan taman sebagai ruang publik yang terpadu
						Mewujudkan pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
						sarana dan prasarana arsitektur perkotaan
		1.3	Terwujudnya perumahan dan pemukiman yang tertata dan terpadu	1.3.1	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman secara terpadu	Mewujudkan penanganan kawasan kumuh secara terpadu serta meningkatkan kualitas penataan, pengembangan dan pengendalian kawasan pemukiman dan perumahan
						Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan
2	Menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan					
		2.1	Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	2.1.1	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran udara dan air	Meningkatkan pengawasan pencemaran sungai dan udara serta mengendalikan limbah industri sesuai dengan regulasi lingkungan
						Mewujudkan perencanaan tata kelola lingkungan dan upaya-upaya promotif pengelolaan lingkungan berbasis komunitas



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
		2.2	Meningkatnya perlindungan ekosistem dan sumberdaya alam	2.2.1	Peningkatan pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan, serta melestarikan vegetasi	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan dan lingkungan, serta meningkatkan daya dukung lingkungan melalui pelestarian vegetasi

6.1.3 Strategi Dan Arah kebijakan Pada Misi 3 : Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Berpijak pada upaya untuk mencapai sasaran Misi 3 : Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1.1	Terwujudnya ekosistem pendidikan yang merata, terjangkau, bermutu dan kompetitif bagi masyarakat	1.1.1	Memperluas cakupan dan meningkatkan pelayanan pendidikan dasar yang merata, terjangkau dan bermutu serta memperluas cakupan pelayanan dan pembinaan pendidikan kesetaraan, anak usia dini, kemasyarakatan, dan informal	Penyediaan sarana dan fasilitas pembelajaran dan fasilitas pendukung, serta bantuan biaya pendidikan bagi Sekolah Dasar
						Penyediaan sarana dan fasilitas pembelajaran dan fasilitas pendukung, serta bantuan biaya pendidikan bagi Sekolah Menengah Pertama
						Pembinaan dan pengembangan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan serta sosialisasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, dan Lembaga Kursus
						Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1.1	Terwujudnya ekosistem pendidikan yang merata, terjangkau, bermutu dan kompetitif bagi masyarakat	1.1.2	Mewujudkan kelestarian seni dan budaya untuk mendukung pendidikan karakter bagi usia sekolah serta menjaga kearifan lokal	Meningkatkan pembinaan seni tradisional, kelestarian nilai budaya, pembinaan sejarah, pengelolaan museum dan cagar budaya
		1.2				



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.2.1	Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, kualitas gizi masyarakat dan perluasan cakupan pelayanan kesehatan khusus dan rujukan	Meningkatkan pola hidup sehat masyarakat melalui upaya-upaya promotif terkait kesehatan pada keluarga, pemenuhan gizi, dan kebiasaan berolahraga Meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang kesehatan melalui mekanisme pembiayaan kesehatan (Jaminan Kesehatan), penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, mengembangkan sumber-sumber daya kesehatan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas penyedia jasa kesehatan serta peredaran obat dan makanan Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan Kesehatan pada RSUD
			Meningkatnya pemasyarakatan olahraga dan kualitas peran pemuda dalam pembangunan	1.3		
				1.3.1	Peningkatan prestasi olahraga, dan pembudayaan olahraga melalui pembinaan	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pemuda dan olahraga Meningkatkan upaya promosi dalam rangka membudayakan olahraga dan



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
						melaksanakan pembinaan dan pelatihan atlet
						Meningkatkan Pembinaan terhadap organisasi Kepemudaan dalam rangka menyelaraskan program kerja kepemudaan
2	Meningkatkan kesejahteraan sosial	2.1	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan RTS	2.1.1	Peningkatan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat	Meningkatkan cakupan layanan perlindungan sosial dan cakupan jaminan sosial bagi masyarakat miskin
						Meningkatkan layanan rehabilitasi sosial yang terkait kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas & Tuna Sosial serta Peningkatan Kapasitas PMKS dan Pengelolaan Rumah Singgah
				2.1.2	Peningkatan pemberdayaan sosial dalam penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan keberdayaan sosial masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan perorangan dan keluarga, kelembagaan, serta penanganan fakir miskin
		2.2	Meningkatnya kualitas keluarga dan pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga sasaran	2.2.1	Peningkatan upaya pengendalian penduduk	Melaksanakan Pembinaan Masyarakat untuk mewujudkan Ketahanan Keluarga
						Melaksanakan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dalam upaya



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
						mengendalikan penduduk
		2.3	Terwujudnya kesetaraan pemenuhan anak perempuan serta hak dan	2.3.1	Mewujudkan pembangunan berbasis gender dan meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan pada bidang ekonomi, bidang sosial, hukum dan politik, serta upaya peningkatan kualitas keluarga
						Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menciptakan kondisi kota yang layak anak

6.1.4 Strategi Dan Arah kebijakan Pada Misi 4 : Memantapkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kota

Berpijak pada upaya untuk mencapai sasaran Misi 4 : Memantapkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kota, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan pelayanan infrastruktur fisik dan transportasi untuk mendukung produktivitas kawasan dan perekonomian daerah	1.1	Terwujudnya pelayanan prasarana jalan dan jembatan yang memadai dan berkualitas	1.1.1	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dalam rangka meningkatkan konektivitas transportasi	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dalam rangka meningkatkan konektivitas transportasi
		1.2	Terwujudnya pelayanan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai dan handal	1.2.1	Peningkatan pengawasan dan pengendalian angkutan/transportasi umum serta manajemen lalu lintas	Meningkatkan tata kelola angkutan orang, barang dan khusus melalui manajemen rekayasa lalu lintas, pengembangan sistem angkutan umum masal, serta pengembangan prasarana lalu lintas jalan
						Mengoptimalkan penerapan peraturan lalu lintas angkutan jalan serta melaksanakan upaya-upaya promotif terkait keselamatan dan ketertiban berkendara bagi masyarakat
						Meningkatkan pengawasan dan tata kelola kepelabuhanan
				1.2.2	Mewujudkan Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung perhubungan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perhubungan (kelayakan angkutan jalan, halte penerangan jalan umum, dsb)



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
		1.3	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan air bersih, saluran irigasi dan penanganan banjir	1.3.1	Mengoptimalkan sumber-sumber daya air beserta saluran/jaringannya serta meningkatkan cakupan layanan dan distribusi air bersih bagi masyarakat melalui jaringan air perpipaan dan non-perpipaan	Mewujudkan pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan sumber-sumber daya air beserta jaringannya dalam rangka mendukung penurunan titik banjir

6.1.5 Strategi Dan Arah kebijakan Pada Misi 5 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan

Berpijak pada upaya untuk mencapai sasaran Prioritas Pembangunan 5 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, Berlandaskan Hukum Serta Berorientasi Publik maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1.1.1	Peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur	Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)
						Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional maupun jabatan
						Mewujudkan tata kelola administrasi sumber daya aparatur sipil negara secara terpadu
						Peningkatan etos kerja, kedisiplinan dan motivasi aparatur sipil negara melalui mekanisme penilaian kinerja pegawai, penjaminan kesejahteraan, dan fasilitasi mutasi/kepangkatan serta promosi/ pengembangan karir pegawai



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				1.1.2 Peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Optimalisasi fungsi organisasi perangkat daerah melalui penyesuaian formasi jabatan dan mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meningkatkan koordinasi kerjasama daerah, meningkatkan kualitas perangkat kecamatan & kelurahan, serta peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang pemerintahan umum, ketentraman & ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat Peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang kependudukan, pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, pemuda, olahraga, teknologi informasi, statistik, persandian, serta bina keagamaan dan pembinaan mental Peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip serta perpustakaan daerah Peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi & UMKM, industri, perdagangan, perhubungan serta badan usaha milik daerah (BUMD)



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
						Peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang perencanaan, litbang, keuangan, pangan, pertanian, pekerjaan umum, tata ruang, pertanahan dan permukiman
						Meningkatkan fungsi pengawasan pada tata laksana pembangunan daerah
				1.1.3	Peningkatan kualitas tata kelola kearsipan di seluruh unit pemerintahan	Mewujudkan tata kelola arsip dinamis dan statis secara optimal dan terintegrasi
		1.2	Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	1.2.1	Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran melalui peningkatan kualitas perencanaan, proses penyusunan dan administrasi penganggaran
						Meningkatkan kualitas pencatatan keuangan daerah melalui efisiensi tata kelola penerimaan, pengeluaran dan pelaporan neraca keuangan daerah
						Mengoptimalkan rangkaian proses pengelolaan aset daerah secara terpadu terkait proses perencanaan aset, manajemen pemanfaatan aset, serta penatausahaan aset daerah
						Meningkatkan kualitas administrasi dan tata kelola aliran keuangan daerah
				1.2.2	Meningkatkan dan mengoptimalkan	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset di setiap Organisasi Perangkat Daerah
						Mewujudkan peningkatan pajak daerah dengan



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
					penerimaan pajak daerah	mengoptimalkan potensi-potensi wajib pajak daerah serta peningkatan pelayanan perpajakan serta tata kelola data & informasi wajib pajak secara terpadu
					1.2.3 Optimalisasi belanja program/kegiatan melalui peningkatan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Optimalisasi dan peningkatan kualitas sistem layanan pengadaan barang dan jasa
						Peningkatan transparansi proses pengadaan barang dan jasa
					1.3 Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	
					1.3.1 Mewujudkan ketersediaan data dan informasi daerah dalam rangka mendukung kualitas perencanaan sektoral dan makro daerah	Penyediaan data statistik sektoral dan data statistik makro daerah melalui sistem manajemen data dan informasi sektoral secara terpadu
						Melaksanakan pengamanan data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah
						Meningkatkan inovasi daerah melalui penelitian dan pengembangan serta kerjasama dengan lembaga penelitian atau instansi lainnya
					1.3.2 Memadukan dan meningkatkan kualitas seluruh tahapan/proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas koordinasi antar sektor pada seluruh tahapan perencanaan dan evaluasi di bidang ekonomi dan infrastruktur
						Meningkatkan kualitas koordinasi antar sektoral pada seluruh tahapan perencanaan dan evaluasi di bidang



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
						pembangunan sosial dan budaya
						Mengoptimalisasi keterlaksanaan dan integrasi program pembangunan melalui mekanisme pengendalian, evaluasi dan pelaporan
						Meningkatkan kinerja penyediaan data-data dan perencanaan sektoral
		1.4	Terwujudnya pelaksanaan penataan dan pengembangan produk hukum dan produk legislatif daerah secara integratif dan bersinergi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah	1.4.1	Meningkatkan fasilitasi produk hukum antara eksekutif dan legislatif	Peningkatan fasilitasi produk hukum, bantuan hukum dan konsultasi, dokumentasi, evaluasi, dan penyuluhan hukum
						Pengembangan produk hukum dan regulasi melalui instrumen legislatif daerah
		1.5	Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu menuju tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	1.5.1	Pengembangan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, perangkat keras serta sumber daya lainnya dalam rangka penerapan e-government	Mengembangkan interkoneksi jaringan teknologi informasi, membangun & mengintegrasikan sistem informasi manajemen tata kelola pemerintahan secara terpadu, serta mendorong pertumbuhan pemanfaatan teknologi dan informasi bagi masyarakat
		2	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	
				2.1.1	Peningkatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pada instansi daerah	Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pada kecamatan dan kelurahan
						Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan pendaftaran penduduk
						Meningkatkan pembinaan, pengawasan



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
						dan evaluasi pelayanan Catatan Sipil
						Meningkatkan pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
						Meningkatkan Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan
						Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam rangka menunjang kondusifitas pertumbuhan dunia usaha
						Meningkatkan pelayanan pengaduan perizinan dan penyediaan data dan informasi perizinan
		2.2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan informasi dan kepastakaan yang berkualitas	2.2.1	Mewujudkan tata kelola dan diseminasi informasi publik	Meningkatkan efektifitas pelayanan informasi publik dan tata kelola informasi pemerintah daerah
				2.2.2	Mewujudkan perpustakaan sebagai ruang publik fungsional serta memenuhi kebutuhan informasi & kepastakaan bagi masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan daerah sebagai pusat referensi kepastakaan, aktivitas akademis, serta sarana pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat
3	Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	3.1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum daerah	3.1.1	Peningkatan pengawasan, pembinaan dan penegakkan Perda dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatkan pengawasan, pembinaan dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum
						Meningkatkan pengawasan, pembinaan dalam rangka melaksanakan perlindungan masyarakat
						Mewujudkan penegakkan Perda



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
						dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
				3.1.2	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan peran masyarakat dalam konstelasi pembangunan daerah	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan peran masyarakat dalam konstelasi pembangunan daerah
		3.2	Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran	3.2.1	Peningkatan upaya pencegahan dan pengurangan dampak bencana alam dan bahaya kebakaran	Meningkatkan upaya pencegahan dan menyediakan sarana prasarana penanganan kebakaran
						Meningkatkan pelayanan pengaduan dan optimalisasi waktu kecepatan tanggap penanganan kebakaran
						Memetakan potensi bencana serta meningkatkan upaya mitigasi bencana dalam rangka meminimalisir dampak bencana
						Meningkatkan utilitas dan koordinasi penanganan bencana
						Meningkatkan pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana

BAB 7

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif dalam mencapai sasaran.

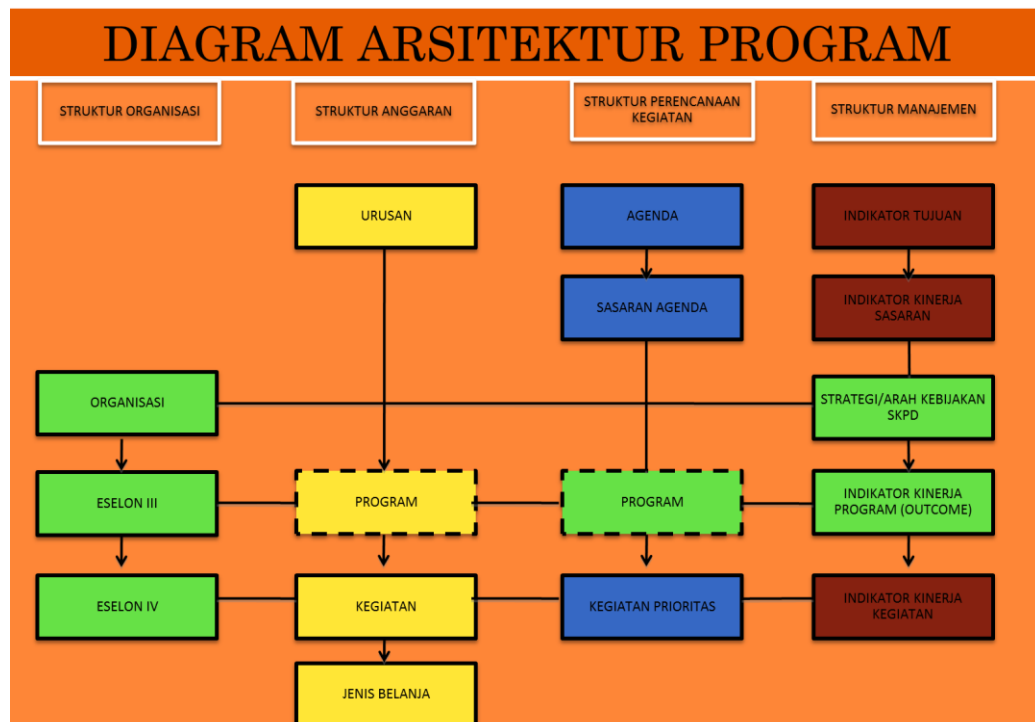
Program dalam RPJMD 2016-2021 didefinisikan "...Kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh OPD..."

Penyusunan program pembangunan daerah dilakukan berdasarkan dua prinsip utama yakni:

1. **Prinsip Perencanaan Kebijakan**, program dan kegiatan diciptakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional (keterkaitan kegiatan → program → prioritas)
2. **Prinsip Akuntabilitas Kinerja Pemerintah** yang mengaitkan secara jelas antara tugas pokok dan fungsi organisasi (tupoksi OPD) dengan struktur program dan kegiatan serta selaras dengan pencapaian visi dan misi Walikota terpilih.

Untuk arsitektur program pembangunan daerah dibuat berdasarkan empat struktur utama yaitu:

1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2. Struktur Anggaran
3. Struktur Perencanaan Kebijakan (*Policy Planning*)
4. Struktur Manajemen Kinerja



Gambar 7.1 Diagram alur arsitektur program

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Cilegon menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Jenis program dalam RPJMD 2016-2021 terbagi menjadi dua jenis program yakni program yang bersifat generik dan program yang bersifat teknis. Program yang bersifat generik di definisikan sebagai berikut:

“...Program Generik, merupakan program-program yang digunakan oleh beberapa *Unit Eselon III* yang memiliki karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal)....”

Sedangkan untuk program teknis didefinisikan sebagai berikut:

“...Program Teknis, merupakan program-program yang mengikat terhadap tugas, pokok dan fungsi OPD dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan, sasaran dalam RPJMD serta menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal)....”



Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut :



Misi 1 : MEMANTAPKAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN DAERAH

Arah kebijakan dan program pembangunan untuk mendukung misi ini adalah :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
MISI 1 : MEMANTAPKAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN DAERAH									
1	Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat dan Perlindungan Ketenagakerjaan								
		Cakupan Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan	%	100	100				
		Tingkat penempatan tenaga kerja	%	43,52	57,67				
						Peningkatan Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan	Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan	Program Hubungan Industrial, Pengawasan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
						Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, Pelayanan dan Aksesibilitas Informasi Ketenagakerjaan	Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja melalui Optimalisasi Fungsi BLK dan meningkatkan Aksesibilitas Informasi Ketenagakerjaan dan Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan	Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
2	Meningkatnya keberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil								
		Proporsi Usaha Kecil terhadap Usaha Mikro & Kecil	%	30	55				
		Proporsi Koperasi Aktif terhadap Jumlah Seluruh Koperasi	%	65,56	76,00				
						Peningkatan pembinaan, fasilitasi peningkatan kualitas SDM, kapasitas kelembagaan dan manajemen, akses	Memberdayakan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan serta pemanfaatan	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
						permodalan, pemasaran produk dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. bagi UMKM dan koperasi	teknologi yang dimanifestasikan dalam konsep <i>science and technopark</i> dengan memberdayakan interaksi pemerintah, masyarakat, civitas perguruan tinggi, dan pelaku industri untuk meningkatkan kapasitas produksi serta menjalin konektivitas hasil produksi UMKM dengan rantai produksi industri menengah di Kota Cilegon		
							Memberdayakan usaha Koperasi melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	Program Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
						Peningkatan keberdayaan masyarakat melalui aspek pemanfaatan teknologi dan kelembagaan/ komunitas	Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG) yang dimanifestasikan dalam wadah interaksi antar kelompok usaha bersama/kelembagaan swadaya masyarakat, civitas perguruan tinggi, dan pelaku industri di Kota Cilegon	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Dinas Sosial
3	Meningkatnya ketahanan pangan								
		Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan	%	> 8 %	> 8 %				
		Ketersediaan pangan utama	kg per 1000 penduduk						



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
						Peningkatan daya saing SDM dan pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan SDM, pemanfaatan ilmu pengetahuan & teknologi, serta pemberdayaan berbasis komunitas.	Program Pengembangan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
							Meningkatkan produktivitas peternakan dan perikanan melalui peningkatan SDM, pemanfaatan ilmu pengetahuan & teknologi, peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, serta pemberdayaan masyarakat atau komunitas pelaku usaha sektor peternakan	Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
							Meningkatkan produktivitas perikanan dan perikanan melalui peningkatan SDM, pemanfaatan ilmu pengetahuan & teknologi, serta pemberdayaan	Program Pengembangan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
							masyarakat atau komunitas pelaku usaha sektor perikanan		
						Peningkatan tata kelola ketahanan pangan	Meningkatkan upaya-upaya diversifikasi dan keamanan pangan	Program Konsumsi, Diversifikasi dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
							Meningkatkan tata kelola distribusi pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga	Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
4	Meningkatnya peran sektor industri, perdagangan dan jasa sebagai penggerak utama perekonomian daerah								
		Laju PDRB ADHK sektor industri pengolahan	%	> 3,70	> 4,77				



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
		Laju PDRB ADHK sektor perdagangan	%	> 5,35	>6				
		Laju PDRB ADHK sektor jasa	%	> 5,05	>5,8				
						Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah	Mendorong industri kecil dan menengah dalam pemenuhan standar/regulasi dan meningkatkan konektivitas rantai produksi industri kecil dan menengah (IKM) terhadap rantai produksi industri besar	Program Pengembangan Kemitraan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
						Peningkatan tata kelola dan pengembangan sarana & prasarana perdagangan perkotaan	Mengembangkan fungsi dan pengelolaan pasar	Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
							Meningkatkan pengawasan aktivitas perdagangan dalam upaya melindungi konsumen dan menjaga stabilitas harga barang pokok dan barang penting	Program Pengendalian dan Pengembangan Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
						Pengembangan sektor pariwisata	Pengembangan destinasi wisata daerah serta pembinaan, fasilitasi usaha kepariwisataan, dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	Terwujudnya peningkatan investasi								
		Pertumbuhan realisasi investasi	%	> 5	> 6				
						Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan kualitas pelayanan penanaman modal	Meningkatkan upaya promotif Kota Cilegon sebagai tujuan investasi pada skala nasional dan internasional	Program Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
							Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP



Misi 2 : MEMANTAPKAN LINGKUNGAN KOTA YANG ASRI DAN LESTARI

Arah kebijakan dan program pembangunan untuk mendukung misi ini adalah :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
MISI 2 : MEMANTAPKAN LINGKUNGAN KOTA YANG ASRI DAN LESTARI									
1	Terwujudnya penataan ruang yang serasi dan terpadu								
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukannya	%	80	90				
		Tingkat kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan	%	5	30				
						Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang dan bangunan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang	Program Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
								Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
							Meningkatkan pengendalian tata bangunan, reklame, dan pengembangan gedung negara	Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan dan Pengendalian Reklame	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
							Mewujudkan kualitas Data Perencanaan Tata Ruang dan Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Terwujudnya lingkungan kota yang bersih dan asri								
		Cakupan pelayanan persampahan	%	56,03	70				
		Proporsi RTH Publik terhadap luas wilayah Kota Cilegon	%	5	10				



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
						Peningkatan pelayanan persampahan	Meningkatkan pelayanan persampahan melalui pengembangan sarana dan prasarana persampahan serta pengelolaan sampah berbasis komunitas	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
						Peningkatan ketersediaan taman publik untuk menunjang keberadaan ruang terbuka hijau	Mewujudkan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan taman sebagai ruang publik yang terpadu	Program Peningkatan Sarana dan Arsitektur Kota	Dinas Perumahan dan Pemukiman
							Mewujudkan pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana arsitektur perkotaan		
3	Terwujudnya perumahan dan pemukiman yang tertata dan terpadu								
		Persentase kawasan kumuh	%	0,05	0				



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
		Persentase permukiman yang memiliki prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai standar	%	20	50				
						Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman secara terpadu	Mewujudkan penanganan kawasan kumuh secara terpadu serta meningkatkan kualitas penataan, pengembangan dan pengendalian kawasan pemukiman dan perumahan	Program Penataan Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Pemukiman
							Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Seluruh Kecamatan



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
4	Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta meningkatnya perlindungan dan konsevasi sumberdaya alam								
		Indeks Kualitas Udara	poin	70	98				
		Indeks Kualitas Air	poin	20	45				
						Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran udara dan air	Meningkatkan pengawasan pencemaran sungai dan udara serta mengendalikan limbah industri sesuai dengan regulasi lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
							Mewujudkan perencanaan tata kelola lingkungan dan upaya-upaya promotif pengelolaan lingkungan berbasis komunitas	Program Penataan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
5	Meningkatnya perlindungan ekosistem dan sumberdaya alam								



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
		Proporsi luasan tutupan vegetasi di Kota Cilegon	persen	15	35				
						Peningkatan pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan, serta melestarikan vegetasi	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan dan lingkungan, serta meningkatkan daya dukung lingkungan melalui pelestarian vegetasi	Program Penuatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup



Misi 3 : MEMANTAPKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Arah kebijakan dan program pembangunan untuk mendukung misi ini adalah :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
MISI 3 : MEMANTAPKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL									
1	Terwujudnya ekosistem pendidikan yang merata, terjangkau, bermutu dan kompetitif bagi masyarakat								
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,04	11,08				
		Harapan lama sekolah	Tahun	13,51	15,04				
		Pemenuhan SPM penyelenggaraan pendidikan	%	80	100				
						Memperluas cakupan dan meningkatkan pelayanan pendidikan dasar yang merata, terjangkau dan bermutu serta memperluas cakupan pelayanan dan pembinaan pendidikan kesetaraan, anak usia dini, kemasyarakatan, dan informal	Penyediaan sarana dan fasilitas pembelajaran dan fasilitas pendukung, serta bantuan biaya pendidikan bagi Sekolah Dasar	Program Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
							Penyediaan sarana dan fasilitas pembelajaran dan fasilitas pendukung, serta bantuan biaya pendidikan bagi Sekolah Menengah Pertama	Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
							Pembinaan dan pengembangan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan serta sosialisasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, dan Lembaga Kursus	Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan
							Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan	Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
						Mewujudkan kelestarian seni dan budaya untuk mendukung pendidikan karakter bagi usia sekolah serta menjaga kearifan lokal	Meningkatkan pembinaan seni tradisional, kelestarian nilai budaya, pembinaan sejarah, pengelolaan museum dan cagar budaya	Program Pembinaan dan Pelestarian Seni, Budaya dan Sejarah Daerah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat								
		Angka Harapan Hidup	Tahun	66,10	66,44				
		Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang pelayanan kesehatan	Poin	75	83				
						Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, kualitas gizi masyarakat dan perluasan cakupan pelayanan kesehatan khusus dan rujukan	Meningkatkan pola hidup sehat masyarakat melalui upaya-upaya promotif terkait kesehatan pada keluarga, pemenuhan gizi, dan kebiasaan berolahraga	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
							Meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang kesehatan melalui mekanisme pembiayaan kesehatan (Jaminan Kesehatan), penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, mengembangkan sumber-sumber daya kesehatan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas penyedia jasa kesehatan serta peredaran obat dan makanan	Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Dinas Kesehatan
							Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
							Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan Kesehatan pada RSUD	Program Peningkatan Pelayanan RSUD	RSUD
3	Meningkatnya pemasyarakatan olahraga dan kualitas peran pemuda dalam pembangunan								
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam olahraga	%	40	75				
		Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	%	30	60				
						Peningkatan prestasi olahraga, dan pembudayaan olahraga melalui pembinaan	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pemuda dan olahraga	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
							Meningkatkan upaya promosi dalam rangka membudayakan olahraga dan melaksanakan pembinaan dan pelatihan atlet	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
							Meningkatkan Pembinaan terhadap organisasi Kepemudaan dalam rangka menyelaraskan program kerja kepemudaan	Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda	Dinas Pemuda dan Olahraga
4	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan RTS								
		Proporsi penanganan PMKS	%	> 25	> 30				
		Cakupan penanganan rumah tangga sasaran	%	40	90				



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
						Peningkatan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat	Meningkatkan cakupan layanan perlindungan sosial dan cakupan jaminan sosial bagi masyarakat miskin	Program Perlindungan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
							Meningkatkan layanan rehabilitasi sosial yang terkait kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas & Tuna Sosial serta Peningkatan Kapasitas PMKS dan Pengelolaan Rumah Singgah	Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
						Peningkatan pemberdayaan sosial dalam penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan keberdayaan sosial masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan perorangan dan keluarga, kelembagaan, serta penanganan fakir miskin	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
5	Meningkatnya kualitas keluarga dan pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga sasaran								
		Tingkat pertumbuhan alamiah penduduk	%	< 3	<2.5				
		Peningkatan kualitas keluarga	%	> 10	> 15				
						Peningkatan upaya pengendalian penduduk	Melaksanakan Pembinaan Masyarakat untuk mewujudkan Ketahanan Keluarga	Program Bina Keluarga Sejahtera	Dinas PP,PA dan KB
							Melaksanakan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dalam upaya mengendalikan penduduk	Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Dinas PP,PA dan KB
6	Terwujudnya kesetaraan serta pemenuhan hak anak dan perempuan								
		Tingkat perwujudan Kota Layak Anak	%	30	80				



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
		Tingkat partisipasi perempuan dalam program pemerintah	%	15	40				
						Mewujudkan pembangunan berbasis gender dan meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan pada bidang ekonomi, bidang sosial, hukum dan politik, serta upaya peningkatan kualitas keluarga	Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Dinas PP,PA dan KB
							meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menciptakan kondisi kota yang layak anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas PP,PA dan KB

**Misi 4: MEMANTAPKAN PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA KOTA**

Arah kebijakan dan program pembangunan untuk mendukung misi ini adalah :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
MISI 4 : MEMANTAPKAN PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA KOTA									
1	Terwujudnya pelayanan prasarana jalan dan jembatan yang memadai dan berkualitas								
		Proporsi jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	80	98				
		Tingkat pengembangan kapasitas jalan dan jembatan	%	>1,25	> 1,5				
						Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dalam rangka meningkatkan konektivitas transportasi	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dalam rangka meningkatkan konektivitas transportasi	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
2	Terwujudnya pelayanan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai dan handal								
		Proporsi penggunaan sarana transportasi umum	%	20	50				
		Tingkat pemenuhan kelengkapan prasarana perhubungan	%	70	100				
						Peningkatan pengawasan dan pengendalian angkutan/transportasi umum serta manajemen lalu lintas	Meningkatkan tata kelola angkutan orang, barang dan khusus melalui manajemen rekayasa lalu lintas, pengembangan sistem angkutan umum masal, serta pengembangan prasarana lalu lintas jalan	Program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
							Mengoptimalkan penerapan peraturan lalu lintas angkutan jalan serta melaksanakan upaya-	Program Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
							upaya promotif terkait keselamatan dan ketertiban berkendara bagi masyarakat		
							Meningkatkan pengawasan dan tata kelola kepelabuhanan	Program Dukungan Pelayanan Perhubungan Laut	Dinas Perhubungan
						Mewujudkan Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung perhubungan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perhubungan (kelayakan angkutan jalan, halte penerangan jalan umum, dsb)	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Dinas Perhubungan
3	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan air bersih, saluran irigasi dan penanganan banjir								
		Cakupan pelayanan air bersih	%	90	98				



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
		Persentase luasan yang masih tergenang (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	%	30	100				
						Mengoptimalkan sumber-sumber daya air beserta saluran/jaringannya serta meningkatkan cakupan layanan dan distribusi air bersih bagi masyarakat melalui jaringan air perpipaan dan non-perpipaan	Mewujudkan pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan sumber-sumber daya air beserta jaringannya dalam rangka mendukung penurunan titik banjir	Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran/Drainase dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

**Misi 5 : MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

Arah kebijakan dan program pembangunan untuk mendukung misi ini adalah :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
MISI 5 : MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN									
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan								
		Proporsi OPD dengan nilai LAKIP minimal B	%	25	70				
		Proporsi OPD yang memiliki maturitas SPIP level 3 (Terdefinisi)	%	30	80				
		Tingkat kinerja pegawai (rata-rata nilai SKP)	%	80	90				
						Peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur	Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Semua OPD



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
							kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)		
							Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional maupun jabatan	Program Diklat dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
							Mewujudkan tata kelola administrasi sumber daya aparatur sipil negara secara terpadu	Program Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan dan Administrasi Umum (P3KA)	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
							Peningkatan etos kerja, kedisiplinan dan motivasi aparatur sipil negara melalui mekanisme penilaian kinerja pegawai, penjaminan kesejahteraan, dan	Program Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
							fasilitasi mutasi/kepangkatan serta promosi/ pengembangan karir pegawai		
								Program Penunjang Kemandirian dan Profesionalitas ASN	Sekretariat Korpri
						Peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Optimalisasi fungsi organisasi perangkat daerah melalui penyesuaian formasi jabatan dan mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
							Meningkatkan koordinasi kerjasama daerah, meningkatkan kualitas perangkat kecamatan & kelurahan, serta peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang pemerintahan umum, ketentraman & ketertiban umum, serta	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	Sekretariat Daerah



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
							perlindungan masyarakat		
							Peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang kependudukan, pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, pemuda, olahraga, teknologi informasi, statistik, persandian, serta bina keagamaan dan pembinaan mental	Program Peningkatan Kualitas Mental dan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan	Sekretariat Daerah
							Peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip serta perpustakaan daerah	Program Peningkatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
							Peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi & UMKM, industri, perdagangan, perhubungan serta badan usaha milik daerah (BUMD)	Program Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretariat Daerah
							Peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang perencanaan, litbang, keuangan, pangan, pertanian, pekerjaan umum, tata ruang, pertanahan dan permukiman	Program Peningkatan Infrastruktur dan Kewilayahan	Sekretariat Daerah
							Meningkatkan fungsi pengawasan pada tata laksana pembangunan daerah	Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah	Inspektorat
						Peningkatan kualitas tata kelola kearsipan di seluruh unit pemerintahan	Mewujudkan tata kelola arsip dinamis dan statis secara optimal dan terintegrasi	Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
2	Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah								
		Tingkat realisasi Belanja	%	> 90	> 90				
		Tingkat pertumbuhan PAD	%	> 10	> 20				
		Persentase aset daerah dalam kondisi baik	%	> 50	> 70				
						Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran melalui peningkatan kualitas perencanaan, proses penyusunan dan administrasi penganggaran	Program Perencanaan Anggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
							Meningkatkan kualitas pencatatan keuangan daerah melalui efisiensi tata kelola penerimaan, pengeluaran dan pelaporan neraca keuangan daerah	Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
							Mengoptimalkan rangkaian proses pengelolaan aset daerah secara terpadu terkait proses perencanaan aset, manajemen pemanfaatan aset, serta penatausahaan aset daerah	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
							Meningkatkan kualitas administrasi dan tata kelola aliran keuangan daerah	Program Perbendaharaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
							Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset di setiap unit satuan kerja perangkat daerah	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Semua OPD
								Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan	Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
						Meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah	Mewujudkan peningkatan pajak daerah dengan mengoptimalkan potensi-potensi wajib pajak daerah serta peningkatan pelayanan perpajakan serta tata kelola data & informasi wajib pajak secara terpadu	Program Peningkatan Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
						Optimalisasi belanja program/kegiatan melalui peningkatan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Optimalisasi dan peningkatan kualitas sistem layanan pengadaan barang dan jasa	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
							Peningkatan transparansi proses pengadaan barang dan jasa	Program Layanan Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3	Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah								



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
		Tingkat ketersediaan data sektoral daerah	%	80	95				
		Ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan yang tepat waktu	%	100	100				
						Mewujudkan ketersediaan data dan informasi daerah dalam rangka mendukung kualitas perencanaan sektoral dan makro daerah	Penyediaan data statistik sektoral dan data statistik makro daerah melalui sistem manajemen data dan informasi sektoral secara terpadu	Program Pengembangan Data dan Statistik Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
							Melaksanakan pengamanan data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
							Meningkatkan inovasi daerah melalui penelitian dan pengembangan serta kerjasama dengan lembaga penelitian atau instansi lainnya	Program Penelitian Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
						Memadukan dan meningkatkan kualitas seluruh tahapan/proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas koordinasi antar sektor pada seluruh tahapan perencanaan dan evaluasi di bidang ekonomi dan infrastruktur	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
							Meningkatkan kualitas koordinasi antar sektoral pada seluruh tahapan perencanaan dan evaluasi di bidang pembangunan sosial dan budaya	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
							Mengoptimalkan keterlaksanaan dan integrasi program pembangunan melalui mekanisme pengendalian, evaluasi dan pelaporan,	Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
							Meningkatkan kinerja penyediaan data-data dan perencanaan sektoral	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Semua OPD



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
								Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan	Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah
4	Terwujudnya pelaksanaan penataan dan pengembangan produk hukum dan produk legislatif daerah secara integratif dan bersinergi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah								
		Rata-rata persentase hasil reses yang ditindaklanjuti	%	100	100				



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
						Meningkatkan fasilitasi produk hukum antara eksekutif dan legislatif	Peningkatan fasilitasi produk hukum, bantuan hukum dan konsultasi, dokumentasi, evaluasi, dan penyuluhan hukum	Program Penataan dan Pengembangan Produk Hukum Daerah	Sekretariat Daerah
							Pengembangan produk hukum dan regulasi melalui instrumen legislatif daerah	Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah	Sekretariat DPRD
5	Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu menuju tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)								
		Cakupan pemenuhan infrastruktur dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks implementasi <i>Smart City</i>	%	20	100				



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
		Tingkat penetrasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	%	70	90				
						Pengembangan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, perangkat keras serta sumber daya lainnya dalam rangka penerapan e-government	Mengembangkan interkoneksi jaringan teknologi informasi, membangun & mengintegrasikan sistem informasi manajemen tata kelola pemerintahan secara terpadu, serta mendorong pertumbuhan pemanfaatan teknologi dan informasi bagi masyarakat.	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
6	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat								
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Perijinan	poin	77	83				



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Non Perijinan	poin	75	80				
						Peningkatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pada instansi daerah	Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pada kecamatan dan kelurahan	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Seluruh Kecamatan
							Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan pendaftaran penduduk	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
							Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan Catatan Sipil	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
							Meningkatkan pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
							Meningkatkan Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
							Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam rangka menunjang kondusifitas pertumbuhan dunia usaha	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
							Meningkatkan pelayanan pengaduan perizinan dan penyediaan data dan informasi perizinan	Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
7	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan informasi dan kepustakaan yang berkualitas								
		Tingkat pemenuhan dan penetrasi media informasi publik	%	30	70				



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
						Mewujudkan tata kelola dan diseminasi informasi publik	Meningkatkan efektifitas pelayanan informasi publik dan tata kelola informasi pemerintah daerah	Program Pengembangan Komunikasi dan Pengelolaan Informasi Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika, Sandi dan Statistik
						Mewujudkan perpustakaan sebagai ruang publik fungsional serta memenuhi kebutuhan informasi & kepastakaan bagi masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan daerah sebagai pusat referensi kepustakaan, aktivitas akademis, serta sarana pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
8	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum daerah								
		Presentase penurunan kasus pelanggaran perda	%	> 5	> 5	Peningkatan pengawasan, pembinaan dan penegakkan Perda dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatkan pengawasan, pembinaan dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
							Meningkatkan pengawasan, pembinaan dalam rangka melaksanakan perlindungan masyarakat	Program Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
							Mewujudkan penegakkan Perda dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Program Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
						Meningkatkan wawasan kebangsaan dan peran masyarakat dalam konstelasi pembangunan daerah	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan peran masyarakat dalam konstelasi pembangunan daerah	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
								Program Peningkatan LSM dan ORMAS	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran								



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Kondisi Akhir (2021)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	OPD
		Indeks Resiko bencana	tinggi/ sedang/ rendah	Tinggi	Rendah	Peningkatan upaya pencegahan dan pengurangan dampak bencana alam dan bahaya kebakaran	Meningkatkan upaya pencegahan dan menyediakan sarana prasarana penanganan kebakaran	Program Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
							Meningkatkan pelayanan pengaduan dan optimalisasi waktu kecepatan tanggap penanganan kebakaran	Program Pengendalian, Operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
							Memetakan potensi bencana serta meningkatkan upaya mitigasi bencana dalam rangka meminimalisir dampak bencana	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Meningkatkan utilitas dan koordinasi penanganan bencana	Program Kedaruratan dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Meningkatkan pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB 8

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Berdasarkan Isu strategis, visi, dan misi RPJMD 2016-2021 maka disusunlah kegiatan strategis kota yang ditargetkan seluruhnya selesai di tahun 2020. Berikut ini akan di jelaskan profil dari kegiatan strategis kota yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 2017-2020 :

1. Pembangunan Pelabuhan Warnasari

Posisi geostrategis Kota Cilegon merupakan salah keunggulan yang dimiliki oleh Daerah. Terkait hal tersebut, membangun Pelabuhan Daerah (Warnasari) merupakan strategi yang sangat tepat untuk meningkatkan daya saing daerah.

Dari sisi dampaknya terhadap perekonomian daerah, Pelabuhan Warnasari akan memberikan multiplier effect perekonomian, menekan angka pengangguran, serta meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Dengan modal investasi berupa lahan dan uang pengganti investasi Pelabuhan Kubangsari, Pemerintah Daerah akan membangun Pelabuhan Warnasari melalui pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang ditargetkan sudah terjalin di tahun 2017.

2. Pembangunan pasar tradisional yang sehat dan bersih

Perwujudan ketahanan ekonomi daerah dilakukan dengan membangun pasar tradisional yang sehat dan bersih, sebagai pusat jual beli para pedagang mikro kecil dengan konsumennya. Setelah pasar kranggot, prioritas daerah pembangunan pasar adalah menyelesaikan pembangunan pasar blok f berupa bangunan bertingkat 2 lantai ditargetkan selesai di tahun 2017. Untuk menjaga stabilitas nilai inflasi, kestabilan harga komoditi juga akan terus dijaga melalui perluasan informasi harga 14 jenis komoditi pangan secara berkesinambungan.

3. Pembangunan taman kota dan peningkatan pelayanan persampahan

Peningkatan prosentase ketersediaan ruang terbuka hijau, diimplementasikan melalui pembangunan taman publik di setiap

kecamatan. Setelah taman jombang dan cilegon, pada kurun waktu tahun 2017- 2019 ditargetkan dibangun 3 taman di kecamatan Cibeber, Ciwandan, dan Purwakarta. Konsep ramah lingkungan akan dipadukan dengan konsep ramah anak dan layanan edukatif, sehingga taman publik benar benar menjadi pusat interaksi sosial yang positif di masyarakat.

Kota yang bersih juga menjadi prioritas ke depan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan layanan persampahan, yang didukung dengan ketersediaan sarana prasarana layanan yang memadai. Untuk itu Pemerintah akan menambah armada pengangkut sampah, membangun transfer depo, merevitalisasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bagendung serta membangun instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).

4. Pengendalian banjir dan genangan

Prioritas pengendalian banjir dan genangan dilakukan melalui pembangunan tandon di beberapa pusat titik banjir serta peningkatan, rehabilitasi dan normalisasi saluran/drainase dan jaringan irigasi. Dalam kurun waktu tahun 2017-2020 akan dibangun 5 tandon yaitu tandon dibuntu, tandon bulakan, tandon sukrajaya (mitsubishi), tandon cibeber, dan tandon kali kedung ingas hulu. Dan dengan bersinergi dengan industri dan pemerintah pusat, direncanakan akan dibangun long water storage untuk menanggulangi banjir di wilayah ciwandan.

5. Peningkatan kualitas tata bangunan perkotaan

Kegiatan peningkatan kualitas tata bangunan perkotaan akan dilakukan melalui penataan estetika kota berdasarkan penataan kota dan pengendalian ruang. Di tahun 2017 hingga tahun 2019 akan dibangun gateway di tiga pintu masuk kota, yaitu di pintu masuk cilegon timur, anyer dan pulomerak. Sebagai ciri khas arsitektural kota, enam buah landmark akan dibangun di sepanjang jalan lingkar selatan, bersinergi dengan industri yang ada di kota cilegon.

Cagar –cagar budaya akan direvitalisasi tanpa menghilangkan nilai sejarahnya, dengan target revitalisasi di lingkungan pekuncen dan lingkungan stasion kereta api Cilegon.

6. Pembangunan jalan lingkar utara

Sesuai dengan rencana jaringan jalan pada rtrw kota cilegon, setelah terbangunnya lingkar luar selatan, pemerintah akan membuka akses lingkar luar utara melalui pembangunan jalan lingkar utara. Sebagai akses strategis angkutan barang dan orang menuju pelabuhan merak, pembangunan jlu akan dimulai dari pertigaan jalan serdang-bojonegara-merak dengan pegantungan-sindangkasih dan berakhir di sekitar pertigaan jalan akses tol merak dengan jalan raya merak cilegon dengan total panjang jalan 12,3 km. Seluruh pembebasan lahan untuk pembangunan jalan lingkar utara ditargetkan selesai di tahun 2017, dan konstruksi jalan ditargetkan selesai di tahun 2019. Rencana pembangunan jlu akan dilakukan secara terintegratif dengan sarana prasarana pendukungnya, meliputi pembangunan pju, taman, jalan simpul, rambu-rambu lalu lintas, trotoar serta sistem angkutan transportasi massal yang akan melalui rute ini.

7. Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan kota

Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan dilakukan melalui pembangunan jalan kota terutama di lokasi yang terhubung dengan jaringan lingkar dalam kota. Sedangkan peningkatan jalan-jalan kota dilakukan pelebaran jalan, betonisasi serta penataan jalan khususnya pada persimpangan jalan sebidang.

8. Pelayanan sistem angkutan massal (SAUM) dan Pembangunan Kantong Parkir Angkutan Barang

Pelayanan sistem angkutan massal merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan moda transportasi publik yang murah, aman dan nyaman. Di tahun 2017 saum akan diujicobakan di jalur anyer-seruni melalui jalur jalan lingkar selatan, yang diimplementasikan melalui penyiapan armada, pembangunan shelter, penyiapan regulasi dan tata kelola serta sosialisasi program. Rute SAUM lainnya adalah melalui jalur jalan lingkar utara, yang ditargetkan akan beroperasi setelah terbangunnya JLU.

Peningkatan kualitas sistem transportasi juga dilakukan melalui penertiban parkir kendaraan terutama di jalan-jalan kota. Untuk itu akan dibangun kantong parkir angkutan barang yang ditargetkan sudah dapat dioperasikan di tahun 2018.

9. Pembangunan stadion

Pembangunan stadion dimulai dengan membangun stadion outdoor type b berupa pembangunan lapangan sepakbola yang memiliki kapasitas 20.000 penonton. Bangunan stadion outdoor tersebut

ditargetkan selesai di tahun 2017 dengan terbangunnya track lintasan, lapangan sepakbola serta tribun barat dan timur. Ke depan akan dibangun fasilitas lainnya meliputi fasilitas pendukung stadion meliputi pembangunan tribun utara dan selatan, landscape serta jalan akses.

10. Pembangunan rumah sakit tipe d

Perluasan sarana prasarana kesehatan dilakukan dengan meningkatkan status dua puskesmas rawat inap menjadi rumah sakit tipe d di wilayah kecamatan yang berjarak cukup jauh dari rsud, yaitu puskesmas dtp ciwandan dan puskesmas dtp pulomerak. Dan untuk memenuhi ketersediaan puskesmas di masing-masing kecamatan, maka akan dibangun 3 puskesmas rawat inap baru yaitu di kecamatan ciwandan, pulomerak dan cilegon. Untuk mengatasi kurangnya tenaga dokter dan perawat, pemerintah daerah akan memberikan beasiswa bagi putra terbaik daerah yang memiliki dedikasi untuk memajukan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah akan menggandeng fakultas kedokteran universitas sultan ageng tirtaryasa, sebagai universitas negeri terbaik di provinsi banten.

11. Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK)

Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, Pemerintah akan mengoptimalkan peran dan fungsi BLK sebagai *labour supply*. Sebagai langkah awal untuk memenuhi sarpras BLK, akan dilakukan perluasan lahan BLK dan pemenuhan sarpras pelatihan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Selain sebagai pusat layanan pengembangan kompetensi tenaga kerja, BLK juga akan dijadikan pusat layanan informasi tenaga kerja. Hal ini akan dilakukan melalui integrasi database kependudukan dan ketenagakerjaan yang terkoneksi dengan database di berbagai perusahaan dan unit-unit usaha.

Dalam mengoptimalkan fungsi BLK, Pemerintah akan bersinergi dengan pihak Perguruan Tinggi dan kalangan industri di Kota Cilegon.

12. Pembangunan pendidikan dasar yang berkualitas

Arah pembangunan pendidikan ke depan berorientasi kepada peningkatan mutu pendidikan, dengan fokus pada peningkatan mutu lulusan pendidikan dasar. Untuk itu pemerintah akan membentuk sekolah “mantap” di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan pilot project sebanyak 8 sd (satu SD di masing-masing kecamatan) dan 2 smp. Selain memenuhi sarana prasarana pendidikannya, sekolah mantap juga akan didukung oleh tenaga pengajar yang berkualitas, serta sistem pendidikan yang mengedepankan karakter, dengan sistem penerimaan siswa baru

dilakukan secara online. Sekolah mantap ini akan menjadi *role model* untuk dikembangkan di sekolah lainya. Layanan pendidikan, terutama di tingkat dasar, juga difokuskan pada pemenuhan standar pelayanan minimal di seluruh sekolah. Hal ini dengan mengoptimalkan anggaran 20% dari APBD sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.

13. Pembangunan pusat pertanian terpadu

Dengan terbatasnya lahan pertanian yang dimiliki kota cilegon, pembangunan pertanian diarahkan pada intensifikasi pertanian melalui pertanian berbasis teknologi serta menjaga agar tidak terjadinya alih fungsi lahan pertanian.

Untuk itu akan dibangun lahan pertanian terpadu yang tidak hanya fokus pada produksi komoditi unggulan daerah, tetapi juga menjadi pusat pembenihan, pelatihan dan pemagangan para petani dan peternak, demplot, pengolahan pasca panen, serta agrowisata. Lahan pertanian ini direncanakan akan dibangun di lahan seluas 10 hektar, meliputi lahan untuk pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan serta sarpras pendukung.

14. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih perkotaan

Perluasan aksesibilitas air bersih menjadi prioritas daerah, yang diimplementasikan melalui optimalisasi jaringan perpipaan dan non perpipaan di beberapa lokasi. Namun sebagaimana kita ketahui, bahwa ketersediaan air baku menjadi kendala daerah untuk mewujudkan hal ini. Sebagai inovasi, pemerintah daerah akan melakukan reverse osmosis/desalinasi, dengan target produksi air bersih sebanyak 5 liter perdetik. Biaya pembangunan akan disinergikan dengan pemerintah pusat, dengan langkah awal yang dilakukan pemerintah daerah di tahun 2017 adalah menyediakan lahan seluas 2 hektare di kawasan pelabuhan warnasari, melalui kerjasama antara pt pcm dan pdam cilegon mandiri.

15. Pembangunan kawasan pemerintahan terpadu

Untuk memudahkan pendistribusian kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, maka akan dibangun kawasan pemerintahan terpadu di lokasi kantor walikota melalui pembangunan gedung pemerintahan daerah sebanyak 8 lantai yang dialokasikan untuk OPD baru yang akan dibentuk seiring dengan perubahan organisasi perangkat daerah, serta seluruh OPD yang saat ini mendiami gedung Plaza mandiri.

Diawali dengan penyusunan detail engineering design, pembangunan gedung ini ditargetkan selesai tahun 2020.

16. Perwujudan smart city

Perwujudan smart city merupakan komitmen pemerintah sekaligus menjawab tantangan globalisasi dimana faktor kemudahan, kenyamanan, efektifitas dan efisiensi menjadi faktor utama dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini diimplementasikan melalui pembangunan integrated control city system, penempatan smart wifi pada area publik, serta optimalisasi layanan pemerintah berbasis elektronik baik yang berupa layanan pemerintah kepada masyarakat (*Government to Citizen*), layanan pemerintah kepada Swasta (*Government to business*) serta layanan internal pemerintah (*Government to Government*). Hal ini sebagai langkah menuju Cilegon *smart city* yang terintegrasi dan terpadu.

17. Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel)

Dalam rangka pemerataan pembangunan sampai ke tingkat kelurahan, Pemerintah mengulirkan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) kepada seluruh Kelurahan, dimulai di tahun 2017, yang melibatkan organisasi lembaga kemasyarakatan dalam merencanakan dan melaksanakan program tersebut. Mengacu kepada UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa alokasi anggaran tersebut sebesar 5% dari APBD dikurangi DAK, untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana local, pemberdayaan masyarakat, serta layanan pemerintahan. Detail dari program prioritas dan kegiatan strategis selama 5 tahun RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



**Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Cilegon
Tahun 2016-2021**

KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
3.1.1. 1.1.1	Program Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar									30.043,3	32.330,0	35.794,2	39.441,0	43.005,1	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ Paket A	%	110,68	112,27	113,82	115,35	116,82	118,13						Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket A	%	96,39	97,78	99,13	100,47	101,74	102,88						Dinas Pendidikan
		Angka Mengulang Kelas (AMK) SD/ MI	%	3,11	3,2	3,09	2,91	2,86	2,74						Dinas Pendidikan
		Angka Melanjutkan (AM) SD/ MI/ SDLB ke SMP/ MTs/ SMPLB	%	100	100	100	100	100	100						Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah (APTS) SD/ MI	%	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25						Dinas Pendidikan
		Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	%	100	100	100	100	100	100						Dinas Pendidikan
		Cakupan sekolah dasar (sederajat) yang telah memenuhi kriteria SPM	%		95	95	95	95	95						Dinas Pendidikan
	Pelatihan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar (SD) (Prioritas Daerah)	Jumlah Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar (SD)	Kegiatan	3 Kegiatan	2 kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	750,0	600,0	600,0	600,0	600,0	Dinas Pendidikan
	Revitalisasi Ruang Kelas Sekolah Dasar (Prioritas Daerah)			4 Ruang Kelas		4 Sekolah	4 Sekolah	6 Sekolah		0,0	4.800,0	4.800,0	7.200,0		Dinas Pendidikan
	Revitalisasi SD Negeri Sumampir (Prioritas Daerah)	Tersedianya : Ruang Kelas, Pemagaran, R. Lab			2 R.Kelas; 1					1.100,0					Dinas Pendidikan



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				TRANSISI	TARGET				TRANSISI	
					2016	2017	2018	2019		2020	2021	2017	2018		
					Pagar+Ga pura										
	Revitalisasi SD Negeri Kedaleman IV (Prioritas Daerah)	Tersedianya : Ruang Kelas, Gapura			2 R.Kelas; 1 Gapura	5 R.Kelas					1.100,0	1.330,0			Dinas Pendidikan
	Revitalisasi SD Negeri Blok I (Prioritas Daerah)	Tersedianya : Ruang Kelas			2 R.Kelas baru						975,0				Dinas Pendidikan
	Revitalisasi SD Negeri Kubangsepat I (Prioritas Daerah)	Tersedianya : Ruang Kelas, Gapura			2 R.Kelas; 1 Gapura						800,0				Dinas Pendidikan
	Revitalisasi SD Negeri CIWANDAN (Prioritas Daerah)	Tersedianya : Ruang Kelas, Gapura			2 R.Kelas; 1 Gapura						1.100,0				Dinas Pendidikan
	Revitalisasi SD Negeri Wilulang (Prioritas Daerah)	Tersedianya : Ruang Kelas, Gapura			2 R.Kelas; 1 Gapura						1.100,0				Dinas Pendidikan
	Revitalisasi SD Negeri Bujanggadung (Prioritas Daerah)	Tersedianya : Ruang Kelas, Gapura			2 R.Kelas; 1 Gapura						1.100,0				Dinas Pendidikan
	Revitalisasi SD Negeri Cilegon II (Prioritas Daerah)	Tersedianya : Ruang Kelas, Gapura			1 paket	Lanjutan Revitalisasi 1 Sekolah					1.200,0	3.500,0			Dinas Pendidikan
	Pengadaan Alat TIK SD Mantap (Prioritas Daerah)	Tersedianya Alat Lab Komputer			64 pc, 4 leptop, 4 proyektor, dan layar	8 Sekolah @ 17 Unit (Tahap II) + 12 Sekolah					440,0	4.352,0			Dinas Pendidikan



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				TRANSISI	TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
						h @ 34 Unit									
	Pengadaan Mebeulair SD Mantap (Prioritas Daerah)	Tersedianya Barang Mebeul	Unit		22					222,3					Dinas Pendidikan
	Pembinaan Manajemen Kelembagaan Sekolah Mantap Menuju ISO (Prioritas Daerah)	Tersedianya Pengelola Sekolah Yang Berkompeten			1 kegiatan	10 Sekolah	10 Sekolah	10 Sekolah	10 Sekolah	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	Dinas Pendidikan
	Pengadaan Peralatan TIK Pendataan Dapodik Sekolah Mantap (Prioritas Daerah)	Tersedianya Peralatan TIK untuk pendataan DAPODIK sekolah	Sekolah			20	10	10	10	0,0	300,0	150,0	150,0	150,0	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Ruang UKS Sekolah (Prioritas Daerah)	Tersedianya ruang UKS	Ruang		-	3	3	3	3	0,0	450,0	450,0	450,0	450,0	Dinas Pendidikan
	Bantuan BOS Sekolah Mantap (Prioritas Daerah)	Tersedianya Sarana Penunjang Sekolah Mantap		0	1 Kegiatan	10 Sekolah	10 Sekolah	10 Sekolah	10 Sekolah	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Sekolah Dasar (Prioritas Daerah)	Jumlah Sekolah Yang Menyelenggarakan PSB	Sekolah	149	149	149	149	149	149	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	Dinas Pendidikan
	Kegiatan Teknis Lainnya									19.056,1	15.898,0	28.694,2	29.941,0	40.705,1	Dinas Pendidikan



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				TRANSISI	TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
3.1.1. 1.2.1	Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama									15.646,9	16.837,8	18.642,0	20.541,3	22.397,5	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ SMPLB	%	112,19%	109,17%	106,54 %	107,3 0%	109,13 %	111,23%						Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B	%	88,11%	90,98%	93,24 %	94,94 %	96,33%	97,61%						Dinas Pendidikan
		Angka Melanjutkan (AM) SMP/ MTs/ SMPLB ke SMA/ SMK/ MA/ SMALB	%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,0 0%	100,00 %	100,00%						Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah (APTs) SMP/ MTs	%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%						Dinas Pendidikan
		Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs	%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,0 0%	100,00 %	100,00%						Dinas Pendidikan
		Angka Mengulang Kelas (AMK) SMP/ MTs	%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,12%	0,12%						Dinas Pendidikan
		Cakupan sekolah menengah pertama (sederajat) yang telah memenuhi kriteria SPM	%		95										Dinas Pendidikan
		Cakupan siswa/i kurang mampu yang mendapatkan fasilitas di sekolah negeri dan sekolah swasta	%		80										Dinas Pendidikan
	Revitalisasi SMPN 1 Cilegon	Jumlah Kebutuhan saluran drainase			1 paket saluran Drainase					319,6					Dinas Pendidikan
	Revitalisasi SMPN 2 Cilegon	Jumlah Kebutuhan R. Kelas/R.Guru+Toilet/R. GSG			8 unit					768,4					Dinas Pendidikan



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				TRANSISI	TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Rehabilitasi toilet SMP	Jumlah Sekolah yang mendapatkan rehab toilet			7 lokasi toilet smp negeri		3 Sekolah			960,0		300,0			Dinas Pendidikan
	Pengadaan Mebeulair SMP Mantap	Tersedianya Barang Mebeulair			280 kursi besi; 280 meja besi					320,0					Dinas Pendidikan
	Pengadaan Alat Lab. IPA / Fisika Biologi SMP Mantap	Tersedianya Alat LAB IPA			2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Prototype Gerbang SMP	Jumlah Kebutuhan Pembangunan Prototype Gerbang SMP			5 sekolah; smpn 3, smpn 5, smpn 8, smpn 4, smpn 10	2 Sekolah	5 Sekolah	3 Sekolah	1 Sekolah	850,0	340,0	850,0	510,0	170,0	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Aula Terbuka SMPN 2 Cilegon	Jumlah Ruang Terbuka			1 paket					750,0					Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Toilet Siswa SMPN 1 Cilegon	Tersedianya R. KM Siswa								0,0					Dinas Pendidikan
	Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Jenjang SMP	Jumlah Kegiatan Penerimaan Siswa Baru Jenjang SMP			3 kegiatan	11 Sekolah	11 Sekolah	11 Sekolah	11 Sekolah	650,0	500,0	500,0	500,0	500,0	Dinas Pendidikan
	Kegiatan Teknis Lainnya									7.912,2	12.674,3	13.355,3	15.564,8	17.438,7	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama SMPN 1									224,0	241,0	266,8	294,0	320,6	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama SMPN 2									421,2	453,2	501,8	552,9	602,9	Dinas Pendidikan



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				TRANSISI	TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama SMPN 3									363,3	390,9	432,8	476,9	520,0	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama SMPN 4									250,0	269,0	297,8	328,2	357,8	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama SMPN 5									312,4	336,2	372,2	410,1	447,2	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama SMPN 6									177,8	191,4	211,9	233,4	254,5	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama SMPN 7									296,1	318,6	352,8	388,7	423,8	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama SMPN 8									173,5	186,7	206,7	227,8	248,4	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama SMPN 9									110,7	119,1	131,9	145,3	158,5	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama SMPN 10									145,0	156,0	172,7	190,3	207,5	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama SMPN 11									242,8	261,3	289,3	318,8	347,6	Dinas Pendidikan



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
					2016	2017	2018	2019	2020		2021	2017	2018	2019		
3.1.2. 1.2.1	Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan									29.712,1	30.159,9	31.439,1	32.758,4	36.884,5	Dinas Kesehatan	
		Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	%	74	75	80	85	95	100						Dinas Kesehatan	
		Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertiikasi akreditasi	Puskesmas	2	4	8	8	8	8						Dinas Kesehatan	
		Persentase jumlah tenaga kesehatan yang memiliki SIP (memenuhi standar yang berlaku)	%	77,82	77,82	77,82	77,82	77,82	77,82						Dinas Kesehatan	
		Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	Puskesmas	8	8	8	8	8	8						Dinas Kesehatan	
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin	%	98	98	98	98	98	98						Dinas Kesehatan	
	DED Peningkatan Puskesmas DTP Ciwandan menjadi RSUD Type D	Tersedianya Dokumen DED Puskesmas DTP Ciwandan menjadi RSUD Type D	Dokumen		1					567,0					Dinas Kesehatan	
	Pembangunan/Pe ningkatan Puskesmas DTP Ciwandan menjadi RSUD Type D	Terbangunnya Puskesmas DTP Ciwandan menjadi RSUD type D	Unit banguna n			1	1				9.450,0	9.450,0			Dinas Kesehatan	
	DED Peningkatan Puskesmas DTP Pulomerak menjadi RSUD Type D	Tersedianya Dokumen DED Peningkatan Puskesmas DTP Pulomerak menjadi RSUD Type D	Dokumen			1					567,0				Dinas Kesehatan	



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				TRANSISI	TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Pembangunam/Pe ningkatan Puskesmas DTP Pulomerak menjadi RSUD Type D	Terbangunnya Puskesmas DTP Pulomerak menjadi RSUD Type D	Unit banguna n				1	1				9.450,0	9.450,0		Dinas Kesehatan
	Perencanaan Pengadaan Tanah PKM Cilegon	Tersusunnya Perencanaan Pengadaan Tanah Puskesmas Cilegon	Dokume n	1											Dinas Kesehatan
	Persiapan Pengadaan Tanah PKM Cilegon	Terlaksananya Persiapan Pengadaan Tanah Puskesmas Cilegon	Kegiatan	1											Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan Pengadaan Tanah PKM Cilegon	Terlaksananya Pengadaan Tanah Puskesmas Cilegon	Bidang tanah	1											Dinas Kesehatan
	DED Pembangunan Puskesmas Baru Cilegon (DTP)	Dokumen DED Puskesmas Baru Cilegon (DTP)	Dokume n		1					217,0					Dinas Kesehatan
	Pembangunan PKM Baru Cilegon (DTP)	Terbangunnya Puskesmas Baru Cilegon (DTP)yang dibangun	Unit banguna n		1					4.677,3					Dinas Kesehatan
	Perencanaan Pengadaan Tanah PKM Citangkil	Tersusunnya Perencanaan Pengadaan Tanah Puskesmas DTP Citangkil	Dokume n		1					58,4					Dinas Kesehatan
	Persiapan Pengadaan Tanah PKM Citangkil	Terlaksananya Persiapan Pengadaan Tanah Puskesmas DTP Citangkil	Kegiatan		1					44,1					Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan Pengadaan Tanah PKM Citangkil	Tersedianya Lahan Tanah Puskesmas DTP Citangkil	Bidang tanah		1					3.200,0					Dinas Kesehatan
	DED Pembangunan	Dokumen DED PKM Baru Citangkil II (DTP)	Dokume n			1					217,0				Dinas Kesehatan



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				TRANSISI	TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Baru Puskesmas Citangkil II (DTP)														
	Pembangunan PKM Baru Citangkil II (DTP)	Terbangunnya PKM Baru Citangkil II (DTP) yang dibangun	Unit bangunan			1					4.677,3				Dinas Kesehatan
	Kegiatan Teknis Lainnya (Dinas Kesehatan)									11.406,6	5.563,1	2.442,8	12.788,4	25.039,5	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan UPT Puskesmas Kecamatan Cilegon									551,2	559,6	583,3	607,8	684,3	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan UPT Kesehatan JPKM									7.674,5	7.790,1	8.120,6	8.461,3	9.527,1	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan UPT Pusat Layanan Gawat Darurat Terpadu									1.199,5	1.217,6	1.269,2	1.322,5	1.489,1	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan UPT LAB KESDA									116,4	118,2	123,2	128,3	144,5	Dinas Kesehatan
3.1.2.1.4.1	Program Peningkatan Pelayanan RSUD									92.612,8	97.261,7	102.139,8	159.263,1	107.263,1	Rumah Sakit Umum Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pasien RSUD	poin		75	>80	>80	>80	>80						Rumah Sakit Umum Daerah



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
		meningkatnya pelayanan yang efektif kepada seluruh pengunjung /pasien rawat inap dan rawat jalan	%		80	80	80	80	80						Rumah Sakit Umum Daerah	
		presentase pemenuhan kebutuhan alat kesehatan dan alat keperawatan	%		80	80	80	80	80						Rumah Sakit Umum Daerah	
	Pembangunan Gedung rawat Inap 5 lantai											54.000,0			Rumah Sakit Umum Daerah	
	Pengadaan Peralatan Kesehatan dan kedokteran									13.129,6	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	Rumah Sakit Umum Daerah	
	Kegiatan Teknis Lainnya (APBD)									2.923,8	2.200,0	0,0	1.000,0	0,0	Rumah Sakit Umum Daerah	
	Kegiatan Teknis Lainnya (Swakelola)									76.559,4	93.061,7	46.139,8	156.263,1	105.263,1	Rumah Sakit Umum Daerah	
4.1.1. 1.1.1	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan									337.047,9	341.984,5	385.451,7	370.751,0	204.470,4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Persentase panjang Jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	%		94	94	94	95	95						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	%	90,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
		Persentase jalan dan jembatan yang dibangun atau ditingkatkan terhadap total panjang jalan dan jembatan perkotaan	%	-	-	39,00	-	-	-						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Cakupan panjang jalan yang dipelihara	%		25	25	25	25	25						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Rasio panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air	%	59,13	59,7	60,28	60,85	61,43	62						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Rasio panjang jalan yang memiliki trotoar	%			10	10	11	11						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Jalan Lingkar Utara									220.710,7	175.099,9	275.538,7	108.515,2	2.700,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembebasan Lahan	Luas lahan yang di bebaskan	Ha		39	0	0	0	0						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pematangan Lahan	Luas lahan yang dimatangkan	Ha		0		39								Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Konstruksi Jalan	Panjang jalan yang dibangun	Km												Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Bangunan Pelengkap	Jumlah bangunan pelengkap yang di bangun	Unit												Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	- Jembatan		unit		1	1									Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	- gorong-gorong		unit			38									Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
					2016	2017	2018	2019	2020		2021	2017	2018	2019		
	- TPT		m'			6800									Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	- Saluran		m'			13033									Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	- Trotoar		m'					25156							Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	- Median		m'				12578								Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS)									6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Simpul Jalan														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penataan Jalan Strategis Kota									4.550,0	10.850,0	8.000,0	10.000,0	0,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penataan Jalan Ki Wasyid			85	100										Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penataan Jalan Maulana Yusuf					100									Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penataan Jalan Kapten Tendean					100									Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penataan Persimpangan Sebidang Jalan Kota Cilegon				13,3	40,0	66,7	100,0							Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Trotoar														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
					2016	2017	2018	2019	2020		2021	2017	2018	2019		
	Penataan Jalan Protokol									6.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pekerjaan normalisasi saluran														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penataan Persimpangan Sebidang Jalan SA Tirtayasa - RA Kartini					100									Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penataan Persimpangan Sebidang Jalan Ahmad Yani - KH. Patimura				100										Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penataan Persimpangan Jalan SA Tirtayasa - DI Panjaitan				100										Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penataan Persimpangan Sebidang Jalan SA Tirtayasa - P. Antasari				100										Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penataan Persimpangan Sebidang Jalan SA Tirtayasa - Kapten Tendean				100										Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan									23.650,0	6.100,0	46.100,0	127.700,0	40.000,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Jalan Ketileng-Cikerut					0,76									Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				TRANSISI	TARGET				TRANSISI	
					2016	2017	2018	2019		2020	2021	2017	2018		
	Pemeliharaan rutin jembatan				10	10	10	10	10						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Penggantian Jembatan Ciberko				1										Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pembangunan Jalan Baru JLS- Pintu Selatan KS						1,7	1,7							Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pembangunan Jalan Akses dari Pekuncen ke JLS						0,75	0,75							Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pembangunan Jalan H. Umar- Pagebangan (+ 400m)					0,2	0,2								Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Peningkatan Jalan Ruas JLS - Pejaten (JLS Ciberko - Panakodan)							4,2							Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pelebaran Jalan									22.900,0	111.400,0	26.000,0	27.600,0	7.000,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pelebaran Jalan Tengku Cik Di Tiro (Kadipaten-Seruni)						1,18								Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pelebaran Jalan Imam Bonjol (Cibeber-Ciberko)						2,385								Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan (Jalan Lingkar Luar Selatan)					3,24	4								Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pelebaran Jalan Sastradikarta (Jombang Kali - Acing)							0,923							Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
					2016	2017	2018	2019	2020		2021	2017	2018	2019		
	Pelebaran Jalan KH. Ahmad Dahlan (Kemiri-Curug Katimaha)					1,6	1,7								Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pelebaran Jalan P. Jayakarta-Jl. Bonakarta (eks RPH-Kel Masigit-Bonakarta)						2,042								Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pelebaran Jalan Lebak Layang - Pasir Angin-JLS						2,83								Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Peningkatan Struktur Jalan (Rigid Pavement)									28.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Peningkatan Struktur Jalan (Rigid Pavement) Jl. KH. Ahmad Dahlan				1,6										Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Peningkatan Struktur Jalan (Rigid Pavement) Jl. Cendrawasih (Jl. Perumnas)				1,023										Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Peningkatan Struktur Jalan (Rigid Pavement) Jl. Kepodang				0,561										Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Peningkatan Struktur Jalan (Rigid Pavement) Jl. Kemiri				0,4										Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh													120.000,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Industri Kecil Menengah												65.926,3		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Kegiatan Teknis Lainnya									25.237,1	26.534,6	27.812,9	29.009,5	34.770,4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
4.1.3. 1.1.1	Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran/Drainase dan Pengelolaan Sumber Daya Air									24.067,3	31.235,2	36.800,7	29.355,7	24.451,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Persentase luasan yang masih tergenang (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	%	86,55	87,16	91,98	94,57	95,4	94,57						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Persentase saluran/drainase perkotaan dalam kondisi baik	%		70.41	73.56	76.24	78.48	80.5						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Persentase peningkatan panjang saluran/drainase perkotaan (tahun dasar : 2016)	%		5	3	3	3	3						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pengendalian Banjir dan Genangan									4.800,0	10.800,0	15.200,0	6.600,0	0,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Tandon Cibuntu														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Tandon Bulakan Kec. Cibeber			0,6											Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Tandon Sukmajaya (Mitsubishi)			0,5											Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				TRANSISI	TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Pembangunan Tandon Cibeber 2														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pembangunan Tandon Kali Kedung Ingas Hulu 20.000m2														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pembangunan Tandon Metro														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pembangunan, Peningkatan, rehabilitasi dan normalisasi saluran/drainase dan jaringan irigasi									16.000,0	17.000,0	18.000,0	19.000,0	19.950,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Kegiatan Teknis Lainnya									3.267,3	3.435,2	3.600,7	3.755,7	4.501,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.1.1. 1.2.1	Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan dan Pengendalian Reklame									16.549,5	57.739,7	36.775,3	60.808,7	969,3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase unit gedung negara/pemerintahan yang laik fungsi	%	48,08	50,00	52,88	57,69	62,50	67,31						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase bangunan berizin terhadap seluruh jumlah bangunan yang ada	%	6	7	8	9	10	10						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase reklame berizin terhadap seluruh jumlah reklame yang ada	%	6	7	8	9	10	10						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
					2016	2017	2018	2019	2020		2021	2017	2018	2019		
	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintahan									15.846,0	57.000,0	36.000,0	60.000,0	0,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penyusunan DED Gedung Kantor 8 Lantai														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Gedung Kelurahan Lebak Gede														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Gedung Kelurahan Ramanuju														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Sarana Pendukung Masjid Pemda														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Gedung DINSOS														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Gedung DISPERLA														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Gedung BPBD														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Gedung Kelurahan Tegal Ratu														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				TRANSISI	TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Pembangunan Gedung Satpol PP														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pemb. Sarana Pendukung kantor kecamatan/Rehab kantor Kecamatan														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pembangunan Gedung Kantor 8 Lantai														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pembangunan Gedung BPTPM														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Kegiatan Teknis Lainnya									703,5	739,7	775,3	808,7	969,3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.1.1. 1.1.1	Program Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang									792,0	819,1	844,1	2.567,5	680,2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Rasio bangunan ber-IMB	%	85,0	86,0	87,0	88,0	89,0	89,0						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase jumlah KRK yang sesuai tata ruang terhadap jumlah KRK yang diajukan	%	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Penyusunan dan Review RDTR									300,0	300,0	300,0			Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Penyusunan rencana Rinci Kawasan Cepat Tumbuh												2.000,0		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				TRANSISI	TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Kegiatan Teknis Lainnya									492,0	519,1	544,1	567,5	680,2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.1.2. 2.1.1	Program Peningkatan Sarana dan Arsitektur Kota									21.338,2	20.146,4	13.282,5	3.090,0	3.703,6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Rasio Realisasi Taman Kota,Taman Perumahan, dan Lingkungan Terhadap kebutuhan luas RTH Publik Yang Seharusnya Tersedia	%		10,12	10,29	10,34	10,49	10,57						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Rasio Taman Kota Terpelihara Terhadap Taman Kota Yang Ada	%		68,29	71,15	77,33	76,98	82,41						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Rasio Panjang Trotoar dan Median Jalan yang terpelihara terhadap Panjang Trotoar dan Median Jalan Yang Ada	%		49,31	54,34	58,47	61,91	64,82						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase ketersediaan prasarana Kota terhadap kebutuhan	%	56,00	60,00	64,00	68,00	72,00	72,00						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Cakupan pemanfaatan tempat pemakaman umum oleh penduduk	%		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Peningkatan Kualitas Tata Bangunan Perkotaan dan Penataan ruang Kota									4.150,0	5.700,0	5.700,0	0,0	0,0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan Gerbang Kota (Gateway) 3 titik : Cilegon Timur, Merak, dan Anyer		titik		1,00	1,00									Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				TRANSISI	TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Penataan Koridor dan Wajah Jalan (Pembangunan Landmark : 6 titik di JLS)		titik		1,00										Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Revitalisasi bangunan cagar budaya (2 titik : Lingk. Pekuncen dan Statsiun KA Cilegon)														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan Taman Kota									10.500,0	10.500,0	3.500,0	0,0	0,0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan Taman Kecamatan Purwakarta														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan Taman Kecamatan Cibeber														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan Taman Kecamatan Ciwandan														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penghijauan Koridor Kota									4.000,0	1.120,0	1.120,0			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penghijauan Median JLS (8 km)		titik		3,00	-	-	-	-						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penghijauan Koridor JLU (8 km)														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan Teknis Lainnya									2.688,2	2.826,4	2.962,5	3.090,0	3.703,6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.1.3.1.1.1	Program Penataan Perumahan dan Permukiman									14.430,1	14.768,8	16.149,4	11.785,1	5.296,9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				TRANSISI	TARGET				TRANSISI	
					2016	2017	2018	2019		2020	2021	2017	2018		
		Prosentase luas penanganan kawasan kumuh	%		17,14	23,45	19,14	10,27	16,02						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik/ Tidak rusak	%		42,81	56,38	72,37	90,31	87,00						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik/ Tidak rusak	%		70,42	83,57	91,78	93,80	95,00						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Penduduk yang mendapat pelayanan air bersih dengan non perpipaan	%		13,59	14,78	15,94	17,31	20,00						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Peningkatan Kualitas Prasarana Dasar Perumahan dan Permukiman									377,5	6.027,5	5.520,0	5.520,0	0,0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penataan kawasan Kumuh		ha		0,56	0,56	0,56	0,56	0,56						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan Sanitasi lingkungan		paket						1,00						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Peningkatan cakupan pelayanan air bersih perkotaan									13.300,0	7.950,0	9.800,0	5.400,0	4.260,0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pengembangan SPAM Mata Air Pengobelan		paket		1,00	-									Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum PDAM		paket						1,00						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan Teknis Lainnya									752,6	791,3	829,4	865,1	1.036,9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				TRANSISI	TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1.1.1. 2.1.1	Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, serta Kompetensi Tenaga Kerja									19.289,5	7.018,2	19.510,0	10.242,5	9.196,5	Dinas Tenaga Kerja
		Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%		75,00	75,00	80,00	80,00	80,00						Dinas Tenaga Kerja
		Persentase tenaga kerja peserta pelatihan yang mendapatkan kesempatan pemagangan, diterima bekerja di perusahaan, maupun berwirausaha.	%		45	45	50	50	55						Dinas Tenaga Kerja
		Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%		45	45	45	45	50						Dinas Tenaga Kerja
	Pengembangan BLK									12.614,5		12.153,8	2.569,8		Dinas Tenaga Kerja
	Study Kelayakan (FS)				100	100	100	100	100						Dinas Tenaga Kerja
	Pengadaan Lahan				100	100	100	100	100						Dinas Tenaga Kerja
	Konstruksi BLK				100	100	100	100	100						Dinas Tenaga Kerja
	Pengadaan Sarana Pelatihan				100	100	100	100	100						Dinas Tenaga Kerja
	Kegiatan Teknis Lainnya									5.164,8	5.430,3	5.691,9	5.936,8	7.115,8	Dinas Tenaga Kerja
	Peningkatan Kualitas, Produktivitas, serta Kompetensi Tenaga Kerja UPT Balai Latihan Kerja									1.510,2	1.587,9	1.664,4	1.736,0	2.080,7	Dinas Tenaga Kerja



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				TRANSISI	TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1.1.3. 1.1.1	Program Pengembangan Pertanian									21.951,1	8.345,6	23.943,5	7.702,8	9.232,4	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Proporsi peningkatan luasan penangkaran kacang tanah per tahun	%		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00						Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Proporsi peningkatan provitas jagung per tahun	%		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Proporsi peningkatan provitas kacang tanah per tahun	%		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50						Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Proporsi peningkatan produksi melon per tahun	%		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Proporsi peningkatan produksi cabe per tahun	%		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Cakupan pembinaan pengolah hasil pertanian	%		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00						Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Pengembangan kawasan pertanian terpadu									15.250,0	1.300,0	16.558,5	0,0	0,0	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Perencanaan dan pengadaan lahan														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Konstruksi bangunan inti dan pendukung kawasan														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Penyediaan fasilitas peternakan,perika nan dan pertanian														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Operasional kawasan pertanian terpadu														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				TRANSISI	TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Kegiatan Teknis Lainnya									6.701,1	7.045,6	7.385,0	7.702,8	9.232,4	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Pengembangan Pertanian UPT Kawasan Pertanian Terpadu									0,0	120,6	126,4	131,8	158,0	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
2.2.1. 1.1.1	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup									3.031,5	3.453,7	4.775,5	12.146,0	594,5	Dinas Lingkungan Hidup
		Rata-rata tingkat pencemaran udara Kota Cilegon atau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)	.		51-100	100	100	100	100						Dinas Lingkungan Hidup
		Tingkat pencemaran air Kota Cilegon	%		10	10	10	10	10						Dinas Lingkungan Hidup
		Proporsi titik pemantauan kualitas air sungai	%		100	100	100	100	100						Dinas Lingkungan Hidup
		Proporsi titik pemantauan kualitas udara	%		100	100	100	100	100						Dinas Lingkungan Hidup
		Proporsi pabrik yang memenuhi baku mutu limbah	%		95	95	95	95	95						Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara	%		95	95	95	95	95						Dinas Lingkungan Hidup



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				TRANSISI	TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
		Persentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomassa	%		100	64,2	82,6	100,9	100,9						Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase wilayah industri manufaktur yang mendapatkan supervisi	%		100	100	100	100	100						Dinas Lingkungan Hidup
	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan									2.600,0	3.000,0	4.300,0	11.650,0	0,0	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemantauan Kualitas Lingkungan														Dinas Lingkungan Hidup
	Pengadaan dan Pembangunan alat Instalasi Stasiun Pemantau Udara (ISPU) dan dari CSR industri														Dinas Lingkungan Hidup
	Pengawasan dan pengendalian Lingkungan														Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan Teknis Lainnya									431,5	453,7	475,5	496,0	594,5	Dinas Lingkungan Hidup
2.2.1.1.2.1	Program Penataan Lingkungan									1.554,8	4.061,6	5.167,6	2.320,0	1.522,2	Dinas Lingkungan Hidup
		Proporsi jumlah perusahaan yang memiliki dokumen terkait lingkungan hidup	%		88	93,1	93,3	93,6	94,6						Dinas Lingkungan Hidup



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
					2016	2017	2018	2019	2020		2021	2017	2018	2019		
		Cakupan supervisi kesesuaian operasional perusahaan terhadap dokumen lingkungan hidup	%		100	5,3	6,2	7,1	7,9						Dinas Lingkungan Hidup	
		Tingkat Prosentase Lahan RTH di Kota Cilegon	%		17	63,4	99,4	100,0	100,0						Dinas Lingkungan Hidup	
		Tingkat Pemenuhan bangunan Konservasi air	%		100	78,4	78,6	100,0	100,0						Dinas Lingkungan Hidup	
	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									450,0	2.900,0	3.950,0	1.050,0	0,0	Dinas Lingkungan Hidup	
	Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (dan EvaluasiPelaksanaa n Daya Dukung & Daya tampung Lingkungan Hidup)														Dinas Lingkungan Hidup	
	Kajian dan Pengadaan lahan Hutan Kota														Dinas Lingkungan Hidup	
	Pembuatan dan Pemeliharaan Hutan Kota														Dinas Lingkungan Hidup	
	Kegiatan Teknis Lainnya									1.104,8	1.161,6	1.217,6	1.270,0	1.522,2	Dinas Lingkungan Hidup	
2.1.2. 1.1.1	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3									20.113,9	19.705,2	16.234,8	20.335,3	12.363,8	Dinas Lingkungan Hidup	
		Persentase penanganan persampahan	%	58	62	66	70	72	75						Dinas Lingkungan Hidup	



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
		TPS per satuan penduduk (Rasio daya tampung TPS per 1.000 penduduk)	m3 per penduduk	2,10	2,20	2,22	2,25	2,27	2,36						Dinas Lingkungan Hidup	
		Persentase pengurangan sampah di perkotaan	%	0,12	0,23	0,34	0,45	0,55	0,55						Dinas Lingkungan Hidup	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan									11.140,0	10.270,0	6.345,0	10.020,0	0,0	Dinas Lingkungan Hidup	
	Pengadaan Sarana Prasarana Peningkatan Pelayanan Persampahan														Dinas Lingkungan Hidup	
	Tempat Transper Depo														Dinas Lingkungan Hidup	
	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)														Dinas Lingkungan Hidup	
	Pengadaan Kendaraan Sedot Lumpur Tinja														Dinas Lingkungan Hidup	
	Revitalisasi TPSA Bagendung / Perluasan Lahan														Dinas Lingkungan Hidup	
	Pembinaan, koordinasi dan sosialisasi Program Adipura (Adiwiyata, Kampung Iklim, Bank Sampah, Adipura)														Dinas Lingkungan Hidup	
	Kegiatan Teknis Lainnya									8.973,9	9.435,2	9.889,8	10.315,3	12.363,8	Dinas Lingkungan Hidup	



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
					2016	2017	2018	2019	2020		2021	2017	2018	2019		
4.1.2. 2.1.1	Program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan									15.340,9	10.527,3	1.972,0	2.013,8	1.215,2	Dinas Perhubungan	
		Cakupan fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, Guard Rail, Marka)	%	31	45	61	80	100	100						Dinas Perhubungan	
		Cakupan Penunjang Sistem Angkutan Umum Massal (Saum)	%		3	3	3	3	3						Dinas Perhubungan	
		Rasio kepatuhan awak angkutan umum terhadap standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota	Unit		1270	1270	1270	1270	1270						Dinas Perhubungan	
	Peningkatan Kualitas Sistem Transportasi Perkotaan									14.650,0	9.600,0	1.000,0	1.000,0		Dinas Perhubungan	
	Pembangunan Kantong Parkir Angkutan Barang					1									Dinas Perhubungan	
	Pelayanan SAUM				3	3	3	3							Dinas Perhubungan	
	Kegiatan Teknis Lainnya									690,9	726,4	761,4	794,1	951,8	Dinas Perhubungan	
										0,0	100,5	105,3	109,9	131,7	Dinas Perhubungan	
										0,0	100,5	105,3	109,9	131,7	Dinas Perhubungan	
5.1.5. 1.1.1	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan									1.681,1	5.767,5	5.852,7	5.932,4	2.316,2	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
					2016	2017	2018	2019	2020		2021	2017	2018	2019		
	Teknologi Informasi															
		Tingkat kualitas dan kapabilitas jaringan infrastruktur TIK	%	90	100	100	100	100	100						Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	
		Tingkat kualitas layanan e-government	%	90	100	100	100	100	100						Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	
		Tingkat ketersediaan aplikasi TIK	%	90	100	100	100	100	100						Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	
	Pengembangan Smart-City										4.000,0	4.000,0	4.000,0		Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	
	Perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan aplikasi														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	
	Pengadaan, penyediaan, dan pemeliharaan infrastruktur TI														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	
	Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	
	Kegiatan Teknis Lainnya									1.681,1	1.767,5	1.852,7	1.932,4	2.316,2	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				TRANSISI	TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1.1.2. 1.1.1	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil									5.812,1	9.475,2	5.507,8	5.726,5	6.354,2	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
		Persentase Koperasi aktif dengan pengelolaan keuangan yang sehat	%	65,56	67,50	70,50	72,50	74,50	76,00						Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
	Pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)									1.200,0	4.626,0	425,1	425,1	0,0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
	Kegiatan Teknis Lainnya									2.201,8	2.315,0	2.426,5	2.530,9	3.033,5	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
	Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil UPT Pengelola Dana Bergulir									2.410,3	2.534,2	2.656,3	2.770,5	3.320,7	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
3.1.3. 1.1.1	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga									62.616,3	39.147,9	41.679,2	10.708,4	849,0	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Tingkat pemenuhan infrastruktur olahraga perkotaan	%		30	50,0%	15,0%	-	-						Dinas Pemuda dan Olahraga
		Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana olahraga	%		100	30,0%	30,0%	30,0%	10,0%						Dinas Pemuda dan Olahraga



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
	Pembangunan Sport center									62.000,0	38.500,0	41.000,0	10.000,0		Dinas Pemuda dan Olahraga	
	Pembangunan Tribun Barat														Dinas Pemuda dan Olahraga	
	Pembangunan Tribun Utara														Dinas Pemuda dan Olahraga	
	Pembangunan Tribun Timur														Dinas Pemuda dan Olahraga	
	Pembangunan Tribun Selatan														Dinas Pemuda dan Olahraga	
	Kegiatan Teknis Lainnya									616,3	647,9	679,2	708,4	849,0	Dinas Pemuda dan Olahraga	
1.2.1. 1.1.1	Program Pengembangan Kemitraan Industri									2.791,2	2.738,4	2.984,2	2.923,9	2.605,6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Pertumbuhan jumlah industri kecil	%		> 3 %	> 3,2 %	> 3,4 %	> 3,6 %	> 3,8 %						Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Proporsi industri kecil dan menengah yang sesuai dengan tata kelola dan regulasi	%		80	82	84	86	88						Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Tingkat pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%		70	72	74	76	78						Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Tingkat Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Industri Kecil dan Menengah	%		70	72	74	76	78						Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	Pemberdayaan IKM dan Ekonomi Kreatif									900,0	750,0	900,0	750,0	0,0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	Kegiatan Teknis Lainnya									1.891,2	1.988,4	2.084,2	2.173,9	2.605,6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	



KODE PROG RAM	PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Juta Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				TRANSISI	TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1.2.1. 2.1.1	Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar									15.331,1	348,2	364,9	380,6	456,2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Tingkat Kepuasan Pengunjung Pasar	Poin		> 5 %	> 5 %	> 5 %	> 5 %	> 5 %						Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Realisasi pendapatan daerah dari pengelolaan pasar	%		> 5 %	> 5 %	> 5 %	> 5 %	> 5 %						Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Rasio jumlah pasar rakyat terhadap jumlah kebutuhan pasar rakyat di Cilegon	Poin		50,0%	50,0%	62,5%	87,5%	87,5%						Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Rasio jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi terhadap total jumlah pasar rakyat	%		25,0%	50,0%	75,0%	100,0%	100,0%						Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Penataan dan revitalisasi pasar tradisional milik pemkot menjadi pasar modern, bersih dan sehat (Pasar Blok F, Pasar Baru Merak)									15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Kegiatan Teknis Lainnya									331,1	348,2	364,9	380,6	456,2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

BAB 9

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis sampai dengan program Pemerintah Daerah Kota Cilegon pada dasarnya merupakan keberhasilan kinerja pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Cilegon yang dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) Kota Cilegon.

Target capaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 9.1 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1	Pertumbuhan PDRB (ADHK)	%	> 5 %	> 5 %	> 5 %	> 6 %	> 6 %	> 6 %
1.2	Laju Inflansi (YoY)	%	< 8 %	< 8 %	< 8 %	< 8 %	< 8 %	< 8 %
1.3	PDRB ADHB per kapita	rupiah/ kapita	199,432,784	212,200,161	224,690,987	236,991,267	249,133,786	259,424,782
1.4	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	96.48	96.60	96.72	96.85	96.97	97.09
1.5	Angka kriminalitas yang tertangani	Kasus	313	297	679	645	613	582
Fokus Kesejahteraan Masyarakat								
1.	Pendidikan							
1.1	Angka melek huruf	%	>98	>98	>98	>98	>98	>98
1.2	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	10.27	10.52	10.78	11.04	11.29	11.55
1.3	Angka partisipasi kasar (SMA/SMK/MA/PAKET C)	%	105.06	107.35	109.64	111.92	114.21	116.50
1.4	Angka pendidikan yang ditamatkan (Seluruh jenjang pendidikan)	%	>98	>98	>98	>98	>98	>98



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.5	Angka Partisipasi Murni							
1.5.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
1.5.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	86.00	87.00	88.00	90.00	92.00	95.00
1.5.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	76.78	79.20	81.61	84.02	86.44	88.85
2.	Kesehatan							
2.1	Angka kelangsungan hidup bayi	%	98.35	98.20	98.06	97.91	97.76	97.62
2.2	Angka usia harapan hidup	tahun	65.93	65.96	65.99	66.03	66.06	66.09
2.3	Persentase balita gizi buruk	%	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
3.	Pertanahan							
3.1	Persentase penduduk yang memiliki lahan	%						
4.	Ketenagakerjaan							
4.1	Rasio Penduduk yang bekerja	%	88.50	89.24	90.26	90.89	90.63	91.56
1.	Kebudayaan							
1.1	Jumlah Grup Kesenian	grup	73.00	75.00	77.00	80.00	82.00	85.00
1.2	Jumlah Gedung	unit	1.00	1.00	2.00	4.00	6.00	8.00



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.	Pemuda dan Olahraga							
2.1	Jumlah klub olahraga	klub	152	152	160	160	170	170
2.2	Jumlah gedung olahraga	unit	1	2	2	3	5	8
1.	Pendidikan							
1.1	Pendidikan Dasar :							
1.1.1	Angka partisipasi sekolah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	Sekolah per penduduk usia sekolah	269.38	271.88	274.33	276.60	278.60	280.52
1.1.3	Rasio guru/murid (SD)	siswa per guru	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
1.1.4	Rasio guru/murid per kelas rata-rata (Pendidikan Dasar)	siswa per guru	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
1.2	Pendidikan Menengah :							
1.2.1	Angka partisipasi sekolah	%	84.63	87.70	90.77	93.84	96.91	99.98
1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	sekolah per penduduk	547.88	547.15	546.42	545.69	544.96	544.24



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.2.3	Rasio Guru Terhadap Murid (SMA)	siswa per guru	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
1.2.4	Rasio guru/murid per kelas rata-rata (Menengah)	siswa per guru	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
1.2.5	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.3	Fasilitas Pendidikan :							
1.3.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.3.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.4	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :							
1.4.1	Angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	65.24	69.72	74.21	78.70	83.19	87.67
1.5	Angka Putus Sekolah							
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MT	%	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
1.5.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	< 0,08	< 0,08	< 0,08	< 0,08	< 0,08	< 0,08
1.6	Angka Kelulusan							
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.6.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.6.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.6.5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.6.6	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	85.33	86.79	100.00	100.00	100.00	100.00
2.	Kesehatan							
2.1	Rasio posyandu per satuan balita	Per 100 Balita	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1 : penduduk	4610.09	4686.83	4763.92	4841.56	4919.58	4997.72
2.3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	2 : penduduk	59815.0000	47233.6667	39209.5455	33631.1538	34061.7692	34475.69
2.4	Rasio dokter per satuan penduduk	3 : penduduk	588.07	597.05	573.54	573.76	573.58	573.13
2.5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	4 : penduduk	156.76	159.15	161.48	163.69	165.78	167.80
2.6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2.7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.8	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	107.17	110.25	113.32	116.40	119.47	122.54
2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.12	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.13	Cakupan kunjungan bayi	%	86.94	84.95	82.95	80.96	78.96	76.96
2.14	Cakupan puskesmas	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.15	Cakupan pembantu puskesmas	%	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
3.	Pekerjaan Umum							
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	>80	>81	>82	>83	>84	>85
3.2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	72.99	74.72	76.46	78.19	79.93	81.66
3.3	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	penduduk per m2	38	39	39	40	40	41
3.4	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	per 1000 penduduk	3.65	4.31	4.96	5.62	6.27	6.93



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.5	Rasio rumah layak huni	1 : Penduduk	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22
3.6	Rasio permukiman layak huni	%	99.97	99.99	100.00	100.00	100.00	100.00
3.7	Panjang jalan dilalui Roda 4	%	348.31	348.31	348.31	372.31	372.31	372.31
3.8	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3.9	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	83.74	87.47	91.20	94.94	98.67	102.41
3.10	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	7.53	7.53	7.53	7.53	7.53	7.53
3.11	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	66.61	70.52	75.21	79.75	83.85	83.85
3.12	Luas irigasi kota dalam kondisi baik	%	66.61	70.52	75.21	79.75	83.85	83.85
3.13	Lingkungan Pemukiman	%	0.07	0.05	0.03	0.01	-0.02	-0.04
4.	Perumahan							
4.1	Rumah tangga pengguna air bersih	%	90.80	92.08	93.35	94.63	95.91	97.19
4.2	Rumah tangga pengguna listrik	%	100.10	100.15	100.20	100.25	100.30	100.35



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.3	Rumah tangga ber-Sanitasi	%	72.99	74.72	76.46	78.19	79.93	81.66
4.4	Lingkungan pemukiman kumuh	%	0.04	0.01	< 1	< 1	< 1	< 1
4.5	Rumah layak huni	%	> 95	> 95	> 95	> 95	> 95	> 95
5.	Penataan Ruang							
5.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	≥ 25	≥ 25	≥ 25	≥ 30	≥ 30	≥ 30
5.2	Jumlah bangunan ber – IMB	unit	6212.33	6555.76	6899.19	7242.62	7586.05	7929.48
5.3	Ruang publik yang berubah peruntukannya	unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Rencana Pembangunan							
6.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
7.	Perhubungan							



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum		1314461.51	1380184.58	1449193.81	1521653.50	1597736.18	1677622.98
7.2	Rasio ijin trayek	1 trayek : ... Penduduk	330	335	340	344	349	353
7.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		24.80	25.31	25.83	26.34	26.86	27.37
7.4	Angkutan darat		1270.00	1270.00	1270.00	1270.00	1270.00	1270.00
7.5	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7.6	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	20'	20'	15'	15'	15'	15'
7.7	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Ada	Perda	Perda	Perda	Perda	Perda	Perda
7.8	Pemasangan Rambu-rambu	Unit	>970	>990	>1000	>1050	>1065	>1065
8.	Lingkungan Hidup							
8.1	Persentase penanganan sampah	Persen	57.16	59.04	60.92	62.81	64.69	66.57
8.2	Persentase Penduduk berakses airminum	Persen	>20	>21	>22	>23	>24	>25
8.3	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8.4	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	per 1000 penduduk	3.65	4.31	4.96	5.62	6.27	6.93



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
8.5	Penegakan hukum lingkungan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
9.	Pertanahan							
9.1	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	> 99	> 99	> 99	> 99	> 99	> 99
9.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	Kasus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	Penyelesaian izin lokasi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
10.	Penduduk dan catatan sipil							
10.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	Persen	83.10	87.21	91.32	95.43	99.53	100.00
10.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	95.00	95.00	98.00	98.00	100.00	100.00
10.3	Rasio pasangan berakte nikah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
10.4	Kepemilikan KTP	Persen	83.10	87.21	91.32	95.43	99.53	100.00
10.5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	per 1000 penduduk	> 400	>420	>440	>460	>470	>480
10.6	Ketersediaan database kependudukan skala kota	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
10.7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ada	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
11.	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak							



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	45 - 50	45 - 55	45 - 55	45 - 55	45 - 55	45 - 55
11.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	>40	>40	>42	>45	>45	>45
11.3	Rasio KDRT	Persen	<1	<1	<1	<1	<1	<1
11.4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	>40	>40	>42	>45	>45	>45
11.5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Kasus	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
12.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
12.2	Rasio akseptor KB	Persen	65	65	65	65	65	65
12.3	Cakupan peserta KB aktif	Persen	65	65	65	65	65	65
12.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	<20	<20	<20	<20	<20	<20
13.	Sosial							
13.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Unit	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
13.2	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Persen	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
13.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persen	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
14.	Ketenagakerjaan							
14.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persen	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20
14.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	60.97	59.90	58.83	57.76	56.70	55.63
14.3	Pencari kerja yang ditempatkan	Persen	43.52	46.35	49.18	52.01	54.84	57.67
14.4	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	<12	<11	<11	<10	<10	<9
14.5	Keselamatan dan perlindungan	Persen	51.38	61.29	71.19	81.10	91.00	100.91
14.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
15.1	Persentase koperasi aktif	Persen	61.68	63.23	64.78	66.34	67.89	69.45
15.2	Usaha Mikro dan Kecil	Persen	99.27	97.26	95.26	93.25	91.25	90.00
16.	Penanaman Modal							
16.1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah (Juta)	182,667,319	186,320,665	190,047,079	193,848,020	197,724,980	201,679,480
16.2	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Rupiah (Juta)	4,392,827	5,282,471	6,172,116	7,061,761	7,951,406	8,841,050
17.	Kebudayaan							



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
17.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Keg	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
17.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
17.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	89.24	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
18.	Kepemudaan dan Olahraga							
18.1	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Gelanggang	0.09	-0.03	-0.14	-0.26	-0.38	-0.49
18.2	Lapangan olahraga	per 100.000 penduduk	1.43	1.41	1.39	1.60	2.03	2.45
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
19.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Keg	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
19.2	Kegiatan pembinaan politik daerah	Keg	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
20.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	per 10.000 penduduk	3.97	4.32	4.73	4.64	4.99	5.24
20.2	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	per 10.000 penduduk	373.77	368.15	362.85	357.96	353.43	349.19
20.3	Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan	1 kel : ... Pos	> 22	> 22	> 22	> 22	> 22	> 22



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
20.4	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5.02	4.74	4.45	4.17	3.88	3.59
20.5	Kemiskinan	Persen	3.52	3.40	3.28	3.15	3.03	2.91
20.6	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	Ada/Tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
20.7	Penegakan PERDA	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20.8	Cakupan patroli petugas Satpol PP	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20.9	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20.10	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota	Persen	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35
20.11	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20.12	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	> 90	> 90	> 90	> 90	> 90	> 90
20.13	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20.14	Sistim Informasi Manajemen Pemda	sistem	>30	>30	>30	>30	>30	>30
20.15	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
21.	Ketahanan Pangan							



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
21.1	Regulasi ketahanan pangan	Ada/Tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
22.	Pemberdayaan Masyarakat Desa							
22.1	PKK aktif	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
22.2	Posyandu aktif	Persen	60	60	60	60	60	60
23.	Statistik							
23.1	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23.2	Buku "PDRB kabupaten"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
24.	Kearsipan							
24.1	Pengelolaan arsip secara baku	Persen	80.00	85.00	90.00	96.00	100.00	100.00
24.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
25.	Komunikasi dan Informatika							
25.1	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Buah	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
25.2	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Siar	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
25.3	Web site milik pemerintah daerah	Buah	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
25.4	Pameran/expo	Kali	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
26.	Perpustakaan							
26.1	Jumlah perpustakaan	Unit	1.67	1.81	1.95	2.10	2.24	2.38
26.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	>20	>22	>24	>24	>25	>26
26.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	40.02	36.43	32.85	29.27	25.69	22.10
1.	Pertanian							
1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton/hektar	7.44	7.97	8.49	9.01	9.53	10.05
1.2	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	0.23	0.22	0.21	0.20	0.18	0.17
1.3	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persen	0.23	0.22	0.21	0.20	0.18	0.17
1.4	Cakupan bina kelompok petani	kelompok	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.	Energi dan Sumber Daya Mineral							
2.1	Penanganan Pertambangan tanpa ijin	Persen	> 85	> 85	> 85	> 85	> 85	> 85
2.2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Persen	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
3.	Pariwisata							



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1	Kunjungan wisata	kunjungan	237883.20	250464.96	269415.67	299985.15	320843.43	340350.68
3.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	> 2,50	> 2,50	> 2,55	> 2,60	> 2,7	> 2,78
4.	Kelautan dan Perikanan							
4.1	Kontribusi Produksi perikanan dan pertanian terhadap PDRB	Persen	> 0,32	> 0,32	> 0,34	> 0,35	> 0,38	> 0,40
4.2	Tingkat Konsumsi ikan	Kg/Kapita/ Tahun	24.00	21.50	21.60	21.70	21.80	21.90
4.3	Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	26.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00
4.4	Produksi perikanan	ton	506.40	530.40	551.10	579.90	597.60	615.83
6.	Perdagangan							
6.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	10.98	10.97	10.96	10.95	10.93	10.92
6.2	Ekspor Bersih Perdagangan	US\$	- 10,705,514,2 98	- 10,705,514,2 98	- 9,064,240,29 9	- 9,064,240,29 9	- 6,177,858,50 9	- 6,177,858,50 9
7.	Perindustrian							
7.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Persen	57.31	56.52	55.73	54.94	54.15	53.36
7.2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	Persen	> 10	> 10	>11	>11	>12	>12
7.3	Pertumbuhan Industri.	Persen	7.27	7.62	7.97	8.31	8.66	9.00



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Perhubungan							
1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1 km : ... Kendaraan						
1.2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Org	1,314,462	1,380,185	1,449,194	1,521,654	1,597,736	1,677,623
1.3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Org	2,636,495	2,768,320	2,906,736	3,052,072	3,204,676	3,364,910
2.	Penataan Ruang							
2.1	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	> 80	> 80	> 85	> 85	> 85	> 85
2.2	Luas wilayah produktif	Ha	1415.22	1415.22	1415.22	1415.22	1415.22	1415.22
2.3	Luas wilayah industri	Ha	3263.28	3263.28	3263.28	3263.28	3263.28	3263.28
2.4	Luas wilayah perkotaan	Ha	11822.30	11822.30	11822.30	11822.30	11822.30	11822.30
3.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.1	Jumlah bank dan cabang	Unit	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00
3.2	Jumlah perusahaan asuransi dan cabang	Unit	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
3.3	Jumlah restoran	Unit	85.33	85.05	84.76	84.48	84.19	83.90
3.4	Jumlah penginapan/ hotel	Unit	27.00	27.00	28.00	29.00	30.00	30.00



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.	Lingkungan Hidup							
4.1	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	Persen	92.80	95.55	97.30	99.06	100.81	102.56
5.	Komunikasi dan Informatika							
5.1	Rasio ketersediaan daya listrik	Persen	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
5.2	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	94.00	95.15	95.20	95.25	95.30	95.35
Fokus Iklim Berinvestas								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1	Angka kriminalitas	Kasus	<700	<700	<700	<700	<700	<700
1.2	Lama proses perijinan	Hari	< 7	< 7	< 7	< 7	< 7	< 7
1.3	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Buah	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
1.4	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Buah	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Fokus Sumber Daya Manusia								
1.	Ketenagakerjaan							
1.1	Rasio lulusan S1/S2/S3	Persen	7.35	7.81	8.28	8.74	9.21	9.67



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.2	Rasio ketergantungan	Persen	44.27	43.93	43.58	43.21	42.84	42.49

BAB 10

PENUTUP

RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021 merupakan suatu dokumen yang berisi kerangka kebijakan perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang sekaligus merupakan penjabaran dari visi dan misi serta program dari Walikota dan Wakil Walikota, yang berpedoman kepada RPJP Kota Cilegon Tahun 2005-2025 dan RTRW Kota Cilegon Tahun 2010-2030.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan RPJMD sangat tergantung dari seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

WALIKOTA CILEGON,

Ttd

Dr. H. Tb. IMAN ARIYADI, M.Si

MATRIKS KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA CILEGON TAHUN 2016-2021

VISI : TERWUJUDNYA KOTA CILEGON YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA BERBASIS INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA

KODE	TUJUAN/SASARAN	KINERJA								KODE	STRATEGI	KODE	ARAH KEBUJAKAN	KODE PROGRAM	PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				TRANSISI							
				2016	2017	2018	2019	2020	2021							
MISI 1 :		MEMANTAPKAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN DAERAH														
1.1	Meningkatkan keberdayaan perekonomian															
		Indeks Daya Beli Masyarakat (Purchasing Power Parity)	Poin	76,23					77,31							
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	< 11,44					< 7,01							
1.1.1	Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat dan Perlindungan Ketenagakerjaan															
		Cakupan Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100							
		Tingkat penempatan tenaga kerja	%	43,52	46,35	49,18	52,01	54,84	57,67							
										1.1.1.1	Peningkatan Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan	1.1.1.1.1	Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan	1.1.1.1.1.1	Program Peningkatan Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
										1.1.1.2	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, Pelayanan dan Aksesibilitas Informasi Ketenagakerjaan	1.1.1.2.1	Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja melalui Optimalisasi Fungsi BLK dan meningkatkan Aksesibilitas Informasi Ketenagakerjaan dan Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan	1.1.1.2.1.1	Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, serta Kompetensi Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2	Meningkatnya keberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil															
		Proporsi Usaha Kecil terhadap Usaha Mikro & Kecil	%	30	35	40	45	50	55							
		Proporsi Koperasi Aktif terhadap Jumlah Seluruh Koperasi	%	65,56	67,53	69,55	71,64	73,79	76,00							
										1.1.2.1	Peningkatan pembinaan, fasilitasi peningkatan kualitas SDM, kapasitas kelembagaan dan manajemen, akses permodalan, pemasaran produk dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. bagi UMKM dan koperasi	1.1.2.1.1	Memberdayakan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan serta pemanfaatan teknologi yang dimanifestasikan dalam konsep <i>science and technopark</i> dengan memberdayakan interaksi pemerintah, masyarakat, civitas perguruan tinggi, dan pelaku industri untuk meningkatkan kapasitas produksi serta menjalin konektivitas hasil produksi UMKM dengan rantai produksi industri menengah di Kota Cilegon	1.1.2.1.1.1	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
										1.1.2.1	Peningkatan pembinaan, fasilitasi peningkatan kualitas SDM, kapasitas kelembagaan dan manajemen, akses permodalan, pemasaran produk dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. bagi UMKM dan koperasi	1.1.2.1.2	Memberdayakan usaha Koperasi melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	1.1.2.1.2.1	Program Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

KODE	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	SATUAN	KINERJA						KODE	STRATEGI	KODE	ARAH KEBIJAKAN	KODE PROGRAM	PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB	
				KONDISI AWAL	TARGET												TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021								
										1.1.2.2	Peningkatan keberdayaan masyarakat melalui aspek pemanfaatan teknologi dan kelembagaan/ komunitas	1.1.2.2.1	Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG) yang dimanifestasikan dalam wadah interaksi antar kelompok usaha bersama/kelembagaan swadaya masyarakat, civitas perguruan tinggi, dan pelaku industri di Kota Cilegon	1.1.2.2.1.1	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Dinas Sosial	
1.1.3	Meningkatnya ketahanan pangan																
		Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan	%	> 8 %	> 8 %	> 8 %	> 8 %	> 8 %	> 8 %								
		Skor Pola Pangan Harapan	Poin														
										1.1.3.1	Peningkatan daya saing SDM dan pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	1.1.3.1.1	Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan SDM, pemanfaatan ilmu pengetahuan & teknologi, serta pemberdayaan berbasis komunitas.	1.1.3.1.1.1	Program Pengembangan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	
										1.1.3.1	Peningkatan daya saing SDM dan pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	1.1.3.1.2	Meningkatkan produktivitas peternakan dan perikanan melalui peningkatan SDM, pemanfaatan ilmu pengetahuan & teknologi, peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, serta pemberdayaan masyarakat atau komunitas pelaku usaha sektor peternakan	1.1.3.1.2.1	Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	
										1.1.3.1	Peningkatan daya saing SDM dan pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	1.1.3.1.3	Meningkatkan produktivitas perikanan dan perikanan melalui peningkatan SDM, pemanfaatan ilmu pengetahuan & teknologi, serta pemberdayaan masyarakat atau komunitas pelaku usaha sektor perikanan	1.1.3.1.3.1	Program Pengembangan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	
										1.1.3.2	Peningkatan tata kelola ketahanan pangan	1.1.3.2.1	Meningkatkan upaya-upaya diversifikasi dan keamanan pangan	1.1.3.2.1.1	Program Konsumsi, Diversifikasi dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	
										1.1.3.2	Peningkatan tata kelola ketahanan pangan	1.1.3.2.2	Meningkatkan tata kelola distribusi pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga	1.1.3.2.2.1	Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	
1.2	Meningkatkan pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah																
		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5 - 6					6 - 6,5								
1.2.1	Meningkatnya peran sektor industri, perdagangan dan jasa sebagai penggerak utama perekonomian daerah																
		Laju PDRB ADHK sektor industri pengolahan	%	> 3,70	> 4,15	> 4,28	> 4,40	> 4,65	> 4,77								
		Laju PDRB ADHK sektor perdagangan	%	> 5,35	> 5,40	> 5,46	> 5,69	> 5,89	>6								
		Laju PDRB ADHK sektor jasa	%	> 5,05	> 5,20	> 5,26	> 5,49	> 5,69	>5,8								
										1.2.1.1	Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah	1.2.1.1.1	Mendorong industri kecil dan menengah dalam pemenuhan standar/regulasi dan meningkatkan konektivitas rantai produksi industri kecil dan menengah (IKM) terhadap rantai produksi industri besar	1.2.1.1.1.1	Program Pengembangan Kemitraan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
										1.2.1.2	Peningkatan tata kelola dan pengembangan sarana & prasarana perdagangan perkotaan	1.2.1.2.1	Mengembangkan fungsi dan pengelolaan pasar	1.2.1.2.1.1	Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

KODE	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	SATUAN	KINERJA						KODE	STRATEGI	KODE	ARAH KEBIJAKAN	KODE PROGRAM	PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB	
				KONDISI AWAL	TARGET												TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021								
										1.2.1.2	Peningkatan tata kelola dan pengembangan sarana & prasarana perdagangan perkotaan	1.2.1.2.2	Meningkatkan pengawasan aktivitas perdagangan dalam upaya melindungi konsumen dan menjaga stabilitas harga barang pokok dan barang penting	1.2.1.2.2.1	Program Pengendalian dan Pengembangan Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
										1.2.1.3	Pengembangan sektor pariwisata	1.2.1.3.1	Pengembangan destinasi wisata daerah serta pembinaan, fasilitasi usaha kepariwisataan, dan Ekonomi Kreatif	1.2.1.3.1.1	Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
1.2.2	Terwujudnya peningkatan investasi																
		Pertumbuhan realisasi investasi	%	> 5	> 5,25	> 5,5	> 5,75	> 5,80	> 6								
										1.2.2.1	Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan kualitas pelayanan penanaman modal	1.2.2.1.1	Meningkatkan upaya promotif Kota Cilegon sebagai tujuan investasi pada skala nasional dan internasional	1.2.2.1.1.1	Program Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
										1.2.2.1	Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan kualitas pelayanan penanaman modal	1.2.2.1.2	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal	1.2.2.1.2.1	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
MISI 2 : MEMANTAPKAN LINGKUNGAN KOTA YANG ASRI DAN LESTARI																	
2.1	Mewujudkan penataan ruang dan perkotaan yang asri																
		Proporsi ruang terbuka hijau (RTH) terhadap luas wilayah Kota Cilegon	%	15,00						30,00							
2.1.1	Terwujudnya penataan ruang yang serasi dan terpadu																
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukannya	%	80	90	90	90	90	90								
		Tingkat kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan	%	5	7	9	11	13	15								
										2.1.1.1	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang dan bangunan	2.1.1.1.1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang	2.1.1.1.1.1	Program Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
										2.1.1.1	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang dan bangunan	2.1.1.1.1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang	2.1.1.1.1.2	Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
										2.1.1.1	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang dan bangunan	2.1.1.1.2	Meningkatkan pengendalian tata bangunan, reklame, dan pengembangan gedung negara	2.1.1.1.2.1	Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan dan Pengendalian Reklame	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
										2.1.1.1	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang dan bangunan	2.1.1.1.3	Mewujudkan kualitas Data Perencanaan Tata Ruang dan Pekerjaan Umum	2.1.1.1.3.1	Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
2.1.2	Terwujudnya lingkungan kota yang bersih dan asri																
		Cakupan pelayanan persampahan	%	56,03	57,5	59	61	63	65								
		Proporsi RTH Publik terhadap luas wilayah Kota Cilegon	%						10								

KODE	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	SATUAN	KINERJA						KODE	STRATEGI	KODE	ARAH KEBUJAKAN	KODE PROGRAM	PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB	
				KONDISI AWAL	TARGET												TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021								
										2.1.2.1	Peningkatan pelayanan persampahan	2.1.2.1.1	Meningkatkan pelayanan persampahan melalui pengembangan sarana dan prasarana persampahan serta pengelolaan sampah berbasis komunitas	2.1.2.1.1.1	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup	
										2.1.2.2	Peningkatan ketersediaan taman publik untuk menunjang keberadaan ruang terbuka hijau	2.1.2.2.1	Mewujudkan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan taman sebagai ruang publik yang terpadu	2.1.2.2.1.1	Program Peningkatan Sarana dan Arsitektur Kota	Dinas Perumahan dan Pemukiman	
										2.1.2.2	Peningkatan ketersediaan taman publik untuk menunjang keberadaan ruang terbuka hijau	2.1.2.2.2	Mewujudkan pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana arsitektur perkotaan				
2.1.3	Terwujudnya perumahan dan pemukiman yang tertata dan terpadu																
		Persentase Luasan kawasan kumuh yang ditangani	Ha	12	15	25	35	45	55								
		Persentase permukiman yang memiliki prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai standar	%	20	25	30	35	40	45								
										2.1.3.1	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman secara terpadu	2.1.3.1.1	Mewujudkan penanganan kawasan kumuh secara terpadu serta meningkatkan kualitas penataan, pengembangan dan pengendalian kawasan pemukiman dan perumahan	2.1.3.1.1.1	Program Penataan Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Pemukiman	
										2.1.3.1	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman secara terpadu	2.1.3.1.2	Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan	2.1.3.1.2.1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Seluruh Kecamatan	
2.2	Menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan																
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	51,00						60,00							
2.2.1	Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta meningkatnya perlindungan dan konsevasi sumberdaya alam																
		Indeks Kualitas Udara	poin	70	72	75	80	85	90								
		Indeks Kualitas Air	poin	20	25	30	35	40	45								
										2.2.1.1	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran udara dan air	2.2.1.1.1	Meningkatkan pengawasan pencemaran sungai dan udara serta mengendalikan limbah industri sesuai dengan regulasi lingkungan	2.2.1.1.1.1	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
										2.2.1.1	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran udara dan air	2.2.1.1.2	Mewujudkan perencanaan tata kelola lingkungan dan upaya-upaya promotif pengelolaan lingkungan berbasis komunitas	2.2.1.1.2.1	Program Penataan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	
2.2.2	Meningkatnya perlindungan ekosistem dan sumberdaya alam																
		Proporsi luasan tutupan vegetasi di Kota Cilegon	persen	15	18	23	26	28	30								
										2.2.2.1	Peningkatan pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan, serta melestarikan vegetasi	2.2.2.1.1	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan dan lingkungan, serta meningkatkan daya dukung lingkungan melalui pelestarian vegetasi	2.2.2.1.1.1	Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
MISI 3 : MEMANTAPKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL																	
3.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia																
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,66						75,72							

KODE	TUJUAN/SASARAN	KINERJA								KODE	STRATEGI	KODE	ARAH KEBUJAKAN	KODE PROGRAM	PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB	
		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET												TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021								
3.1.1	Terwujudnya ekosistem pendidikan yang merata, terjangkau, bermutu dan kompetitif bagi masyarakat																
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,04	10,25	10,46	10,67	10,87	11,08								
		Harapan lama sekolah	Tahun	13,51	13,82	14,12	14,43	14,73	15,04								
		Pemenuhan SPM penyelenggaraan pendidikan	%	80	85	88	90	95	100								
										3.1.1.1	Memperluas cakupan dan meningkatkan pelayanan pendidikan dasar yang merata, terjangkau dan bermutu serta memperluas cakupan pelayanan dan pembinaan pendidikan kesetaraan, anak usia dini, kemasyarakatan, dan informal	3.1.1.1.1	Penyediaan sarana dan fasilitas pembelajaran dan fasilitas pendukung, serta bantuan biaya pendidikan bagi Sekolah Dasar	3.1.1.1.1.1	Program Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	
										3.1.1.1	Memperluas cakupan dan meningkatkan pelayanan pendidikan dasar yang merata, terjangkau dan bermutu serta memperluas cakupan pelayanan dan pembinaan pendidikan kesetaraan, anak usia dini, kemasyarakatan, dan informal	3.1.1.1.2	Penyediaan sarana dan fasilitas pembelajaran dan fasilitas pendukung, serta bantuan biaya pendidikan bagi Sekolah Menengah Pertama	3.1.1.1.2.1	Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	
										3.1.1.1	Memperluas cakupan dan meningkatkan pelayanan pendidikan dasar yang merata, terjangkau dan bermutu serta memperluas cakupan pelayanan dan pembinaan pendidikan kesetaraan, anak usia dini, kemasyarakatan, dan informal	3.1.1.1.3	Pembinaan dan pengembangan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan serta sosialisasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, dan Lembaga Kursus	3.1.1.1.3.1	Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan	
										3.1.1.1	Memperluas cakupan dan meningkatkan pelayanan pendidikan dasar yang merata, terjangkau dan bermutu serta memperluas cakupan pelayanan dan pembinaan pendidikan kesetaraan, anak usia dini, kemasyarakatan, dan informal	3.1.1.1.4	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan	3.1.1.1.4.1	Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	
										3.1.1.2	Mewujudkan kelestarian seni dan budaya untuk mendukung pendidikan karakter bagi usia sekolah serta menjaga kearifan lokal	3.1.1.2.1	Meningkatkan pembinaan seni tradisional, kelestarian nilai budaya, pembinaan sejarah, pengelolaan museum dan cagar budaya	3.1.1.2.1.1	Program Pembinaan dan Pelestarian Seni, Budaya dan Sejarah Daerah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat																
		Angka Harapan Hidup	Tahun	66,10	66,17	66,23	66,30	66,37	66,44								
		Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang pelayanan kesehatan	Poin	75	77	79	81	82	83								
										3.1.2.1	Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, kualitas gizi masyarakat dan perluasan cakupan pelayanan kesehatan khusus dan rujukan		Meningkatkan pola hidup sehat masyarakat melalui upaya-upaya promotif terkait kesehatan pada keluarga, pemenuhan gizi, dan kebiasaan berolahraga	3.1.2.1.1.1	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	

KODE	TUJUAN/SASARAN	KINERJA								KODE	STRATEGI	KODE	ARAH KEBIJAKAN	KODE PROGRAM	PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB	
		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET												TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021								
										3.1.2.1	Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, kualitas gizi masyarakat dan perluasan cakupan pelayanan kesehatan khusus dan rujukan	3.1.2.1.1	Meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang kesehatan melalui mekanisme pembiayaan kesehatan (Jaminan Kesehatan), penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, mengembangkan sumber-sumber daya kesehatan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas penyedia jasa kesehatan serta peredaran obat dan makanan	3.1.2.1.2.1	Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Dinas Kesehatan	
										3.1.2.1	Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, kualitas gizi masyarakat dan perluasan cakupan pelayanan kesehatan khusus dan rujukan	3.1.2.1.2	Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular	3.1.2.1.3.1	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan	
										3.1.2.1	Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, kualitas gizi masyarakat dan perluasan cakupan pelayanan kesehatan khusus dan rujukan	3.1.2.1.3	Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan Kesehatan pada RSUD	3.1.2.1.4.1	Program Peningkatan Pelayanan RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah	
3.1.3	Meningkatnya pemasyarakatan olahraga dan kualitas peran pemuda dalam pembangunan																
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam olahraga	%	40	45	50	55	60	65								
		Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	%	30	35	40	45	50	55								
										3.1.3.1	Peningkatan prestasi olahraga, dan pembudayaan olahraga melalui pembinaan	3.1.3.1.1	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pemuda dan olahraga	3.1.3.1.1.1	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	
										3.1.3.1	Peningkatan prestasi olahraga, dan pembudayaan olahraga melalui pembinaan	3.1.3.1.2	Meningkatkan upaya promosi dalam rangka membudayakan olahraga dan melaksanakan pembinaan dan pelatihan atlet	3.1.3.1.2.1	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	
										3.1.3.1	Peningkatan prestasi olahraga, dan pembudayaan olahraga melalui pembinaan	3.1.3.1.3	Meningkatkan Pembinaan terhadap organisasi Kepemudaan dalam rangka menyelaraskan program kerja kepemudaan	3.1.3.1.3.1	Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda	Dinas Pemuda dan Olahraga	
3.2	Meningkatkan kesejahteraan sosial																
		Tingkat kemiskinan	%	< 3,9						< 3,6							
		Indeks Pembangunan Gender	%	60,48						62,94							
3.2.1	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan RTS																
		Proporsi penanganan PMKS	%	> 25	> 26	> 27,5	> 29	> 29,5	> 30								
		Cakupan penanganan rumah tangga sasaran	%	>90	>90	>90	>90	>90	>90								
										3.2.1.1	Peningkatan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat	3.2.1.1.1	Meningkatkan cakupan layanan perlindungan sosial dan cakupan jaminan sosial bagi masyarakat miskin	3.2.1.1.1.1	Program Perlindungan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	
										3.2.1.1	Peningkatan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat	3.2.1.1.2	Meningkatkan layanan rehabilitasi sosial yang terkait kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas & Tuna Sosial serta Peningkatan Kapasitas PMKS dan Pengelolaan Rumah Singgah	3.2.1.1.2.1	Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	

KODE	TUJUAN/SASARAN	KINERJA								KODE	STRATEGI	KODE	ARAH KEBIJAKAN	KODE PROGRAM	PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				TRANSISI							
				2016	2017	2018	2019	2020	2021							
										3.2.1.2	Peningkatan pemberdayaan sosial dalam penanggulangan kemiskinan	3.2.1.2.1	Meningkatkan keberdayaan sosial masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan perorangan dan keluarga, kelembagaan, serta penanganan fakir miskin	3.2.1.2.1.1	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
3.2.2	Meningkatnya kualitas keluarga dan pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga sasaran															
		Tingkat pertumbuhan alamiah penduduk	%	< 3	< 3	< 3	< 3	<2.5	<2.5							
		Peningkatan kualitas keluarga	%	> 10	> 10	> 10	> 15	> 15	> 15							
										3.2.2.1	Peningkatan upaya pengendalian penduduk	3.2.2.1.1	Melaksanakan Pembinaan Masyarakat untuk mewujudkan Ketahanan Keluarga	3.2.2.1.1.1	Program Bina Keluarga Sejahtera	Dinas PP,PA dan KB
										3.2.2.1	Peningkatan upaya pengendalian penduduk	3.2.2.1.2	Melaksanakan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dalam upaya mengendalikan penduduk	3.2.2.1.2.1	Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Dinas PP,PA dan KB
3.2.3	Terwujudnya kesetaraan serta pemenuhan hak anak dan perempuan															
		Tingkat perwujudan Kota Layak Anak	%	30	40	50	60	70	80							
		Tingkat partisipasi perempuan dalam program pemerintah	%	15	20	25	30	35	40							
										3.2.3.1	Mewujudkan pembangunan berbasis gender dan meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	3.2.3.1.1	meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan pada bidang ekonomi, bidang sosial, hukum dan politik, serta upaya peningkatan kualitas keluarga	3.2.3.1.1.1	Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Dinas PP,PA dan KB
										3.2.3.1	Mewujudkan pembangunan berbasis gender dan meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	3.2.3.1.2	meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menciptakan kondisi kota yang layak anak	3.2.3.1.2.1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas PP,PA dan KB
MISI 4 : MEMANTAPKAN PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA KOTA																
4.1	Meningkatkan pelayanan infrastruktur fisik dan transportasi untuk mendukung produktivitas kawasan dan perekonomian daerah															
		Pertumbuhan laju PDRB sektor konstruksi, transportasi dan perdagangan	%	6 - 6,5					6,5 - 7							
		Rata-rata jarak dan waktu tempuh moda transportasi di jalan perkotaan	km/jam	30,00					40,00							
4.1.1	Terwujudnya pelayanan prasarana jalan dan jembatan yang memadai dan berkualitas															
		Proporsi jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	80	82	86	90	95	98							
		Tingkat pengembangan kapasitas jalan dan jembatan	%	>1,25	>1,25	>1,3	>1,4	>1,4	> 1,5							
										4.1.1.1	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dalam rangka meningkatkan konektivitas transportasi	4.1.1.1.1	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dalam rangka meningkatkan konektivitas transportasi	4.1.1.1.1.1	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	SATUAN	KINERJA						KODE	STRATEGI	KODE	ARAH KEBIJAKAN	KODE PROGRAM	PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB	
				KONDISI AWAL	TARGET												TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021								
4.1.2	Terwujudnya pelayanan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai dan handal																
		Proporsi penggunaan sarana transportasi umum	%	20	25	30	35	40	45								
		Tingkat pemenuhan kelengkapan prasarana perhubungan	%	70					100								
										4.1.2.1	Peningkatan pengawasan dan pengendalian angkutan/transportasi umum serta manajemen lalu lintas	4.1.2.1.1	Meningkatkan tata kelola angkutan orang, barang dan khusus melalui manajemen rekayasa lalu lintas, pengembangan sistem angkutan umum masal, serta pengembangan prasarana lalu lintas jalan	4.1.2.1.1.1	Program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan	
										4.1.2.1	Peningkatan pengawasan dan pengendalian angkutan/transportasi umum serta manajemen lalu lintas	4.1.2.1.2	Mengoptimalkan penerapan peraturan lalu lintas angkutan jalan serta melaksanakan upaya-upaya promotif terkait keselamatan dan ketertiban berkendara bagi masyarakat	4.1.2.1.2.1	Program Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	
										4.1.2.1	Peningkatan pengawasan dan pengendalian angkutan/transportasi umum serta manajemen lalu lintas	4.1.2.1.3	Meningkatkan pengawasan dan tata kelola kepelabuhanan	4.1.2.1.3.1	Program Dukungan Pelayanan Perhubungan Laut	Dinas Perhubungan	
										4.1.2.2	Mewujudkan Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung perhubungan	4.1.2.2.1	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perhubungan (kelayakan angkutan jalan, halte penerangan jalan umum, dsb)	4.1.2.2.1.1	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Dinas Perhubungan	
4.1.3	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan air bersih, saluran irigasi dan penanganan banjir																
		Cakupan pelayanan air bersih	%	80	82	84	86	88	90								
		Persentase luasan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) yang ditangani	%	30	40	50	60	65	70								
										4.1.3.1	Mengoptimalkan sumber-sumber daya air beserta saluran/jaringannya serta meningkatkan cakupan layanan dan distribusi air bersih bagi masyarakat melalui jaringan air perpipaan dan non-perpipaan		Mewujudkan pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan sumber-sumber daya air beserta jaringannya dalam rangka mendukung penurunan titik banjir	4.1.3.1.1.1	Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran/Drainase dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
MISI 5 : MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN																	
5.1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan																
		Penilaian akuntabilitas kinerja (LAKIP) daerah	Poin (A/B/C)	B						BB							
		Opini BPK	WDP/WTP	WTP						WTP							
5.1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan																
		Proporsi SKPD dengan nilai LAKIP minimal B	%	25	30	35	45	55	60								
		Proporsi SKPD yang memiliki maturitas SPIP level 3 (Terdefinisi)	%	30	40	50	60	70	80								
		Tingkat kinerja pegawai (rata-rata nilai SKP)	%	80	82	84	86	88	90								

KODE	TUJUAN/SASARAN	KINERJA								KODE	STRATEGI	KODE	ARAH KEBIJAKAN	KODE PROGRAM	PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB	
		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET												TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021								
										5.1.1.1	Peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur	5.1.1.1.1	Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)	5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Semua SKPD	
										5.1.1.1	Peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur	5.1.1.1.2	Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional maupun jabatan	5.1.1.1.2.1	Program Diklat dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
										5.1.1.1	Peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur	5.1.1.1.3	Mewujudkan tata kelola administrasi sumber daya aparatur sipil negara secara terpadu	5.1.1.1.3.1	Program Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan dan Administrasi Umum (P3KA)	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
										5.1.1.1	Peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur	5.1.1.1.4	Peningkatan etos kerja, kedisiplinan dan motivasi aparatur sipil negara melalui mekanisme penilaian kinerja pegawai, penjaminan kesejahteraan, dan fasilitasi mutasi/keangkatan serta promosi/ pengembangan karir pegawai	5.1.1.1.4.1	Program Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
										5.1.1.1	Peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur	5.1.1.1.4		5.1.1.1.4.2	Program Penunjang Kemandirian dan Profesionalitas ASN	Sekretariat Korpri	
										5.1.1.2	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	5.1.1.2.1	Optimalisasi fungsi organisasi perangkat daerah melalui penyesuaian formasi jabatan dan mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	5.1.1.2.1.1	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	SETDA	
										5.1.1.2	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	5.1.1.2.2	Meningkatkan koordinasi kerjasama daerah, meningkatkan kualitas perangkat kecamatan & kelurahan, serta peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang pemerintahan umum, ketentraman & ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat	5.1.1.2.2.1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	SETDA	
										5.1.1.2	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	5.1.1.2.3	Peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang kependudukan, pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, pemuda, olahraga, teknologi informasi, statistik, persandian, serta bina keagamaan dan pembinaan mental	5.1.1.2.3.1	Program Peningkatan Kualitas Mental dan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan	SETDA	
										5.1.1.2	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	5.1.1.2.4	Peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip serta perpustakaan daerah	5.1.1.2.4.1	Program Peningkatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA	
										5.1.1.2	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	5.1.1.2.5	Peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi & UMKM, industri, perdagangan, perhubungan serta badan usaha milik daerah (BUMD)	5.1.1.2.5.1	Program Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	SETDA	
										5.1.1.2	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	5.1.1.2.6	Peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang perencanaan, litbang, keuangan, pangan, pertanian, pekerjaan umum, tata ruang, pertanahan dan permukiman	5.1.1.2.6.1	Program Peningkatan Infrastruktur dan Kewilayahan	SETDA	
										5.1.1.2	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	5.1.1.2.7	Meningkatkan fungsi pengawasan pada tata laksana pembangunan daerah	5.1.1.2.7.1	Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah	Inspektorat	
										5.1.1.3	Peningkatan kualitas tata kelola kearsipan di seluruh unit pemerintahan	5.1.1.3.1	Mewujudkan tata kelola arsip dinamis dan statis secara optimal dan terintegrasi	5.1.1.3.1.1	Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	

KODE	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	SATUAN	KINERJA						KODE	STRATEGI	KODE	ARAH KEBIJAKAN	KODE PROGRAM	PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB	
				KONDISI AWAL	TARGET												TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021								
5.1.2	Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah																
		Tingkat realisasi Belanja	%	> 90	> 90	> 90	> 90	> 90	> 90								
		Tingkat pertumbuhan PAD	%	> 10	> 12,5	> 15	> 15	> 18	> 20								
		Persentase aset daerah dalam kondisi baik	%	> 50	> 53	> 55	> 60	> 65	> 70								
										5.1.2.1	Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu		Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran melalui peningkatan kualitas perencanaan, proses penyusunan dan administrasi penganggaran	5.1.2.1.1	Program Perencanaan Anggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
										5.1.2.1	Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu	5.1.2.1.1	Meningkatkan kualitas pencatatan keuangan daerah melalui efisiensi tata kelola penerimaan, pengeluaran dan pelaporan neraca keuangan daerah	5.1.2.1.2.1	Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
										5.1.2.1	Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu	5.1.2.1.2	Mengoptimalkan rangkaian proses pengeloaan aset daerah secara terpadu terkait proses perencanaan aset, manajemen pemanfaatan aset, serta penatausahaan aset daerah	5.1.2.1.3.1	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
										5.1.2.1	Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu	5.1.2.1.3	Meningkatkan kualitas administrasi dan tata kelola aliran keuangan daerah	5.1.2.1.4.1	Program Perbendaharaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
										5.1.2.1	Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu	5.1.2.1.4	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset di setiap unit satuan kerja perangkat daerah	5.1.2.1.5.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Semua SKPD	
										5.1.2.1	Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu	5.1.2.1.5		5.1.2.1.5.2	Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan	Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah	
										5.1.2.2	Meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah		Mewujudkan peningkatan pajak daerah dengan mengoptimalkan potensi-potensi wajib pajak daerah serta peningkatan pelayanan perpajakan serta tata kelola data & informasi wajib pajak secara terpadu	5.1.2.2.1.1	Program Peningkatan Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
										5.1.2.3	Optimalisasi belanja program/kegiatan melalui peningkatan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	5.1.2.3.1	Optimalisasi dan peningkatan kualitas sistem layanan pengadaan barang dan jasa	5.1.2.3.1.1	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
											Optimalisasi belanja program/kegiatan melalui peningkatan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	5.1.2.3.2	Peningkatan transparansi proses pengadaan barang dan jasa	5.1.2.3.2.1	Program Layanan Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
5.1.3	Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah																
		Tingkat ketersediaan data sektoral daerah	%	80	82	84	85	90	95								
		Ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100								
										5.1.3.1	Mewujudkan ketersediaan data dan informasi daerah dalam rangka mendukung kualitas perencanaan sektoral dan makro daerah	5.1.3.1.1	Penyediaan data statistik sektoral dan data statistik makro daerah melalui sistem manajemen data dan informasi sektoral secara terpadu	5.1.3.1.1.1	Program Pengembangan Data dan Statistik Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	
										5.1.3.1	Mewujudkan ketersediaan data dan informasi daerah dalam rangka mendukung kualitas perencanaan sektoral dan makro daerah	5.1.3.1.2	Melaksanakan pengamanan data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	5.1.3.1.2	Program Penyelenggaraan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	

KODE	TUJUAN/SASARAN	KINERJA								KODE	STRATEGI	KODE	ARAH KEBIJAKAN	KODE PROGRAM	PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB	
		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET												TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021								
										5.1.3.1	Mewujudkan ketersediaan data dan informasi daerah dalam rangka mendukung kualitas perencanaan sektoral dan makro daerah	5.1.3.1.3	Meningkatkan inovasi daerah melalui penelitian dan pengembangan serta kerjasama dengan lembaga penelitian atau instansi lainnya	5.1.3.1.3.1	Program Penelitian Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
										5.1.3.2	Memadukan dan meningkatkan kualitas seluruh tahapan/proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan daerah	5.1.3.2.1	Meningkatkan kualitas koordinasi antar sektor pada seluruh tahapan perencanaan dan evaluasi di bidang ekonomi dan infrastruktur	5.1.3.2.1.1	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
										5.1.3.2	Memadukan dan meningkatkan kualitas seluruh tahapan/proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan daerah	5.1.3.2.2	Meningkatkan kualitas koordinasi antar sektoral pada seluruh tahapan perencanaan dan evaluasi di bidang pembangunan sosial dan budaya	5.1.3.2.2.1	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
										5.1.3.2	Memadukan dan meningkatkan kualitas seluruh tahapan/proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan daerah	5.1.3.2.3	Mengoptimalisasi keterlaksanaan dan integrasi program pembangunan melalui mekanisme pengendalian, evaluasi dan pelaporan,	5.1.3.2.3.1	Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
										5.1.3.2	Memadukan dan meningkatkan kualitas seluruh tahapan/proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan daerah	5.1.3.2.4	Meningkatkan kinerja penyediaan data-data dan perencanaan sektoral	5.1.3.2.4.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Semua SKPD	
										5.1.3.2	Memadukan dan meningkatkan kualitas seluruh tahapan/proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan daerah	5.1.3.2.4		5.1.3.2.4.1	Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan	Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah	
5.1.4	Terwujudnya pelaksanaan penataan dan pengembangan produk hukum dan produk legislatif daerah secara integratif dan bersinergi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah																
		Rata-rata persentase hasil reses yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100								
										5.1.4.1	Meningkatkan fasilitasi produk hukum antara eksekutif dan legislatif	5.1.4.1.1	Peningkatan fasilitasi produk hukum, bantuan hukum dan konsultasi, dokumentasi, evaluasi, dan penyuluhan hukum	5.1.4.1.1.1	Program Penataan dan Pengembangan Produk Hukum Daerah	SETDA	
										5.1.4.1	Meningkatkan fasilitasi produk hukum antara eksekutif dan legislatif	5.1.4.1.2	Pengembangan produk hukum dan regulasi melalui instrumen legislatif daerah	5.1.4.1.2.1	Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah	Sekretariat DPRD	
5.1.5	Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)																
		Cakupan pemenuhan infrastruktur dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks implementasi Smart City	%	20	30	40	50	60	70								

KODE	TUJUAN/SASARAN	KINERJA								KODE	STRATEGI	KODE	ARAH KEBIJAKAN	KODE PROGRAM	PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB	
		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET												TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021								
		Tingkat penetrasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	%	70	75	80	85	87	90								
										5.1.5.1	Pengembangan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, perangkat keras serta sumber daya lainnya dalam rangka penerapan e-government	5.1.5.1.1	Mengembangkan interkoneksi jaringan teknologi informasi, membangun & mengintegrasikan sistem informasi manajemen tata kelola pemerintahan secara terpadu, serta mendorong pertumbuhan pemanfaatan teknologi dan informasi bagi masyarakat.	5.1.5.1.1.1	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	
5.2	Meningkatkan kinerja pelayanan publik																
		Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kota	Poin	77,07						80,00							
5.2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat																
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Perijinan	poin	77	78	79	80	82	83								
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Non Perijinan	poin	75	76	77	78	79	80								
										5.2.1.1	Peningkatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pada instansi daerah	5.2.1.1.1	Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pada kecamatan dan kelurahan	5.2.1.1.1.1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Seluruh Kecamatan	
										5.2.1.1	Peningkatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pada instansi daerah	5.2.1.1.2	Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan pendaftaran penduduk	5.2.1.1.2.1	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
										5.2.1.1	Peningkatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pada instansi daerah	5.2.1.1.3	Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan Catatan Sipil	5.2.1.1.3.1	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
										5.2.1.1	Peningkatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pada instansi daerah	5.2.1.1.4	Meningkatkan pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	5.2.1.1.4.1	Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
										5.2.1.1	Peningkatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pada instansi daerah	5.2.1.1.5	Meningkatkan Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	5.2.1.1.5.1	Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
										5.2.1.1	Peningkatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pada instansi daerah	5.2.1.1.6	Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam rangka menunjang kondusifitas pertumbuhan dunia usaha	5.2.1.1.6.1	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
										5.2.1.1	Peningkatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pada instansi daerah	5.2.1.1.7	Meningkatkan pelayanan pengaduan perizinan dan penyediaan data dan informasi perizinan	5.2.1.1.7.1	Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
5.2.2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan informasi dan kepustakaan yang berkualitas																
		Tingkat pemenuhan dan penetrasi media informasi publik	%	30	40	50	55	60	70								
										5.2.2.1	Mewujudkan tata kelola dan diseminasi informasi publik	5.2.2.1.1	Meningkatkan efektifitas pelayanan informasi publik dan tata kelola informasi pemerintah daerah	5.2.2.1.1.1	Program Pengembangan Komunikasi dan Pengelolaan Informasi Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	

KODE	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	SATUAN	KINERJA						KODE	STRATEGI	KODE	ARAH KEBIJAKAN	KODE PROGRAM	PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB	
				KONDISI AWAL	TARGET												TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021								
										5.2.2.2	Mewujudkan perpustakaan sebagai ruang publik fungsional serta memenuhi kebutuhan informasi & kepustakaan bagi masyarakat	5.2.2.2.1	Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan daerah sebagai pusat referensi kepustakaan, aktivitas akademis, serta sarana pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat	5.2.2.2.1.1	Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
5.3	Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat																
		Penanganan Kasus SARA, Konflik Sosial dan Pelanggaran PERDA	%	100,00						100,00							
5.3.1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum daerah																
		Presentase penurunan kasus pelanggaran perda	%	> 5	> 5	> 5	> 5	> 5	> 5	5.3.1.1	Peningkatan pengawasan, pembinaan dan penegakkan Perda dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	5.3.1.1.1	Meningkatkan pengawasan, pembinaan dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum	5.3.1.1.1.1	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	
										5.3.1.1	Peningkatan pengawasan, pembinaan dan penegakkan Perda dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	5.3.1.1.2	Meningkatkan pengawasan, pembinaan dalam rangka melaksanakan perlindungan masyarakat	5.3.1.1.2.1	Program Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	
										5.3.1.1	Peningkatan pengawasan, pembinaan dan penegakkan Perda dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	5.3.1.1.3	Mewujudkan penegakkan Perda dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	5.3.1.1.3.1	Program Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	
										5.3.1.2	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan peran masyarakat dalam konstelasi pembangunan daerah	5.3.1.2.1	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan peran masyarakat dalam konstelasi pembangunan daerah	5.3.1.2.1.1	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
										5.3.1.2	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan peran masyarakat dalam konstelasi pembangunan daerah	5.3.1.2.1		5.3.1.2.1.2	Program Peningkatan LSM dan ORMAS	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
5.3.2	Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran																
		Indeks Resiko bencana	tinggi/ sedang/ rendah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	5.3.2.1	Peningkatan upaya pencegahan dan pengurangan dampak bencana alam dan bahaya kebakaran	5.3.2.1.1	Meningkatkan upaya pencegahan dan menyediakan sarana prasarana penanganan kebakaran	5.3.2.1.1.1	Program Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	
										5.3.2.1	Peningkatan upaya pencegahan dan pengurangan dampak bencana alam dan bahaya kebakaran	5.3.2.1.2	Meningkatkan pelayanan pengaduan dan optimalisasi waktu kecepatan tanggap penanganan kebakaran	5.3.2.1.2.1	Program Pengendalian, Operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	
										5.3.2.1	Peningkatan upaya pencegahan dan pengurangan dampak bencana alam dan bahaya kebakaran	5.3.2.1.3	Memetakan potensi bencana serta meningkatkan upaya mitigasi bencana dalam rangka meminimalisir dampak bencana	5.3.2.1.3.1	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
										5.3.2.1	Peningkatan upaya pencegahan dan pengurangan dampak bencana alam dan bahaya kebakaran	5.3.2.1.4	Meningkatkan utilitas dan koordinasi penanganan bencana	5.3.2.1.4.1	Program Kedaruratan dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

KODE	TUJUAN/SASARAN	KINERJA								KODE	STRATEGI	KODE	ARAH KEBIJAKAN	KODE PROGRAM	PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB	
		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET												TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021								
										5.3.2.1	Peningkatan upaya pencegahan dan pengurangan dampak bencana alam dan bahaya kebakaran	5.3.2.1.5	Meningkatkan pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	5.3.2.1.5.1	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

MATRIKS RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA CILEGON TAHUN 2016-2021

VISI : TERWUJUDNYA KOTA CILEGON YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA BERBASIS INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00		
MISI 1 : MEMANTAPKAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN DAERAH																
1.1.2.2.1.1	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan									2629377926,49	2764552874,73	2897740784,62	3022408243,33	3622617410,77	Dinas Sosial	
		Tingkat partisipasi masyarakat terhadap inovasi Teknologi Tepat Guna	%		64,00	69,33	74,67	80,00	85,33						Dinas Sosial	
		Cakupan pembentukan Posyantek	%		15,69	31,37	47,06	58,82	74,51						Dinas Sosial	
		Presentase lembaga kemasyaarakatan yang mandiri	%		4,65	9,30	11,63	13,95	18,60						Dinas Sosial	
		Presentase Kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang terbentuk	%		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00						Dinas Sosial	
	kegiatan Teknis Lainnya									2629377926,49	2764552874,73	2897740784,62	3022408243,33	3622617410,77	Dinas Sosial	
	Pengembangan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna														Dinas Sosial	
	Pengadaan Alat Tekhnologi Tepat Guna														Dinas Sosial	
	Penguatan Lembaga kemasyarakatan Kelurahan														Dinas Sosial	
	Pendampingan Cilegon Coorporate Social Responsibility (CCSR)														Dinas Sosial	
	Pendampingan DPW Kelurahan														Dinas Sosial	
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									1235022931,77	1239474536,94	1261934071,10	1467170778,67	1844634286,18	Dinas Tenaga Kerja	
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00						Dinas Tenaga Kerja	
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00						Dinas Tenaga Kerja	
		Tingkat disiplin aparatur	%		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00						Dinas Tenaga Kerja	
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		80,00	82,00	85,00	85,00	90,00						Dinas Tenaga Kerja	
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									1235022931,77	1239474536,94	1261934071,10	1467170778,67	1844634286,18	Dinas Tenaga Kerja	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Dinas Tenaga Kerja	
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Tenaga Kerja	
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Tenaga Kerja	
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Dinas Tenaga Kerja	
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Dinas Tenaga Kerja	
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Dinas Tenaga Kerja	
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Dinas Tenaga Kerja	
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Dinas Tenaga Kerja	
1.1.1.2.1.1	Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, serta Kompetensi Tenaga Kerja									19289497044,46	7018155162,18	19510047909,31	10242537807,36	9196456799,34	Dinas Tenaga Kerja	
		Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%		75,00	75,00	80,00	80,00	80,00						Dinas Tenaga Kerja	
		Persentase tenaga kerja peserta pelatihan yang mendapatkan kesempatan pemagangan, diterima bekerja di perusahaan, maupun berwirausaha.	%		45	45	50	50	55						Dinas Tenaga Kerja	
		Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%		45	45	45	45	50						Dinas Tenaga Kerja	

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Pengembangan BLK									12614500000,00		12153778969,00	2569785295,00		Dinas Tenaga Kerja
	Study Kelayakan (FS)				100	100	100	100	100						Dinas Tenaga Kerja
	Pengadaan Lahan				100	100	100	100	100						Dinas Tenaga Kerja
	Konstruksi BLK				100	100	100	100	100						Dinas Tenaga Kerja
	Pengadaan Sarana Pelatihan				100	100	100	100	100						Dinas Tenaga Kerja
	Kegiatan Teknis Lainnya									5164783117,49	5430301924,65	5691917670,91	5936797031,76	7115764172,13	Dinas Tenaga Kerja
	Pelatihan dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja														Dinas Tenaga Kerja
	Peningkatan Akses Pencari Kerja terhadap Lapangan Pekerjaan luar negeri														Dinas Tenaga Kerja
	Peningkatan Akses Pencari Kerja terhadap Lapangan Pekerjaan Dalam negeri														Dinas Tenaga Kerja
	Peningkatan Kompetensi SDM dan Tenaga Kerja														Dinas Tenaga Kerja
	Pengembangan Balai Latihan Kerja														Dinas Tenaga Kerja
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja														Dinas Tenaga Kerja
	Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Tenaga Kerja														Dinas Tenaga Kerja
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelatihan Tenaga Kerja														Dinas Tenaga Kerja
	Peningkatan Kualitas, Produktivitas, serta Kompetensi Tenaga Kerja UPT Balai Latihan Kerja									1510213926,97	1587853237,53	1664351269,40	1735955480,60	208069267,22	Dinas Tenaga Kerja
1.1.1.1.1.1	Program Peningkatan Hubungan Industrial									598967902,33	629760529,89	660100513,42	688499552,41	825226198,80	Dinas Tenaga Kerja
		Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%		67,00	70,00	70,00	70,00	75,00						Dinas Tenaga Kerja
		Cakupan tenaga kerja yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan	%		60,00	60,00	60,00	60,00	65,00						Dinas Tenaga Kerja
		Proporsi perusahaan yg telah memiliki Sarana Hubungan Industrial	%		12,00	12,00	12,00	12,00	13,00						Dinas Tenaga Kerja
	Kegiatan Teknis Lainnya									598967902,33	629760529,89	660100513,42	688499552,41	825226198,80	Dinas Tenaga Kerja
	Pembinaan Persyaratan Kerja														Dinas Tenaga Kerja
	Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan														Dinas Tenaga Kerja
	Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja														Dinas Tenaga Kerja
	Peningkatan tata kelola Hubungan Industrial														Dinas Tenaga Kerja
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									2926895454,48	2937256359,17	2989529883,82	3467208807,03	4345737623,63	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		100	100	100	100	100						Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		100	100	100	100	100						Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Tingkat disiplin aparatur	%		100	100	100	100	100						Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		100	100	100	100	100						Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									2717148135,81	2726942019,30	2776354770,91	3227891761,06	4058341333,60	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan UPT Puskesmas dan RPH									104873659,33	105062666,40	106016257,41	114730235,10	130756649,79	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan UPT Kawasan Pertanian Terpadu									52436829,67	52625836,73	53579427,75	62293405,44	78319820,12	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan UPT Perikanan									52436829,67	52625836,73	53579427,75	62293405,44	78319820,12	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
1.1.3.2.1.1	Program Konsumsi, Diversifikasi dan Keamanan Pangan									1152182845,19	1211415964,52	1269778371,61	1324407151,23	1587416397,37	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Peningkatan pencapaian tingkat konsumsi energi	%	86,50	88,30	90,70	93,00	95,30	95,3						Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Peningkatan pencapaian tingkat konsumsi protein	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100						Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Prosentase tingkat minimal cadangan pangan pemerintah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100						Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Tingkat pengawasan pangan segar asal tumbuhan	%	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80						Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Kegiatan Teknis Lainnya									1152182845,19	1211415964,52	1269778371,61	1324407151,23	1587416397,37	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Penyuluhan Ketahanan Pangan														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Analisa penganeekaragaman konsumsi pangan (PPH, NMB)														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Pembinaan penganeekaragaman pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Pengawasan Keamanan Pangan														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
1.1.3.2.2.1	Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan									526818811,73	553902292,16	580587652,11	605565865,33	725823009,49	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pencapaian tingkat ketersediaan energi	%		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00						Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pencapaian tingkat ketersediaan protein	%		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00						Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pencapaian stabilitas harga pangan (beras)	%		CV < 10%	CV < 10%	CV < 10%	CV < 10%	CV < 10%						Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Kegiatan Teknis Lainnya									526818811,73	553902292,16	580587652,11	605565865,33	725823009,49	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Kelurahan Mandiri Pangan														Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Pendataan sistim kewaspadaan pangan dan Gizi														Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Dewan Ketahanan Pangan (DKP)														Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Analisis Harga Pangan														Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Analisis Pasokan Pangan														Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.3.1.1.1	Program Pengembangan Pertanian									21951095146,66	8345594954,21	23943520699,65	7702751668,60	9232413379,97	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Proporsi peningkatan luasan penangkaran kacang tanah per tahun	%		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00						Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Proporsi peningkatan provitas jagung per tahun	%		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Proporsi peningkatan provitas kacang tanah per tahun	%		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50						Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Proporsi peningkatan produksi melon per tahun	%		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Proporsi peningkatan produksi cabe per tahun	%		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Cakupan pembinaan pengolah hasil pertanian	%		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00						Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Pengembangan kawasan pertanian terpadu									15250000000,00	1300000000,00	16558490000,00	0,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Perencanaan dan pengadaan lahan														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Pematangan Lahan														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Konstruksi bangunan inti dan pendukung kawasan, Penyediaan fasilitas peternakan perikanan dan pertanian														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Operasional kawasan pertanian terpadu														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Kegiatan Teknis Lainnya									6701095146,66	7045594954,21	7385030699,65	7702751668,60	9232413379,97	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Petani serta Alat dan Mesin Pertanian														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Prodruk Tanaman Pangan dan Hortikultura														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Pembenihan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Petani serta Alat dan Mesin Pertanian(DAK)														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Pengembangan Pertanian UPT Kawasan Pertanian Terpadu									0,00	120577369,72	126386427,67	131823861,84	158002287,78	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
1.1.3.1.2.1	Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan									1624980150,77	1909481815,93	1996634071,55	2078210922,18	2470961156,27	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia	%		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50						Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan	%		12,00	13,00	14,00	15,00	16,00						Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Cakupan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner	%		5,00	5,00	6,00	7,00	8,00						Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Kegiatan Teknis Lainnya									1624980150,77	1708519533,06	1790830907,06	1867876562,54	2238811441,69	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Pengembangan dan Pengelolaan Bina Usaha Peternakan														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Pengendalian Penyakit Hewan Zoonosis														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Peningkatan kualitas pelayanan RPH														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Peningkatan Keamanan Pangan Asal Hewan														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan UPT Puskeswan dan RPH									0,00	200962282,87	205803164,49	210334359,63	232149714,59	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
1.1.3.1.3.1	Program Pengembangan Perikanan									2469614126,23	2746369649,12	2872872487,49	2991282539,83	3561365540,33	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton		363,90	371,20	378,60	386,10	393,90						Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar	Ton		275,15	280,65	286,27	291,99	297,83						Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Pengembangan Perikanan UPT Perikanan (Kegiatan Teknis Lainnya)									2469614126,23	2746369649,12	2872872487,49	2991282539,83	3561365540,33	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya														Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									737467608,40	740125789,51	753537021,41	876089744,92	1101484029,50	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		100	100	100	100	100						Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		100	100	100	100	100						Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
		Tingkat disiplin aparatur	%		82,00	84,00	86,00	88,00	90,00						Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		100	100	100	100	100						Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									737467608,40	740125789,51	753537021,41	876089744,92	1101484029,50	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
1.1.2.1.1.1	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil									5812050740,66	9475153864,53	5507821631,01	5726494131,27	6354238827,43	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
		Persentase Koperasi aktif dengan pengelolaan keuangan yang sehat	%	65,56	67,50	70,50	72,50	74,50	76,00						Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
	Pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)									1200000000,00	4626000000,00	425050000,00	425050000,00	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
	Kegiatan Teknis Lainnya									2201784434,48	2314977024,25	2426505710,90	2530899555,28	3033501782,59	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
	Peningkatan kapasitas koperasi, Usaha Mikro dan Kecil														Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
	Operasional Pusat Inkubator Wirausaha dan Klinik UMKM (PIWKU)														Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
	Penyelenggaraan Pameran koperasi, Usaha Mikro dan Kecil														Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
	Operasional Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat														Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
	Operasional BLUD UPT-Dana Bergulir														Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
	Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil UPT Pengelola Dana Bergulir									2410266306,18	2534176840,28	2656265920,11	2770544575,98	3320737044,84	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
1.1.2.1.2.1	Program Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan									1354676944,45	1424320179,84	1492939676,87	1557169367,98	1866402024,42	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
		Persentase UMKM yang dibina/dilatih	%		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5						Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
		Proporsi usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	%		> 2	> 3	> 4	> 5	> 6						Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
	Kegiatan Teknis Lainnya									1354676944,45	1424320179,84	1492939676,87	1557169367,98	1866402024,42	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
	Fasilitas Pembuatan Badan Hukum Koperasi														Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
	Sosialisasi Perkoperasian Untuk Usaha Produktif / Kelompok Usaha														Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
	Penyusunan rancangan regulasi koperasi, usaha mikro dan kecil														Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
	Bimbingan dan Penyuluhan														Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									2721876059,16	2731686984,31	2781185715,67	3233508394,40	4065402975,35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		60,00	62,00	65,00	67,00	70,00						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		60,00	65,00	67,00	70,00	75,00						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tingkat disiplin aparatur	%		90,00	92,00	95,00	95,00	95,00						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		70,00	75,00	80,00	82,00	85,00						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									2721876059,16	2731686984,31	2781185715,67	3233508394,40	4065402975,35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
1.2.2.1.1.1	Program Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal									486635079,70	511652735,42	536302637,77	559375608,04	670459995,37	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Pertumbuhan Ijin Prinsip	%		5,75	5,80	6,00	6,25	6,50						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Kegiatan Teknis Lainnya									486635079,70	511652735,42	536302637,77	559375608,04	670459995,37	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Promosi Investasi														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Fasilitasi dan Koordinasi Percepatan Penanaman Modal														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
1.2.2.1.2.1	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal									240831456,79	301443424,31	265411498,11	276830109,86	331804804,34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Laju pertumbuhan investasi	%		1,75	2,00	2,50	2,75	3,00						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Kegiatan Teknis Lainnya									240831456,79	301443424,31	265411498,11	276830109,86	331804804,34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Pembinaan Perluasan Penanaman Modal														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Penertiban Penanaman Modal														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Forum investasi														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Sosialisasi kebijakan penanaman modal														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									1510698075,56	1516143343,98	1543616173,96	1794664710,13	2256383581,68	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		100	100	100	100	100						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017,00	2018,00	2019,00	2020,00		
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		100	100	100	100	100						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Tingkat disiplin aparatur	%		100	100	100	100	100						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		100	100	100	100	100						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									1000123998,56	1003728917,18	1021916692,11	1188117781,45	1493788472,04	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	Dukungan Layanan Pemerintahan UPT Sanggar Seni Budaya									510574077,00	512414426,80	521699481,86	606546928,68	762595109,64	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
1.2.1.3.1.1	Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif									3250574421,76	3417684757,94	3582338613,44	3736459041,86	4478468985,63	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Capaian pengembangan destinasi wisata	%		17,00	33,00	50,00	67,00	83,00						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Capaian pembinaan usaha pariwisata	%		29,00	43,00	57,00	71,00	86,00						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		capaian pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif	%		20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		peningkatan jumlah kunjungan wisnu dan wisman	%		5,00	10,00	15,00	20,00	25,00						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	Kegiatan Teknis Lainnya									3250574421,76	3417684757,94	3582338613,44	3736459041,86	4478468985,63	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	Pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata														Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	Pengembangan wisata kreatif														Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	Peningkatan kelembagaan kepariwisataan														Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	Pengembangan ekonomi kreatif pariwisata daerah														Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	Peningkatan kualitas kesenian non tradisional														Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									2755255522,49	2765186762,98	2815292517,23	3273162211,31	4115258650,86	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		100	100	100	100	100						Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		100	100	100	100	100						Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Tingkat disiplin aparatur	%		100	100	100	100	100						Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		100	100	100	100	100						Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									2597945033,49	2607309252,77	2654554233,99	3086281994,99	3880299190,49	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Dukungan Layanan Pemerintahan UPT Pasar Baru Merak									52436829,67	52625836,73	53579427,75	62293405,44	78319820,12	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Dukungan Layanan Pemerintahan UPT Pasar Baru Cilegon									52436829,67	52625836,73	53579427,75	62293405,44	78319820,12	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Dukungan Layanan Pemerintahan UPT Pasar Blok F									52436829,67	52625836,73	53579427,75	62293405,44	78319820,12	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.2.1.2.2.1	Program Pengendalian dan Pengembangan Perdagangan									536853455,77	613186165,61	643133044,03	670802103,54	803633360,77	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase Penurunan Barang Tidak Layak Edar	%		20,00	25,00	33,33	50,00	100,00						Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Tingkat pemantauan ketersediaan harga dan pasokan pangan	%		41,67	50,00	58,33	75,00	91,67						Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Kegiatan Teknis Lainnya									506749523,67	532801252,46	558470027,27	582496689,50	698172609,13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Kegiatan promosi, pengawasan perdagangan dalam dan luar negeri														Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Kegiatan Pemantauan ketersediaan stok, stabilitas dan standarisasi harga pasar														Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Peningkatan Pengendalian dan Pengembangan Perdagangan UPT Metrologi									30103932,10	80384913,15	84663016,76	88305414,04	105460751,64	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.2.1.1.1.1	Program Pengembangan Kemitraan Industri									2791196407,13	2738421828,35	2984218059,89	2923885904,00	2605590076,13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pertumbuhan jumlah industri kecil	%		> 3 %	> 3,2 %	> 3,4 %	> 3,6 %	> 3,8 %						Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Proporsi industri kecil dan menengah yang sesuai dengan tata kelola dan regulasi	%		80	82	84	86	88						Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Tingkat pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%		70	72	74	76	78						Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Tingkat Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Industri Kecil dan Menengah	%		70	72	74	76	78						Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Pemberdayaan IKM dan Ekonomi Kreatif									900000000,00	750000000,00	900000000,00	750000000,00	0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Kegiatan Teknis Lainnya									1891196407,13	1988421828,35	2084218059,89	2173885904,00	2605590076,13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Perumusan kebijakan sentra perindustrian														Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Peningkatan kapasitas SDM/keompok Agrobisnis														Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Penataan Kawasan Sentra Industri														Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Pengembangan sentra industri														Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.2.1.2.1.1	Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar									15331143253,09	348167155,07	364940809,90	380641401,06	456231605,97	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Tingkat Kepuasan Pengunjung Pasar	Poin		> 5 %	> 5 %	> 5 %	> 5 %	> 5 %						Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Realisasi pendapatan daerah dari pengelolaan pasar	%		> 5 %	> 5 %	> 5 %	> 5 %	> 5 %						Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Rasio jumlah pasar rakyat terhadap jumlah kebutuhan pasar rakyat di Cilegon	Poin		50,0%	50,0%	62,5%	87,5%	87,5%						Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Rasio jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi terhadap total jumlah pasar rakyat	%		25,0%	50,0%	75,0%	100,0%	100,0%						Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Penataan dan revitalisasi pasar tradisional milik pemkot menjadi pasar modern, bersih dan sehat (Pasar Blok F, Pasar Baru Merak)									15000000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Kegiatan Teknis Lainnya									331143253,09	348167155,07	364940809,90	380641401,06	456231605,97	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Manajerial pedagang pasar dan kawasan pasar tradisional														Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat/tradisional														Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Kegiatan Identifikasi pedagang dan kawasan perdagangan														Dinas Perdagangan dan Perindustrian

MATRIKS RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA CILEGON TAHUN 2016-2021

VISI : TERWUJUDNYA KOTA CILEGON YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA BERBASIS INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00		
MISI 2 : MEMANTAPKAN LINGKUNGAN KOTA YANG ASRI DAN LESTARI																
2.1.1.1.3.1	Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi									3610847219,44	3653191902,93	3858526768,44	3837302621,57	4238720687,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral urusan pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan	%	70	75	80	85	90	95						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Rasio pelayanan alat berat	%	16/26	18/26	19/26	20/26	21/26	22/26						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Prosentase ketersediaan data layanan informasi jasa konstruksi	%		71,43	85,71	100,00	100,00	100,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Prosentase ketersediaan alat laboratorium	%	87,14	87,38	87,61	87,78	87,95	89,29						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Kegiatan Teknis Lainnya									277360860,14	280613492,31	296385927,82	294755632,42	325589853,12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pengadaan Alat Berat dan Peralatan Perbengkelan														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pemeliharaan Alat Berat dan Peralatan Perbengkelan														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pengadaan Alat Laboratorium														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pemeliharaan Alat Laboratorium														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pelaksanaan Uji Mutu Konstruksi Bidang ke-PU-an														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penyusunan Laporan Kinerja														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penyediaan Biaya Penunjang Penerbitan Rekomendasi SIUJK														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penyusunan dan pemutakhiran data urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi UPT Laboratorium dan Alat Berat									3333486359,30	3372578410,61	3562140840,61	3542546989,15	3913130834,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
2.1.1.1.2.1	Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan dan Pengendalian Reklame									16549503806,54	57739670570,43	36775305691,82	60808661121,97	969250221,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Persentase unit gedung negara/pemerintahan yang laik fungsi	%	48,08	50,00	52,88	57,69	62,50	67,31						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Persentase bangunan berizin terhadap seluruh jumlah bangunan yang ada	%	6	7	8	9	10	10						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Persentase reklame berizin terhadap seluruh jumlah reklame yang ada	%	6	7	8	9	10	10						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintahan									15846000000,00	57000000000,00	36000000000,00	60000000000,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penyusunan DED Gedung Kantor 8 Lantai														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Gedung Kelurahan Lebak Gede														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Gedung Kelurahan Ramanuju														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00		
	Pembangunan Sarana Pendukung Masjid Pemda														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Gedung DINSOS														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Gedung DISPERLA														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Gedung BPBD														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Gedung Kelurahan Tegal Ratu														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Gedung Satpol PP														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pemb. Sarana Pendukung kantor kecamatan/Rehab kantor Kecamatan														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Gedung Kantor 8 Lantai														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Gedung BPTPM														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Kegiatan Teknis Lainnya									703503806,54	739670570,43	775305691,82	808661121,97	969250221,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Negara														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Perencanaan Teknis Gedung Negara														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Perencanaan teknis regulasi media luar ruang														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pengendalian dan Pengawasan Bangunan														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pemeliharaan papan dan panggung reklame														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penyusunan regulasi bangunan bangunan														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penertiban Media Luar Ruang														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penyusunan, pemutakhiran dan pengelolaan data reklame														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penyusunan, pemutakhiran dan pengelolaan data bangunan														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
2.1.1.1.1.1	Program Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang									792000000,00	819085576,65	844093571,12	2567501725,22	680199848,90	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Rasio bangunan ber-IMB	%	85,0	86,0	87,0	88,0	89,0	89,0						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Persentase jumlah KRK yang sesuai tata ruang terhadap jumlah KRK yang diajukan	%	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penyusunan dan Review RDTR									300000000,00	300000000,00	300000000,00			Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penyusunan rencana Rinci Kawasan Cepat Tumbuh												2000000000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Kegiatan Teknis Lainnya									492000000,00	519085576,65	544093571,12	567501725,22	680199848,90	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Pemetaan														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pencetakan dan Penggandaan Peta														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penyusunan dokumen perencanaan penataan, pengendalian dan pemanfaatan ruang														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Evaluasi Rencana Pemanfaatan Lahan Pada Perumahan Terencana														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Monitoring Evaluasi Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Masa Bangunan														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.1.1.1.1.2	Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah									858340000,00	905593320,86	949222105,36	990059818,75	1186672232,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase aset lahan pemda yang bersertifikat	%	85	86	87	88	89	89						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Kegiatan Teknis Lainnya									858340000,00	905593320,86	949222105,36	990059818,75	1186672232,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pembinaan Administrasi Pertanahan														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Validasi Data Tanah Pemerintah Kota Cilegon														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Fasilitasi pengadaaan lahan pemerintah														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Fasilitasi izin lokasi														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									2146455111,46	2154191948,11	2193226350,35	2549925297,94	3205952367,76	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		90,00	91,00	92,00	93,00	94,00						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		90,00	91,00	92,00	93,00	94,00						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Tingkat disiplin aparatur	%		89,00	90,00	91,00	92,00	92,00						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		97,00	98,00	99,00	100,00	100,00						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									2146455111,46	2154191948,11	2193226350,35	2549925297,94	3205952367,76	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.1.2.2.1.1	Program Peningkatan Sarana dan Arsitektur Kota									21338160720,71	20146357661,76	13282523141,90	3089977686,30	3703605226,05	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Rasio Realisasi Taman Kota, Taman Perumahan, dan Lingkungan Terhadap kebutuhan luas RTH Publik Yang Seharusnya Tersedia	%		10,12	10,29	10,34	10,49	10,57						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Rasio Taman Kota Terpelihara Terhadap Taman Kota Yang Ada	%		68,29	71,15	77,33	76,98	82,41						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Rasio Panjang Trotoar dan Median Jalan yang terpelihara terhadap Panjang Trotoar dan Median Jalan Yang Ada	%		49,31	54,34	58,47	61,91	64,82						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase ketersediaan prasarana Kota terhadap kebutuhan	%	56,00	60,00	64,00	68,00	72,00	72,00						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Cakupan pemanfaatan tempat pemakaman umum oleh penduduk	%		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Peningkatan Kualitas Tata Bangunan Perkotaan dan Penataan ruang Kota									4150000000,00	5700000000,00	5700000000,00	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan Gerbang Kota (Gateway) 3 titik : Cilegon Timur, Merak, dan Anyer		titik		1,00	1,00									Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penataan Koridor dan Wajah Jalan (Pembangunan Landmark : 6 titik di JIS)		titik		1,00										Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Revitalisasi bangunan cagar budaya (2 titik : Lingk. Pekuncen dan Statsiun KA Cilegon)														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan Taman Kota									10500000000,00	10500000000,00	3500000000,00	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan Taman Kecamatan Purwakarta														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan Taman Kecamatan Cibeber														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan Taman Kecamatan Ciwandan														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penghijauan Koridor Kota									4000000000,00	1120000000,00	1120000000,00			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penghijauan Median JLS (8 km)		titik		3,00	-	-	-	-						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penghijauan Koridor JLU (8 km)														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan Teknis Lainnya									2688160720,71	2826357661,76	2962523141,90	3089977686,30	3703605226,05	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan Gerbang Kota (Gateway)														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pengadaan Lahan Taman														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penataan Taman Kota														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan Alun-Alun Kota Cilegon														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penanaman Jalur Hijau Median Jalan														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan Taman Pulau dan Taman Median Jalan														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pengadaan Peralatan Pemeliharaan Taman														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penataan Koridor Dan Wajah Jalan														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pemasangan Papan Nama Jalan														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pemeliharaan Landmark Kota														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pemeliharaan Taman dan Peralatan taman														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pemeliharaan dan Perijinan Rutin/taman Berkala Kendaraan Operasional														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pemeliharaan Median Jalan dan Trotoar														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Perencanaan teknis sarana dan arsitektur kota														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan dan Pemeliharaan Pemakaman														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.1.3.1.1.1	Program Penataan Perumahan dan Permukiman									14430128302,47	14768788988,80	16149410931,59	11785094093,32	5296890013,56	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Prosentase luas penanganan kawasan kumuh	%		17,14	23,45	19,14	10,27	16,02						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik/ Tidak rusak	%		42,81	56,38	72,37	90,31	87,00						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik/ Tidak rusak	%		70,42	83,57	91,78	93,80	95,00						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Penduduk yang mendapat pelayanan air bersih dengan non perpipaan	%		13,59	14,78	15,94	17,31	20,00						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Peningkatan Kualitas Prasarana Dasar Perumahan dan Permukiman									377530000,00	6027500000,00	5520000000,00	5520000000,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penataan kawasan Kumuh		ha		0,56	0,56	0,56	0,56	0,56						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan Sanitasi lingkungan		paket						1,00						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Peningkatan cakupan pelayanan air bersih perkotaan									13300000000,00	7950000000,00	9800000000,00	5400000000,00	4260000000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pengembangan SPAM Mata Air Pengobelan		paket		1,00	-									Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum PDAM		paket						1,00						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan Teknis Lainnya									752598302,47	791288988,80	829410931,59	865094093,32	1036890013,56	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Perencanaan Teknis Perumahan dan Permukiman														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pengembangan SPAM														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penyediaan Air Bersih														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penataan Kawasan Kumuh														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan dan Peningkatan Drainase Lingkungan														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Monitoring dan Pengawasan Pembangunan Perumahan dan Permukiman														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Utilitas Permukiman														Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									9656714219,47	9691521572,33	9867133941,36	11471891376,50	14423299910,33	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		100	100	100	100	100						Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		100	100	100	100	100						Dinas Lingkungan Hidup
		Tingkat disiplin aparatur	%		100	100	100	100	100						Dinas Lingkungan Hidup
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		100	100	100	100	100						Dinas Lingkungan Hidup
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									9013943561,41	9046434065,64	9210357316,05	10708298812,65	13463255555,28	Dinas Lingkungan Hidup
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Dinas Lingkungan Hidup
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Lingkungan Hidup
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Dinas Lingkungan Hidup
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan UPT Kebersihan Wilayah I									108255834,85	108646039,94	110614728,58	128604735,53	161691268,64	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan UPT Kebersihan Wilayah II									108255834,85	108646039,94	110614728,58	128604735,53	161691268,64	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan UPT Kebersihan Wilayah III									108255834,85	108646039,94	110614728,58	128604735,53	161691268,64	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan UPT Kebersihan Wilayah IV									108255834,85	108646039,94	110614728,58	128604735,53	161691268,64	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan UPT TPSA									104873659,33	105251673,47	107158855,49	124586810,87	156639640,24	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan UPT Instalasi Pengelolaan Tinja									104873659,33	105251673,47	107158855,49	124586810,87	156639640,24	Dinas Lingkungan Hidup
2.2.1.1.1.1	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup									3031489693,42	3453672353,58	4775528934,11	12145987280,17	594483607,78	Dinas Lingkungan Hidup
		Rata-rata tingkat pencemaran udara Kota Cilegon atau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)	.		51-100	100	100	100	100						Dinas Lingkungan Hidup
		Tingkat pencemaran air Kota Cilegon	%		10	10	10	10	10						Dinas Lingkungan Hidup
		Proporsi titik pemantauan kualitas air sungai	%		100	100	100	100	100						Dinas Lingkungan Hidup

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
					2016	2017	2018	2019	2020		2021	2017,00	2018,00	2019,00		
		Proporsi titik pemantauan kualitas udara	%		100	100	100	100	100						Dinas Lingkungan Hidup	
		Proporsi pabrik yang memenuhi baku mutu limbah	%		95	95	95	95	95						Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara	%		95	95	95	95	95						Dinas Lingkungan Hidup	
		Persentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomassa	%		100	64,2	82,6	100,9	100,9						Dinas Lingkungan Hidup	
		Persentase wilayah industri manufaktur yang mendapatkan supervisi	%		100	100	100	100	100						Dinas Lingkungan Hidup	
	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan									2600000000,00	3000000000,00	4300000000,00	11650000000,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup	
	Pemantauan Kualitas Lingkungan														Dinas Lingkungan Hidup	
	Pengadaan dan Pembangunan alat Instalasi Stasiun Pemantau Udara (ISPU) dan dari CSR industri														Dinas Lingkungan Hidup	
	Pengawasan dan pengendalian Lingkungan														Dinas Lingkungan Hidup	
	Kegiatan Teknis Lainnya									431489693,42	453672353,58	475528934,11	495987280,17	594483607,78	Dinas Lingkungan Hidup	
	Pengadaan sarpras pengawasan kualitas lingkungan hidup														Dinas Lingkungan Hidup	
	Pemeliharaan sarpras pengawasan kualitas lingkungan hidup														Dinas Lingkungan Hidup	
	Operasional Pemantauan kualitas lingkungan														Dinas Lingkungan Hidup	
	Operasional Pengawasan lingkungan hidup														Dinas Lingkungan Hidup	
	Penanganan pencemaran lingkungan														Dinas Lingkungan Hidup	
	Penanganan kerusakan lingkungan														Dinas Lingkungan Hidup	
2.2.2.1.1.1	Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup									883048674,90	928445746,86	973175493,07	1015043736,17	1216617615,92	Dinas Lingkungan Hidup	
		Cakupan Pembinaan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada masyarakat/komunitas	%		100	79,0	86,4	93,8	100,0						Dinas Lingkungan Hidup	
		Persentase jumlah kasus dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%		100	100	100	100	100						Dinas Lingkungan Hidup	
	Kegiatan Teknis Lainnya									883048674,90	928445746,86	973175493,07	1015043736,17	1216617615,92	Dinas Lingkungan Hidup	
	Pengawasan terhadap izin lingkungan														Dinas Lingkungan Hidup	
	Penanganan kasus lingkungan														Dinas Lingkungan Hidup	
	Pembinaan tata lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup														Dinas Lingkungan Hidup	
2.2.1.1.2.1	Program Penataan Lingkungan									1554814308,03	4061612235,56	5167575247,58	2319958129,00	1522154539,91	Dinas Lingkungan Hidup	
		Proporsi jumlah perusahaan yang memiliki dokumen terkait lingkungan hidup	%		88	93,1	93,3	93,6	94,6						Dinas Lingkungan Hidup	
		Cakupan supervisi kesesuaian operasional perusahaan terhadap dokumen lingkungan hidup	%		100	5,3	6,2	7,1	7,9						Dinas Lingkungan Hidup	
		Tingkat Prosentase Lahan RTH di Kota Cilegon	%		17	63,4	99,4	100,0	100,0						Dinas Lingkungan Hidup	
		Tingkat Pemenuhan bangunan Konservasi air	%		100	78,4	78,6	100,0	100,0						Dinas Lingkungan Hidup	
	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									450000000,00	2900000000,00	3950000000,00	1050000000,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup	
	Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (dan EvaluasiPelaksanaan Daya Dukung & Daya tampung Lingkungan Hidup)														Dinas Lingkungan Hidup	
	Kajian dan Pengadaan lahan Hutan Kota														Dinas Lingkungan Hidup	
	Pembuatan dan Pemeliharaan Hutan Kota														Dinas Lingkungan Hidup	
	Kegiatan Teknis Lainnya									1104814308,03	1161612235,56	1217575247,58	1269958129,00	1522154539,91	Dinas Lingkungan Hidup	

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00		
	Penyusunan Sistem Informasi Lingkungan Hidup														Dinas Lingkungan Hidup	
	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup														Dinas Lingkungan Hidup	
	Peningkatan Ketersediaan data lingkungan hidup														Dinas Lingkungan Hidup	
	Penyusunan pedoman usaha atau kegiatan yang wajib UKL/UPL dan SPPL														Dinas Lingkungan Hidup	
	Pemeliharaan Hutan Kota														Dinas Lingkungan Hidup	
	Monitoring dan Evaluasi RTH														Dinas Lingkungan Hidup	
	Pembuatan Sumur Resapan														Dinas Lingkungan Hidup	
	Penyediaan Bibit Tanaman														Dinas Lingkungan Hidup	
2.1.2.1.1.1	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3									20113890843,45	19705233892,74	16234795313,12	20335277004,04	12363750712,42	Dinas Lingkungan Hidup	
		Persentase penanganan persampahan	%	58	62	66	70	72	75						Dinas Lingkungan Hidup	
		TPS per satuan penduduk (Rasio daya tampung TPS per 1.000 penduduk)	m3 per penduduk	2,10	2,20	2,22	2,25	2,27	2,36						Dinas Lingkungan Hidup	
		Persentase pengurangan sampah di perkotaan	%	0,12	0,23	0,34	0,45	0,55	0,55						Dinas Lingkungan Hidup	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan									11140000000,00	10270000000,00	6345000000,00	10020000000,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup	
	Pengadaan Sarana Prasarana Peningkatan Pelayanan Persampahan														Dinas Lingkungan Hidup	
	Tempat Transper Depo														Dinas Lingkungan Hidup	
	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)														Dinas Lingkungan Hidup	
	Pengadaan Kendaraan Sedot Lumpur Tinja														Dinas Lingkungan Hidup	
	Revitalisasi TPSA Bagendung / Perluasan lahan														Dinas Lingkungan Hidup	
	Pembinaan, koordinasi dan sosialisasi Program Adipura (Adiwiyata, Kampung Iklim, Bank Sampah, Adipura)														Dinas Lingkungan Hidup	
	Kegiatan Teknis Lainnya									8973890843,45	9435233892,74	9889795313,12	10315277004,04	12363750712,42	Dinas Lingkungan Hidup	
	Pembinaan dan Sosialisasi Kebersihan														Dinas Lingkungan Hidup	
	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah														Dinas Lingkungan Hidup	
	Operasional TPS														Dinas Lingkungan Hidup	
	Peningkatan upaya pengurangan volume sampah														Dinas Lingkungan Hidup	
	Pengadaan sarpras TPSA														Dinas Lingkungan Hidup	
	Pemeliharaan TPS														Dinas Lingkungan Hidup	
	Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan pengelolaan persampahan														Dinas Lingkungan Hidup	
	Penyediaan sarpras kebersihan														Dinas Lingkungan Hidup	
	Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3														Dinas Lingkungan Hidup	
	Perumusan kebijakan pengelolaan limbah B3														Dinas Lingkungan Hidup	

MATRIKS RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA CILEGON TAHUN 2016-2021

VISI : TERWUJUDNYA KOTA CILEGON YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA BERBASIS INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00		
MISI 3 : MEMANTAPKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL																
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									15264592288,25	16426412406,02	18186545863,53	20039422449,43	21850273322,30	Dinas Pendidikan	
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		100	100	100	100	100						Dinas Pendidikan	
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		100	100	100	100	100						Dinas Pendidikan	
		Tingkat disiplin aparatur	%		100										Dinas Pendidikan	
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		100	100	100	100	100						Dinas Pendidikan	
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									8408686184,27	9048688916,63	10018279823,95	11038959410,72	12036488622,70	Dinas Pendidikan	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Dinas Pendidikan	
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Pendidikan	
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Pendidikan	
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Dinas Pendidikan	
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Dinas Pendidikan	
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Dinas Pendidikan	
	Peningkatan koordinasi sektoral/ lintas sektoral tingkat kota														Dinas Pendidikan	
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Dinas Pendidikan	
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cilegon									59980573,68	64545820,88	71462076,00	78742755,27	85858299,01	Dinas Pendidikan	
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ciwandan									59991472,13	64557548,84	71475060,64	78757062,80	85873899,44	Dinas Pendidikan	
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cibeber									59991472,13	64557548,84	71475060,64	78757062,80	85873899,44	Dinas Pendidikan	
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Grogol									59991472,13	64557548,84	71475060,64	78757062,80	85873899,44	Dinas Pendidikan	
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pulomerak									59991472,13	64557548,84	71475060,64	78757062,80	85873899,44	Dinas Pendidikan	
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purwakarta									59991472,13	64557548,84	71475060,64	78757062,80	85873899,44	Dinas Pendidikan	
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jombang									59991472,13	64557548,84	71475060,64	78757062,80	85873899,44	Dinas Pendidikan	
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Citangkil									74989340,17	80696936,05	89343825,79	98446328,50	107342374,30	Dinas Pendidikan	
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar									535778518,38	576557744,55	638337429,08	703372344,73	766932181,73	Dinas Pendidikan	
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan SMPN 1									677619075,56	729194083,88	807329155,15	889581238,63	969967735,13	Dinas Pendidikan	
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan SMPN 2									581921829,05	626213119,33	693313508,36	763949481,56	832983336,66	Dinas Pendidikan	
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan SMPN 3														Dinas Pendidikan	
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan SMPN 4									550731812,75	592649165,50	656153088,27	723003093,94	788336852,28	Dinas Pendidikan	

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan SMPN 5									802809379,60	863912884,38	956483430,81	1053931608,54	1149169531,60	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan SMPN 6									582022864,69	626321845,00	693433884,27	764082121,58	833127962,62	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan SMPN 7									627962834,26	675758401,96	748167698,83	824392311,35	898888047,96	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan SMPN 8									491435041,87	528839193,08	585505708,84	645158037,92	703457372,60	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan SMPN 9									553841870,65	595995936,43	659858474,54	727085991,33	792788698,36	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan SMPN 10									354275239,31	381239870,43	422090729,08	465094058,84	507122015,71	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan SMPN 11									542597419,07	583895646,06	646461606,11	712324226,90	776692995,58	Dinas Pendidikan
3.1.1.1.3.1	Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal									8655805565,92	9314617072,45	10312702883,76	11363378798,47	12390223981,66	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) POS PAUD/ KOBER/ TPA/ SPS (0-6 tahun)	%	8,77	8,82	8,85	8,87	8,87	8,87						Dinas Pendidikan
		APK PAUD usia 3-6 tahun (RENSTRA KEMDIKBUD)	%	42,78	43,20	43,46	43,60	43,64	43,64						Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (TK/RA/TPA)	%	36,67	37,08	37,39	37,55	37,61	37,61						Dinas Pendidikan
		Angka Melanjutkan (AM) POS PAUD/ KOBER/ TPA/ SPS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah (APTs) PAUD/ KOBER/ TPA/ MDA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) TK dan sederajat (TK/RA)	%	36,09	36,50	36,80	36,96	37,02	37,02						Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) TK/RA	%	36,09	36,50	36,80	36,96	37,02	37,02						Dinas Pendidikan
		Proporsi jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas yang melek huruf	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Dinas Pendidikan
		Tingkat kelulusan UN kejar paket A	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Dinas Pendidikan
		Tingkat kelulusan pendidikan kesetaraan Paket B dan C	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Dinas Pendidikan
		APM Pendidikan Prasekolah	%	57,73	58,38	58,87	59,12	59,21	59,21						Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Prasekolah	%	23,41	23,53	23,61	23,65	23,67	23,67						Dinas Pendidikan
		Proporsi Penduduk usia PAUD Yang Tidak Sekolah	%	76,59	76,47	76,39	76,35	76,33	76,33						Dinas Pendidikan
		Cakupan lembaga kursus yang diaudit	%	43,48	28,99	28,99	28,99	28,99	28,99						Dinas Pendidikan
		Penilaian Kinerja													
	Kegiatan Teknis Lainnya									8655805565,92	9314617072,45	10312702883,76	11363378798,47	12390223981,66	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Posyandu PAUD Holistik Integratif														Dinas Pendidikan
	Pengadaan Fasilitas Sarana Pendidikan Non Formal dan PAUD														Dinas Pendidikan
	Operasional Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)														Dinas Pendidikan
	Peningkatan dan Pemeliharaan Gedung PAUD														Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kapasitas SDM Pendidikan Non Formal dan PAUD														Dinas Pendidikan
	Apresiasi dan Seleksi Pendidikan Non Formal dan PAUD														Dinas Pendidikan
	Bantuan BOP TK Negeri														Dinas Pendidikan
	Peringatan dukungan kegiatan Pendidikan Non Formal dan PAUD														Dinas Pendidikan
	Supervisi Pelaporan Evaluasi Monitoring dan Pembinaan Penilik														Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan kelembagaan dan kesiswaan pendidikan non formal dan PAUD														Dinas Pendidikan
	Pendampingan Operasional DAK														Dinas Pendidikan
3.1.1.1.1.1	Program Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar									30043314303,60	32329973934,14	35794215997,20	39440992313,57	43005054877,65	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ Paket A	%	110,68	112,27	113,82	115,35	116,82	118,13						Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket A	%	96,39	97,78	99,13	100,47	101,74	102,88						Dinas Pendidikan

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				TRANSISI	TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
		Angka Mengulang Kelas (AMK) SD/ MI	%	3,11	3,2	3,09	2,91	2,86	2,74						Dinas Pendidikan
		Angka Melanjutkan (AM) SD/ MI/ SDLB ke SMP/ MTs/ SMP LB	%	100	100	100	100	100	100						Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah (APTS) SD/ MI	%	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25						Dinas Pendidikan
		Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	%	100	100	100	100	100	100						Dinas Pendidikan
		Cakupan sekolah dasar (sederajat) yang telah memenuhi kriteria SPM	%		95	95	95	95	95						Dinas Pendidikan
	Pelatihan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar (SD) (Prioritas Daerah)	Jumlah Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar (SD)	Kegiatan	3 Kegiatan	2 kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	750000000,00	600000000,00	600000000,00	600000000,00	600000000,00	Dinas Pendidikan
	Revitalisasi Ruang Kelas Sekolah Dasar (Prioritas Daerah)			4 Ruang Kelas		4 Sekolah	4 Sekolah	6 Sekolah		0,00	4800000000,00	4800000000,00	7200000000,00		Dinas Pendidikan
	Revitalisasi SD Negeri Sumampir (Prioritas Daerah)	Tersedianya : Ruang Kelas, Pemagaran, R. Lab			2 R.Kelas; 1 Pagar+Gapura					1100000000,00					Dinas Pendidikan
	Revitalisasi SD Negeri Kedaleman IV (Prioritas Daerah)	Tersedianya : Ruang Kelas, Gapura			2 R.Kelas; 1 Gapura	5 R.Kelas				1100000000,00	1330000000,00				Dinas Pendidikan
	Revitalisasi SD Negeri Blok I (Prioritas Daerah)	Tersedianya : Ruang Kelas			2 R.Kelas baru					975000000,00					Dinas Pendidikan
	Revitalisasi SD Negeri Kubangsepat I (Prioritas Daerah)	Tersedianya : Ruang Kelas, Gapura			2 R.Kelas; 1 Gapura					800000000,00					Dinas Pendidikan
	Revitalisasi SD Negeri CIWANDAN (Prioritas Daerah)	Tersedianya : Ruang Kelas, Gapura			2 R.Kelas; 1 Gapura					1100000000,00					Dinas Pendidikan
	Revitalisasi SD Negeri Wilulang (Prioritas Daerah)	Tersedianya : Ruang Kelas, Gapura			2 R.Kelas; 1 Gapura					1100000000,00					Dinas Pendidikan
	Revitalisasi SD Negeri Bujanggadung (Prioritas Daerah)	Tersedianya : Ruang Kelas, Gapura			2 R.Kelas; 1 Gapura					1100000000,00					Dinas Pendidikan
	Revitalisasi SD Negeri Cilegon II (Prioritas Daerah)	Tersedianya : Ruang Kelas, Gapura			1 paket	Lanjutan Revitalisasi 1 Sekolah				1200000000,00	3500000000,00				Dinas Pendidikan
	Pengadaan Alat TIK SD Mantap (Prioritas Daerah)	Tersedianya Alat Lab Komputer			64 pc, 4 Ieptop, 4 proyektor, dan layar	8 Sekolah @ 17 Unit (Tahap II) + 12 Sekolah @ 34 Unit				440000000,00	4352000000,00				Dinas Pendidikan
	Pengadaan Mebeulair SD Mantap (Prioritas Daerah)	Tersedianya Barang Mebeul	Unit		22					222250000,00					Dinas Pendidikan
	Pembinaan Manajemen Kelembagaan Sekolah Mantap Menuju ISO (Prioritas Daerah)	Tersedianya Pengelola Sekolah Yang Berkompeten			1 kegiatan	10 Sekolah	10 Sekolah	10 Sekolah	10 Sekolah	150000000,00	150000000,00	150000000,00	150000000,00	150000000,00	Dinas Pendidikan
	Pengadaan Peralatan TIK Pendataan Dapodik Sekolah Mantap (Prioritas Daerah)	Tersedianya Peralatan TIK untuk pendataan DAPODIK sekolah	Sekolah			20	10	10	10	0,00	300000000,00	150000000,00	150000000,00	150000000,00	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Ruang UKS Sekolah (Prioritas Daerah)	Tersedianya ruang UKS	Ruang		-	3	3	3	3	0,00	450000000,00	450000000,00	450000000,00	450000000,00	Dinas Pendidikan
	Bantuan BOS Sekolah Mantap (Prioritas Daerah)	Tersedianya Sarana Penunjang Sekolah Mantap		0	1 Kegiatan	10 Sekolah	10 Sekolah	10 Sekolah	10 Sekolah	250000000,00	250000000,00	250000000,00	250000000,00	250000000,00	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Sekolah Dasar (Prioritas Daerah)	Jumlah Sekolah Yang Menyelenggarakan PSB	Sekolah	149	149	149	149	149	149	700000000,00	700000000,00	700000000,00	700000000,00	700000000,00	Dinas Pendidikan
	Kegiatan Teknis Lainnya									19056064303,60	15897973934,14	28694215997,20	29940992313,57	40705054877,65	Dinas Pendidikan
	Revitalisasi SD Negeri														Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri														Dinas Pendidikan
	Pengembangan Sekolah Dasar Negeri														Dinas Pendidikan
	Pembangunan Sekolah Dasar Negeri														Dinas Pendidikan
	Peningkatan Sarana Pendidikan Sekolah Dasar Negeri														Dinas Pendidikan
	Pemeliharaan Sarana Pendidikan Sekolah Dasar Negeri														Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Lomba tingkat Sekolah Dasar														Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Sekolah Dasar Negeri														Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan dan Pelatihan UN dan US SD/MI														Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Pembinaan Program Gugus dan KKKS														Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Kesiswaan dan Kelembagaan Pendidikan														Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Pembinaan Program UKS SD														Dinas Pendidikan

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				TRANSISI	TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Pembinaan Manajemen Kelembagaan Sekolah														Dinas Pendidikan
	Pelaksanaan Kegiatan FLS2N, OSN														Dinas Pendidikan
	Peningkatan Pengembangan Kurikulum Sekolah														Dinas Pendidikan
	Penyediaan BOS Daerah														Dinas Pendidikan
	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan kinerja hasil KBM jenjang Sekolah Dasar														Dinas Pendidikan
3.1.1.1.2.1	Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama									15646907171,69	16837826076,67	18642043595,19	20541327073,76	22397532269,05	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ SMPLB	%	112,19%	109,17%	106,54%	107,30%	109,13%	111,23%						Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B	%	88,11%	90,98%	93,24%	94,94%	96,33%	97,61%						Dinas Pendidikan
		Angka Melanjutkan (AM) SMP/ MTs/ SMPLB ke SMA/ SMK/ MA/ SMALB	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/ MTs	%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%						Dinas Pendidikan
		Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						Dinas Pendidikan
		Angka Mengulang Kelas (AMK) SMP/ MTs	%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,12%	0,12%						Dinas Pendidikan
		Cakupan sekolah menengah pertama (sederajat) yang telah memenuhi kriteria SPM	%		95										Dinas Pendidikan
		Cakupan siswa/i kurang mampu yang mendapatkan fasilitas di sekolah negeri dan sekolah swasta	%		80										Dinas Pendidikan
	Revitalisasi SMPN 1 Cilegon	Jumlah Kebutuhan saluran drainase			1 paket saluran Drainase					319600000,00					Dinas Pendidikan
	Revitalisasi SMPN 2 Cilegon	Jumlah Kebutuhan R. Kelas/R.Guru+Toilet/R.GSG			8 unit					768400000,00					Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi toilet SMP	Jumlah Sekolah yang mendapatkan rehab toilet			7 lokasi toilet smp negeri		3 Sekolah			960000000,00		300000000,00			Dinas Pendidikan
	Pengadaan Mebeulair SMP Mantap	Tersedianya Barang Mebeulair			280 kursi besi; 280 meja besi					320000000,00					Dinas Pendidikan
	Pengadaan Alat Lab. IPA / Fisika Biologi SMP Mantap	Tersedianya Alat LAB IPA			2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	400000000,00	400000000,00	400000000,00	400000000,00	400000000,00	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Prototype Gerbang SMP	Jumlah Kebutuhan Pembangunan Prototype Gerbang SMP			5 sekolah; smpn 3, smpn 5, smpn 8, smpn 4, smpn 10	2 Sekolah	5 Sekolah	3 Sekolah	1 Sekolah	850000000,00	340000000,00	850000000,00	510000000,00	170000000,00	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Aula Terbuka SMPN 2 Cilegon	Jumlah Ruang Terbuka			1 paket					750000000,00					Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Toilet Siswa SMPN 1 Cilegon	Tersedianya R. KM Siswa								0,00					Dinas Pendidikan
	Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Jenjang SMP	Jumlah Kegiatan Penerimaan Siswa Baru Jenjang SMP			3 kegiatan	11 Sekolah	11 Sekolah	11 Sekolah	11 Sekolah	650000000,00	500000000,00	500000000,00	500000000,00	500000000,00	Dinas Pendidikan
	Kegiatan Teknis Lainnya									7912161960,58	12674303692,50	13355258069,02	15564772268,69	17438687792,31	Dinas Pendidikan
	Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum jenjang SMP														Dinas Pendidikan
	Revitalisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri														Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Negeri														Dinas Pendidikan
	Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri														Dinas Pendidikan
	Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Negeri														Dinas Pendidikan
	Peningkatan sarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri														Dinas Pendidikan
	Pemeliharaan sarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri														Dinas Pendidikan
	Bantuan Operasional SMP Satu Atap														Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Jenjang Sekolah Menengah Pertama														Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan dan Pelatihan UN dan US Jenjang Sekolah Menengah Pertama														Dinas Pendidikan

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi siswa jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														Dinas Pendidikan
	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan kinerja hasil KBM jenjang Sekolah Menengah Pertama														Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama SMPN 1									223960163,77	241006241,32	266830696,37	294015866,84	320584441,38	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama SMPN 2									421167930,43	453223904,49	501788042,44	552911071,62	602874562,30	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama SMPN 3									363273360,22	390922857,18	432811273,42	476906830,69	520002241,89	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama SMPN 4									249979465,09	269005926,20	297830621,41	328174117,60	357829382,80	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama SMPN 5									312402691,55	336180315,28	372202923,63	410123597,94	447184180,75	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama SMPN 6									177824721,98	191359334,34	211863992,23	233449060,31	254544550,25	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama SMPN 7									296101408,80	318638307,73	352781243,66	388723203,79	423849952,31	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama SMPN 8									173526333,00	186733785,97	206742804,14	227806116,76	248391685,36	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama SMPN 9									110699263,95	119124816,99	131889355,64	145326470,13	158458812,94	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama SMPN 10									144979390,99	156014076,35	172731396,54	190329568,43	207528590,31	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama SMPN 11									242830481,33	261312818,30	289313176,69	318788900,95	347596076,45	Dinas Pendidikan
3.1.1.1.4.1	Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan									15996526072,91	17214055205,35	19058586668,31	21000308271,91	22897989038,94	Dinas Pendidikan
		Angka kelulusan ujian akhir SD/ sederajat	%		100										Dinas Pendidikan
		Angka kelulusan ujian akhir SMP/ sederajat	%		100										Dinas Pendidikan
		Proporsi jumlah guru SD/ sederajat yang memenuhi kriteria SPM	%		98										Dinas Pendidikan
		Proporsi jumlah guru SMP/ sederajat yang memenuhi kriteria SPM	%		98										Dinas Pendidikan
		Di setiap SD/ MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	100	100	100	100	100	100						Dinas Pendidikan
		Di setiap kota semua kepala SD/ MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	%	100	100	100	100	100	100						Dinas Pendidikan
		Di setiap kota semua pengawas sekolah dan madrasah untuk SD/ MI memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	%	100	100	100	100	100	100						Dinas Pendidikan
		Di setiap kota semua pengawas sekolah dan madrasah SMP/ MTs memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	%	100	100	100	100	100	100						Dinas Pendidikan
		Di setiap SMP/ MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%)	%	100	100	100	100	100	100						Dinas Pendidikan
		Guru yang memenuhi kualifikasi D4/ S1 (Proposi jumlah guru SD/ MI, SMP/ MTs/ dan SMA/ SMK/ MA yang berijazah D4/ S1 terhadap total jumlah guru SD/ MI, SMP/ MTs dan SMA/ SMK/ MA)	%	89,71	89,71	89,71	89,71	89,71	89,71						Dinas Pendidikan
		Jumlah Guru TK/ RA yang bersertifikat Pendidik	Orang	358	323	350	350	350	350						Dinas Pendidikan
		Jumlah Guru TK/ RA yang berkualifikasi S1/ D4	Orang	746	729	730	735	735	750						Dinas Pendidikan
	Kegiatan Teknis Lainnya									15996526072,91	17214055205,35	19058586668,31	21000308271,91	22897989038,94	Dinas Pendidikan

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan														Dinas Pendidikan
	Pembuatan dan operasional sistem informasi peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan														Dinas Pendidikan
	Seleksi dan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Tingkat Kota Cilegon														Dinas Pendidikan
	Peningkatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)														Dinas Pendidikan
	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Guru														Dinas Pendidikan
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									13370230334,73	13571753320,62	14147382711,34	14741053130,36	16597803460,50	Dinas Kesehatan
		Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan	%		100	100	100	100	100						Dinas Kesehatan
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		100	100	100	100	100						Dinas Kesehatan
		Tingkat disiplin dan kinerja aparatur	%		100	100	100	100	100						Dinas Kesehatan
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		100	100	100	100	100						Dinas Kesehatan
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									8650180890,12	8780560863,98	9152977660,90	9537066519,89	10738334248,37	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Dinas Kesehatan
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Kesehatan
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Kesehatan
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Dinas Kesehatan
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Dinas Kesehatan
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Dinas Kesehatan
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Dinas Kesehatan
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Dinas Kesehatan
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan UPT Puskesmas Kecamatan Cilegon									514347030,10	522099532,99	544243748,92	567081995,47	638510384,81	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan UPT Puskesmas Kecamatan Ciwandan									771716249,68	783347953,78	816572703,35	850838762,93	958008524,82	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan UPT Puskesmas Kecamatan Cibeber									623868357,50	633271622,15	660131066,87	687832324,06	774470156,75	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan UPT Puskesmas Kecamatan Grodol									392563575,62	398480495,67	415381560,67	432812328,62	487328408,77	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan UPT Puskesmas Kecamatan Bulomerak									636734641,88	646331833,78	673745211,46	702017762,66	790442361,71	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan UPT Puskesmas Kecamatan Purwakarta									500566455,63	508111250,61	529662170,58	551888526,44	621403180,15	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan UPT Puskesmas Kecamatan Jombang									524038233,99	531936807,69	554498259,64	577766818,99	650541044,98	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan UPT Puskesmas Kecamatan Citangkil									649645864,37	659437660,85	687406906,24	716252746,80	806470352,85	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan UPT Kesehatan P2KP									60800616,65	61717034,81	64334687,68	67034381,46	75477883,34	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan UPT Kesehatan JPKM									45768419,18	46458264,33	48428735,04	50460963,05	56816913,94	Dinas Kesehatan
3.1.2.1.2.1	Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan									29712058668,86	30159894093,54	31439089275,70	32758376219,78	36884548571,44	Dinas Kesehatan
		Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	%	74	75	80	85	95	100						Dinas Kesehatan

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017,00	2018,00	2019,00	2020,00		
		Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	Puskesmas	2	4	8	8	8	8						Dinas Kesehatan	
		Persentase jumlah tenaga kesehatan yang memiliki SIP (memenuhi standar yang berlaku)	%	77,82	77,82	77,82	77,82	77,82	77,82						Dinas Kesehatan	
		Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	Puskesmas	8	8	8	8	8	8						Dinas Kesehatan	
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin	%	98	98	98	98	98	98						Dinas Kesehatan	
	DED Peningkatan Puskesmas DTP Ciwandan menjadi RSUD Type D	Tersedianya Dokumen DED Puskesmas DTP Ciwandan menjadi RSUD Type D	Dokumen		1					567000000,00					Dinas Kesehatan	
	Pembangunan/Peningkatan Puskesmas DTP Ciwandan menjadi RSUD Type D	Terbangunnya Puskesmas DTP Ciwandan menjadi RSUD Type D	Unit bangunan			1	1				9450000000,00	9450000000,00			Dinas Kesehatan	
	DED Peningkatan Puskesmas DTP Pulomerak menjadi RSUD Type D	Tersedianya Dokumen DED Peningkatan Puskesmas DTP Pulomerak menjadi RSUD Type D	Dokumen			1					567000000,00				Dinas Kesehatan	
	Pembangunam/Peningkatan Puskesmas DTP Pulomerak menjadi RSUD Type D	Terbangunnya Puskesmas DTP Pulomerak menjadi RSUD Type D	Unit bangunan				1	1				9450000000,00	9450000000,00		Dinas Kesehatan	
	Perencanaan Pengadaan Tanah PKM Cilegon	Tersusunnya Perencanaan Pengadaan Tanah Puskesmas Cilegon	Dokumen	1											Dinas Kesehatan	
	Persiapan Pengadaan Tanah PKM Cilegon	Terlaksananya Persiapan Pengadaan Tanah Puskesmas Cilegon	Kegiatan	1											Dinas Kesehatan	
	Pelaksanaan Pengadaan Tanah PKM Cilegon	Terlaksananya Pengadaan Tanah Puskesmas Cilegon	Bidang tanah	1											Dinas Kesehatan	
	DED Pembangunan Puskesmas Baru Cilegon (DTP)	Dokumen DED Puskesmas Baru Cilegon (DTP)	Dokumen		1					217000000,00					Dinas Kesehatan	
	Pembangunan PKM Baru Cilegon (DTP)	Terbangunnya Puskesmas Baru Cilegon (DTP) yang dibangun	Unit bangunan		1					4677300000,00					Dinas Kesehatan	
	Perencanaan Pengadaan Tanah PKM Citangkil	Tersusunnya Perencanaan Pengadaan Tanah Puskesmas DTP Citangkil	Dokumen		1					58425000,00					Dinas Kesehatan	
	Persiapan Pengadaan Tanah PKM Citangkil	Terlaksananya Persiapan Pengadaan Tanah Puskesmas DTP Citangkil	Kegiatan		1					44105000,00					Dinas Kesehatan	
	Pelaksanaan Pengadaan Tanah PKM Citangkil	Tersedianya Lahan Tanah Puskesmas DTP Citangkil	Bidang tanah		1					3200000000,00					Dinas Kesehatan	
	DED Pembangunan Baru Puskesmas Citangkil II (DTP)	Dokumen DED PKM Baru Citangkil II (DTP)	Dokumen			1					217000000,00				Dinas Kesehatan	
	Pembangunan PKM Baru Citangkil II (DTP)	Terbangunnya PKM Baru Citangkil II (DTP) yang dibangun	Unit bangunan			1					4677300000,00				Dinas Kesehatan	
	Kegiatan Teknis Lainnya (Dinas Kesehatan)									11406570537,68	5563119185,18	2442816743,13	12788431092,27	25039534507,83	Dinas Kesehatan	
	Peningkatan Kesehatan Dasar														Dinas Kesehatan	
	Peningkatan Kesehatan Rujukan														Dinas Kesehatan	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan														Dinas Kesehatan	
	Peningkatan obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai														Dinas Kesehatan	
	Peningkatan Sarana Alat Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya														Dinas Kesehatan	
	Pengembangan dan Pembangunan RSUD dan Puskesmas														Dinas Kesehatan	
	Pelayanan Kesehatan Tradisional														Dinas Kesehatan	
	Pengawasan Obat dan Makanan														Dinas Kesehatan	
	Peningkatan pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan														Dinas Kesehatan	
	Jasa Pelayanan (Kapitasi)														Dinas Kesehatan	
	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan														Dinas Kesehatan	
	Pelayanan Ambulance Gratis														Dinas Kesehatan	
	Pelayanan Mobil Jenazah Gratis														Dinas Kesehatan	
	Public Service Center														Dinas Kesehatan	
	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														Dinas Kesehatan	
	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah														Dinas Kesehatan	
	Akreditasi Puskesmas														Dinas Kesehatan	
	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan														Dinas Kesehatan	
	Pengadaan Instalasi Farmasi														Dinas Kesehatan	
	Pengadaan Sarana Alat Kesehatan														Dinas Kesehatan	
	Upaya Kesehatan Lainnya /BOK														Dinas Kesehatan	

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Peningkatan Pembiayaan Kesehatan														Dinas Kesehatan
	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Melalui BPJS (APBD II)														Dinas Kesehatan
	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan untuk Non PNS														Dinas Kesehatan
	Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi														Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kepesertaan JPKM														Dinas Kesehatan
	Jasa Dokter Spesialis														Dinas Kesehatan
	Peningkatan Cakupan Pelayanan P2KP														Dinas Kesehatan
	Jasa Resiko Pelayanan														Dinas Kesehatan
	Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan UPT Puskesmas Kecamatan Cilegon									551247395,97	559556080,15	583288969,92	607765681,56	684318497,70	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan UPT Kesehatan JPKM									7674476088,02	7790149737,44	8120559452,46	8461324668,98	9527094341,85	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan UPT Pusat Layanan Gawat Darurat Terpadu									1199524672,88	1217604525,48	1269247738,75	1322509522,38	1489089886,12	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan UPT LAB KESDA									116409974,30	118164565,29	123176371,44	128345254,58	144511337,95	Dinas Kesehatan
3.1.2.1.1.1	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat									8890354553,67	9024354548,47	9407111557,66	9801864705,58	11036485825,74	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran hidup	306	306	306	306	306	306						Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 kelahiran hidup	24	24	24	24	24	24						Dinas Kesehatan
		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)	%	19	18	18	17	17	17						Dinas Kesehatan
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)	%	30	30	29	28	28	28						Dinas Kesehatan
		Presentase penduduk yang menggunakan Jamban Sehat	%	85	87	90	92	95	98						Dinas Kesehatan
		Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS	%	67	68	70	71	73	74						Dinas Kesehatan
	Kegiatan Teknis Lainnya (Dinas Kesehatan)									3935745193,21	3995066768,33	4164512660,49	4339269223,36	4885833942,43	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Anak, Remaja dan Usia														Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak														Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Bayi														Dinas Kesehatan
	Perbaikan Gizi Masyarakat														Dinas Kesehatan
	Penyelenggaraan Kota Sehat														Dinas Kesehatan
	Peningkatan Promosi Kesehatan														Dinas Kesehatan
	Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga														Dinas Kesehatan
	Jampersal														Dinas Kesehatan
	BOP Jamban Keluarga														Dinas Kesehatan
	Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)														Dinas Kesehatan
	Upaya Kesehatan Prioritas /BOK														Dinas Kesehatan
	Pendampingan kegiatan program penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan masyarakat														Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Kecamatan Cilegon									17128896,22	17387071,75	18124523,23	18885087,46	21263811,16	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Kecamatan Ciwandan									928767406,52	942766266,40	982752549,58	1023992058,67	1152971825,32	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Kecamatan Cibeber									716290442,06	727086739,88	757925238,58	789730258,85	889202929,22	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Kecamatan Grogol									435539844,94	442104525,42	460855850,51	480194868,30	540679147,97	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Kecamatan Pulomerak									696764926,63	707266925,84	737264791,26	768202831,64	864963955,05	Dinas Kesehatan

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Kecamatan Purwakarta									490076975,26	497463667,41	518562983,10	540323580,78	608381539,61	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Kecamatan Jombang									642930412,44	652620990,18	680301114,78	708848773,11	798133791,07	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Kecamatan Citanduy									846033343,55	858785193,09	895209521,31	932775438,79	1050265762,49	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat UPT Kesehatan P2KP									181077112,84	183806400,18	191602324,82	199642584,62	224789121,41	Dinas Kesehatan
3.1.2.1.3.1	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit									1645707493,68	1670512443,16	1741365194,25	1814438569,42	2042981223,93	Dinas Kesehatan
		Cakupan Keluarahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100	100						Dinas Kesehatan
		Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	90	92	95	97	100	100						Dinas Kesehatan
		Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	271	271	262	245	245	245						Dinas Kesehatan
		Prevalensi HIV/AIDS	%	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5						Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	%	100	100	100	100	100	100						Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	%	100	100	100	100	100	100						Dinas Kesehatan
	Kegiatan Teknis Lainnya (Dinas Kesehatan)									1535247480,37	1558387519,74	1624484628,73	1692653313,35	1905856167,35	Dinas Kesehatan
	Surveilans dan imunisasi														Dinas Kesehatan
	Pemberantasan penyakit menular dan pemberantasan penyakit bersumber binatang														Dinas Kesehatan
	Pengendalian penyakit tidak menular														Dinas Kesehatan
	Pemeriksaan Calon Haji														Dinas Kesehatan
	Penanganan Krisis Kesehatan														Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Jiwa dan Indera														Dinas Kesehatan
	Pengawas Minum Obat (PMO) Pasien MDR/XDR														Dinas Kesehatan
	Screening Contact TB MDR dan Kategori II														Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan Kegiatan Rabu Sehat														Dinas Kesehatan
	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (BOK / DAK)														Dinas Kesehatan
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit UPT Puskesmas Kecamatan Cilegon									11451505,16	11624108,13	12117130,52	12625604,92	14215898,09	Dinas Kesehatan
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit UPT Puskesmas Kecamatan Ciwandan									11668481,04	11844354,39	12346718,26	12864826,91	14485251,95	Dinas Kesehatan
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit UPT Puskesmas Kecamatan Cibeber									6311587,47	6406718,96	6678452,15	6958701,83	7835204,46	Dinas Kesehatan
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit UPT Puskesmas Kecamatan Grogol									4773469,52	4845417,70	5050930,20	5262883,74	5925784,89	Dinas Kesehatan
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit UPT Puskesmas Kecamatan Pulomerak									15564403,64	15798998,33	16469093,61	17160190,61	19321650,12	Dinas Kesehatan
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit UPT Puskesmas Kecamatan Purwakarta									8640462,00	8770695,48	9142693,85	9526351,17	10726269,21	Dinas Kesehatan
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit UPT Puskesmas Kecamatan Jombang									9812131,79	9960025,28	10382467,63	10818149,90	12180780,05	Dinas Kesehatan
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit UPT Puskesmas Kecamatan Citanduy									8679035,49	8809850,37	9183509,45	9568879,52	10774154,34	Dinas Kesehatan
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit UPT Kesehatan P2KP									33558937,21	34064754,77	35509569,86	36999667,48	41660063,46	Dinas Kesehatan
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									364705600,00	364705600,00	367850000,00	370000000,00	370000000,00	Rumah Sakit Umum Daerah
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		100	100	100	100	100						Rumah Sakit Umum Daerah
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		100	90	90	90	90						Rumah Sakit Umum Daerah
		Tingkat disiplin aparatur	%		100	90	90	90	90						Rumah Sakit Umum Daerah

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00		
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		100	90	90	90	90						Rumah Sakit Umum Daerah	
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									364705600,00	364705600,00	367850000,00	370000000,00	370000000,00	Rumah Sakit Umum Daerah	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Rumah Sakit Umum Daerah	
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Rumah Sakit Umum Daerah	
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Rumah Sakit Umum Daerah	
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Rumah Sakit Umum Daerah	
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Rumah Sakit Umum Daerah	
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Rumah Sakit Umum Daerah	
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Rumah Sakit Umum Daerah	
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Rumah Sakit Umum Daerah	
3.1.2.1.4.1	Program Peningkatan Pelayanan RSUD									92612794400,00	97261669400,00	102139843750,00	159263078438,00	107263078438,00	Rumah Sakit Umum Daerah	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pasien RSUD	poin		75	>80	>80	>80	>80						Rumah Sakit Umum Daerah	
		meningkatnya pelayanan yang efektif kepada seluruh pengunjung /pasien rawat inap dan rawat jalan	%		80	80	80	80	80						Rumah Sakit Umum Daerah	
		presentase pemenuhan kebutuhan alat kesehatan dan alat keperawatan	%		80	80	80	80	80						Rumah Sakit Umum Daerah	
	Pembangunan Gedung rawat Inap 5 lantai											54000000000,00			Rumah Sakit Umum Daerah	
	Pengadaan Peralatan Kesehatan dan kedokteran									13129630000,00	2000000000,00	2000000000,00	2000000000,00	2000000000,00	Rumah Sakit Umum Daerah	
	Kegiatan Teknis Lainnya (APBD)									2923800000,00	2200000000,00	0,00	1000000000,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah	
	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan														Rumah Sakit Umum Daerah	
	Pembangunan Gedung														Rumah Sakit Umum Daerah	
	Pengadaan Alat Penunjang Pelayanan														Rumah Sakit Umum Daerah	
	Kegiatan Teknis Lainnya (Swakelola)									76559364400,00	93061669400,00	46139843750,00	156263078438,00	105263078438,00	Rumah Sakit Umum Daerah	
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									1759377126,72	1765718751,74	1797713939,56	2090088080,62	2627811425,02	Dinas Sosial	
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		80,00	82,00	84,00	86,00	90,00						Dinas Sosial	
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		98,00	98,25	98,50	98,75	99,00						Dinas Sosial	
		Tingkat disiplin aparatur	%		85,00	87,00	90,00	92,00	95,00						Dinas Sosial	
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		85,00	87,00	90,00	93,00	95,00						Dinas Sosial	
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									1759377126,72	1765718751,74	1797713939,56	2090088080,62	2627811425,02	Dinas Sosial	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Dinas Sosial	
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Sosial	
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Sosial	
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Dinas Sosial	
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Dinas Sosial	
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Dinas Sosial	
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Dinas Sosial	

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Dinas Sosial
3.2.1.2.1.1	Program Pemberdayaan Sosial									1859907223,01	1963167382,58	2049735399,94	2137919720,88	2562481498,24	Dinas Sosial
		Persentase pemberdayaan PSKS	%		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25						Dinas Sosial
		Persentase (%) fakir miskin yang menerima pemberdayaan ekonomi produktif	%		2,24	2,24	2,24	2,24	2,24						Dinas Sosial
		Presentase penerima bantuan pangan Non tunai	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Dinas Sosial
		Persentase (%) rumah tidak layak huni yang dibangun	%		25,64	23,08	17,09	17,09	17,09						Dinas Sosial
	Kegiatan Teknis Lainnya									1389336604,94	1460761675,41	1531136814,97	1597009834,63	1914154265,84	Dinas Sosial
	Pemberdayaan Kelompok/Lembaga Sosial														Dinas Sosial
	Pemberdayaan Sosial Masyarakat														Dinas Sosial
	Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)														Dinas Sosial
	Peningkatan kualitas dan pengelolaan data sektoral bidang pemberdayaan sosial														Dinas Sosial
	Sosialisasi data sektoral														Dinas Sosial
	Pembinaan dan Pendampingan Veteran														Dinas Sosial
	Pendampingan program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial														Dinas Sosial
	Pemberdayaan Sosial (UPT Data dan Informasi Fakir Miskin)									470570618,07	502405707,18	518598584,97	540909886,25	648327232,40	Dinas Sosial
3.2.1.1.2.1	Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial									2102694431,93	2210792856,33	2317302260,59	2416997921,93	2896980834,10	Dinas Sosial
		Presentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti (berbasis keluarga dan masyarakat)	%		2,70	2,70	2,70	2,70	2,70						Dinas Sosial
		Presentasi anak yang mendapatkan layanan dan rehabilitasi sosial diluar panti	%		17,80	17,80	17,80	17,80	17,80						Dinas Sosial
		Presentase lanjut usia terlanter yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti	%		13,30	13,30	13,30	13,30	13,30						Dinas Sosial
	Kegiatan Teknis Lainnya									2102694431,93	2210792856,33	2317302260,59	2416997921,93	2896980834,10	Dinas Sosial
	Pembinaan dan Bantuan Usaha Produktif (LUPE)														Dinas Sosial
	Pelayanan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)														Dinas Sosial
	Penanganan PMKS														Dinas Sosial
	Pelatihan Keterampilan Bagi PMKS														Dinas Sosial
	Pemeliharaan Gedung Rehabilitasi														Dinas Sosial
	Operasional Gedung Panti Rehabilitasi														Dinas Sosial
	Sarana dan Prasarana Gedung Panti Rehabilitasi														Dinas Sosial
	Jaminan Kesejahteraan Bagi Penyandang Cacat														Dinas Sosial
	Operasional Pemakaman TPU Cikerai dan Pemakaman Jenazah Terlanter														Dinas Sosial
3.2.1.1.1.1	Program Perlindungan Jaminan Sosial									1428303134,65	1501731454,09	1574080395,36	1641800946,40	1967840283,18	Dinas Sosial
		Presentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Dinas Sosial
		Presentase Fakir miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat	%		71,00	73,00	73,00	77,00	82,00						Dinas Sosial
		Presentase masyarakat yang menerima santunan kematian	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Dinas Sosial
		Presentase orang terlanter dalam perjalanan, jenazah terlanter dan orang terlanter sakit yang ditangani	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Dinas Sosial
	kegiatan Teknis Lainnya									1428303134,65	1501731454,09	1574080395,36	1641800946,40	1967840283,18	Dinas Sosial
	Buffer stock														Dinas Sosial
	Pemantauan Kampung Siaga Bencana (KSB)														Dinas Sosial

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Pelatihan Tagana														Dinas Sosial
	Pelayanan Bagi Orang Terlantar														Dinas Sosial
	Pendampingan program/kegiatan perlindungan jaminan sosial														Dinas Sosial
	Pemberian rekomendasi PBI dan Pengaktifan BPJS Kelas 3 (Keadaan Darurat)														Dinas Sosial
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									1167816132,09	1172025492,26	1193262835,82	1387331084,94	1744253990,59	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		100	100	100	100	100						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		100	100	100	100	100						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Tingkat disiplin aparatur	%		100	100	100	100	100						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		100	100	100	100	100						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									1167816132,09	1172025492,26	1193262835,82	1387331084,94	1744253990,59	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
3.2.3.1.2.1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan									3001596840,94	3155907369,51	3307949571,40	3450265153,53	4135440883,78	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan/atau berperan dalam program/kegiatan pemerintahan	%	49	49	49,4	49,6	49,8	49,8						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Proporsi perempuan di lembaga politik & jabatan politik	%	14,29	14,29	14,29	14,29	17,14	17,14						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Proporsi peningkatan jumlah organisasi/lembaga/instansi swasta & pemerintah yang menerapkan pengarusutamaan gender	%		> 5 %	> 5 %	> 5 %	> 5 %	> 5 %						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Teknis Lainnya									3001596840,94	3155907369,51	3307949571,40	3450265153,53	4135440883,78	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Peningkatan ketersediaan data gender														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial dan Hukum														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Sosial dan Hukum														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pengarusutamaan Gender Bidang Kualitas Keluarga														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
3.2.3.1.1.1	Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak									802471888,17	843726549,53	884374777,56	922422610,08	1105603193,99	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Cakupan penanganan kasus KDRT	%	100	100	100	100	100	100						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Cakupan korban KDRT yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan	%	80	80	80	80	80	80						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Persentase ketersediaan elemen pendukung kota layak anak	%	40	40	40	40	40	40						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	kegiatan Teknis Lainnya									802471888,17	843726549,53	884374777,56	922422610,08	1105603193,99	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Peningkatan Perlindungan Anak														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Penanganan kekerasan terhadap Perempuan														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pemenuhan Hak Anak														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
3.2.2.1.2.1	Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk									385442016,46	405257389,55	424781481,56	443056555,75	531041561,42	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif (CU/PUS)	%	65	78	66	66,5	67	67,5						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Cakupan pelayanan KB	%	100	100	100	100	100	100						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB namun tidak terpenuhi (unmet need)	%	25	25	18	15	10	10						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Teknis Lainnya									385442016,46	405257389,55	424781481,56	443056555,75	531041561,42	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Advokasi dan pergerakan pengendalian pertumbuhan penduduk														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Peningkatan informasi keluarga														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan KB														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
3.2.2.1.1.1	Program Bina Keluarga Sejahtera									5163927062,01	5429401859,81	5690974243,62	5935813016,07	7114584744,30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Rasio kapasitas pelayanan posyandu	%	100		100	100	100	100						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Proporsi posyandu yang memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar kebutuhan	%	10	100	40	60	80	100						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Rasio PLKB di setiap kelurahan	%		60	60	60	60	60						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Peningkatan proporsi jumlah kelompok catur bina terhadap jumlah balita	%	0,52	0,15	0,69	0,78	0,87	0,95						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
		Proporsi peningkatan kompetensi kader tribina	%	96	100	142	156	200	224						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Teknis Lainnya									5163927062,01	5429401859,81	5690974243,62	5935813016,07	7114584744,30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Peningkatan Jaminan Ber-KB														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Pembinaan Kesertaan Ber-KB														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Peningkatan Ketahanan Keluarga														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									1111401732,94	1115407749,01	1135619167,39	1320312444,40	1659993259,69	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		100	100	100	100	100						Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		100	100	100	100	100						Dinas Pemuda dan Olahraga
		Tingkat disiplin aparatur	%		100	100	100	100	100						Dinas Pemuda dan Olahraga
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		100	100	100	100	100						Dinas Pemuda dan Olahraga
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									1111401732,94	1115407749,01	1135619167,39	1320312444,40	1659993259,69	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Dinas Pemuda dan Olahraga
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Pemuda dan Olahraga
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Pemuda dan Olahraga
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Dinas Pemuda dan Olahraga
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Dinas Pemuda dan Olahraga
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Dinas Pemuda dan Olahraga
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Dinas Pemuda dan Olahraga
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Dinas Pemuda dan Olahraga
3.1.3.1.1.1	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga									62616259600,93	39147941185,69	41679157058,99	10708375954,29	849049783,75	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Tingkat pemenuhan infrastruktur olahraga perkotaan	%		30	50,0%	15,0%	-	-						Dinas Pemuda dan Olahraga
		Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana olahraga	%		100	30,0%	30,0%	30,0%	10,0%						Dinas Pemuda dan Olahraga
	Pembangunan Sport center									62000000000,00	38500000000,00	41000000000,00	10000000000,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
	Pembangunan Tribun Barat														Dinas Pemuda dan Olahraga
	Pembangunan Tribun Utara														Dinas Pemuda dan Olahraga
	Pembangunan Tribun Timur														Dinas Pemuda dan Olahraga
	Pembangunan Tribun Selatan														Dinas Pemuda dan Olahraga

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Kegiatan Teknis Lainnya									616259600,93	647941185,69	679157058,99	708375954,29	849049783,75	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Pembangunan Sarana dan prasarana olahraga masyarakat														Dinas Pemuda dan Olahraga
	Pembangunan Sarana dan prasarana olahraga kepemudaan														Dinas Pemuda dan Olahraga
	Pembangunan Sarana dan prasarana olahraga prestasi														Dinas Pemuda dan Olahraga
	Pemeliharaan Sarana dan prasarana olahraga masyarakat														Dinas Pemuda dan Olahraga
	Pemeliharaan Sarana dan prasarana olahraga kepemudaan														Dinas Pemuda dan Olahraga
	Pemeliharaan Sarana dan prasarana olahraga prestasi														Dinas Pemuda dan Olahraga
3.1.3.1.3.1	Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda									1841817770,22	1936504661,46	2029799678,79	2117126319,25	2537558809,88	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Cakupan pembinaan organisasi pemuda	%		50	100	100	100	100						Dinas Pemuda dan Olahraga
		Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	%		50	40	45	55	60						Dinas Pemuda dan Olahraga
	Kegiatan Teknis Lainnya									1841817770,22	1936504661,46	2029799678,79	2117126319,25	2537558809,88	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Peningkatan kapasitas SDM Pemuda														Dinas Pemuda dan Olahraga
	Sosialisasi kepemudaan														Dinas Pemuda dan Olahraga
	Gebyar Pramuka														Dinas Pemuda dan Olahraga
	Sosialisasi dan Seleksi Pemuda Pelopor														Dinas Pemuda dan Olahraga
	Kwarran tergiat														Dinas Pemuda dan Olahraga
3.1.3.1.2.1	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga									10170416278,89	10773656990,10	11292699642,33	11778537497,09	14117594836,64	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Cakupan atlet cabang olahraga yang dibina	%		55	11%	12%	12%	12%						Dinas Pemuda dan Olahraga
		Proporsi cabang olahraga yang berprestasi	%		40	65%	65%	65%	65%						Dinas Pemuda dan Olahraga
	Kegiatan Teknis Lainnya									5201844570,03	5469268687,14	5732761735,77	5979398302,02	7166825475,21	Dinas Pemuda dan Olahraga
	O2S														Dinas Pemuda dan Olahraga
	Training Centre														Dinas Pemuda dan Olahraga
	Kejuaraan Olahraga Prestasi														Dinas Pemuda dan Olahraga
	POMKOT														Dinas Pemuda dan Olahraga
	POSPEKOT														Dinas Pemuda dan Olahraga
	Festifal Olahraga Masyarakat														Dinas Pemuda dan Olahraga
	Kejuaraan Olahraga Masyarakat														Dinas Pemuda dan Olahraga
	Kejurda														Dinas Pemuda dan Olahraga
	Kejuaraan Olahraga														Dinas Pemuda dan Olahraga
	Pembinaan Pelatih dan Instruktur olahraga dan pemuda														Dinas Pemuda dan Olahraga
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga UPT Pemusatan Latihan Cabang Olahraga Binaan									4968571708,86	5224003389,81	5475680288,11	5711256620,50	6845434502,91	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga UPT Stadion Seruni									0,00	80384913,15	84257618,45	87882574,56	105334858,52	Dinas Pemuda dan Olahraga
3.1.1.2.1.1	Program Pembinaan dan Pelestarian Seni, Budaya dan Sejarah Daerah									2182535077,18	2294738067,52	2405291701,62	2508772870,64	3006981039,34	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Jumlah Sanggar yang dibina	%		83,00	83,00	87,00	87,00	90,00						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00		
		jumlah peguron yang dibina	%		50,00	53,00	56,00	59,00	62,00						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Cakupan Kajian seni	%		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Cakupan Fasilitas Seni	%		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Cakupan Gelar seni	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Cakupan Misi kesenian	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Cakupan SDM Kesenian	%		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Cakupan Tempat Kesenian	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Cakupan Organisasi Kesenian	%		67,00	67,00	67,00	67,00	67,00						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Cakupan cagar budaya (benda, bangunan, kawasan dan struktur cagar budaya) yang dilestarikan	%		18,00	25,00	29,00	29,00	29,00						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	Kegiatan Teknis Lainnya									2182535077,18	2294738067,52	2405291701,62	2508772870,64	3006981039,34	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	Penyelenggaraan perayaan kebudayaan														Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	Revitalisasi nilai-nilai kebudayaan daerah														Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	Pembinaan Seni Budaya Tradisional														Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	Pembinaan Sejarah, Pengelolaan Museum dan Cagar Budaya														Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

MATRIKS RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA CILEGON TAHUN 2016-2021

VISI : TERWUJUDNYA KOTA CILEGON YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA BERBASIS INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00		
MISI 4 : MEMANTAPKAN PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA KOTA																
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									2146836719,67	2154574931,81	2193616273,80	2550378637,23	3206522339,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		80	82	84	86	90						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		80	82	84	86	90						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Tingkat disiplin aparatur	%		90	91	92	93	95						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		85	85	85	85	85						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									2146836719,67	2154574931,81	2193616273,80	2550378637,23	3206522339,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
4.1.1.1.1.1	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan									337047850742,99	341984501424,48	385451654239,41	370750959107,13	204470378454,85	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Persentase panjang Jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	%		94	94	94	95	95						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	%	90,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Persentase jalan dan jembatan yang dibangun atau ditingkatkan terhadap total panjang jalan dan jembatan perkotaan	%	-	-	39,00	-	-	-						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Cakupan panjang jalan yang dipelihara	%		25	25	25	25	25						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Rasio panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air	%	59,13	59,7	60,28	60,85	61,43	62						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Rasio panjang jalan yang memiliki trotoar	%			10	10	11	11						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Jalan Lingkar Utara									220710721000,00	175099944000,00	275538741000,00	108515209000,00	27000000000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembebasan Lahan	Luas lahan yang di bebaskan	Ha		39	0	0	0	0						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pematangan Lahan	Luas lahan yang dimatangkan	Ha		0		39								Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Konstruksi Jalan	Panjang jalan yang dibangun	Km												Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Bangunan Pelengkap	Jumlah bangunan pelengkap yang di bangun	Unit												Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	- Jembatan		unit		1	1									Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	- gorong-gorong		unit			38									Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	- TPT		m'			6800									Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	- Saluran		m'			13033									Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				TRANSISI	TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	- Trotoar		m'					25156							Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	- Median		m'				12578								Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS)								6000000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Simpul Jalan													Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penataan Jalan Strategis Kota								4550000000,00	10850000000,00	8000000000,00	10000000000,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penataan Jalan Ki Wasyid		85	100										Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penataan Jalan Maulana Yusuf				100									Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penataan Jalan Kapten Tendean				100									Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penataan Persimpangan Sebidang Jalan Kota Cilegon			13,3	40,0	66,7	100,0							Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Trotoar													Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penataan Jalan Protokol								6000000000,00	2000000000,00	2000000000,00	2000000000,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pekerjaan normalisasi saluran													Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penataan Persimpangan Sebidang Jalan SA Tirtayasa - RA Kartini				100									Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penataan Persimpangan Sebidang Jalan Ahmad Yani - KH. Patimura			100										Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penataan Persimpangan Jalan SA Tirtayasa - DI Panaitan			100										Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penataan Persimpangan Sebidang Jalan SA Tirtayasa - P. Antasari			100										Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penataan Persimpangan Sebidang Jalan SA Tirtayasa - Kapten Tendean			100										Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan								23650000000,00	6100000000,00	46100000000,00	127700000000,00	40000000000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Jalan Ketileng-Cikerut				0,76									Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pemeliharaan rutin jembatan			10	10	10	10	10						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Penggantian Jembatan Ciberko			1										Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Jalan Baru JLS-Pintu Selatan KS						1,7	1,7						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Jalan Akses dari Pekuncen ke JLS						0,75	0,75						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pembangunan Jalan H. Umar-Pagebangan (+ 400m)				0,2	0,2								Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Peningkatan Jalan Ruas JLS - Pejaten (JLS Ciberko - Panakodan)							4,2						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pelebaran Jalan								22900000000,00	111400000000,00	26000000000,00	27600000000,00	7000000000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pelebaran Jalan Tengku Cik Di Tiro (Kadipaten-Seruni)						1,18							Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pelebaran Jalan imam Bonjol (Cibeber-Ciberko)						2,385							Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan (Jalan Lingkar Luar Selatan)				3,24	4								Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pelebaran Jalan Sastradikarta (Jombang Kali - Acing)							0,923						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pelebaran Jalan KH. Ahmad Dahlan (Kemiri-Curug Katimaha)				1,6	1,7								Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pelebaran Jalan P. Jayakarta-Jl. Bonakarta (eks RPH-Kel Masigit-Bonakarta)						2,042							Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Pelebaran Jalan Lebak Layang - Pasir Angin-JLS						2,83							Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Peningkatan Struktur Jalan (Rigid Pavement)								28000000000,00	10000000000,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Peningkatan Struktur Jalan (Rigid Pavement) Jl. KH. Ahmad Dahlan			1,6										Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00		
	Peningkatan Struktur Jalan (Rigid Pavement) Jl. Cendrawasih (Jl. Perumnas)				1,023											Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Peningkatan Struktur Jalan (Rigid Pavement) Jl. Kepodang				0,561											Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Peningkatan Struktur Jalan (Rigid Pavement) Jl. Kemiri				0,4											Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh														12000000000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Industri Kecil Menengah												65926261511,00			Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Kegiatan Teknis Lainnya									25237129742,99	26534557424,48	27812913239,41	29009488596,13	34770378454,85		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan															Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Penataan Jalan Kota															Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan															Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pemeliharaan Berkala															Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga															Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Penanganan Darurat Jalan															Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pengadaan Tanah															Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Penataan Jalan															Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Studi kelayakan Pembangunan															Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	BOP DAK Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan															Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4.1.3.1.1.1	Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran/Drainase dan Pengelolaan Sumber Daya Air									24067280097,14	31235249263,38	36800749324,35	29355661823,82	24451485178,89		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase luasan yang masih tergenang (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	%	86,55	87,16	91,98	94,57	95,4	94,57							Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase saluran/drainase perkotaan dalam kondisi baik	%		70.41	73.56	76.24	78.48	80.5							Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase peningkatan panjang saluran/drainase perkotaan (tahun dasar : 2016)	%		5	3	3	3	3							Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pengendalian Banjir dan Genangan									4800000000,00	10800000000,00	15200000000,00	6600000000,00	0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pembangunan Tandon Cibuntu															Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pembangunan Tandon Bulakan Kec. Cibeber			0,6												Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pembangunan Tandon Sukmajaya (Mitsubishi)			0,5												Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pembangunan Tandon Cibeber 2															Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pembangunan Tandon Kali Kedung Ingas Hulu 20.000m2															Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pembangunan Tandon Metro															Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pembangunan, Peningkatan, rehabilitasi dan normalisasi saluran/drainase dan jaringan irigasi									16000000000,00	17000000000,00	18000000000,00	19000000000,00	19950000000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Kegiatan Teknis Lainnya									3267280097,14	3435249263,38	3600749324,35	3755661823,82	4501485178,89		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pembangunan Saluran/Drainase dan Jaringan Irigasi															Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Peningkatan Saluran/Drainase dan Jaringan Irigasi															Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pengadaan Tanah															Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Normalisasi Saluran/Drainase															Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Pemeliharaan Saluran/Drainase														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Perencanaan Teknis Bidang Pengairan														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Penanggulangan Banjir														Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									4207126432,07	4222290900,11	4298799681,75	4997941985,13	6283777785,20	Dinas Perhubungan
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		100	100	100	100	100						Dinas Perhubungan
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		100	100	100	100	100						Dinas Perhubungan
		Tingkat disiplin aparatur	%		100	100	100	100	100						Dinas Perhubungan
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		100	100	100	100	100						Dinas Perhubungan
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									4207126432,07	4222290900,11	4298799681,75	4997941985,13	6283777785,20	Dinas Perhubungan
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Dinas Perhubungan
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Perhubungan
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Perhubungan
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Dinas Perhubungan
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Dinas Perhubungan
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Dinas Perhubungan
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Dinas Perhubungan
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Dinas Perhubungan
4.1.2.2.1	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan									3309806918,56	3479962366,51	3647616571,40	3804545407,38	4560076377,25	Dinas Perhubungan
		Tingkat kepuasan masyarakat (termasuk pelaku jasa usaha angkutan umum) pelayanan terminal	%		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00						Dinas Perhubungan
		Tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Dinas Perhubungan
		Cakupan fasilitas Penerangan Jalan umum	%	18,00	28,00	53,00	75,00	100,00	100,00						Dinas Perhubungan
	Kegiatan Teknis Lainnya									3309806918,56	3479962366,51	3647616571,40	3804545407,38	4560076377,25	Dinas Perhubungan
	Penyusunan kajian kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan														Dinas Perhubungan
	Pengadaan sarana perhubungan														Dinas Perhubungan
	Pengadaan prasarana perhubungan														Dinas Perhubungan
	Pemeliharaan sarana perhubungan														Dinas Perhubungan
	Pemeliharaan prasarana perhubungan														Dinas Perhubungan
	Pengadaan dan pemeliharaan PJU														Dinas Perhubungan
4.1.2.1.3.1	Program Dukungan Pelayanan Perhubungan Laut									528926086,98	556117901,33	582910002,72	607988128,79	728726301,53	Dinas Perhubungan
		Jumlah TUKS yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan dan lainnya mengenai kepelabuhanan di Kota Cilegon	TUKS		18	18	18	18	18						Dinas Perhubungan
		Cakupan pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir	%		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00						Dinas Perhubungan
	Kegiatan Teknis Lainnya									528926086,98	556117901,33	582910002,72	607988128,79	728726301,53	Dinas Perhubungan
	Pengadaan sarpras perhubungan laut														Dinas Perhubungan
	Pemeliharaan sarpras perhubungan laut														Dinas Perhubungan
	Pengawasan angkutan kepelabuhanan														Dinas Perhubungan
	Pengendalian perhubungan kepelabuhanan														Dinas Perhubungan
	Pengawasan angkutan keselamatan pelayaran														Dinas Perhubungan

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Pengendalian perhubungan keselamatan pelayaran														Dinas Perhubungan
4.1.2.1.1.1	Program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan									15340865172,38	10527344473,55	1972021163,70	2013839744,89	1215174528,35	Dinas Perhubungan
		Cakupan fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, Guard Rail, Marka)	%	31	45	61	80	100	100						Dinas Perhubungan
		Cakupan Penunjang Sistem Angkutan Umum Massal (Saum)	%		3	3	3	3	3						Dinas Perhubungan
		Rasio kepatuhan awak angkutan umum terhadap standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota	Unit		1270	1270	1270	1270	1270						Dinas Perhubungan
	Peningkatan Kualitas Sistem Transportasi Perkotaan									14650000000,00	9600000000,00	1000000000,00	1000000000,00		Dinas Perhubungan
	Pembangunan Kantong Parkir Angkutan Barang					1									Dinas Perhubungan
	Pelayanan SAUM				3	3	3	3							Dinas Perhubungan
	Kegiatan Teknis Lainnya									690865172,38	726382190,68	761377117,58	794133308,50	951837382,05	Dinas Perhubungan
	Pengadaan sarana dan prasarana Penunjang SAUM														Dinas Perhubungan
	Penunjang Oprasional SAUM														Dinas Perhubungan
	Pengadaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan														Dinas Perhubungan
	Pengawasan aktifitas angkutan jalan														Dinas Perhubungan
	Penyusunan kajian lalu lintas dan angkutan jalan														Dinas Perhubungan
	Operasional manajemen lalu lintas dan angkutan jalan														Dinas Perhubungan
	Penyusunan Kebijakan/pedoman lalu lintas dan angkutan jalan														Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UPT Terminal Seruni									0,00	100481141,44	105322023,06	109853218,20	131668573,15	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UPT Parkir									0,00	100481141,44	105322023,06	109853218,20	131668573,15	Dinas Perhubungan
4.1.2.1.2.1	Program Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas									949146875,15	997942021,12	1046019890,49	1091022066,74	1307684209,51	Dinas Perhubungan
		Tingkat kelancaran lalu lintas jalan	Titik		8	10	10	10	10						Dinas Perhubungan
	Kegiatan Teknis Lainnya									949146875,15	997942021,12	1046019890,49	1091022066,74	1307684209,51	Dinas Perhubungan
	Dukungan Kelancaran Lalu Lintas														Dinas Perhubungan
	Pembinaan Tertib dan disiplin lalu lintas														Dinas Perhubungan
	Optimalisasi penegakan Peraturan LLAJ														Dinas Perhubungan

MATRIKS RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA CILEGON TAHUN 2016-2021

VISI : TERWUJUDNYA KOTA CILEGON YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA BERBASIS INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00		
MISI 5 : MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN																
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									1385637620,92	1390632112,48	1415830653,07	1646096582,45	2069592878,01	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		100	100	100	100	100						Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		100	100	100	100	100						Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		Tingkat disiplin aparatur	%		100	100	100	100	100						Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		100	100	100	100	100						Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									1385637620,92	1390632112,48	1415830653,07	1646096582,45	2069592878,01	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
5.3.2.1.1.1	Program Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Kebakaran									640511328,63	673439682,07	705883996,85	736252746,36	882462527,54	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		Persentase Kapasitas Penanganan Kebakaran Pada WMK	%	25,00	31,16	36,99	42,81	48,63	54,45						Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Kegiatan Teknis Lainnya									640511328,63	673439682,07	705883996,85	736252746,36	882462527,54	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyuluhan di bidang Pencegahan Kebakaran														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Pemeriksaan alat proteksi kebakaran pada bangunan gedung														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Pendataan Bangunan dan Gedung														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Pengadaan Sarpras Pemadam Kebakaran														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Pemasangan Hidrant Kota														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Pemeliharaan Peralatan Damkar dan Rescue														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5.3.2.1.2.1	Program Pengendalian, Operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan									491490843,95	516758131,97	541653997,10	564957195,13	677150009,74	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Persentase capaian waktu dalam penanggulangan kebakaran di permukiman	%	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00						Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Kegiatan Teknis Lainnya									491490843,95	516758131,97	541653997,10	564957195,13	677150009,74	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Pengamanan Hari Raya/Kegiatan Keagamaan/Olahraga, Hari Jadi Kota Cilegon dan Hari Besar Nasional														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Bimbingan Teknis Penanggulangan Kebakaran														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Siaga Tim Penanggulangan Kebakaran														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Publikasi, Sosialisasi dan Operasional Pusat Pengaduan dan Pelayanan kepada masyarakat														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Siaga Tim Penyelamatan, evakuasi dan perlindungan hak sipil														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									2213154155,40	2221131406,86	2261378765,89	2629161792,84	3305574277,72	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		100	100	100	100	100						Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		100	100	100	100	100						Satuan Polisi Pamong Praja

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
					2016	2017	2018	2019	2020		2021	2017,00	2018,00	2019,00		
		Tingkat disiplin aparatur	%		100	100	100	100	100						Satuan Polisi Pamong Praja	
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		100	100	100	100	100						Satuan Polisi Pamong Praja	
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									2213154155,40	2221131406,86	2261378765,89	2629161792,84	3305574277,72	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Satuan Polisi Pamong Praja	
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Satuan Polisi Pamong Praja	
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Satuan Polisi Pamong Praja	
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Satuan Polisi Pamong Praja	
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Satuan Polisi Pamong Praja	
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Satuan Polisi Pamong Praja	
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Satuan Polisi Pamong Praja	
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Satuan Polisi Pamong Praja	
5.3.1.1.1.1	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum									1562366982,40	1642687454,35	1721827235,19	1795904194,35	2152546340,12	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota	%	100	100	100	100	100	100						Satuan Polisi Pamong Praja	
		Rasio Personil Satpol PP per Jumlah 10.000 Penduduk	per 10.000 penduduk	2,23	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9						Satuan Polisi Pamong Praja	
	Kegiatan Teknis Lainnya									1562366982,40	1642687454,35	1721827235,19	1795904194,35	2152546340,12	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Operasional Patroli pada Jalan di Kota Cilegon														Satuan Polisi Pamong Praja	
	Pengendalian Ketentraman Ketertiban Masyarakat Kota Cilegon														Satuan Polisi Pamong Praja	
	Pembinaan Fisik Mental dan Spiritual Anggota satpol PP														Satuan Polisi Pamong Praja	

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Pengamanan Kegiatan Khusus														Satuan Polisi Pamong Praja
5.3.1.1.2.1	Program Perlindungan Masyarakat									3014897761,61	3169892083,57	3322608027,27	3465554249,81	4153766186,62	Satuan Polisi Pamong Praja
		Cakupan rasio petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	per 10.000 penduduk	35	35	35	35	35	35						Satuan Polisi Pamong Praja
		Cakupan peningkatan kapasitas dan pembinaan anggota linmas Kota Cilegon	%	100	100	100	100	100	100						Satuan Polisi Pamong Praja
	kegiatan Teknis Lainnya									3014897761,61	3169892083,57	3322608027,27	3465554249,81	4153766186,62	Satuan Polisi Pamong Praja
	Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Linmas Kota Cilegon														Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan sarana SATLINMAS Kota Cilegon														Satuan Polisi Pamong Praja
	Operasional SATLINMAS Kota Cilegon														Satuan Polisi Pamong Praja
5.3.1.1.3.1	Program Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah									1539113701,78	1618238734,70	1696200649,17	1769175093,79	2120509203,74	Satuan Polisi Pamong Praja
		Cakupan penegakan peraturan daerah	%	100	100	100	100	100	100						Satuan Polisi Pamong Praja
	Kegiatan Teknis Lainnya									1539113701,78	1618238734,70	1696200649,17	1769175093,79	2120509203,74	Satuan Polisi Pamong Praja
	Sosialisasi dan Penyuluhan Perda dab Perundang-undangan Lainnya														Satuan Polisi Pamong Praja
	Pembinaan dan Pelatihan Personil Anti Huru Hara (PHH)														Satuan Polisi Pamong Praja
	Peningkatan Kapasitas PPNS Kota Cilegon														Satuan Polisi Pamong Praja
	Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lainnya														Satuan Polisi Pamong Praja
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									7198602099,65	7224549257,00	7355459579,05	8551726754,35	10751855616,58	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	80,00	85,00	85,00	90,00	95,00	100,00						Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00						Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tingkat disiplin aparatur	%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	100,00						Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	95,00						Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									7198602099,65	7224549257,00	7355459579,05	8551726754,35	10751855616,58	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.3.2.1.3.1	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana									465497603,78	502405707,18	513007802,35	535078575,33	641337902,45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	%	28,57	42,86	71,43	85,71	100,00	100,00						Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase meningkatnya peralatan kesiapsiagaan bencana daerah	%	28,57	57,14	71,43	85,71	100,00	100,00						Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Kegiatan Teknis Lainnya									465497603,78	502405707,18	513007802,35	535078575,33	641337902,45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pelatihan Pemetaan Resiko Bencana														Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Drill Penanggulangan Kebencanaan														Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penguatan Sistem Peringatan Dini Pusdalops PB														Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.3.2.1.4.1	Program Kedaruratan dan Logistik									1060513361,56	1115033800,52	1168752802,50	1219035230,29	1461119046,15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase distribusi logistik terhadap kawasan rawan bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Penanganan bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	kegiatan Teknis Lainnya									1060513361,56	1115033800,52	1168752802,50	1219035230,29	1461119046,15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan dan Penyusunan tata laksana logistik kebencanaan														Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Operasional tanggap darurat Kebencanaan														Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Peningkatan SDM penanggulangan bencana														Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.3.2.1.5.1	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi									337665771,71	502405707,18	519989906,93	538189553,67	631148810,67	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	%	20,00	40,00	60,00	80,00	90,00	100,00						Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Kegiatan Teknis Lainnya									337665771,71	502405707,18	519989906,93	538189553,67	631148810,67	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bencana														Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Koordinasi dan Evaluasi Pasca Bencana														Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyusunan SOP Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahap I														Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									1878656867,24	1885428432,70	1919592784,63	2231788890,60	2805968035,20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		100	100	100	100	100						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00		
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		100	100	100	100	100						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Tingkat disiplin aparatur	%		100	100	100	100	100						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		100	100	100	100	100						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									1878656867,24	1885428432,70	1919592784,63	2231788890,60	2805968035,20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
5.2.1.1.2.1	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk									513964432,73	540387076,23	566421313,40	590790058,21	708112928,06	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%		90,33	91,50	92,50	93,50	94,83						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Waktu rata-rata penyelesaian pelayanan pendaftaran penduduk	hari		3	3	3	3	3						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Kegiatan Teknis Lainnya									513964432,73	540387076,23	566421313,40	590790058,21	708112928,06	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Pelayanan Langsung Dokumen Pendaftaran Penduduk														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Pengawasan Dokumen Kependudukan Orang Asing														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Penatausahaan Pendaftaran Penduduk														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
5.2.1.1.3.1	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil									319101680,25	335506531,25	351670235,00	366799895,57	439641365,75	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	%		67,50	72,50	77,50	82,50	86,00						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Waktu rata-rata penyelesaian pelayanan pencatatan sipil	%		3	3	3	3	3						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Kegiatan Teknis Lainnya									319101680,25	335506531,25	351670235,00	366799895,57	439641365,75	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Pelayanan Langsung dan Pendokumentasian Akta Kelahiran dan Akta Kematian														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pembinaan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Sosialisasi Perubahan Status Anak, dan Pewarganegara dan kematian														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pelayanan Langsung dan Pendokumentasian Akta Kelahiran														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.2.1.1.5.1	Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									401385761,32	422020794,03	442352496,85	461383516,44	553008007,23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tingkat operasional sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil	%		78,13	83,33	88,54	93,75	98,96						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Banyaknya titik pengembangan koneksi jaringan SIAK	%		28,00	47,00	66,00	85,00	100,00						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan perekaman KTP-el	%		90,59	92,37	94,18	96,02	97,90						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tingkat Validasi dan Akurasi data kependudukan	%		84,31	84,69	85,07	85,44	85,79						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Kegiatan Teknis Lainnya									401385761,32	422020794,03	442352496,85	461383516,44	553008007,23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemeliharaan SIAK														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pengelolaan SIAK														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pelaporan dan Penyusunan Buku Induk Penduduk														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.2.1.1.4.1	Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan									235596784,39	247708692,23	259642558,02	270812976,73	324592750,41	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan terhadap target instansi	%		6,67	33,33	66,67	86,67	100,00						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan intergrasi basis data kependudukan terhadap sistem informasi manajemen di lingkungan pemerintahan Kota Cilegon	%		0,00	20,00	60,00	80,00	100,00						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Promosi Pelayanan Publik Dokumen Kependudukan	kegiatan		2	4	8	10	10						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah inovasi pelayanan publik yang terlaksana	kegiatan		0	1	2	2	2						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Buku Profil Kependudukan	buku		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tingkat Ketersediaan Dokumen Analisis Pelayanan Kependudukan	%		10,00	40,00	60,00	80,00	100,00						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Kegiatan Teknis Lainnya									235596784,39	247708692,23	259642558,02	270812976,73	324592750,41	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Sosialisasi Kerjasama Penyelenggaraan Dokumen Kependudukan														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Promosi Pelayanan Publik Dokumen Kependudukan														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Penyusunan Profil Kependudukan														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									864153958,09	867268776,55	882983865,59	1026589387,90	1290703175,31	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		100	100	100	100	100						Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		100	80	80	80	80						Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
		Tingkat disiplin aparatur	%		100	80	80	80	80						Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		100	85	85	85	85						Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									864153958,09	867268776,55	882983865,59	1026589387,90	1290703175,31	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
5.2.2.1.1.1	Program Pengembangan Komunikasi dan Pengelolaan Informasi Daerah									2925199082,06	3075582041,67	3223754408,91	3362447721,93	4030184104,72	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
		Cakupan pelayanan informasi publik terkait pembangunan daerah	%	80	80	85	90	95	95						Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Kegiatan Teknis Lainnya									1960869790,49	2061677084,02	2161002535,23	2253973823,69	2701582367,34	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Pengelolaan website Pemerintah Kota Cilegon														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Pengelolaan informasi daerah														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Sosialisasi promosi dan propaganda pemerintah daerah														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Penyusunan media informasi daerah (booklet, buletin, buku, majalah dll)														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Kelompok informasi masyarakat														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Peningkatan sarana LPPL														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Peningkatan SDM LPPL														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Optimalisasi penyebaran informasi pembangunan daerah														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Pengembangan Komunikasi dan Pengelolaan Informasi Daerah UPT Radio									964329291,57	1013904957,65	1062751873,68	1108473898,25	1328601737,38	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
5.1.3.1.1.1	Program Pengembangan Data dan Statistik Daerah									950000000,00	1002299385,82	1050587180,02	1095785851,54	1313394017,18	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
		Persentase ketersediaan dokumen statistik daerah yang akurat dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100						Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Kegiatan Teknis Lainnya									950000000,00	1002299385,82	1050587180,02	1095785851,54	1313394017,18	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Penyusunan dokumen statistik daerah														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Updating data pembangunan daerah														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Forum data pembangunan Kota Cilegon														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Pelaporan data pembangunan daerah														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
5.1.3.1.2	Program Penyelenggaraan Persandian									165000000,00	174083577,54	182470404,95	190320700,53	228115802,98	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
		Tingkat penyelenggaraan persandian	%		100	100	100	100	100						Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Kegiatan Teknis Lainnya									165000000,00	174083577,54	182470404,95	190320700,53	228115802,98	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Peningkatan Alat-alat Komunikasi dan Telekomunikasi														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Peningkatan SDM Persandian														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
5.1.5.1.1.1	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi									1681122980,67	5767548636,57	5852703856,67	5932411428,44	2316162054,18	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
		Tingkat kualitas dan kapabilitas jaringan infrastruktur TIK	%	90	100	100	100	100	100						Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
		Tingkat kualitas layanan e-government	%	90	100	100	100	100	100						Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
		Tingkat ketersediaan aplikasi TIK	%	90	100	100	100	100	100						Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Pengembangan Smart-City										4000000000,00	4000000000,00	4000000000,00		Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan aplikasi														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Pengadaan, penyediaan, dan pemeliharaan infrastruktur TI														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Kegiatan Teknis Lainnya									1681122980,67	1767548636,57	1852703856,67	1932411428,44	2316162054,18	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Pengelolaan sistem keamanan dan helpdesk TIK														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Peningkatan kapasitas SDM TIK														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Pengelolaan, Penyediaan, dan penguatan kapasitas jaringan infrastruktur TIK														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Pengelolaan Bandwith Kota Cilegon														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Pembuatan sistem informasi pemerintahan terintegrasi														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
	Pemutakhiran sistem informasi pemerintahan terintegrasi														Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
5.2.1.1.7.1	Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan									498919992,66	524569209,35	549841388,88	573496827,29	687385496,69	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait perizinan	%		100	100	100	100	100						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Kegiatan Teknis Lainnya									498919992,66	524569209,35	549841388,88	573496827,29	687385496,69	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Fasilitasi Pengaduan Masyarakat Dunia Usaha														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Sosialisasi Media Cetak dan Elektronik														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyusunan Sistem Informasi Perizinan Online														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Evaluasi SOP perizinan														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyusunan Sistem Manajemen Informasi dan Kodefikasi Dokumen														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5.2.1.1.6.1	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan perijinan dan non perijinan Dinas PM dan PTSP	Poin		60,00	65,00	70,00	72,00	75,00						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase jumlah perizinan yang diterbitkan	%		65,00	67,00	70,00	75,00	80,00						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Kegiatan Teknis Lainnya									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									586157147,75	588269934,58	598929507,08	696337385,13	875486231,07	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00						Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00	90,00						Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
		Tingkat disiplin aparatur	%	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	95,00						Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00						Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									586157147,75	588269934,58	598929507,08	696337385,13	875486231,07	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
5.2.2.2.1.1	Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah									672891117,99	707484099,52	741568572,77	773472554,63	927073683,49	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Persentase Pengunjung Perpustakaan terhadap Populasi yang harus dilayani	%	20,83	22,50	24,17	25,83	27,50	29,17						Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Kegiatan Teknis Lainnya									672891117,99	707484099,52	741568572,77	773472554,63	927073683,49	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Sosialisasi membaca dan perpustakaan														Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Pembinaan perpustakaan di Kota Cilegon														Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Lomba perpustakaan														Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan														Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan														Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
5.1.1.3.1.1	Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah									525815347,33	552847240,18	579481770,87	604412406,54	724440489,48	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Rasio Jumlah Unit Kerja Berstandar baku dalam pengelolaan kearsipan terhadap total unit kerja hinaan		7,41	11,11	14,81	18,52	22,22	25,93						Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Kegiatan Teknis Lainnya									525815347,33	552847240,18	579481770,87	604412406,54	724440489,48	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Akuisisi Arsip														Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis														Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Penelusuran Arsip Sejarah Kota Cilegon														Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Pelaporan dan Evaluasi Situasi Kondisi Arsip SKPD														Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Peningkatan Sarana Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi														Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Pendataan dan Penataan Arsip In Aktif														Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Penyusunan Regulasi Kearsipan Perwal Tata Kearsipan dan JRA														Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									3555424605,21	3568240032,49	3632897277,56	4223739456,44	5310393807,26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		75	80	85	90	95						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		75	80	85	90	95						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tingkat disiplin aparatur	%		80	80	80	80	85						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				TRANSISI	TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		75	80	85	90	95						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									3555424605,21	3568240032,49	3632897277,56	4223739456,44	5310393807,26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.1.3.2.3.1	Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi									1901264004,93	1999006996,11	2095313189,45	2185458371,49	2619460678,27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tingkat tata kelola proses/tahapan/mekanisme perencanaan, pengendalian dan evaluasi jangka panjang, menengah dan tahunan yang komprehensif, partisipatif, handal, responsif dan tepat waktu	%		100	100	100	100	100						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase kesesuaian antara muatan perencanaan tingkat kota dengan dokumen perencanaan tingkat propinsi dan tingkat nasional (nusat)	%		80	80	80	80	80						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase jumlah usulan musrenbangkel yang diakomodir dalam RKPD (Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang tercakup dalam dokumen perencanaan)	%		50	50	50	50	50						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase cakupan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah (litbang)	%		80	80	80	80	80						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti (litbang)	%		50	50	50	50	50						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Kegiatan Teknis Lainnya									1901264004,93	1999006996,11	2095313189,45	2185458371,49	2619460678,27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Monitoring Pelaksanaan Musrenbangcam														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan, Pengendalian, dan Evaluasi														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Evaluasi dan penyusunan kebijakan DPW Kel														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Operasional TEPPRA														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Perumusan kebijakan kerjasama dengan badan usaha/ lembaga														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyusunan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Bintek/Workshop SDM Perencana Bappeda														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.1.3.2.2.1	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan									1204157283,96	1266062382,08	1327057490,55	1384150549,32	1659024021,70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tingkat efektifitas koordinasi perencanaan dan evaluasi program pada SKPD di bawah koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan	%		90	90	90	90	90						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00		
		Tingkat ketersediaan analisis data sektoral di bawah koordinasi bidang Sosial Pemerintahan	%		90	90	90	90	90						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Kegiatan Teknis Lainnya									1204157283,96	1266062382,08	1327057490,55	1384150549,32	1659024021,70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Verifikasi Dokumen Perencanaan PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Pelaksanaan Pasca Musrenbang RKPD														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Pelaksanaan Forum PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Pembangunan Manusia														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Penyusunan Matriks Sinkronisasi Hasil Reses Dewan Dengan Renja PD														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Sosial														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Pemerintahan														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Bintek/Workshop SDM Perencana PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.3.2.1.1	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan									1655716265,44	1740835775,36	1824704049,50	1903207005,31	2281158029,84	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Persentase substansi dokumen Perencanaan Tata Ruang yang ditindaklanjuti	%		80	85	90	95	95						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Tingkat efektifitas koordinasi perencanaan dan evaluasi program pada SKPD di bawah koordinasi Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan	%		80	85	90	95	95						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Tingkat ketersediaan analisis data sektoral di bawah koordinasi bidang perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan	%		80	85	90	95	95						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Kegiatan Teknis Lainnya									1655716265,44	1740835775,36	1824704049,50	1903207005,31	2281158029,84	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Verifikasi Dokumen Perencanaan PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Pelaksanaan Pasca Musrenbang RKPD														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Daya Saing Ekonomi Daerah														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Penyusunan Matriks Sinkronisasi Hasil Reses Dewan Dengan Renja PD														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Cilegon														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Bintek/Workshop SDM Perencana PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Sosialisasi Perda Revisi RTRW														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang LH, SDA dan Kebersamaan														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Pelaksanaan Forum PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan kewilayahan														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Monitoring dan Evaluasi kesesuaian rencana tata ruang wilayah kota cilegon 2010-2030														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pengembangan SPAM dan sanitasi kota cilegon														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Pemutakhiran data infrastruktur permukiman														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.1.3.1.3.1	Program Penelitian Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah									1605543045,28	1688083176,11	1769409987,40	1845534065,76	2212032028,94	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tingkat tata kelola proses/tahapan/mekanisme perencanaan, pengendalian dan evaluasi jangka panjang, menengah dan tahunan yang komprehensif, partisipatif, handal, responsif dan tepat waktu	%		100	100	100	100	100						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase kesesuaian antara muatan perencanaan tingkat kota dengan dokumen perencanaan tingkat propinsi dan tingkat nasional (nusat)	%		80	80	80	80	80						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase jumlah usulan musrenbangkel yang diakomodir dalam RKPD (Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang tercakup dalam dokumen pembangunan daerah)	%		50	50	50	50	50						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase cakupan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah (litbang)	%		80	80	80	80	80						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti (litbang)	%		50	50	50	50	50						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	kegiatan Teknis Lainnya									1605543045,28	1688083176,11	1769409987,40	1845534065,76	2212032028,94	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Pengendalian RKPD														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Pemutakhiran Balance Scorecard														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyusunan Program Kerja Penelitian Daerah														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyusunan Analisis Standar Belanja Non Fisik														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyusunan Pedoman Perencanaan Pembangunan														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	pelaksanaan penelitian dan pengembangan perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	pelaksanaan penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									23753405827,96	23839024306,41	24270992341,82	28218344800,02	35478164555,99	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		100%	100%	100%	100%	100%						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		80	80	80	80	80						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
					2016	2017	2018	2019	2020		2021	2017,00	2018,00	2019,00		
		Tingkat disiplin aparatur	%		90	90	90	90	90						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		85	85	85	85	85						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									23333911190,63	23418017612,53	23842356919,86	27719997556,52	34851605995,02	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Fasilitasi Kepegawalan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan UPT Pajak Wilayah I									104873659,33	105251673,47	107158855,49	124586810,87	156639640,24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan UPT Pajak Wilayah II									104873659,33	105251673,47	107158855,49	124586810,87	156639640,24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan UPT Pajak Wilayah III									104873659,33	105251673,47	107158855,49	124586810,87	156639640,24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan UPT Pajak Wilayah IV									104873659,33	105251673,47	107158855,49	124586810,87	156639640,24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5.1.2.1.2.1	Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah									2406596636,86	2530318515,17	2652221712,41	2766326377,19	3315681169,13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Tingkat keoptimalan penyediaan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	%		100	100	100	100	100						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Kegiatan Teknis Lainnya									2406596636,86	2530318515,17	2652221712,41	2766326377,19	3315681169,13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Kegiatan Penyusunan Data Akuntansi dan Rekonsiliasi Akuntansi Penerimaan														Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Kegiatan Penyusunan Data Akuntansi dan Rekonsiliasi Akuntansi Pengeluaran														Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5.1.2.2.1.1	Program Peningkatan Pajak Daerah									5558590715,64	5844354966,09	6125918552,62	6389469627,41	7658331388,18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Proporsi peningkatan realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah	%		5	5	5	5	5						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
					2016	2017	2018	2019	2020		2021	2017,00	2018,00	2019,00		
		Realisasi pendapatan pajak	%		100	100	100	100	100						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Proporsi wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu	%		80	80	80	80	80						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Kegiatan Teknis Lainnya									5558590715,64	5844354966,09	6125918552,62	6389469627,41	7658331388,18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Kegiatan pendaftaran dan pendataan pajak														Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Kegiatan penetapan dan penagihan pajak														Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Kegiatan penetapan dan penagihan pajak														Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Peningkatan Pajak Daerah UPT Pajak Wilayah I									476645591,57	501149692,91	525293590,01	547892925,77	656697008,59	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Peningkatan Pajak Daerah UPT Pajak Wilayah II									476645591,57	501149692,91	525293590,01	547892925,77	656697008,59	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Peningkatan Pajak Daerah UPT Pajak Wilayah III									476645591,57	501149692,91	525293590,01	547892925,77	656697008,59	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Peningkatan Pajak Daerah UPT Pajak Wilayah IV									476645591,57	501149692,91	525293590,01	547892925,77	656697008,59	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5.1.2.1.4.1	Program Perbendaharaan Keuangan Daerah									2285500057,87	2402996424,19	2518765622,93	2627128700,46	3148840727,13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Persentase proses pelayanan pembiayaan dengan durasi sesuai dengan peraturan perundangan	%		100	100	100	100	100						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Persentase proses pencairan anggaran belanja dengan durasi sesuai dengan peraturan perundangan	%		100	100	100	100	100						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Tingkat pelayanan kas daerah	%	100	100	100	100	100	100						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Kegiatan Teknis Lainnya									2285500057,87	2402996424,19	2518765622,93	2627128700,46	3148840727,13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Kegiatan belanja tidak langsung														Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Kegiatan belanja langsung														Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Kegiatan Pelayanan kas daerah, dana perimbangan dann pendapatan lainnya														Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5.1.2.1.1.1	Program Perencanaan Anggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan									5235315125,20	5504459946,11	5769648404,60	6017871920,00	7212939430,42	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Tingkat Realisasi Belanja APBD	%		95	95	95	95	95						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Realisasi pendapatan daerah terhadap target APBD	%		90	95	100	100	100						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Laju realisasi pendapatan daerah	%		5	5	5	5	5						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan anggaran	%		100	100	100	100	100						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
					2016	2017	2018	2019	2020		2021	2017,00	2018,00	2019,00		
		tingkat ketersediaan dokumen penyusunan cashbudget dan surat penyediaan dana (SPD)	%		100	100	100	100	100						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Kegiatan Teknis Lainnya									5235315125,20	5504459946,11	5769648404,60	6017871920,00	7212939430,42	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Kegiatan Penyusunan Anggaran														Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Kegiatan penyusunan administrasi anggaran														Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Kegiatan Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan														Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5.1.2.1.3.1	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah									7284298623,21	7658780617,41	8027757818,76	8373130383,40	10035920189,29	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
		Proporsi SKPD yang menerapkan tata kelola aset secara baku dengan baik	%		100	100	100	100	100						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
		Tingkat pengelolaan barang aset daerah	%		100	100	100	100	100						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
	Kegiatan Teknis Lainnya									7284298623,21	7658780617,41	8027757818,76	8373130383,40	10035920189,29	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
	Kegiatan perencanaan dan pengamanan asset														Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
	Kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan aset														Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
	Kegiatan Penatausahaan Aset														Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									1462392041,17	1467663191,86	1494257551,49	1737278567,53	2184233530,88	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		100	100	100	100	100						Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		100	90	90	90	90						Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
		Tingkat disiplin aparatur	%		100	95	95	95	95						Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		100	90	90	90	90						Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									1462392041,17	1467663191,86	1494257551,49	1737278567,53	2184233530,88	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
5.1.1.1.2.1	Program Diklat dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara									4918017794,37	5170850524,93	5419966676,78	5653146081,75	6775784001,56	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00		
		Prosentase pelaksanaan Assesment Pejabat struktural (JPT, Administrator, Pengawas)	%		85	85	85	85	85						Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
		Prosentase Pelaksanaan Diklat Bimtek, Workshop, sosialisasi bagi ASN untuk meningkatkan kompetensinya	%		100	100	100	100	100						Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
		Cakupan fasilitasi diklat terhadap kebutuhan permohonan diklat seluruh aparatur maupun SKPD	%		75	75	75	75	75						Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
		Persentase pejabat struktural yang telah menialani diklat kepemimpinan	%		85	85	85	85	85						Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
		Persentase Diklat Prajabatan bagi PNS	%		100	100	100	100	100						Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
		Rata-rata kinerja pencapaian SKP dan penilaian kompetensi aparatur PNS	%		80	85	85	85	85						Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	kegiatan Teknis Lainnya									4918017794,37	5170850524,93	5419966676,78	5653146081,75	6775784001,56	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Pengiriman Diklat dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Pengiriman Diklat Penjenjangan jabatan Fungsional Tertentu														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Pengiriman Aparatur dalam seminar dan Magang														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Menyelenggarakan Diklat Pengembangan Aparatur Sipil Negara														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Tes Kompetensi Jabatan														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
5.1.1.1.4.1	Program Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara									1183887235,37	1258756147,09	1319399262,95	1376162847,19	1649450070,58	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
		Proporsi jumlah jabatan struktural yang sesuai dengan kompetensi aparatur	%		80	80	80	80	80						Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
		Tingkat penempatan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai formasi dan kompetensi	%		80	80	80	80	80						Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	%		100	100	100	100	100						Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Kegiatan Teknis Lainnya									1197208292,97	1258756147,09	1319399262,95	1376162847,19	1649450070,58	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Peningkatan Administrasi Kepegawaian (KP PNS)														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Penyerahan SK Kenaikan Pangkat PNS														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Pembinaan Jabatan fungsional Tertentu														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan jabatan fungsional														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian lizah														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Peningkatan Karir Aparatur Berdasarkan Kompetensi (BAPERJAKAT)														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
5.1.1.1.3.1	Program Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan dan Administrasi Umum (P3KA)									1959797970,09	2060550161,90	2159821321,36	2252741791,28	2700105670,06	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
		Prosentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS	%		85	85	85	85	85						Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	%		100	100	100	100	100						Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
		Prosentase ketersediaan ASN Pemerintah Kota Cilegon	%		83	85	85	85	85						Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
		Cakupan pemberian bantuan pendidikan bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dan bantuan pendidikan	%		100	100	100	100	100						Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
		Prosentase SKPD yang Online Data Kepegawaian	%		100	100	100	100	100						Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
					2016	2017	2018	2019	2020		2021	2017,00	2018,00	2019,00		
		Tingkat Kelengkapan dalam Penyajian Data dan informasi Kepegawaian	%		100	100	100	100	100							Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	kegiatan Teknis Lainnya									1959797970,09	2060550161,90	2159821321,36	2252741791,28	2700105670,06	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Pengolahan Administrasi Pemberhentian Pegawai (pensiun)														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Pengelolaan identitas Pegawai														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Pengambilan Sumpah dan Janji PNS														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Persiapan dan Pelaksanaan CPNSD Kota Cilegon														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Sosialisasi Penyusunan Bezetting dan formasi														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan Kepegawaian														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Penegakan Disiplin Aparatur														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Pengelolaan LHKPN														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Bantuan Tugas Belajar dan Bantuan Pendidikan S1 S2 dan S3														Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan dan Administrasi Umum (P3KA) UPT Data dan Informasi Kepegawaian									110381084,36	116055718,36	121646936,63	126880467,02	152077201,99	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									630912245,26	633186350,57	644659817,79	749505119,57	942332590,94	Sekretariat Korpri	
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		100	100	100	100	100							Sekretariat Korpri
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		100	100	100	100	100							Sekretariat Korpri
		Tingkat disiplin aparatur	%		100	100	100	100	100							Sekretariat Korpri
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		100	100	100	100	100							Sekretariat Korpri
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									630912245,26	633186350,57	644659817,79	749505119,57	942332590,94	Sekretariat Korpri	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran															Sekretariat Korpri
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur															Sekretariat Korpri
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur															Sekretariat Korpri
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur															Sekretariat Korpri
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan															Sekretariat Korpri
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja															Sekretariat Korpri
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota															Sekretariat Korpri
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota															Sekretariat Korpri
5.1.1.1.4.2	Program Penunjang Kemandirian dan Profesionalitas ASN									1024125735,36	1076775505,44	1128651336,90	1177208507,61	1410986105,26	Sekretariat Korpri	
		Prosentase purna ASN yang telah mendapatkan pembekalan	%		100	100	100	100	100							Sekretariat Korpri
		Prosentase ASN yang memahami kode etik KORPRI	%		100	100	100	100	100							Sekretariat Korpri
		Prosentase kasus terkait ASN yang difasilitasi	%		100	100	100	100	100							Sekretariat Korpri
	Kegiatan Teknis Lainnya									1024125735,36	1076775505,44	1128651336,90	1177208507,61	1410986105,26	Sekretariat Korpri	
	Penyelenggaraan Penunjang Kemandirian dan Profesionalitas ASN															Sekretariat Korpri
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									25352749353,09	25444132619,96	25905185548,96	30118317686,96	37866949270,78	Bagian Umum Sekretariat Daerah	
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		100	85	85	85	85							Bagian Umum Sekretariat Daerah

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
		Tingkat disiplin aparatur	%		100	95	95	95	95						Bagian Umum Sekretariat Daerah
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									25352749353,09	25444132619,96	25905185548,96	30118317686,96	37866949270,78	Bagian Umum Sekretariat Daerah
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Bagian Umum Sekretariat Daerah
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Bagian Umum Sekretariat Daerah
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Bagian Umum Sekretariat Daerah
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Bagian Umum Sekretariat Daerah
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Bagian Umum Sekretariat Daerah
5.1.2.1.5.2	Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan									1543474562,99	1511807490,47	1532882702,85	1774721919,75	2231310048,70	Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Daerah
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		85	85	85	85	85						Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Daerah
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		85	85	85	85	85						Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Daerah
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									1543474562,99	1511807490,47	1532882702,85	1774721919,75	2231310048,70	Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Daerah
	Penyediaan Pakaian Olahraga														Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Daerah
	Penyediaan jasa pegawai non PNS														Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Daerah
	Penatausahaan Keuangan SKPD														Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD														Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Daerah
	Penyusunan Laporan Kinerja														Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Daerah
	Penyusunan Laporan Keuangan														Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Daerah
	Dokumentasi Dan Penataan Arsip Keuangan Sekretariat DPRD														Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Daerah
5.1.1.2.3.1	Program Peningkatan Kualitas Mental dan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan									4060779608,70	4176278151,19	4475235975,38	4667770897,47	5594726708,39	Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan Sekretariat Daerah
		Tingkat kondusifitas kehidupan antar umat beragama	%		100	100	100	100	100						Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan Sekretariat Daerah
		Proporsi cakupan layanan usulan hibah dan bansos bidang keagamaan	%		100	100	100	100	100						Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan Sekretariat Daerah
	Kegiatan Teknis Lainnya									4060779608,70	4176278151,19	4475235975,38	4667770897,47	5594726708,39	Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan Sekretariat Daerah
	Penyusunan rumusan kebijakan Kependudukan Capil, Pemberdayaan Perempuan PA KB														Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan Sekretariat Daerah
	Koordinasi Urusan Kependudukan Capil, Pemberdayaan Perempuan PA KB														Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan Sekretariat Daerah
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Urusan Kependudukan Capil, Pemberdayaan Perempuan PA KB														Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan Sekretariat Daerah

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Penyusunan rumusan kebijakan Pemuda Olah Raga, Komunikasi Informasi, Sandi dan Statistik														Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan Sekretariat Daerah
	Koordinasi Urusan Pemuda Olah Raga, Komunikasi Informasi, Sandi dan Statistik														Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan Sekretariat Daerah
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Urusan Pemuda Olah Raga, Komunikasi Informasi, Sandi dan Statistik														Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan Sekretariat Daerah
	Penyusunan rumusan kebijakan Pemerintahan umum, Trantibum dan Linmas														Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan Sekretariat Daerah
	Koordinasi Urusan Pemerintahan umum, Trantibum dan Linmas														Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan Sekretariat Daerah
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Urusan Pemerintahan umum, Trantibum dan Linmas														Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan Sekretariat Daerah
	Pendukung Penyelenggaraan Ibadah Haji														Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan Sekretariat Daerah
	Pembinaan lembaga Keagamaan dan Sosial keagamaan														Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan Sekretariat Daerah
	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Islam														Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan Sekretariat Daerah
	Verifikasi dan Monitoring bantuan Hibah Keagamaan														Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan Sekretariat Daerah
	Penyelenggaraan MTQ														Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan Sekretariat Daerah
	Pembinaan Khotib dan Imam														Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan Sekretariat Daerah
	Pembinaan Fardu Kifayah														Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan Sekretariat Daerah
	Fasilitasi Lintas Sektoral														Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan Sekretariat Daerah
5.1.1.2.2.1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan									3110505642,33	3270415115,59	3427973959,08	3575453265,82	4285489652,40	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
		Nilai Kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	kriteria		tinggi (2,5 - 3)	tinggi (2,5 - 3)	tinggi (2,5 - 3)	tinggi (2,5 - 3)	tinggi (2,5 - 3)						Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
		Rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan PATEN di seluruh kecamatan	poin		75	75	75	75	75						Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
	Kegiatan Teknis Lainnya									3110505642,33	3270415115,59	3427973959,08	3575453265,82	4285489652,40	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah														Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
	Fasilitasi Administrasi KDH/WKDH dan DPRD														Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
	Dialog/Audiensi dengan Perangkat Daerah, Tokoh Masyarakat Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan														Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
	APEKSI														Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
	Penyusunan LPPD														Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan														Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan														Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
	Pembinaan Kewilayahan Kota Cilegon														Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00		
	Fasilitasi Pemekaran Wilayah														Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	
	Penerimaan Kunjungan Kerja/Pejabat/Departemen/Pemerintah/Tamu														Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah														Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	
	Koordinasi Urusan Pemerintahan umum, Trantibum dan Linmas														Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	
	Penyusunan rumusan kebijakan Pemerintahan umum, Trantibum dan Linmas														Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	
	Koordinasi Urusan Sumberdaya aparatur dan pengawasan														Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	
	Penyusunan rumusan kebijakan sumberdaya aparatur dan pengawasan														Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	
	Lomba Kelurahan														Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	
	Bimbingan Teknis Aparatur Kecamatan dan Kelurahan														Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	
	Pembakuan dan Pemutakhiran Rupa Bumi di Kota Ciegon/Toponomi														Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	
	Penataan batas daerah/wilayah														Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	
	Desk Pemilu/Pilkada														Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	
	Perumusan dan Pelaksanaan Monitoring dan Evluasi Perwal Rewads dan Punishment														Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	
	Penyusunan Sistem Informasi Analisis dan Pengembangan Kinerja Pegawai														Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	
	Pembinaan/Optimalisasi Jafung/PPNS/P2OPD														Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	
	Fasilitasi Lintas Sektoral														Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	
5.1.1.2.1.1	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah									1096222645,81	1152578880,46	1208106692,38	1260082214,83	1510317403,52	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	
		Nilai mutu pelayanan kepuasan masyarakat tingkat kota	A/B/C/D		75	75	75	75	75						Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	
		Proporsi SKPD yang memiliki SOP (standard operating procedure) yang komprehensif	%		50	30	40	50	60						Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	
		Nilai Integritas Organisasi	poin		38	38	38	38	38						Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	
		Persentase ketersediaan pengisian jabatan terhadap syarat dan kompetensi jabatan	nama jabatan		100	200	200	200	200						Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	
		Nilai rata-rata Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	Unit		600	650	700	750	820						Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	nilai		B	B	BB	BB	A						Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	point		C	C	B	B	BB						Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	
	Kegiatan Teknis Lainnya									1096222645,81	1152578880,46	1208106692,38	1260082214,83	1510317403,52	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	
	Analisis Jabatan														Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	
	Analisis Beban Kerja														Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	
	Evaluasi Jabatan														Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00		
	Penilaian Kapasitas Perangkat Daerah														Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	
	Survey Integritas Organisasi														Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	
	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan														Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	
	Evaluasi Perangkat Daerah														Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	
	Penyusunan Kelengkapan Regulasi Kelembagaan Urusan Organisasi														Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan														Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	
	Monitoring dan Evaluasi SOP														Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	
	Kompetisi Pelayanan Publik														Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	
	Survey Kepuasan Masyarakat Kota Cilegon														Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	
	Inovasi Pelayanan Publik														Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	
	Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik														Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	
	Penyediaan Produk Ketatalaksanaan														Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	
	Penyusunan Laporan Kinerja dan SPM Kota Cilegon														Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	
	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah														Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	
	Pengembangan Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah														Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	
	Optimalisasi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi														Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	
	Pengembangan Budaya Kerja Organisasi														Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	
5.1.4.1.1.1	Program Penataan dan Pengembangan Produk Hukum Daerah									1338621514,00	1407439348,08	1475245576,99	1538714027,33	1844281704,13	Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah	
		Proporsi jumlah Raperda yang disahkan menjadi perda	%		70	70	70	70	70						Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah	
		Proporsi jumlah perwal yang ditetapkan terhadap raperwal (usulan perwal)	%		90	90	90	90	90						Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah	
	Kegiatan Teknis Lainnya									1338621514,00	1407439348,08	1475245576,99	1538714027,33	1844281704,13	Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah	
	Pembinaan dan Penyuluhan Hukum														Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah	
	Pemberian Bantuan Hukum														Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah	
	Kodifikasi dan Penyebarluasan Produk Hukum														Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah	
	Penataan Administrasi Produk Hukum Daerah														Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah	
	Sinkronisasi Data dan Informasi Produk Hukum Daerah														Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah	

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Pembinaan dan Penyuluhan Rencana Aksi HAM														Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah
5.1.1.2.4.1	Program Peningkatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat									451558981,48	750000000,00	789915172,94	823899136,50	983960305,88	Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
		Tingkat efektifitas fasilitasi terhadap SKPD lingkup bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip serta perpustakaan daerah	%		70	70	70	70	70						Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
		Tingkat efektifitas pelayanan terhadap SKPD lingkup bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip serta perpustakaan daerah	%		90	90	90	90	90						Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
		Tingkat efektifitas koordinasi SKPD di bawah koordinasi bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip serta perpustakaan daerah	%		90	90	90	90	90						Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	Kegiatan Teknis Lainnya									451558981,48	750000000,00	789915172,94	823899136,50	983960305,88	Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	Penyusunan rumusan kebijakan sosial, pemberdayaan masyarakat														Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	Koordinasi Urusan sosial, pemberdayaan masyarakat														Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	Monitoring dan Evaluasi Urusan sosial, pemberdayaan masyarakat														Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	Penyusunan rumusan kebijakankesehatan, RSUD														Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	Koordinasi Urusan kesehatan, RSUD														Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	Monitoring dan Evaluasi Urusan kesehatan, RSUD														Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	Penyusunan rumusan kebijakan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip														Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	Koordinasi Urusan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip														Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	Monitoring dan Evaluasi Urusan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip														Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	Fasilitasi Lintas Sektoral														Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
5.1.1.2.5.1	Program Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam									451558981,48	750000000,00	789915172,94	823899136,50	983960305,88	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
		Tingkat efektifitas fasilitasi terhadap SKPD lingkup bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi & UMKM, industri, perdagangan, perhubungan serta badan usaha milik daerah (BUMD)	%		70	100	100	100	70						Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
		Tingkat efektifitas pelayanan terhadap SKPD lingkup bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi & UMKM, industri, perdagangan, perhubungan serta badan usaha milik daerah (BUMD)	%		70	100	100	100	100						Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00		
		Tingkat efektifitas koordinasi SKPD di bawah koordinasi bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi & UMKM, industri, perdagangan, perhubungan serta badan usaha milik daerah (BUMD)	%		90	100	100	100	100						Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	
	Kegiatan Teknis Lainnya									451558981,48	750000000,00	789915172,94	823899136,50	983960305,88	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	
	Penyusunan rumusan kebijakan PM, PTSP, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi														Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	
	Koordinasi Urusan PM, PTSP, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi														Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	
	Monitoring dan evaluasi Urusan PM, PTSP, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi														Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	
	Pembinaan Urusan PM, PTSP, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi														Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	
	Penyusunan rumusan kebijakan Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan														Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	
	Koordinasi Urusan Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan														Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	
	Monitoring dan Evaluasi urusan Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan														Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	
	Pembinaan Urusan Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan														Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	
	Penyusunan rumusan kebijakan Perhubungan dan BUMD														Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	
	Koordinasi Urusan Perhubungan dan BUMD														Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	
	Monitoring dan Evaluasi Urusan Perhubungan dan BUMD														Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	
	Pembinaan Urusan Perhubungan dan BUMD														Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	
	Fasilitasi lintas sektoral														Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	
5.1.1.2.6.1	Program Peningkatan Infrastruktur dan Kewilayahan	Peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang perencanaan, litbang, keuangan, pangan, pertanian, pekerjaan umum, tata ruang, pertanahan dan permukiman								578773181,21	608527608,69	637844653,43	665286194,24	797402983,43	Bagian Pembangunan dan Sarpraswil Sekretariat Daerah	
		Tingkat efektifitas fasilitasi terhadap SKPD lingkup bidang perencanaan, litbang, keuangan, pangan, pertanian, pekerjaan umum, tata ruang, pertanahan dan permukiman	%		70	90	90	90	90						Bagian Pembangunan dan Sarpraswil Sekretariat Daerah	
		Tingkat efektifitas pelayanan terhadap SKPD lingkup bidang perencanaan, litbang, keuangan, pangan, pertanian, pekerjaan umum, tata ruang, pertanahan dan permukiman	%		90	90	90	90	90						Bagian Pembangunan dan Sarpraswil Sekretariat Daerah	
		Tingkat efektifitas koordinasi SKPD di bawah koordinasi bidang perencanaan, litbang, keuangan, pangan, pertanian, pekerjaan umum, tata ruang, pertanahan dan permukiman	%		90	90	90	90	90						Bagian Pembangunan dan Sarpraswil Sekretariat Daerah	
	Kegiatan Teknis Lainnya									578773181,21	608527608,69	637844653,43	665286194,24	797402983,43	Bagian Pembangunan dan Sarpraswil Sekretariat Daerah	
	Penyusunan rumusan kebijakan Pangan, Pertanian dan Lingkungan Hidup														Bagian Pembangunan dan Sarpraswil Sekretariat Daerah	
	Koordinasi Urusan Pangan, Pertanian dan Lingkungan Hidup														Bagian Pembangunan dan Sarpraswil Sekretariat Daerah	
	Monitoring dan Evaluasi Urusan Pangan, Pertanian dan Lingkungan Hidup														Bagian Pembangunan dan Sarpraswil Sekretariat Daerah	
	Penyusunan rumusan kebijakan PU, Tata ruang, Pertanahan dan Perkim														Bagian Pembangunan dan Sarpraswil Sekretariat Daerah	

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Koordinasi Urusan PU, Tata ruang, Pertanahan dan Perkim														Bagian Pembangunan dan Sarpraswil Sekretariat Daerah
	Monitoring dan Evaluasi Urusan PU, Tata ruang, Pertanahan dan Perkim														Bagian Pembangunan dan Sarpraswil Sekretariat Daerah
	Prasasti Peresmian Kegiatan Pembangunan Kota Cilegon														Bagian Pembangunan dan Sarpraswil Sekretariat Daerah
	Penyusunan rumusan kebijakan Perencanaan, Litbang dan Keuangan														Bagian Pembangunan dan Sarpraswil Sekretariat Daerah
	Koordinasi Urusan Perencanaan, Litbang dan Keuangan														Bagian Pembangunan dan Sarpraswil Sekretariat Daerah
	Monitoring dan Evaluasi Urusan Perencanaan, Litbang dan Keuangan														Bagian Pembangunan dan Sarpraswil Sekretariat Daerah
	Fasilitasi Lintas Sektoral														Bagian Pembangunan dan Sarpraswil Sekretariat Daerah
5.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									23958062327,13	24044418484,13	24480108304,39	28461470678,51	35783840171,84	Sekretariat DPRD
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		100	100	100	100	100						Sekretariat DPRD
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		100	100	100	100	100						Sekretariat DPRD
		Tingkat disiplin aparatur	%		100	100	100	100	100						Sekretariat DPRD
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		100	100	100	100	100						Sekretariat DPRD
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									23958062327,13	24044418484,13	24480108304,39	28461470678,51	35783840171,84	Sekretariat DPRD
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Sekretariat DPRD
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Sekretariat DPRD
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Sekretariat DPRD
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Sekretariat DPRD
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Sekretariat DPRD
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Sekretariat DPRD
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Sekretariat DPRD
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Sekretariat DPRD
5.1.2.1.5.2	Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan									485396302,90	510350273,74	534937427,38	557951663,16	668753274,41	Sekretariat DPRD
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		85	85	85	85	85						Sekretariat DPRD
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		85	85	85	85	85						Sekretariat DPRD
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									485396302,90	510350273,74	534937427,38	557951663,16	668753274,41	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Pakaian Olahraga														Sekretariat DPRD
	Penyediaan jasa pegawai non PNS														Sekretariat DPRD
	Penatausahaan Keuangan SKPD														Sekretariat DPRD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD														Sekretariat DPRD
	Penyusunan Laporan Kinerja														Sekretariat DPRD
	Penyusunan Laporan Keuangan														Sekretariat DPRD

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Dokumentasi Dan Penataan Arsip Keuangan Sekretariat DPRD														Sekretariat DPRD
5.1.4.1.2.1	Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah									16274726560,03	17111401766,87	17787917185,80	18557365717,86	22256524007,01	Sekretariat DPRD
		Proporsi hasil reses yang ditindaklanjuti	%		85	100	100	100	100						Sekretariat DPRD
		Proporsi jumlah usulan raperda yang dibahas dan disahkan dalam satu tahun anggaran	%		90	100	100	100	100						Sekretariat DPRD
	Kegiatan Teknis Lainnya									16274726560,03	17111401766,87	17787917185,80	18557365717,86	22256524007,01	Sekretariat DPRD
	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD														Sekretariat DPRD
	Kajian Produk Legislatif														Sekretariat DPRD
	Dokumentasi produk legislasi														Sekretariat DPRD
	Penyelenggaraan rapat pembahasan legislatif														Sekretariat DPRD
	Penyelenggaraan rapat pembahasan pengawasan														Sekretariat DPRD
	Penyelenggaraan Rapat Pembahasan Anggaran														Sekretariat DPRD
	Fasilitasi Study Komparasi BAPERDAKOT														Sekretariat DPRD
	Fasilitasi Study Komparasi BADAN ANGGARAN														Sekretariat DPRD
	Fasilitasi Study Komparasi BADAN KEHORMATAN														Sekretariat DPRD
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									1420068144,42	1425186739,82	1451011417,38	1686999027,80	2121018420,40	Inspektorat
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		100	100	100	100	100						Inspektorat
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		100	100	100	100	100						Inspektorat
		Tingkat disiplin aparatur	%		100	100	100	100	100						Inspektorat
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		100	100	100	100	100						Inspektorat
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									1420068144,42	1425186739,82	1451011417,38	1686999027,80	2121018420,40	Inspektorat
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Inspektorat
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Inspektorat
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Inspektorat
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Inspektorat
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Inspektorat
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Inspektorat
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Inspektorat
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Inspektorat
5.1.1.2.7.1	Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah									4042553885,43	4139823027,12	4235569781,43	4417793713,84	5125306439,23	Inspektorat
		Tingkat penurunan kasus temuan administratif	%		> 5 %	> 5 %	> 5 %	> 5 %	> 5 %						Inspektorat
		Proporsi SKPD yang mendapat temuan berindikasi penyimpangan material/ administrasi	%		<30	<30	<30	<30	<30						Inspektorat
		Rasio temuan BPK/RI yang ditindaklanjuti	%		100	100	100	100	100						Inspektorat
		Proporsi SKPD yang telah menerapkan SPIP pada tingkat maturitas level berkembang atau lebih baik	%		50	50	50	50	50						Inspektorat

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
					2016	2017	2018	2019	2020		2021	2017,00	2018,00	2019,00		
		Rata-rata nilai laporan akuntabilitas kinerja SKPD	poin		> C	> C	> C	> C	> C							Inspektorat
	Kegiatan Teknis Lainnya									4042553885,43	4139823027,12	4235569781,43	4417793713,84	5125306439,23		Inspektorat
	Rapat Koordinasi Pengawasan															Inspektorat
	Peningkatan Kualitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah															Inspektorat
	Bintek Sistem Pengendalian Intern															Inspektorat
	Penyusunan PKPT Inspektorat															Inspektorat
	Penyusunan PKP dan LHP Reguler															Inspektorat
	Pengawasan Pembangunan Daerah															Inspektorat
	Pendampingan PHO Kegiatan Fisik Kota Cilegon															Inspektorat
	Pemeriksaan Kasus dan Kas Barang															Inspektorat
	Retensi Arsip															Inspektorat
	Review dokumen Perencanaan dan Penganggaran															Inspektorat
	Review dokumen evluasi kinerja															Inspektorat
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									3650234297,51	3663391463,64	3729772872,25	4336370571,62	5452001873,46		Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		100	100	100	100	100							Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		100	100	100	100	100							Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		Tingkat disiplin aparatur	%		100	100	100	100	100							Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		100	100	100	100	100							Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									3650234297,51	3663391463,64	3729772872,25	4336370571,62	5452001873,46		Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	Pelayanan Administrasi Perkantoran															Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur															Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur															Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur															Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan															Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja															Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tinekak kota															Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota															Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5.1.2.3.1.1	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa									451207768,94	502405707,18	529143854,76	551908837,75	659129697,74		Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		Tingkat Pelaksanaan Operasional LPSE dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	%	20	40	60	80	100	80							Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		Tingkat Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	%	0,94	1,89	2,83	3,77	4,71	4,71							Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	Kegiatan Teknis Lainnya									451207768,94	502405707,18	529143854,76	551908837,75	659129697,74		Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	Sosialisasi Pengadaan Layanan Barang dan Jasa															Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	Bimbingan Teknis/Workshop Sistem Penyediaan Layanan Penagadaan Barang dan Jasa															Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	Pembinaan Jasa ULP															Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5.1.2.3.2.1	Program Layanan Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa									225779490,74	251202853,59	264571927,38	275954418,88	329564848,87		Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadaan barang dan jasa	%	20	40	60	80	100	80						Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	Kegiatan Teknis Lainnya									225779490,74	251202853,59	264571927,38	275954418,88	329564848,87	Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	Legal Consulting Pengaduan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Cilegon														Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	Penyusunan Laporan Pelaksanaan e-Procurement Pengadaan Barang dan Jasa														Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									757787174,44	760518596,85	774299350,62	900228789,43	1131833399,72	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		100	100	100	100	100						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		100	100	100	100	100						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Tingkat disiplin aparatur	%		100	100	100	100	100						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		100	100	100	100	100						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya									757787174,44	760518596,85	774299350,62	900228789,43	1131833399,72	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.3.1.2.1.1	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan									490128390,16	515325635,14	540152486,85	563391086,45	675272893,18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Tingkat Pemahaman terhadap Wawasan Kebangsaan, Ideologi Negara, Toleransi Antar Umat Beragama dan Antar Etnis di Kota Cilegon	%		50	55	60	65	70						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Indeks demokrasi Kota Cilegon	poin		73	76	80	85	90						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Cakupan pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan	%		50	55	70	75	85						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Cakupan penerapan bela negara	%		80	80	80	80	80						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Kegiatan Teknis Lainnya									490128390,16	515325635,14	540152486,85	563391086,45	675272893,18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pembinaan Peningkatan Kesadaran Bela Negara														Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan														Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.3.1.2.1.2	Program Peningkatan LSM dan ORMAS									2721147405,35	2861040174,66	2998876554,80	3127895106,45	3749052530,10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Tingkat Kondusifitas Kota melalui KOMINDA	%		80	80	80	80	80						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Proporsi lembaga di bidang kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan	%		100	100	100	100	100						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Cakupan pendataan dan pembinaan ormas dan LSM	%		100	100	100	100	100						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Kegiatan Teknis Lainnya									2721147405,35	2861040174,66	2998876554,80	3127895106,45	3749052530,10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Sosialisasi UU dan Permendagri Tentang ORMAS														Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Koordinasi Pengawasan LSM dan Ormas														Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pendataan LSM dan Ormas														Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pembinaan LSM dan Ormas														Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di Kota Cilegon														Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Sosialisasi dan Pelatihan Dasar Konflik Sosial														Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									2848886358,00	3168063014,01	3276806660,91	3581311042,40	4066608995,62	Kecamatan Cilegon
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		80	82	84	86	90						Kecamatan Cilegon
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		90	85	87	86	90						Kecamatan Cilegon
		Tingkat disiplin aparatur	%		90	92	94	96	98						Kecamatan Cilegon
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		85	85	85	85	85						Kecamatan Cilegon
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Cilegon									1298860270,84	1303541975,90	1327162425,26	1543007652,68	1939981944,40	Kecamatan Cilegon
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Kecamatan Cilegon
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Kecamatan Cilegon
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Kecamatan Cilegon
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Kecamatan Cilegon
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Kecamatan Cilegon
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Kecamatan Cilegon
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Kecamatan Cilegon
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Kecamatan Cilegon
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Cilegon Kelurahan Bagendung									292090424,90	351354565,43	367395373,49	384102505,19	400746415,92	Kecamatan Cilegon
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Cilegon Kelurahan Ciwaduk									286203129,05	344272757,54	359990251,39	376360638,65	392669079,20	Kecamatan Cilegon
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Cilegon Kelurahan Ciwedus									322268245,42	387655361,73	405353453,23	423786710,74	442150215,50	Kecamatan Cilegon
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Cilegon Kelurahan Ketileng									340965641,60	410146395,14	428871296,56	448374016,93	467802937,62	Kecamatan Cilegon
	Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Cilegon Kelurahan Bendungan									308498646,18	371091958,26	388033860,99	405679518,20	423258402,99	Kecamatan Cilegon
2.1.3.1.2.1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan									7708960949,60	9151085995,19	9577994345,87	10010434927,64	10644139974,57	Kecamatan Cilegon
		Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWkel)	%		90	91	92	93	95						Kecamatan Cilegon
		Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%		90	91	92	93	95						Kecamatan Cilegon
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan									1103810843,63	1205773697,22	1269945251,43	1324581210,60	1581911274,58	Kecamatan Cilegon
	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan														Kecamatan Cilegon
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan														Kecamatan Cilegon
	Peningkatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum tingkat kecamatan														Kecamatan Cilegon
	Pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan umum tingkat kecamatan														Kecamatan Cilegon
	Peningkatan koordinasi kegiatan sosial tingkat kecamatan														Kecamatan Cilegon

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Peningkatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan														Kecamatan Cilegon
	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan														Kecamatan Cilegon
	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)														Kecamatan Cilegon
	Peningkatan pelayanan pemerintahan kelurahan														Kecamatan Cilegon
	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum kelurahan														Kecamatan Cilegon
	Peningkatan layanan kesejahteraan sosial kelurahan														Kecamatan Cilegon
	Pemberdayaan masyarakat kelurahan														Kecamatan Cilegon
	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lokal (swakelola oleh kelompok masyarakat)														Kecamatan Cilegon
	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lokal														Kecamatan Cilegon
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan di Kelurahan Bagendung									1389434397,22	1671345847,76	1747649788,48	1827123340,13	1906296158,18	Kecamatan Cilegon
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan di Kelurahan Ciwaduk									1352577595,52	1627010928,03	1701290793,90	1778656192,09	1855728834,08	Kecamatan Cilegon
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan di Kelurahan Ciwedus									1341835551,01	1614089359,70	1687779301,84	1764530271,28	1840990809,58	Kecamatan Cilegon
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan di Kelurahan Ketileng									1186875487,97	1427688433,94	1492868392,83	1560755880,41	1628386476,90	Kecamatan Cilegon
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan di Kelurahan Bendungan									1334427074,25	1605177728,54	1678460817,38	1754788033,13	1830826421,25	Kecamatan Cilegon
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									3474378423,09	1718549324,38	1749689792,46	2034253447,96	2557612045,88	Kecamatan Ciwandan
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		80	82	84	86	90						Kecamatan Ciwandan
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		80	82	84	86	88						Kecamatan Ciwandan
		Tingkat disiplin aparatur	%		86	87	88	89	90						Kecamatan Ciwandan
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		81	82	83	84	85						Kecamatan Ciwandan
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Ciwandan									1712377109,60	1718549324,38	1749689792,46	2034253447,96	2557612045,88	Kecamatan Ciwandan
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Kecamatan Ciwandan
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Kecamatan Ciwandan
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Kecamatan Ciwandan
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Kecamatan Ciwandan
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Kecamatan Ciwandan
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Kecamatan Ciwandan
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Kecamatan Ciwandan
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Kecamatan Ciwandan
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Tegal Ratu									323134953,30	388697921,64	406443610,37	424926442,27	443339333,82	Kecamatan Ciwandan

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017,00	2018,00	2019,00	2020,00		
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Gunung Sugih									270926168,85	325896154,77	340774679,70	356271247,89	371709175,95	Kecamatan Ciwandan	
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Randakari									263067556,79	316443057,41	330890008,85	345937076,27	360927204,52	Kecamatan Ciwandan	
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Kepuh									312639693,48	376073209,79	393242527,52	411125046,39	428939896,53	Kecamatan Ciwandan	
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Kubangsari									301492922,06	362664796,85	379221964,36	396466904,72	413646588,99	Kecamatan Ciwandan	
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Banjarnegara									290740019,01	349730166,84	365696814,29	382326704,82	398893666,65	Kecamatan Ciwandan	
2.1.3.1.2.1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan									10553995942,13	12576734768,89	13159911815,54	13755281598,61	14548485329,95	Kecamatan Ciwandan	
		Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWkel)	%		90	91	92	93	95						Kecamatan Ciwandan	
		Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan			90	91	92	93	95						Kecamatan Ciwandan	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan									1087110687,30	1189051123,26	1252332698,22	1306210924,94	1559972142,59	Kecamatan Ciwandan	
	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan														Kecamatan Ciwandan	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan														Kecamatan Ciwandan	
	Peningkatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum tingkat kecamatan														Kecamatan Ciwandan	
	Pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan umum tingkat kecamatan														Kecamatan Ciwandan	
	Peningkatan koordinasi kegiatan sosial tingkat kecamatan														Kecamatan Ciwandan	
	Peningkatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan														Kecamatan Ciwandan	
	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan														Kecamatan Ciwandan	
	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)														Kecamatan Ciwandan	
	Peningkatan pelayanan pemerintahan kelurahan														Kecamatan Ciwandan	
	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum kelurahan														Kecamatan Ciwandan	
	Peningkatan layanan kesejahteraan sosial kelurahan														Kecamatan Ciwandan	
	Pemberdayaan masyarakat kelurahan														Kecamatan Ciwandan	
	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lokal (swakelola oleh kelompok masyarakat)														Kecamatan Ciwandan	
	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lokal														Kecamatan Ciwandan	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Tegal Ratu									1535788584,12	1847394794,77	1931736107,56	2019580897,92	2107093277,34	Kecamatan Ciwandan	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Gunungsugih									1551041852,99	1865742899,33	1950921879,96	2039639134,30	2128020676,22	Kecamatan Ciwandan	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Bandakari									1503150813,69	1808134933,21	1890683868,82	1976661827,95	2062314440,35	Kecamatan Ciwandan	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Kepuh									1784060904,45	2146040713,24	2244016463,49	2346062056,08	2447721500,86	Kecamatan Ciwandan	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Kubangsari									1432878376,18	1723604460,33	1802294225,67	1884252707,38	1965901052,35	Kecamatan Ciwandan	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Banjarnegara									1659964723,40	1996765844,75	2087926571,82	2182874050,04	2277462240,23	Kecamatan Ciwandan	
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									3282144735,89	3663846803,03	3791705774,95	4134871490,06	4676524779,58	Kecamatan Cibeber	
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		80	82	84	86	90						Kecamatan Cibeber	

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TRANSISI	TARGET					TRANSISI
					2016	2017	2018	2019	2020		2021	2017,00	2018,00	2019,00		
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		80	82	84	86	90						Kecamatan Cibeber	
		Tingkat disiplin aparatur	%		80	82	84	86	90						Kecamatan Cibeber	
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		85	85	85	85	85						Kecamatan Cibeber	
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									1426217164,76	1431357924,13	1457294424,82	1694303882,42	2130202617,28	Kecamatan Cibeber	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Kecamatan Cibeber	
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Kecamatan Cibeber	
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Kecamatan Cibeber	
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Kecamatan Cibeber	
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Kecamatan Cibeber	
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Kecamatan Cibeber	
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Kecamatan Cibeber	
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Kecamatan Cibeber	
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Kedaleman									291177321,51	350256196,50	366246859,41	382901762,98	399493643,20	Kecamatan Cibeber	
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Kalitimbang									309427543,80	372209326,00	389202241,25	406901030,01	424532845,28	Kecamatan Cibeber	
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Karangasem									284037346,50	341667545,18	357266100,17	373512607,94	389697637,76	Kecamatan Cibeber	
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Cikeral									253830898,96	305332313,54	319272012,96	333790757,50	348254562,06	Kecamatan Cibeber	
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Bulakan									328006483,32	394557868,31	412571088,16	431332564,23	450023045,53	Kecamatan Cibeber	
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Cibeber									389447977,04	468465629,36	489853048,16	512128884,99	534320428,46	Kecamatan Cibeber	
2.1.3.1.2.1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan									10039315055,38	11922568918,06	12477198343,28	13041072211,65	13832207858,58	Kecamatan Cibeber	
		Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%		90	91	92	93	95						Kecamatan Cibeber	
		Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%		90	91	92	93	95						Kecamatan Cibeber	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan									1261048949,17	1363222872,99	1435773908,64	1497544197,22	1788476260,12	Kecamatan Cibeber	
	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan														Kecamatan Cibeber	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan														Kecamatan Cibeber	
	Peningkatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum tingkat kecamatan														Kecamatan Cibeber	
	Pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan umum tingkat kecamatan														Kecamatan Cibeber	
	Peningkatan koordinasi kegiatan sosial tingkat kecamatan														Kecamatan Cibeber	
	Peningkatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan														Kecamatan Cibeber	
	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan														Kecamatan Cibeber	
	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)														Kecamatan Cibeber	
	Peningkatan pelayanan pemerintahan kelurahan														Kecamatan Cibeber	
	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum kelurahan														Kecamatan Cibeber	

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Peningkatan layanan kesejahteraan sosial kelurahan														Kecamatan Cibeber
	Pemberdayaan masyarakat kelurahan														Kecamatan Cibeber
	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lokal (swakelola oleh kelompok masyarakat)														Kecamatan Cibeber
	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lokal														Kecamatan Cibeber
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Kedaleman									1385132446,29	1666171045,81	1742238735,15	1821466221,69	1900393905,77	Kecamatan Cibeber
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Kalitimbang									1471169490,57	1769664709,85	1850457318,58	1934605994,27	2018436245,37	Kecamatan Cibeber
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Karangasem									1621984557,74	1951079634,38	2040154594,52	2132929664,55	2225353667,11	Kecamatan Cibeber
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Cikeral									1450814688,34	1745179988,40	1824854767,00	1907839178,71	1990509571,48	Kecamatan Cibeber
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Bulakan									1495295163,05	1798685398,13	1880802922,87	1966331550,64	2051536531,97	Kecamatan Cibeber
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Cibeber									1353869760,22	1628565268,49	1702916096,52	1780355404,58	1857501676,77	Kecamatan Cibeber
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									2260753605,61	2505912415,24	2590708972,34	2836794237,86	3232044433,80	Kecamatan Grogol
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		100	100	100	100	100						Kecamatan Grogol
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		100	100	100	100	100						Kecamatan Grogol
		Tingkat disiplin aparatur	%		100	100	100	100	100						Kecamatan Grogol
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		100	100	100	100	100						Kecamatan Grogol
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									1071494177,41	1075356347,82	1094842026,55	1272903446,70	1600387204,36	Kecamatan Grogol
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Kecamatan Grogol
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Kecamatan Grogol
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Kecamatan Grogol
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Kecamatan Grogol
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Kecamatan Grogol
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Kecamatan Grogol
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Kecamatan Grogol
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Kecamatan Grogol
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Kotasari									264161306,59	317758725,28	332265742,46	347375370,73	362427823,08	Kecamatan Grogol
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Grogol									259593815,33	312264505,77	326520688,82	341369063,47	356161250,82	Kecamatan Grogol
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Rawaarum									296215677,99	356316818,15	372584173,83	389527263,79	406406239,88	Kecamatan Grogol
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Gerdem									369288628,29	444216018,23	464496340,68	485619093,17	506661915,66	Kecamatan Grogol
2.1.3.1.2.1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan									71243704284,04	84719560173,15	88665236974,12	92670663866,29	98392908005,30	Kecamatan Grogol
		Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWkel)	%		100	100	100	100	100						Kecamatan Grogol
		Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%		90	90	90	90	90						Kecamatan Grogol
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan									1003464403,30	1105292555,79	1164116480,48	1214199443,05	1450085335,03	Kecamatan Grogol

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan														Kecamatan Grogol
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan														Kecamatan Grogol
	Peningkatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum tingkat kecamatan														Kecamatan Grogol
	Pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan umum tingkat kecamatan														Kecamatan Grogol
	Peningkatan koordinasi kegiatan sosial tingkat kecamatan														Kecamatan Grogol
	Peningkatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan														Kecamatan Grogol
	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan														Kecamatan Grogol
	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)														Kecamatan Grogol
	Peningkatan pelayanan pemerintahan kelurahan														Kecamatan Grogol
	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum kelurahan														Kecamatan Grogol
	Peningkatan layanan kesejahteraan sosial kelurahan														Kecamatan Grogol
	Pemberdayaan masyarakat kelurahan														Kecamatan Grogol
	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lokal (swakelola oleh kelompok masyarakat)														Kecamatan Grogol
	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lokal														Kecamatan Grogol
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Kotasari									1257769822,93	1512966985,13	1582040267,18	1653982803,78	1725653104,69	Kecamatan Grogol
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Grogol									1483468252,98	1784458848,78	1865926871,93	1950779018,28	2035310078,05	Kecamatan Grogol
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Rawaarum									1408880044,61	1694736949,99	1772108792,53	1852694605,87	1932975476,75	Kecamatan Grogol
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan gerem									1749563364,50	2104543741,33	2200624980,95	2300697366,29	2400391070,59	Kecamatan Grogol
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									3074885787,95	3362297755,03	3469146592,12	3829023512,50	4424042513,46	Kecamatan Pulomerak
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		85	85	85	85	85						Kecamatan Pulomerak
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		90	90	90	90	90						Kecamatan Pulomerak
		Tingkat disiplin aparatur	%		100	100	100	100	100						Kecamatan Pulomerak
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		100	100	100	100	100						Kecamatan Pulomerak
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									1688334823,19	1694420378,24	1725123624,84	2005691921,56	2521702408,35	Kecamatan Pulomerak
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Kecamatan Pulomerak
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Kecamatan Pulomerak
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Kecamatan Pulomerak
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Kecamatan Pulomerak
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Kecamatan Pulomerak
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Kecamatan Pulomerak
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Kecamatan Pulomerak

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Kecamatan Pulomerak
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Mekarsari									355943498,74	428163207,88	447710652,28	468070083,49	488352473,16	Kecamatan Pulomerak
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Tamansari									325713359,86	391799478,02	409686765,79	428317078,65	446876893,09	Kecamatan Pulomerak
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Lebakegede									331254170,00	398464499,43	416656073,35	435603312,20	454478853,35	Kecamatan Pulomerak
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Suralaya									373639936,16	449450191,46	469969475,86	491341116,59	512631885,51	Kecamatan Pulomerak
2.1.3.1.2.1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan									7073209686,29	8402384362,22	8794508369,16	9191526127,10	9776531728,58	Kecamatan Pulomerak
		Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWkel)	%		100	100	100	100	100						Kecamatan Pulomerak
		Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%		90	90	90	90	90						Kecamatan Pulomerak
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan									1024222469,33	1126078486,63	1186008643,35	1237033457,01	1477355376,19	Kecamatan Pulomerak
	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan														Kecamatan Pulomerak
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan														Kecamatan Pulomerak
	Peningkatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum tingkat kecamatan														Kecamatan Pulomerak
	Pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan umum tingkat kecamatan														Kecamatan Pulomerak
	Peningkatan koordinasi kegiatan sosial tingkat kecamatan														Kecamatan Pulomerak
	Peningkatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan														Kecamatan Pulomerak
	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan														Kecamatan Pulomerak
	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)														Kecamatan Pulomerak
	Peningkatan pelayanan pemerintahan kelurahan														Kecamatan Pulomerak
	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum kelurahan														Kecamatan Pulomerak
	Peningkatan layanan kesejahteraan sosial kelurahan														Kecamatan Pulomerak
	Pemberdayaan masyarakat kelurahan														Kecamatan Pulomerak
	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lokal (swakelola oleh kelompok masyarakat)														Kecamatan Pulomerak
	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lokal														Kecamatan Pulomerak
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Mekarsari									1516365640,92	1824031003,34	1907305661,15	1994039488,47	2080445108,80	Kecamatan Pulomerak
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Tamansari									1547943224,27	1862015569,52	1947024381,93	2035564399,38	2123769375,09	Kecamatan Pulomerak
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Lebakegede									1632897377,27	1964206627,38	2053880889,75	2147280156,60	2240325993,97	Kecamatan Pulomerak
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Suralaya									1351780974,50	1626052675,35	1700288792,98	1777608625,64	1854635874,54	Kecamatan Pulomerak
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									3401037142,91	3746947554,90	3870292861,36	4253023029,65	4876204592,43	Kecamatan Purwakarta
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		100	100	100	100	100						Kecamatan Purwakarta
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		85	90	92	94	95						Kecamatan Purwakarta
		Tingkat disiplin aparat	%		85	90	92	94	95						Kecamatan Purwakarta

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		100	100	100	100	100						Kecamatan Purwakarta
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									1726853869,53	1733078265,39	1764482000,87	2051451411,33	2579234581,81	Kecamatan Purwakarta
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Kecamatan Purwakarta
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Kecamatan Purwakarta
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Kecamatan Purwakarta
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Kecamatan Purwakarta
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Kecamatan Purwakarta
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Kecamatan Purwakarta
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Kecamatan Purwakarta
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Kecamatan Purwakarta
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Purwakarta									287964184,68	346391125,30	362205331,51	378676448,50	395085237,60	Kecamatan Purwakarta
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Tegol Bunder									284006745,20	341630734,98	357227609,43	373472366,85	389655652,95	Kecamatan Purwakarta
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan kelurahan Pabean									280645537,56	337587549,89	352999836,00	369052337,41	385044095,01	Kecamatan Purwakarta
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan kelurahan Kotabumi									262753646,65	316065455,98	330495168,33	345524280,57	360496521,58	Kecamatan Purwakarta
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan kelurahan Kebondalem									292027050,59	351278332,69	367315660,40	384019167,19	400659466,72	Kecamatan Purwakarta
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan kelurahan Ramanuli									266786108,69	320916090,67	335567254,81	350827017,80	366029036,75	Kecamatan Purwakarta
2.1.3.1.2.1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan									9120273063,25	10818165878,48	11322332976,29	11833704120,76	12571608249,60	Kecamatan Purwakarta
		Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%		90	91	92	94	95						Kecamatan Purwakarta
		Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%		90	91	92	94	95						Kecamatan Purwakarta
		Terfasilitasnya kegiatan keagamaan, kepemudaan dan sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan Purwakarta	%		90	91	92	94	95						Kecamatan Purwakarta
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan									1255544696,05	1357711231,18	1429968935,99	1491489481,31	1781245277,77	Kecamatan Purwakarta
	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan														Kecamatan Purwakarta
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan														Kecamatan Purwakarta
	Peningkatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum tingkat kecamatan														Kecamatan Purwakarta
	Pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan umum tingkat kecamatan														Kecamatan Purwakarta
	Peningkatan koordinasi kegiatan sosial tingkat kecamatan														Kecamatan Purwakarta
	Peningkatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan														Kecamatan Purwakarta
	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan														Kecamatan Purwakarta
	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)														Kecamatan Purwakarta
	Peningkatan pelayanan pemerintahan kelurahan														Kecamatan Purwakarta
	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum kelurahan														Kecamatan Purwakarta

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Peningkatan layanan kesejahteraan sosial kelurahan														Kecamatan Purwakarta
	Pemberdayaan masyarakat kelurahan														Kecamatan Purwakarta
	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lokal (swakelola oleh kelompok masyarakat)														Kecamatan Purwakarta
	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lokal														Kecamatan Purwakarta
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Purwakarta									1369984801,27	1647949995,83	1723185817,89	1801546881,98	1879611422,22	Kecamatan Purwakarta
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Tegalbunder									1351326890,65	1625506459,45	1699717640,03	1777011499,78	1854012874,05	Kecamatan Purwakarta
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Pahean									1335480351,36	1606444711,94	1679785643,89	1756173105,50	1832271511,50	Kecamatan Purwakarta
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Kotabumi									1251032600,56	1504862803,56	1573566095,77	1645123273,41	1716409673,59	Kecamatan Purwakarta
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Kebondalem									1282104768,84	1542239407,69	1612649098,48	1685983557,28	1759040513,26	Kecamatan Purwakarta
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Ramanjau									1274798954,52	1533451268,82	1603459744,25	1676376321,49	1749016977,21	Kecamatan Purwakarta
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									3850131596,56	4222253999,99	4358299130,91	4802211326,47	5531966630,43	Kecamatan Jombang
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		80	82	84	86	90						Kecamatan Jombang
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		90	85	87	86	90						Kecamatan Jombang
		Tingkat disiplin aparatur	%		90	92	94	96	98						Kecamatan Jombang
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		85	85	85	85	85						Kecamatan Jombang
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									2052545311,01	2059943652,44	2097270256,13	2438363227,71	3065688382,97	Kecamatan Jombang
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Kecamatan Jombang
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Kecamatan Jombang
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Kecamatan Jombang
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Kecamatan Jombang
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Kecamatan Jombang
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Kecamatan Jombang
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Kecamatan Jombang
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Kecamatan Jombang
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Jombang Wetan									331819800,53	399144894,45	417367531,26	436347123,32	455254895,25	Kecamatan Jombang
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Masiit									408864997,40	491822296,23	514276044,74	537662505,85	560960470,91	Kecamatan Jombang
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Sukmajaya									304227296,56	365953966,52	382661298,40	400062640,85	417398135,39	Kecamatan Jombang
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Panggungrawi									472046421,99	567823014,12	593746513,83	620746857,12	647645029,18	Kecamatan Jombang
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Gedongdalem									280627769,06	337566176,22	352977486,54	369028971,62	385019716,73	Kecamatan Jombang
2.1.3.1.2.1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan									8429154904,40	9977097079,48	10443231420,07	10914501048,35	11620585678,91	Kecamatan Jombang
		Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%		85	85	85	85	85						Kecamatan Jombang
		Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%		90	90	90	90	90						Kecamatan Jombang

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan									1303795479,11	1406026784,19	1480855853,87	1544565671,19	1844632726,19	Kecamatan Jombang
	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan														Kecamatan Jombang
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan														Kecamatan Jombang
	Peningkatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum tingkat kecamatan														Kecamatan Jombang
	Pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan umum tingkat kecamatan														Kecamatan Jombang
	Peningkatan koordinasi kegiatan sosial tingkat kecamatan														Kecamatan Jombang
	Peningkatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan														Kecamatan Jombang
	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan														Kecamatan Jombang
	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)														Kecamatan Jombang
	Peningkatan pelayanan pemerintahan kelurahan														Kecamatan Jombang
	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum kelurahan														Kecamatan Jombang
	Peningkatan layanan kesejahteraan sosial kelurahan														Kecamatan Jombang
	Pemberdayaan masyarakat kelurahan														Kecamatan Jombang
	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lokal (swakelola oleh kelompok masyarakat)														Kecamatan Jombang
	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lokal														Kecamatan Jombang
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Jombang Wetan									1576361963,43	1896200372,91	1982769864,83	2072935391,29	2162759724,97	Kecamatan Jombang
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Masigit									1435558458,05	1726828321,57	1805665269,69	1887777048,03	1969578109,56	Kecamatan Jombang
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Sukmajaya									1446652911,12	1740173800,93	1819620026,10	1902366390,42	1984799636,61	Kecamatan Jombang
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Pangeungrawi									1331060930,91	1601128606,32	1674226835,77	1750361513,19	1826208091,57	Kecamatan Jombang
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Gedongdalem									1335725161,78	1606739193,56	1680093569,82	1756495034,22	1832607390,02	Kecamatan Jombang
5.1.1.1.1.1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									4331421068,31	4774879639,98	4932505577,70	5418337487,38	6208351093,02	Kecamatan Citangkil
		Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%		80	82	84	86	90						Kecamatan Citangkil
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%		80	82	84	86	90						Kecamatan Citangkil
		Tingkat disiplin aparatur	%		90	91	92	93	95						Kecamatan Citangkil
		Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%		85	85	85	85	85						Kecamatan Citangkil
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan									2184591735,48	2192466034,50	2232193971,08	2595230481,28	3262913353,99	Kecamatan Citangkil
	Pelayanan Administrasi Perkantoran														Kecamatan Citangkil
	Pengadaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur														Kecamatan Citangkil
	Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur														Kecamatan Citangkil
	Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur														Kecamatan Citangkil

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan														Kecamatan Citangkil
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja														Kecamatan Citangkil
	Peningkatan koordinasi sektoral/lintas sektoral tingkat kota														Kecamatan Citangkil
	Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota														Kecamatan Citangkil
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan samangrava									321490380,04	386719670,14	404375043,40	422763808,19	441082988,58	Kecamatan Citangkil
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Warnasari									298446611,69	359000400,62	375390273,08	392460969,08	409467068,35	Kecamatan Citangkil
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Deringo									310841126,57	373909719,85	390980265,20	408759908,76	426472272,88	Kecamatan Citangkil
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Lebakdenok									299879937,24	360724542,98	377193129,77	394345809,83	411433582,92	Kecamatan Citangkil
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Tamanbaru									289254375,11	347943090,91	363828150,86	380373064,79	396855371,59	Kecamatan Citangkil
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Kebonsari									306898494,17	369167140,92	386021167,68	403575298,61	421063003,45	Kecamatan Citangkil
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Citangkil									320018408,01	384949040,05	402523576,63	420828146,84	439063451,25	Kecamatan Citangkil
2.1.3.1.2.1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan									11521085911,49	13669524089,83	14305242310,84	14951790594,91	15854934120,00	Kecamatan Citangkil
		Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%		90	91	92	93	95						Kecamatan Citangkil
		Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%		90	91	92	93	95						Kecamatan Citangkil
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan									1436991129,46	1539401231,13	1621328519,62	1691081793,40	2019612941,66	Kecamatan Citangkil
	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan														Kecamatan Citangkil
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan														Kecamatan Citangkil
	Peningkatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum tingkat kecamatan														Kecamatan Citangkil
	Pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan umum tingkat kecamatan														Kecamatan Citangkil
	Peningkatan koordinasi kegiatan sosial tingkat kecamatan														Kecamatan Citangkil
	Peningkatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan														Kecamatan Citangkil
	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan														Kecamatan Citangkil
	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)														Kecamatan Citangkil
	Peningkatan pelayanan pemerintahan kelurahan														Kecamatan Citangkil
	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum kelurahan														Kecamatan Citangkil
	Peningkatan layanan kesejahteraan sosial kelurahan														Kecamatan Citangkil
	Pemberdayaan masyarakat kelurahan														Kecamatan Citangkil
	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lokal (swakelola oleh kelompok masyarakat)														Kecamatan Citangkil
	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lokal														Kecamatan Citangkil
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Semangrava									1484065471,96	1785177241,43	1866678062,21	1951564368,59	2036129459,12	Kecamatan Citangkil
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Warnasari									1285276445,83	1546054607,01	1616638477,64	1690154351,58	1763392036,21	Kecamatan Citangkil

KODE PROGRAM	PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							ANGGARAN (Ribu Rupiah)					OPD PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					TARGET				TRANSISI	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017,00	2018,00	2019,00	2020,00	2021,00	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Deringo									1477831690,39	1777678647,05	1858837125,59	1943366869,06	2027576745,95	Kecamatan Citangkil
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Lebakdenok									1426155960,90	1715518090,15	1793838678,81	1875412648,51	1956677936,48	Kecamatan Citangkil
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Tamanbaru									1376066563,47	1655265726,62	1730835542,44	1809544474,16	1887955565,66	Kecamatan Citangkil
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Kebonsari									1459245840,90	1755321792,76	1835459587,22	1918926248,14	2002077065,26	Kecamatan Citangkil
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Citangkil									1575452808,58	1895106753,68	1981626317,30	2071739841,48	2161512369,65	Kecamatan Citangkil